



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA TRIWULAN II 2026



*Balai Pelaksana
Penyediaan dan Perumahan
dan Kawasan Permukiman
Sulawesi III*



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga **Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2026** ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan selama periode triwulan tersebut, sekaligus sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta kualitas kinerja di masa mendatang.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, data, serta kontribusi dalam proses penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas terkait capaian kinerja, tantangan yang dihadapi, serta rekomendasi perbaikan yang diperlukan.

Kami berharap laporan ini dapat bermanfaat sebagai dasar pengambilan keputusan, peningkatan kualitas pelayanan, dan perbaikan kinerja secara berkelanjutan. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan laporan di periode selanjutnya.

Akhir kata, semoga kerja sama, komitmen, dan semangat perbaikan terus menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas pada periode berikutnya.

Makassar, 1 Juli 2026

Kepala Balai,




BAKHTIAR

NIP. 19711000 200212 1 003





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	4
DAFTAR GAMBAR	6
BAB I PENDAHULUAN.....	8
1.1 LATAR BELAKANG	8
1.2 TUGAS DAN FUNGSI	10
1.3 STRUKTUR ORGANISASI	13
1.3.1 Susunan Stuktur Organisasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III	13
BAB II CAPAIAN KINERJA	19
2.1 Target Kinerja Triwulan II berdasarkan Dokumen Rencana Aksi Kinerja.	19
2.2 Metode Pengukuran Kinerja	38
2.3 Capaian Target Triwulan BP3KP Sulawesi III.	39
2.3.1 Capaian Target Triwulan II Program Dukungan Manajemen	40
2.4 Permasalahan/ Faktor Keberhasilan.....	85
2.4.1 Permasalahan pelaksanaan kegiatan BP3KP Sulawesi III	85
2.4.2 Permasalahan pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan ..	86
2.4.3 Permasalahan pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara.....	86
BAB III PENUTUP	88
3.1 Rencana Tindak Lanjut.....	88
3.1.1 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III	88
3.1.2 Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan	89
3.1.3 Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara.....	90
3.2 Bukti Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan.....	91
LAMPIRAN	95





DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Target Kinerja Triwulan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sulawesi III DIPA Sekretariat Jenderal Tahun 2026	21
Tabel 2.2	Target Rencana Keuangan Dan Fisik Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sulawesi III DIPA Sekretariat Jenderal Tahun 2026	23
Tabel 2.3	Target Kinerja Triwulan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sulawesi III DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Tahun 2026.....	24
Tabel 2.4	Target Rencana Keuangan Dan Fisik Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sulawesi III Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Tahun 2026	26
Tabel 2.5	Target Kinerja Triwulan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sulawesi III DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Tahun 2026	27
Tabel 2.6	Target Rencana Keuangan Dan Fisik Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sulawesi III Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Tahun 2026	30
Tabel 2.7	Target Kinerja Triwulan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sulawesi III DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2026.....	31
Tabel 2.8	Target Rencana Keuangan Dan Fisik Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sulawesi III Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2026	34
Tabel 2.9	Target Kinerja Triwulan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sulawesi III DIPA Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun 2026	35
Tabel 2.10	Target Rencana Keuangan Dan Fisik Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sulawesi III DIPA Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun 2026	37
Tabel 2.11	Skala Pengukuran Ordinal Evaluasi Capaian Kinerja.....	39
Tabel 2.12	Capaian Target Kinerja Triwulan II BP3KP Sulawesi III Sekretariat Jenderal Kementerian PKP Tahun Anggaran 2026.....	41
Tabel 2.13	Progres Fisik dan Keuangan Triwulan II BP3KP Sulawesi III Sekretariat Jenderal Kementerian PKP Tahun Anggaran 2026..	43
Tabel 2.14	Capaian Target Kinerja Triwulan II BP3KP Sulawesi III DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2026	49





Tabel 2.15 Progres Fisik dan Keuangan Triwulan II BP3KP Sulawesi III Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2026	52
Tabel 2.16 Capaian Target Kinerja Triwulan II BP3KP Sulawesi III Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Tahun Anggaran 2026	58
Tabel 2.17 Progres Fisik dan Keuangan Triwulan II BP3KP Sulawesi III Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Tahun Anggaran 2026	62
Tabel 2.18 Capaian Target Kinerja Triwulan II BP3KP Sulawesi III Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun Anggaran 2026	68
Tabel 2.19 Progres Fisik dan Keuangan Triwulan II BP3KP Sulawesi III Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun Anggaran 2026	73
Tabel 2.20 Capaian Target Kinerja Triwulan II BP3KP Sulawesi III Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun Anggaran 2026	79
Tabel 2.21 Progres Fisik dan Keuangan Triwulan II BP3KP Sulawesi III Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun Anggaran 2026	81
Tabel 3. 1 Bukti Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan Sebelumnya	91





DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Wilayah Kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III.....	10
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III.....	17
Gambar 1.3 Struktur Organisasi Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan	18
Gambar 1.4 Struktur Organisasi Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara.....	18
Gambar 2.1 Grafik Realisasi Keuangan Triwulan II BP3KP Sulawesi III DIPA Sekretariat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	46
Gambar 2.2 Grafik Realisasi Fisik Triwulan II BP3KP Sulawesi III DIPA Sekretariat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	47
Gambar 2.3 Grafik Realisasi Keuangan Triwulan II BP3KP Sulawesi III DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	55
Gambar 2.4 Grafik Realisasi Fisik Triwulan II BP3KP Sulawesi III DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	56
Gambar 2.5 Grafik Realisasi Keuangan Triwulan II BP3KP Sulawesi III DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	65
Gambar 2.6 Grafik Realisasi Fisik Triwulan II BP3KP Sulawesi III DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	66
Gambar 2.7 Grafik Realisasi Keuangan Triwulan II BP3KP Sulawesi III DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	76
Gambar 2.8 Grafik Realisasi Fisik Triwulan II BP3KP Sulawesi III DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	77
Gambar 2.9 Grafik Realisasi Keuangan Triwulan II BP3KP Sulawesi III DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	83
Gambar 2.10 Grafik Realisasi Fisik Triwulan II BP3KP Sulawesi III DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.	84







BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya, diperlukan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mengintegrasikan dari sistem perencanaan, pemograman, penganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan yang kemudian dituangkan dalam laporan kinerja instansi pemerintah.

Dan sebagai wujud dari pelaksanaan akuntabilitas dan kinerja, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III (Balai P3P Sulawesi III) berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis. Pelaporan kinerja dimaksudkan mengkomunikasikan capaian kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan





pelaksanaan tugas dan fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya berdasarkan Rencana Strategis Balai P3P Sulawesi III Tahun 2025-2029. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 20 menyebutkan laporan kinerja dihasilkan dari suatu SAKIP yang diselenggarakan masing-masing identitas pelaporan/akuntansi. Sesuai ketentuan tersebut penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) memiliki peran strategis karena dapat memberikan informasi antara lain:

1. Keberhasilan/kegagalan pencapaian output/outcome yang tercantum dalam perencanaan kinerja tahun 2026;
2. Hubungan kinerja dan hasil sumber daya; dan
3. Menjelaskan kinerja dan hasil-hasil yang dicapai.

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme, Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional yang menguatkan integrasi perencanaan, penganggaran, dan pelaporan yang juga berimplikasi pada implementasi SAKIP.

Penyelenggaraan SAKIP meliputi:

1. Rencana Strategis.
2. Perjanjian Kinerja.
3. Pengukuran Kinerja.
4. Pengelolaan Data Kinerja.
5. Pelaporan Kinerja.
6. Reviu dan Evaluasi Kinerja.

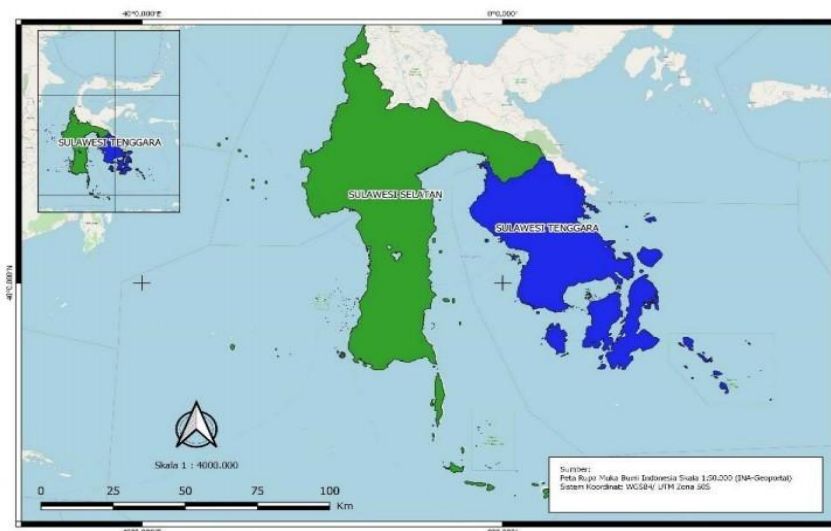
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai P2P Sulawesi III Triwulan II Tahun 2026 ini disusun sebagai bentuk



perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indicator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 TUGAS DAN FUNGSI

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Balai P3KP Sulawesi III merupakan salah satu unit kerja yang menangani Pembangunan Perumahan di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman No 1 Tahun 2025 yang merupakan penggabungan dari Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan dan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara.



Gambar 1.1 Wilayah Kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III

(Sumber: Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III)

Berdasarkan Permen PKP Nomor 1 Tahun 2025 Tugas Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III adalah Melaksanakan Penyediaan Perumahan, Peningkatan Kualitas Perumahan, Pengembangan



Kawasan Permukiman, penataan Kawasan Permukiman Pasca bencana dan kerusakan sosial, dan fasilitasi Serah Terima Aset.

Sebelum terbentuknya Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III (BP3KP Sulawesi III) di kenal sebagai Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi III (BP2P Sulawesi III) dibawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pada awalnya unit teknis penyediaan perumahan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memiliki nomenklatur sebagai Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Sulawesi III yang tersebar di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara. balai ini dibentuk sebagai unit pelaksana teknis (UPT) yang fokus pada pembangunan perumahan dan prasarana perumahan di daerah masing-masing. Sebelum Tahun 2025 struktur organisasi, tugas, dan fungsi awal balai ini mengacu pada Peraturan Menteri PUPR tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT yang juga mengatur penugasan teknis di tingkat daerah.

Pada tahun 2025, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Peraturan ini mengubah nomenklatur dan struktur organisasi UPT, termasuk balai-balai yang sebelumnya disebut BP2P, menjadi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP). Tujuan perubahan ini adalah untuk menyelaraskan fungsi teknis pelaksanaan perumahan dengan fokus yang lebih luas, yaitu tidak hanya penyediaan rumah tetapi juga pengembangan kawasan permukiman serta koordinasi penyediaan lahan, PSU, dan rehabilitasi kawasan pasca bencana.

Sedangkan menurut fungsi Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi:





1. Penyusunan program dan anggaran pelaksanaan pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
2. Penyusunan rencana teknis pengembangan Kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
3. pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
4. pelaksanaan dan koordinasi pengawasan dan pengendalian teknis pengembangan Kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
5. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
6. pengelolaan data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman;
7. pelaksanaan koordinasi dan dukungan penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusakan sosial;
8. pelaksanaan koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian;
9. pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghunian perumahan;
10. pelaksanaan fasilitasi bina usaha dan perlindungan konsumen perumahan;
11. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi forum perumahan dan kawasan permukiman;
12. pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi fasilitasi pembiayaan perumahan;
13. pelaksanaan fasilitasi serah terima aset;
14. pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas, sistem pengendalian intern, sistem manajemen risiko, serta system pengendalian anti korupsi dan penyuapan; dan
15. pelaksanaan urusan tata usaha, umum dan rumah tangga, komunikasi publik, serta layanan hukum balai.





1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Secara organisasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Sulawesi III membawahi 2 (dua) wilayah Satuan Kerja diantaranya Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi Selatan dan Satuan Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi Tenggara. Adapun susunan Struktur Organisasi yaitu :

1.3.1 Susunan Stuktur Organisasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III

1. Kepala Balai

Kepala Balai mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program kerja. Kepala Balai juga bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan kegiatan dengan bawahan dan memastikan pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Kasubag Umum dan Tata Usaha

Melakukan penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan administrasi sumber daya manusia, pengelolaan dan pelaporan administrasi keuangan, pelaksanaan koordinasi reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas, koordinasi administrasi pelaksanaan sistem pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko, komunikasi publik serta layanan hukum balai.

3. Kepala Seksi Pelaksana Wilayah I

- Melakukan penyiapan pelaksanaan dan koordinasi penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pembinaan usaha dan perlindungan konsumen, serta koordinasi dan penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusakan sosial;



- Melakukan koordinasi penyediaan lahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah dan prasarana, sarana dan utilitas umum, fasilitasi penghunian, pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, verifikasi data, pada wilayah pesisir sesuai dengan Keputusan Menteri mengenai delineasi perkotaan, perdesaan dan pesisir.

4. Kepala Seksi Pelaksana Wilayah II

Melakukan penyiapan pelaksanaan dan koordinasi penyusunan rencana teknis perumahan, koordinasi penyusunan rencana teknis perumahan, koordinasi penyediaan lahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah dan prasarana, sarana dan utilitas umum, fasilitasi penghunian, pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, verifikasi data pada wilayah perkotaan dan perdesaan sesuai dengan Keputusan Menteri mengenai delineasi perkotaan, perdesaan dan pesisir.

5. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mempunyai tugas melaksanakan tugas dan wewenang terkait pengadaan barang dan jasa serta bertanggung jawab atas segala pengeluaran anggaran belanja.

6. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM)

Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) mempunyai tugas menguji kebenaran dan kelengkapan dokumen pembayaran. PPSPM juga bertanggung jawab atas keabsahan dokumen tersebut.

7. Bendahara

mempunyai tugas menerima, menyimpan, membayarkan, menatausakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja.

Adapun Untuk 2 (Dua) Satuan Kerja yang membawahi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III, yaitu Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi



Sulawesi Selatan dan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara.

1. Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Selatan

A. Kepala Satuan Kerja mempunyai tugas menyusun DIPA, menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran/ keuangan, menetapkan rencana melaksanakan kegiatan dan rencana penarikan dana, mengawasi pemantauan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran, menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan perundang – undangan.

B. PPK Perencanaan/ Pengendalian

bertugas menyusun rencana dan analisa teknis, pengendalian pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, penanganan kawasan permukiman kumuh dan prasarana, sarana, dan utilitas umum di Provinsi Sulawesi Selatan.

C. PPK Rumah Susun dan Rumah Khusus

PPK Rumah Susun dan Rumah Khusus mempunyai tugas melakukan

Pelaksanaan kegiatan Rumah Susun dan Rumah Khusus deleniasi perumahan perkotaan di Provinsi Sulawesi Selatan.

D. PPK Rumah Swadaya, PSU, dan Kawasan Permukiman

PPK Rumah Swadaya, PSU dan Kawaasn Permukiman mempunyai tugas melakukan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengembangan Rumah Swadaya, Pembangunan PSU di perumahan





MBR, Penanganan kumuh pada kawasan permukiman Provinsi Sulawesi Selatan.

E. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPSM)

Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) memputugas melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.

F. Bendahara Pengeluaran

Pejabat perbendaharaan negara yang mempunyai tugas melakukan pembayaran atas uang yang ada dalam kewenangannya.

2. Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Tenggara

A. Kepala Satuan Kerja mempunyai tugas menyusun DIPA, menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran/ keuangan , menetapkan rencana melaksanakan kegiatan dan rencana penarikan dana , mengawasi pemantauan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran, menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan perundang –undangan.

B. PPK Perencanaan/ Pengendalian

bertugas menyusun rencana dan analisa teknis, pengendalian pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, penanganan kawasan permukiman kumuh dan prasarana, sarana, dan utilitas umum di Provinsi Sulawesi Tenggara.

G. PPK Rumah Swadaya, PSU, dan Kawasan Permukiman

PPK Rumah Swadaya, PSU dan Kawaasn Permukiman mempunyai tugas melakukan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengembangan Rumah Swadaya, Pembangunan PSU di perumahan



MBR, Penanganan kumuh pada kawasan permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara.

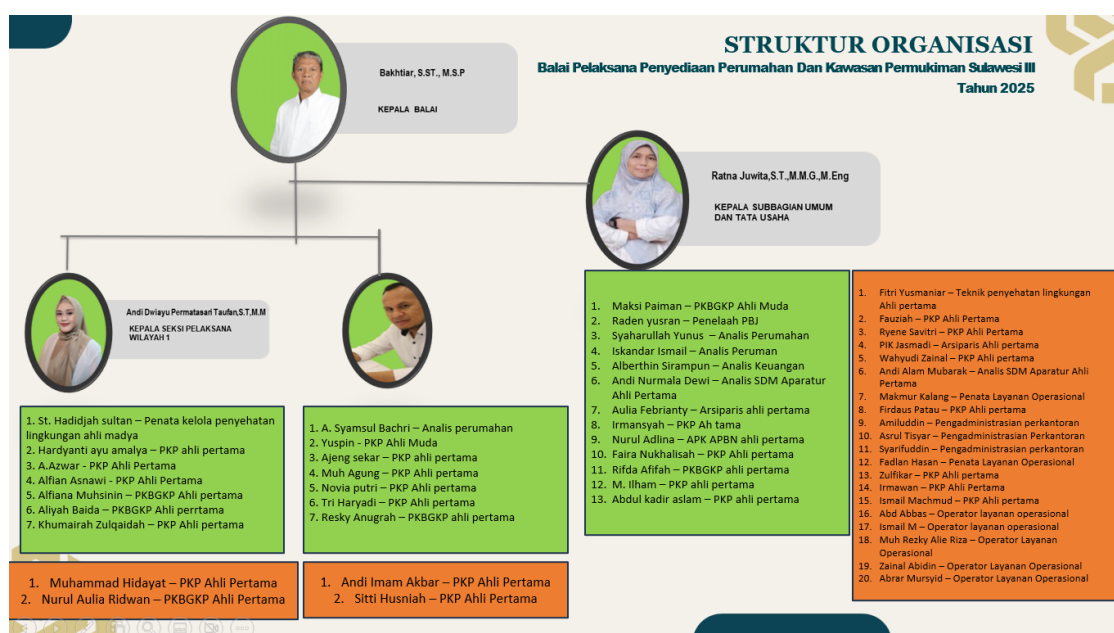
H. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPSM)

Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) memputugas melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.

I. Bendahara Pengeluaran

Pejabat perbendaharaan negara yang mempunyai tugas melakukan pembayaran atas uang yang ada dalam kewenangannya.

Untuk lebih melengkapi Struktur Organisasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III dan 2 (Dua) Satuan Kerja yaitu Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan dan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara dapat di lihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III





BAB II

CAPAIAN KINERJA

2.1 Target Kinerja Triwulan II berdasarkan Dokumen Rencana Aksi Kinerja.

Target Kinerja Triwulan II berdasarkan Dokumen Rencana Aksi Kinerja merupakan tahapan pelaksanaan yang berfokus pada percepatan pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran. Pada periode ini, seluruh program dan kegiatan diarahkan untuk mencapai target kumulatif semester pertama melalui peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan, percepatan realisasi fisik dan keuangan, serta penguatan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Capaian Triwulan II menjadi indikator penting dalam mengukur efektivitas pelaksanaan program sekaligus memastikan bahwa target tahunan dapat dicapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan kegiatan pada Triwulan II difokuskan pada penyelesaian tahapan-tahapan strategis, antara lain pelaksanaan kegiatan operasional perkantoran, pengelolaan data dan informasi, penyusunan dokumen teknis, penyelenggaraan klinik perumahan dan kawasan permukiman, pemenuhan *readiness criteria* lokasi penanganan kawasan kumuh, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), serta pengadaan sarana pendukung operasional. Selain itu, dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan yang bersifat prioritas melalui monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan kesesuaian antara target, jadwal pelaksanaan, serta realisasi fisik dan keuangan. Langkah tersebut juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi kendala sejak dini sehingga dapat dilakukan tindak lanjut yang tepat guna menjaga pencapaian target kinerja.

Secara umum, capaian kinerja Triwulan II menunjukkan perkembangan yang positif, ditandai dengan meningkatnya realisasi fisik dan keuangan pada sebagian besar kegiatan dibandingkan dengan target yang direncanakan. Meskipun masih terdapat beberapa



indikator dan paket pekerjaan yang belum mencapai target optimal akibat pelaksanaan yang bersifat bertahap, penyesuaian jadwal kegiatan, proses koordinasi dengan para pemangku kepentingan, serta penyelesaian administrasi pertanggungjawaban, seluruh kegiatan tetap berjalan sesuai rencana kerja. Hasil pelaksanaan Triwulan II menjadi dasar dalam penyusunan strategi percepatan pada Triwulan III sehingga seluruh target kinerja, baik dari aspek fisik, keuangan, maupun keluaran kegiatan, diharapkan dapat tercapai secara optimal pada akhir Tahun Anggaran 2026



Tabel 2.1 Target Kinerja Triwulan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sulawesi III DIPA Sekretariat Jenderal Tahun 2026

Sasaran Strategis / Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Satuan	Target Rencana Aksi	Target PK Awal	Aktivitas	TW I	TW II	TW III	TW IV
Meningkatnya layanan dukungan manajemen								
7665.EBA.962 Jumlah Layanan Umum	Layanan	3 Layanan	3 Layanan	- Belanja Bahan	21,21	49,58	77,94	100,00
7665.EBA.994 Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	3 Layanan	3 Layanan	- Belanja Keperluan Perkantoran - Belanja Barang Operasional Lainnya - Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - Belanja Jasa Pos dan Giro - Belanja Langganan Listrik - Belanja Langganan Air - Belanja Langganan	21,21	49,58	77,94	100,00



				Daya dan Jasa Lainnya - Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - Belanja Honor Operasional Satuan Kerja				
7665.EBB.951 Jumlah Layanan Sarana Internal	Unit	10 unit	10 unit	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	25,05	75,15	100

Sumber: Rencana Aksi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III Tahun 2026.

Berdasarkan Tabel 2.1 diatas Sasaran kegiatan Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen direncanakan untuk mendukung kelancaran operasional satuan kerja melalui tiga indikator kinerja, yaitu Jumlah Layanan Umum sebanyak 3 layanan, Jumlah Layanan Perkantoran sebanyak 3 layanan, dan Jumlah Layanan Sarana Internal sebanyak 10 unit. Pelaksanaan kegiatan didukung oleh belanja bahan, berbagai komponen belanja operasional perkantoran, serta belanja modal peralatan dan mesin. Target capaian layanan umum dan layanan perkantoran direncanakan meningkat secara bertahap dari 21,21% pada Triwulan I, 49,58% pada Triwulan II, 77,94% pada Triwulan III, hingga mencapai 100,00% pada Triwulan IV. Adapun layanan sarana internal ditargetkan mulai terealisasi pada Triwulan II sebesar 25,05%, meningkat menjadi 75,15% pada Triwulan III, dan mencapai 100,00% pada Triwulan IV, sehingga seluruh target layanan



dukungan manajemen diharapkan dapat diselesaikan secara optimal sesuai rencana aksi pada akhir tahun anggaran.

Tabel 2.2 Target Rencana Keuangan Dan Fisik Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sulawesi III Dipa Sekretariat Jenderal Tahun 2026

Rencana	Bulan											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Keuangan	0,00	0,85	16,21	25,66	35,12	44,58	54,03	63,49	72,94	82,40	97,86	100,00
Fisik	0,00	5,85	21,21	30,66	40,12	49,58	59,03	68,49	77,94	87,40	96,86	100,00

Sumber: Rencana Aksi BP3KP Sulawesi III Tahun 2026

Berdasarkan Tabel 2.2 diatas Berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan, target kemajuan keuangan dan fisik disusun secara bertahap hingga mencapai 100,00% pada akhir Desember. Target keuangan direncanakan mulai sebesar 0,85% pada Februari, meningkat menjadi 16,21% pada Maret, 44,58% pada Juni, 72,94% pada September, 97,86% pada November, dan mencapai 100,00% pada Desember. Sementara itu, target fisik direncanakan lebih progresif dengan capaian 5,85% pada Februari, 21,21% pada Maret, 49,58% pada Juni, 77,94% pada September, 96,86% pada November, hingga mencapai 100,00% pada Desember. Pola tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan fisik direncanakan sedikit lebih cepat dibandingkan penyerapan anggaran guna memastikan seluruh kegiatan dapat diselesaikan tepat waktu dan mendukung optimalisasi realisasi anggaran pada akhir tahun.



Tabel 2.3 Target Kinerja Triwulan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sulawesi III Dipa Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Tahun 2026

Sasaran Strategis / Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Satuan	Target Rencana Aksi	Target PK Awal	Aktivitas	TW I	TW II	TW III	TW IV
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman								
Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni								
7659.BMA.001.101. A Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Menyusun dokumen data dan informasi penyelenggaraan kawasan permukiman	23,1 8	50,4 6	77,73	100
7659.PBF.001.101.A Jumlah Laporan Penyusunan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rekomem dasi Kebijakan	1 Rekomem dasi Kebijakan	1 Rekomem dasi Kebijakan	Melaksanakan Rekomendasi Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	23,1 8	50,4 6	77,73	100
Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman								
7659.CBR.002.101. A Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Menyusun Dokumen Teknis Penyiapan	23,1 8	50,4 6	77,73	100



Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman				Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman				
Program Dukungan Manajemen								
Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman								
7674.EBA.962.101.A Jumlah Layanan Umum	Layanan	3 Layanan	3 Layanan	Terlaksananya layanan umum	23,1 8	50,4 6	77,73	100
7674.EBA.963.100.A Jumlah Layanan Data dan Informasi	Layanan	1 Layanan	1 Layanan	Terlaksananya Layanan Data dan Informasi	23,1 8	50,4 6	77,73	100
7674.EBA.Z06.101.A Jumlah Layanan BMN	Layanan	1 Layanan	1 Layanan	Terlaksananya Layanan BMN	23,1 8	50,4 6	77,73	100

Sumber: Rencana Aksi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III Tahun 2026.

Berdasarkan Tabel 2.3 Berdasarkan target rencana aksi, pelaksanaan kegiatan pada Program Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Program Dukungan Manajemen direncanakan berlangsung secara bertahap hingga mencapai 100% pada Triwulan IV. Pada Program Perumahan dan Kawasan Permukiman, sasaran yang akan dicapai meliputi penyusunan 1 Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman, 1 Rekomendasi Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta 1 Dokumen Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman. Sementara itu, Program Dukungan Manajemen diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan melalui penyelenggaraan 3 Layanan Umum, 1 Layanan Data dan Informasi, dan 1 Layanan



BMN. Seluruh indikator direncanakan memiliki pola capaian yang sama, yaitu 23,18% pada Triwulan I, meningkat menjadi 50,46% pada Triwulan II, 77,73% pada Triwulan III, dan mencapai 100% pada Triwulan IV, sehingga seluruh target kinerja diharapkan dapat diselesaikan sesuai rencana pada akhir tahun anggaran.

Tabel 2.4 Target Rencana Keuangan Dan Fisik Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sulawesi III Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Tahun 2026

Rencana	Bulan											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Keuangan	0,00	9,09	18,18	27,28	36,37	45,46	54,55	63,64	72,73	81,83	90,92	100,00
Fisik	0,00	14,09	23,18	32,28	41,37	50,46	59,55	68,64	77,73	86,83	95,92	100,00

Sumber: Rencana Aksi BP3KP Sulawesi III Tahun 2026

Berdasarkan Tabel 2.4 diatas Berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan, target kemajuan keuangan dan fisik disusun secara bertahap setiap bulan hingga mencapai 100,00% pada akhir Desember. Target keuangan direncanakan meningkat dari 0,00% pada Januari menjadi 9,09% pada Februari, 45,46% pada Juni, 72,73% pada September, 90,92% pada November, dan mencapai 100,00% pada Desember. Sementara itu, target fisik direncanakan lebih progresif, yaitu 14,09% pada Februari, 23,18% pada Maret, 50,46% pada Juni, 77,73% pada September, 95,92% pada November, hingga mencapai 100,00% pada Desember. Pola tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan fisik direncanakan sedikit lebih cepat dibandingkan penyerapan anggaran sebagai upaya memastikan seluruh kegiatan dapat diselesaikan tepat waktu serta mendukung optimalisasi realisasi anggaran pada akhir tahun.

Tabel 2.5 Target Kinerja Triwulan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sulawesi III Dipa Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Tahun 2026

[illegible]

7661.ABF.002.103.A Jumlah Kebijakan Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan	Rekomen dasi Kebijakan	1 Rekomen dasi Kebijakan	1 Rekome ndasi Kebijaka n	Melaksanakan Kebijakan Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan	17,44	46,63	75.8 1	100
Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan di Wilayah Perkotaan								
7661.ABF.003.101.A Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan	Rekomen dasi Kebijakan	1 Rekomen dasi Kebijakan	1 Rekome ndasi Kebijaka n	Melaksanakan Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan	17,44	46,63	75.8 1	100
Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan								
7661.ABF.004.102.A Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	Rekomen dasi Kebijakan	1 Rekomen dasi Kebijakan	1 Rekome ndasi Kebijaka n	Melaksanakan Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	17,44	46,63	75.8 1	100
Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan								

7661.ABF.005.101.A Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	Rekomen dasi Kebijakan	1 Rekomen dasi Kebijakan	1 Rekome ndasi Kebijaka n	Melaksanakan Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	17,44	46,63	75.8 1	100
Program Dukungan Manajemen								
7676.EBA.962.106.A Jumlah layanan umum	Layanan	3 Layanan	3 Layanan	Terlaksananya layanan umum	17,44	46,63	75.8 1	100
7676.EBA.963.101.A Jumlah data dan informasi	Layanan	1 Layanan	1 Layanan	Terlaksananya data dan informasi	17,44	46,63	75.8 1	100
7676.EBA.Z06.101.A Jumlah layanan BMN dan Manajemen Keuangan	Layanan	1 Layanan	1 Layanan	Terlaksananya layanan BMN dan Manajemen Keuangan	17,44	46,63	75.8 1	100

Sumber: Rencana Aksi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III Tahun 2026.

Berdasarkan Tabel 2.5 Berdasarkan target rencana aksi, pelaksanaan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Program Dukungan Manajemen direncanakan berlangsung secara bertahap untuk mendukung pencapaian sasaran strategis di bidang perumahan perkotaan. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman mencakup penyusunan 1 rekomendasi kebijakan strategi dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perkotaan, 3 laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perkotaan, serta



masing-masing 1 rekomendasi kebijakan terkait penyiapan lahan, perizinan dan penghunian, pembiayaan perumahan, pembangunan perumahan, dan peningkatan kualitas perumahan perkotaan. Sementara itu, Program Dukungan Manajemen diarahkan untuk mendukung kelancaran operasional melalui penyelenggaraan 3 layanan umum, 1 layanan data dan informasi, serta 1 layanan BMN dan manajemen keuangan. Seluruh indikator direncanakan memiliki pola capaian yang sama, yaitu 17,44% pada Triwulan I, meningkat menjadi 46,63% pada Triwulan II, 75,81% pada Triwulan III, dan mencapai 100% pada Triwulan IV, sehingga seluruh target kinerja diharapkan dapat diselesaikan secara optimal pada akhir tahun anggaran.

Tabel 2.6 Target Rencana Keuangan Dan Fisik Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sulawesi III Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Tahun 2026

Rencana	Bulan											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Keuangan	0,00	2,72	12,44	22,17	31,90	41,63	51,36	61,09	70,81	80,54	90,27	100,00
Fisik	0.00	7,72	17,44	27,17	36,90	46,63	56,36	66,09	75,81	95,22	98,88	100,00

Sumber: Rencana Aksi BP3KP Sulawesi III Tahun 2026

Berdasarkan table 2.6 di atas berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan, target kemajuan keuangan dan fisik disusun secara bertahap setiap bulan hingga mencapai 100,00% pada akhir Desember. Target keuangan direncanakan meningkat dari 0,00% pada Januari menjadi 2,72% pada Februari, 12,44% pada Maret, 41,63% pada Juni, 70,81% pada September, 90,27% pada November, dan mencapai 100,00% pada Desember. Sementara itu, target fisik direncanakan lebih progresif dengan capaian 7,72% pada Februari, 17,44% pada Maret, 46,63% pada Juni, 75,81% pada September, 95,22% pada Oktober, 98,88% pada November, hingga mencapai 100,00% pada Desember. Rencana tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan



fisik diharapkan mendahului penyerapan anggaran sehingga seluruh kegiatan dapat diselesaikan tepat waktu dan target kinerja maupun realisasi anggaran dapat tercapai secara optimal pada akhir tahun anggaran.

Tabel 2.7 Target Kinerja Triwulan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sulawesi III Dipa Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2026

Sasaran Strategis / Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Satuan	Target Rencana Aksi	Target PK Awal	Aktivitas	TW I	TW II	TW III	TW IV
Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di perdesaan								
7660.ABF.007.101.A Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	Rekomen dasi kebijakan	1 Rekomen dasi Kebijakan	1 Rekomen dasi Kebijakan	Melaksanakan rekomendasi Penyelenggaraa n Pembangunan Perumahan Perdesaan	18,2 4	47,1 6	76,08	100,00
7660.FAE.004.101. Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Melaksanakan Pemantuan dan Evaluasi Perumahan Perdesaan	18,2 4	47,1 6	76,08	100,00
Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan								
7660.ABF.008.101.A Jumlah Rekomendasi Kebijakan	Rekomen dasi kebijakan	1 Rekomen	1 Rekomen	Melaksanakan Rekomendasi Kebijakan	18,2 4	47,1 6	76,08	100,00



Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan		dasi Kebijakan	dasi Kebijakan	Penyelenggaraa n Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan				
Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan								
7660.ABF.009.102.A Jumlah Rekomendasi Kebijakan,Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Rekomen dasi kebijakan	1 Rekomen dasi Kebijakan	1 Rekomen dasi Kebijakan	Melaksanakan Kebijakan,Kemit raan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraa n Perumahan Perdesaan	18,2 4	47,1 6	76,08	100,00
7660.BMA.001.100.A Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Menyusun Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraa n Perumahan Perdesaan	18,2 4	47,1 6	76,08	100,00
7660.FAE.001.100.A Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Laporan	3 Laporan	3 Laporan	Menyusun Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraa n Perumahan Perdesaan	18,2 4	47,1 6	76,08	100,00
Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di wilayah perdesaan								
7660.CBR.001.100.A Jumlah Dokumen Dukungan Teknis	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Menyusun Dokumen Dukungan	18,2 4	47,1 6	76,08	100,00



Penyiapan Lahan dan Perizinan Perumahan Perdesaan				Teknis Penyiapan Lahan dan Perizinan Perumahan Perdesaan				
7660.CBR.002.100.A Jumlah Dokumen Dukungan Teknis Penghunian Perumahan Pedesaan	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Menyusun Dukungan Teknis Penghunian Perumahan Pedesaan	18,2 4	47,1 6	76,08	100,00
Meningkatnya akses rumah tangga yang terfasilitasi pembiayaan perumahan di wilayah perdesaan								
7660.PEA.001.100.A Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan Perdesaan	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Melakukan Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan Perdesaan	18,2 4	47,1 6	76,08	100,00
Program Dukungan Manajemen								
Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan								
7675.EBA.962.100.A Jumlah Layanan Umum	Layanan	3 Layanan	3 Layanan	Terlaksananya Layanan Umum	18,2 4	47,1 6	76,08	100,00
Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan								
7675.EBA.963.101.A Jumlah Layanan Data dan Informasi	Layanan	1 Layanan	1 Layanan	Terlaksananya Layanan Data dan Informasi	18,2 4	47,1 6	76,08	100,00

Sumber: Rencana Aksi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III Tahun 2026.



Berdasarkan table 2.7 diatas Berdasarkan target rencana aksi, pelaksanaan kegiatan pada Program Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Program Dukungan Manajemen diarahkan untuk mendukung peningkatan penyelenggaraan perumahan perdesaan secara menyeluruh. Sasaran yang akan dicapai meliputi penyusunan dan pelaksanaan rekomendasi kebijakan terkait pembangunan, peningkatan kualitas, keterpaduan dan kemitraan, penyiapan lahan, perizinan, penghunian, serta pembiayaan perumahan perdesaan, disertai penyusunan dokumen data dan informasi, dokumen dukungan teknis, serta laporan pemantauan dan evaluasi sesuai target yang telah ditetapkan. Selain itu, Program Dukungan Manajemen mendukung pencapaian sasaran melalui penyelenggaraan 3 layanan umum dan 1 layanan data dan informasi. Seluruh indikator kinerja direncanakan memiliki pola capaian yang sama, yaitu 18,24% pada Triwulan I, meningkat menjadi 47,16% pada Triwulan II, 76,08% pada Triwulan III, dan mencapai 100,00% pada Triwulan IV, sehingga seluruh target kinerja diharapkan dapat terealisasi secara optimal pada akhir tahun anggaran.

Tabel 2.8 Target Rencana Keuangan Dan Fisik Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sulawesi III Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2026

Rencana	Bulan											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Keuangan	0,00	3,60	13,24	22,88	32,52	42,16	51,80	61,44	71,08	80,72	90,36	100,00
Fisik	0,00	8,60	18,24	27,88	37,52	47,16	56,80	66,44	76,08	95,22	98,88	100,00

Sumber: Rencana Aksi BP3KP Sulawesi III Tahun 2026

Berdasarkan table 2.8 diatas Berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan, target kemajuan keuangan dan fisik disusun secara bertahap setiap bulan hingga mencapai 100,00% pada akhir Desember. Target keuangan direncanakan meningkat dari 0,00% pada Januari menjadi 3,60% pada Februari, 13,24% pada Maret, 42,16% pada Juni, 71,08% pada September, 90,36% pada November, dan mencapai 100,00% pada

Desember. Sementara itu, target fisik direncanakan lebih progresif dengan capaian 8,60% pada Februari, 18,24% pada Maret, 47,16% pada Juni, 76,08% pada September, 95,22% pada Oktober, 98,88% pada November, hingga mencapai 100,00% pada Desember. Rencana tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan fisik diharapkan lebih dahulu berkembang dibandingkan penyerapan anggaran, sehingga seluruh kegiatan dapat diselesaikan tepat waktu dan target kinerja serta realisasi anggaran dapat tercapai secara optimal pada akhir tahun anggaran.

Tabel 2.9 Target Kinerja Triwulan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sulawesi III Dipa Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun 2026

[illegible]



7662.FAE.001 Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	23,1 8	50,4 6	77,74	100
--	---------	--------------	--------------	---	-----------	-----------	-------	-----

Sumber: Rencana Aksi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III Tahun 2026.

Berdasarkan Tabel 2.9 diatas Berdasarkan target rencana aksi, pelaksanaan kegiatan diarahkan untuk memperkuat tata kelola penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pengendalian risiko. Sasaran yang akan dicapai meliputi penyusunan 1 rekomendasi/laporan kebijakan keterbukaan publik, transparansi, dan akuntabilitas melalui pembangunan Zona Integritas, 1 rekomendasi/laporan kebijakan manajemen risiko dan pencegahan korupsi melalui penyusunan dan penerapan manajemen risiko, serta 1 laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko. Seluruh indikator kinerja direncanakan memiliki pola capaian yang sama, yaitu 23,18% pada Triwulan I, meningkat menjadi 50,46% pada Triwulan II, 77,74% pada Triwulan III, dan mencapai 100,00% pada Triwulan IV, sehingga seluruh target kegiatan diharapkan dapat terlaksana secara optimal pada akhir tahun anggaran.



Tabel 2.10 Target Rencana Keuangan Dan Fisik Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sulawesi III Dipa Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun 2026

Rencana	Bulan											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Keuangan	0,00	9,09	18,18	27,28	36,37	45,46	54,55	63,64	72,74	81,83	90,92	100,00
Fisik	0,00	14,09	23,18	32,28	41,37	50,46	59,55	68,64	77,74	95,22	98,88	100,00

Sumber: Rencana Aksi BP3KP Sulawesi III Tahun 2026

Berdasarkan Tabel 2.10 diatas berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan, target kemajuan keuangan dan fisik disusun secara bertahap setiap bulan hingga mencapai 100,00% pada akhir Desember. Target keuangan direncanakan meningkat dari 0,00% pada Januari menjadi 9,09% pada Februari, 18,18% pada Maret, 45,46% pada Juni, 72,74% pada September, 90,92% pada November, dan mencapai 100,00% pada Desember. Sementara itu, target fisik direncanakan lebih progresif dengan capaian 14,09% pada Februari, 23,18% pada Maret, 50,46% pada Juni, 77,74% pada September, 95,22% pada Oktober, 98,88% pada November, hingga mencapai 100,00% pada Desember. Pola tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan fisik direncanakan lebih cepat dibandingkan penyerapan anggaran sebagai upaya memastikan seluruh kegiatan dapat diselesaikan tepat waktu, sehingga target kinerja dan realisasi anggaran dapat tercapai secara optimal pada akhir tahun anggaran.

2.2 Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja mencakup kinerja kegiatan dan kinerja sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kinerja. Data terkait pencapaian target masing-masing kinerja diperoleh berdasarkan hasil laporan oleh PPK dan Kasatker sebagai penanggungjawab data. Perhitungan persentase pencapaian target baik dalam pencapaian kegiatan maupun pencapaian sasaran memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi sebagai berikut:

Rumus: persentase capaian kinerja

$$\% \text{ Pencapaian target} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Berdasarkan pengukuran kinerja kegiatan dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan realisasi pencapaian kegiatan dan sasaran, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja untuk memberikan penjelasan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan dan pencapaian sasaran. Evaluasi bertujuan agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Evaluasi terhadap capaian kinerja dinilai dengan skala pengukuran ordinal yang dibuat dengan menggunakan asumsi seperti terlihat di bawah ini:



Tabel 2.11 Skala Pengukuran Ordinal Evaluasi Capaian Kinerja

Kondisi	Keterangan
x 100%	Sangat Baik
85% s/d 100%	Baik
75% s/d 85%	Cukup Baik
55% s/d 75%	Sedang
< 55%	Kurang

Berdasarkan Tabel 2.11 menjelaskan skala pengukuran ordinal yang digunakan dalam evaluasi capaian kinerja untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan persentase capaian terhadap target yang telah ditetapkan. Hasil capaian dengan nilai lebih dari 100% dikategorikan Sangat Baik, sedangkan capaian pada rentang 85% sampai dengan 100% termasuk kategori Baik. Selanjutnya, capaian 75% sampai dengan 85% diklasifikasikan sebagai Cukup Baik, capaian 55% sampai dengan 75% berada pada kategori Sedang, dan capaian di bawah 55% masuk dalam kategori Kurang. Skala pengukuran ini menjadi dasar dalam mengevaluasi tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan sekaligus memberikan gambaran objektif mengenai pencapaian kinerja setiap indikator, sehingga dapat digunakan sebagai bahan analisis dalam penyusunan rekomendasi perbaikan dan peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

2.3 Capaian Target Triwulan BP3KP Sulawesi III.

Pada Triwulan II Tahun Anggaran 2026, BP3KP Sulawesi III telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan



difokuskan pada tahapan persiapan, koordinasi, pengumpulan data dan informasi, penyusunan dokumen pendukung, serta pelaksanaan kegiatan administrasi dan operasional sebagai fondasi dalam pencapaian target kinerja tahunan. Seluruh pelaksanaan kegiatan mengacu pada prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Capaian kinerja Triwulan II menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai dengan target yang telah direncanakan. Program yang dilaksanakan mencakup penyelenggaraan sistem dan strategi perumahan dan kawasan permukiman, penyiapan lahan dan pengembangan kawasan permukiman, penyediaan rumah layak huni, peningkatan kualitas perumahan, serta dukungan manajemen. Masing-masing program dilaksanakan melalui berbagai aktivitas, antara lain penyusunan rekomendasi kebijakan, dokumen teknis, laporan pemantauan dan evaluasi, koordinasi dengan pemangku kepentingan, serta penyelenggaraan layanan administrasi perkantoran dan dukungan operasional.

Secara umum, realisasi kinerja pada Triwulan II telah menunjukkan kemajuan yang sejalan dengan target rencana aksi. Capaian tersebut menjadi dasar yang kuat untuk pelaksanaan kegiatan pada triwulan berikutnya, khususnya dalam percepatan penyelesaian output kegiatan, peningkatan kualitas pelaksanaan program, serta optimalisasi realisasi anggaran. Dengan dukungan koordinasi yang baik antarunit kerja dan pemantauan secara berkala, BP3KP Sulawesi III optimis seluruh indikator kinerja dan target Perjanjian Kinerja Tahun 2026 dapat dicapai secara optimal pada akhir tahun anggaran.

2.3.1 Capaian Target Triwulan II Program Dukungan Manajemen

Capaian target Triwulan II BP3KP Sulawesi III pada Program Dukungan Manajemen adalah sebagai berikut:

Tabel 2.12 Capaian Target Kinerja Triwulan II BP3KP Sulawesi III Sekretariat Jenderal Kementerian
PKP Tahun Anggaran 2026

SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	TARGET PK AWAL	SATUAN	CAPAIAN TARGET TRIWULAN II		KETERANGAN
			TARGET	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III					
7665.EBA.962 Jumlah Layanan Umum	Jumlah Layanan Umum	3	44,58	33,64	- Belanja Bahan
7665.EBA.994 Jumlah Layanan Perkantoran	3	Layanan	44,58	65,23	- Belanja Keperluan Perkantoran - Belanja Barang Operasional Lainnya - Belanja Peralatan dan Mesin - Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - Belanja Jasa Pos dan Giro - Belanja Langganan Listrik - Belanja Langganan telepon - Belanja Langganan Air - Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya



					- Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - Belanja Honor Operasional Satuan Kerja
7665.EBB.951 Jumlah Layanan Sarana Internal	10 unit	0,00%	44,58	100	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Realisasi fisik sebesar 100%

Berdasarkan tabel 2.12 Berdasarkan capaian kinerja Triwulan II, penyerapan anggaran pada Sasaran Kegiatan Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III menunjukkan hasil yang bervariasi pada setiap indikator. Jumlah Layanan Perkantoran telah melampaui target Triwulan II dengan realisasi sebesar 65,23% dari target 44,58%. Capaian tersebut didukung oleh terlaksananya berbagai komponen belanja operasional, antara lain belanja keperluan perkantoran, belanja barang operasional lainnya, pengadaan peralatan dan mesin, belanja persediaan konsumsi, jasa pos dan giro, pembayaran langganan listrik, telepon, air, langganan daya dan jasa lainnya, pemeliharaan peralatan dan mesin, serta pembayaran honor operasional satuan kerja. Sementara itu, Jumlah Layanan Sarana Internal telah mencapai 100% realisasi fisik, karena seluruh pengadaan peralatan dan mesin yang direncanakan pada Triwulan II telah selesai dilaksanakan sesuai spesifikasi dan kebutuhan satuan kerja. Adapun Jumlah Layanan Umum belum menunjukkan realisasi penyerapan anggaran meskipun target Triwulan II sebesar 33,64%, karena kegiatan yang didukung melalui belanja bahan masih berada pada tahap persiapan pelaksanaan, proses administrasi, atau penjadwalan pelaksanaan yang direncanakan pada triwulan



berikutnya. Dengan demikian, anggaran untuk kegiatan tersebut belum dapat direalisasikan pada Triwulan II, namun tetap diarahkan agar seluruh target penyerapan dan keluaran kegiatan dapat tercapai sesuai rencana

**Tabel 2.13 Progres Fisik dan Keuangan Triwulan II BP3KP Sulawesi III Sekretariat Jenderal
Kementerian PKP Tahun Anggaran 2026**

No.	Nama Paket	Pagu RKAKL (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Progres Fisik Per Bulan											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	7665.EBA.962.106.A Layanan Umum	59.604.000	17.073.550	0,00	6,21	6,21	29,43	32,18	33,64						
2	7665.EBA.994.002.A Operasional Pemeliharaan Kantor	479.774.000	291.161.525	0,00	50,01	54,16	59,98	61,80	65,23						
3	7665.EBA.994.002.B Langganan Daya dan Jasa	207.200.000	61.383.982	0,00	13,74	15,84	21,98	25,69	35,24						
4	7665.EBA.994.002.C Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	337.134.000	268.243.950	0,00	7,62	9,53	76,43	79,25	84,57						
5	7665.EBA.994.002.D Honor Operasional Satuan Kerja	64.200.000	27.000.000	0,00	0,00	17,01	18,06	38,33	46,67						



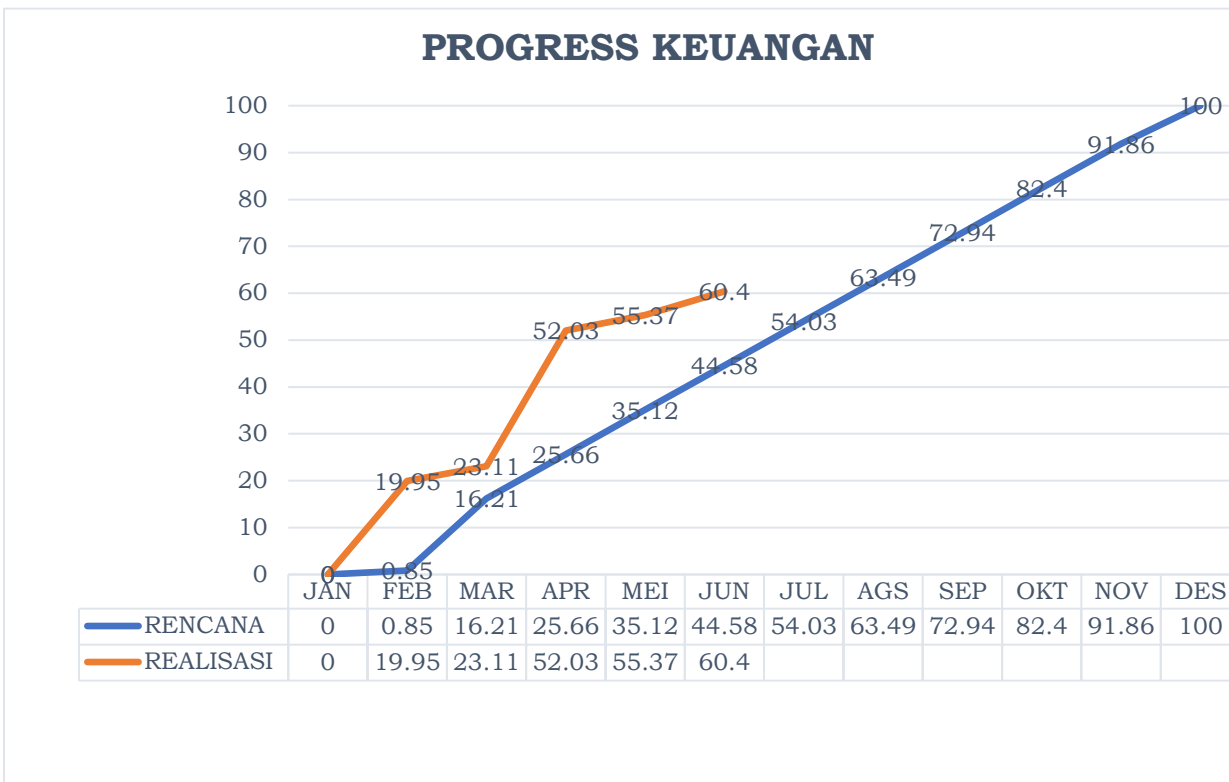
6	7665.EBB.951.101.A Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	72.693.000	72.427.500	0,00	0,00	100,00	100	100	100						
	TOTAL	1.220.605.000	737.290.507	0.00	24,40	27,81	56,76	60,08	65,03						

Berdasarkan Tabel 2.13, realisasi fisik dan keuangan Triwulan II pada kegiatan Layanan Dukungan Manajemen BP3KP Sulawesi III Sekretariat Jenderal Kementerian PKP Tahun Anggaran 2026 menunjukkan perkembangan yang positif dengan total realisasi keuangan sebesar Rp737.290.507 dari pagu anggaran Rp1.220.605.000 serta capaian progres fisik kumulatif sebesar 65,03%. Penyerapan anggaran didukung oleh terlaksananya kegiatan operasional pemeliharaan kantor, pembayaran langganan daya dan jasa, pemeliharaan sarana dan prasarana, pembayaran honor operasional satuan kerja, serta pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi yang telah mencapai progres fisik 100%. Tingginya realisasi pada paket pemeliharaan sarana dan prasarana serta operasional kantor menunjukkan bahwa kebutuhan pendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi telah dilaksanakan sesuai jadwal. Sementara itu, masih terdapat anggaran yang belum terserap secara optimal karena beberapa kegiatan masih berlangsung secara bertahap hingga semester II, pembayaran belanja rutin seperti langganan listrik, air, telepon, dan jasa lainnya mengikuti tagihan bulanan, serta sebagian belanja bahan, honor operasional, dan pemeliharaan baru akan direalisasikan setelah pekerjaan selesai dan dokumen administrasi pembayaran dinyatakan lengkap. Dengan demikian, sisa anggaran akan dimanfaatkan pada triwulan berikutnya untuk mendukung penyelesaian seluruh kegiatan sesuai rencana kerja dan mencapai target penyerapan anggaran pada akhir Tahun Anggaran 2026



Adapun capaian progres keuangan dan progres fisik pada DIPA Sekretariat Jenderal Tahun 2026 pada triwulan II dapat dilihat dalam kurva S sebagai berikut:

**Gambar 2.1 Grafik Realisasi Keuangan Triwulan II BP3KP Sulawesi III
DIPA Sekretariat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan
Permukiman**



Berdasarkan Gambar 2.1 diatas grafik Progres Keuangan Tahun Anggaran 2026, realisasi keuangan hingga Triwulan II mencapai 60,40%, lebih tinggi dibandingkan target rencana sebesar 44,58%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran berjalan lebih cepat dari jadwal yang telah direncanakan, terutama didukung oleh percepatan pelaksanaan kegiatan operasional perkantoran, pengadaan barang dan peralatan, pemeliharaan sarana dan prasarana, serta pembayaran belanja rutin yang telah memenuhi persyaratan administrasi. Meskipun demikian, masih terdapat anggaran yang belum terserap karena beberapa kegiatan masih berlangsung dan dijadwalkan selesai pada semester II, sementara pembayaran atas pekerjaan tersebut baru dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan, pemeriksaan hasil pekerjaan, serta kelengkapan dokumen administrasi sesuai

ketentuan. Selain itu, belanja yang bersifat periodik seperti langganan daya dan jasa serta honor operasional satuan kerja akan terus direalisasikan secara bertahap hingga akhir tahun anggaran. Dengan kondisi tersebut, sisa anggaran diproyeksikan dapat terserap secara optimal pada triwulan berikutnya sehingga target penyerapan keuangan Tahun Anggaran 2026 dapat tercapai sesuai rencana.

Gambar 2.2 Grafik Realisasi Fisik Triwulan II BP3KP Sulawesi III DIPA Sekretariat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman



Berdasarkan Gambar 2.2 Grafik Realisasi Fisik Triwulan II BP3KP Sulawesi III DIPA Sekretariat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, capaian realisasi fisik hingga akhir Triwulan II menunjukkan perkembangan yang baik dan secara umum telah sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan. Realisasi fisik didukung oleh terlaksananya kegiatan operasional perkantoran, pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi yang telah mencapai 100%, pemeliharaan sarana dan prasarana, pembayaran langganan daya dan jasa, serta pelaksanaan layanan umum yang berjalan

sesuai rencana kerja. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kegiatan yang belum mencapai target maksimal karena pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sesuai tahapan pekerjaan, jadwal pelaksanaan kontrak, serta proses administrasi dan verifikasi sebelum pekerjaan dapat dinyatakan selesai. Selain itu, beberapa kegiatan pemeliharaan dan layanan rutin masih akan dilaksanakan pada semester II sehingga realisasi fisik belum mencapai 100% pada Triwulan II. Dengan pengendalian dan monitoring yang dilakukan secara berkala, sisa pekerjaan ditargetkan dapat diselesaikan pada triwulan berikutnya sehingga seluruh target fisik dan keuangan Tahun Anggaran 2026 dapat tercapai sesuai rencana.



Tabel 2.14 Capaian Target Kinerja Triwulan II BP3KP Sulawesi III DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2026

SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	TARGET PK AWAL	SATUAN	CAPAIAN TARGET TRIWULAN II		KETERANGAN
			TARGET	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman					
Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni					
7659.BMA.001 Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1	Dokumen	45,46	87,74	- Belanja Bahan - Belanja Perjalanan Dinas Biasa
7659.PBF.001 Jumlah Laporan Penyusunan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik	1	Rekomendasi Kebijakan	45,46	39,27	- Belanja Bahan - Belanja Perjalanan Dinas Biasa



Perumahan dan Kawasan Permukiman					
Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman					
7659.CBR.002 Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	1	Dokumen	45,46	51,59	- Belanja Sewa - Belanja Perjalanan Dinas Biasa
Program Dukungan Manajemen					
Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman					
7674.EBA.962 Jumlah Layanan Umum	3	Layanan	45,46	49,67	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa
7674.EBA.963 Jumlah Layanan Data dan Informasi	1	Layanan	45,46	28,21	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa
7674.EBA.Z06	1	Layanan	45,46	48,60	- Belanja Sewa



Jumlah Layanan BMN					- Belanja Perjalanan Dinas Biasa
-----------------------	--	--	--	--	----------------------------------

Berdasarkan Tabel 2.14 Berdasarkan capaian kinerja Triwulan II, pelaksanaan kegiatan pada Program Perumahan dan Kawasan Permukiman menunjukkan hasil yang bervariasi. Indikator Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman telah melampaui target Triwulan II, sedangkan indikator Jumlah Laporan Penyusunan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Jumlah Layanan Data dan Informasi masih berada di bawah target yang ditetapkan. Kondisi tersebut disebabkan karena sebagian kegiatan masih berada pada tahap pengumpulan data, koordinasi dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan, penyusunan dokumen teknis, serta pelaksanaan perjalanan dinas yang menyesuaikan jadwal pelaksanaan kegiatan di lapangan. Selain itu, beberapa belanja perjalanan dinas, belanja bahan, dan belanja sewa belum dapat direalisasikan seluruhnya karena pelaksanaan kegiatan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan, jadwal pelaksanaan, serta penyelesaian administrasi pertanggungjawaban. Meskipun demikian, seluruh kegiatan tetap berjalan sesuai rencana kerja dan sisa anggaran akan direalisasikan pada triwulan berikutnya agar seluruh target fisik, keuangan, dan indikator kinerja dapat tercapai secara optimal pada akhir Tahun Anggaran 2026.



Tabel 2.15 Progres Fisik dan Keuangan Triwulan II BP3KP Sulawesi III Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2026

No.	Nama Paket	Pagu RKAKL (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Progres Fisik Per Bulan											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	7659.BMA.001.101.A Pengelolaan Data dan Informasi Program Satu Juta Rumah di Kawasan Pesisir di Balai Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman	29.363.000	24.294.560	0	0	78,37	78,37	78,37	87,74						
2	7659.CBR.002.101.A Pemenuhan Readiness Criteria Lokasi Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	100.877.000	46.995.840	0	0	51,59	51,59	51,59	51,59						
3	7659.PBF.001.101.A Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman di Balai Penyediaan Perumahan dan	60.818.000	20.840.960	0	26,21	26,21	26,21	29,61	32,90						



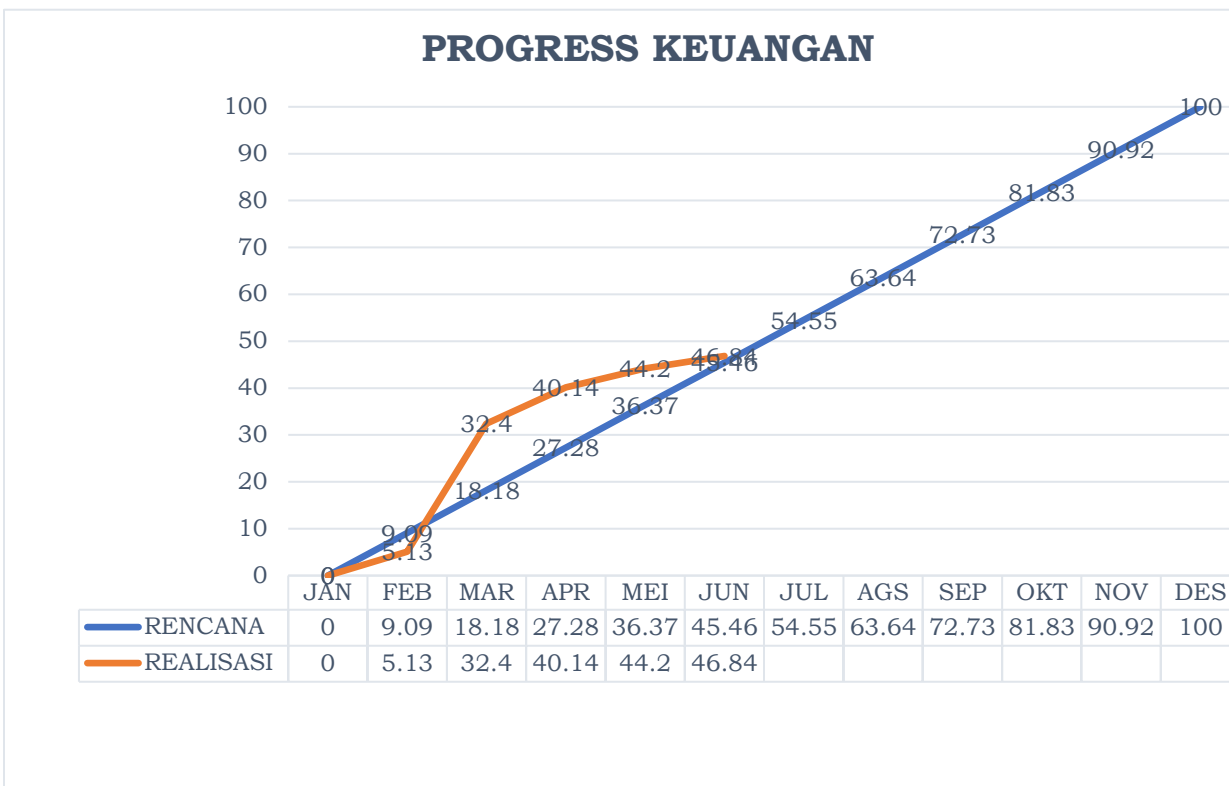
	Kawasan Permukiman													
4	7674.EBA.962.101.A Layanan Umum Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman pada 19 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman	41.274.000	18.435.448	0	0	0	42,79	49,67	49,67					
5	7674.EBA.963.100.A Pengelolaan Data dan Informasi serta Publikasi Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	5.558.000	1.290.000	0	0	0	0	28,21	28,21					
6	7674.EBA.Z06.101.A Penatausahaan BMN Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman pada 19 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman	13.485.000	5.880.000	0	0	0	18,35	48,60	48,60					
	TOTAL	251.375.000	117.736.808	0	6,34	36,20	45,03	49,20	51,84					

Berdasarkan table 2.15 diatas Berdasarkan Tabel Progres Fisik dan Keuangan Triwulan II, realisasi anggaran pada kegiatan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman mencapai Rp117.736.808 dari



total pagu Rp251.375.000, dengan capaian progres fisik kumulatif sebesar 51,84%. Penyerapan anggaran didukung oleh terlaksananya kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Program Satu Juta Rumah di Kawasan Pesisir yang telah mencapai progres fisik 87,74%, Pemenuhan Readiness Criteria Lokasi Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman sebesar 51,59%, serta pelaksanaan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman, Layanan Umum, Pengelolaan Data dan Informasi serta Publikasi, dan Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) yang berjalan sesuai tahapan pelaksanaan. Sementara itu, masih terdapat anggaran yang belum terserap secara optimal karena sebagian kegiatan masih dalam proses penyelesaian, koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan, serta pelaksanaan perjalanan dinas yang disesuaikan dengan jadwal kegiatan di lapangan. Selain itu, beberapa komponen belanja seperti belanja perjalanan dinas, belanja sewa, dan belanja bahan baru dapat direalisasikan setelah seluruh tahapan kegiatan selesai dan dokumen pertanggungjawaban dinyatakan lengkap sesuai ketentuan. Oleh karena itu, sisa anggaran akan direalisasikan secara bertahap pada triwulan berikutnya sehingga target fisik, keuangan, dan keluaran kegiatan diharapkan dapat tercapai secara optimal pada akhir Tahun Anggaran 2026.

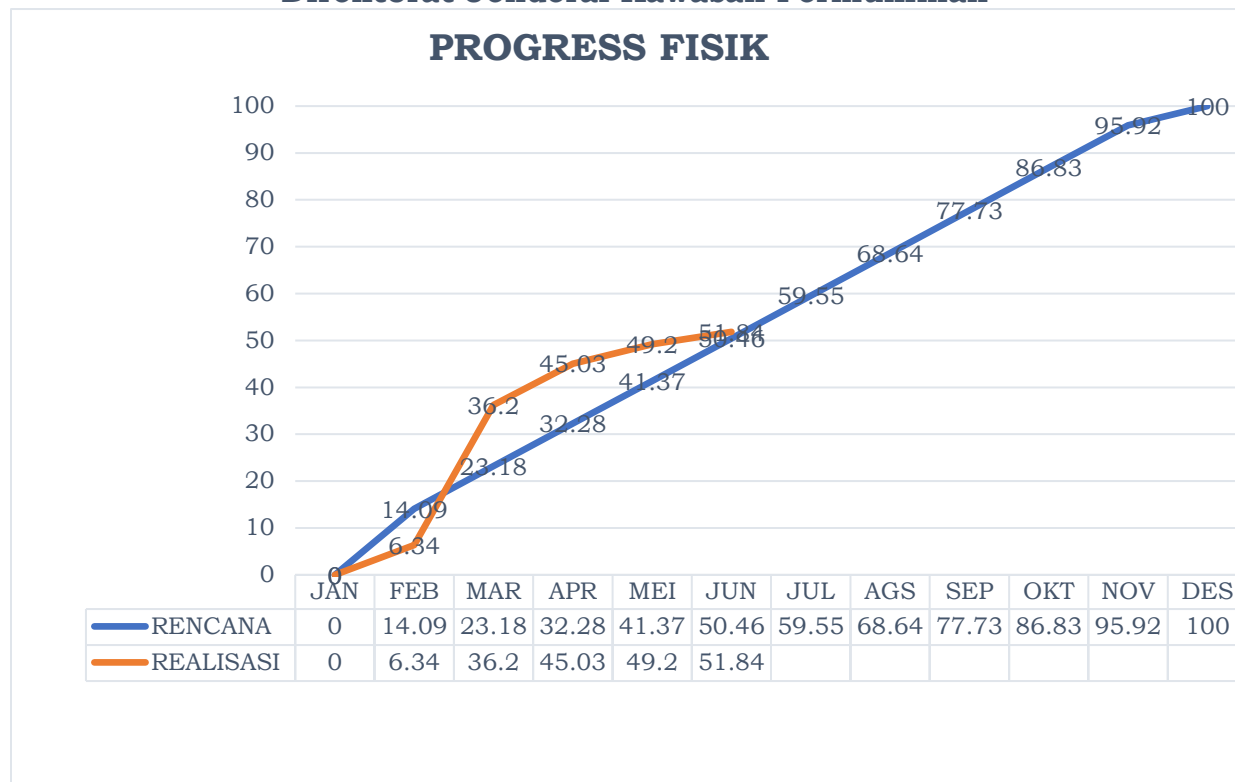
**Gambar 2.3 Grafik Realisasi Keuangan Triwulan II BP3KP Sulawesi III
DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman**



Berdasarkan gambar 2.3 diatas Berdasarkan Grafik Progres Keuangan Triwulan II, realisasi keuangan hingga bulan Juni mencapai 46,84%, melampaui target rencana sebesar 45,46%. Keberhasilan pencapaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan secara efektif melalui percepatan proses pengadaan, pelaksanaan kegiatan prioritas, pembayaran atas pekerjaan yang telah selesai, serta penguatan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan anggaran. Meskipun demikian, masih terdapat sebagian anggaran yang belum terserap karena beberapa kegiatan masih berada pada tahap pelaksanaan, proses verifikasi hasil pekerjaan, penyelesaian administrasi dan pertanggungjawaban, serta terdapat belanja yang bersifat bertahap seperti perjalanan dinas, sewa, pemeliharaan, dan pembayaran jasa yang realisasinya mengikuti jadwal pelaksanaan kegiatan maupun tagihan rutin. Dengan kondisi tersebut, sisa anggaran telah direncanakan untuk direalisasikan pada Triwulan III dan Triwulan IV sehingga target penyerapan

anggaran serta pencapaian indikator kinerja pada akhir Tahun Anggaran 2026 dapat terlaksana secara optimal.

**Gambar 2.4 Grafik Realisasi Fisik Triwulan II BP3KP Sulawesi III DIPA
Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman**



Berdasarkan Gambar 2.4 diatas Grafik Progres Fisik Triwulan II, realisasi fisik hingga bulan Juni mencapai 51,84%, melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 50,46%. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan telah dilaksanakan sesuai bahkan lebih cepat dari jadwal yang direncanakan, terutama pada kegiatan pengelolaan data dan informasi, pemenuhan *readiness criteria* lokasi penanganan kawasan kumuh, layanan umum, pengelolaan BMN, serta kegiatan pendukung lainnya yang telah memasuki tahapan penyelesaian. Capaian ini merupakan hasil dari penguatan koordinasi antarunit kerja, percepatan pelaksanaan kegiatan di lapangan, serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala sehingga kendala pelaksanaan dapat segera ditindaklanjuti. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kegiatan yang belum mencapai realisasi fisik maksimal karena

pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, memerlukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan, serta menyesuaikan jadwal pelaksanaan perjalanan dinas, penyusunan dokumen teknis, dan proses administrasi penyelesaian pekerjaan. Dengan demikian, sisa target fisik akan diselesaikan pada Triwulan III dan Triwulan IV sehingga seluruh keluaran kegiatan dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan pada Tahun Anggaran 2026.



**Tabel 2.16 Capaian Target Kinerja Triwulan II BP3KP Sulawesi III Direktorat Jenderal Perumahan
Perkotaan Tahun Anggaran 2026**

SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	TARGET PK AWAL	SATUAN	CAPAIAN TARGET TRIWULAN II		KETERANGAN
			TARGET	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan					
7661.ABF.001.102.A Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1	Rekomendasi Kebijakan	41,63	56,84	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa
7661.FAE.001.102.A Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	3	Laporan	41,63	50,85	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa

Meningkatnya Akses Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan					
7661.ABF.002.103.A Jumlah Kebijakan Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan	1	Rekomendasi Kebijakan	41,63	25,85	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa
Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan di Wilayah Perkotaan					
7661.ABF.003.101.A Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan	1	Rekomendasi Kebijakan	41,63	34,07	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa
Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan					
7661.ABF.004.102.A Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan	1	Rekomendasi Kebijakan	41,63	72,26	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

Pembangunan Perumahan Perkotaan					
Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan					
7661.ABF.005.101.A Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	1	Rekomendasi Kebijakan	41,63	60,07	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa
Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan					
7676.EBA.962.106.A Jumlah Layanan Umum	3	Layanan	41,63	0	Belum ada realisasi
7676.EBA.963.101.A Jumlah Layanan Data dan Informasi	1	Layanan	41,63	0	Belum ada realisasi
7676.EBA.Z06.101.A Jumlah Layanan BMN dan Manajemen Keuangan	1	Layanan	41,63	0	Belum ada realisasi

Berdasarkan Tabel 2.16 capaian kinerja Triwulan II, pelaksanaan kegiatan pada Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan menunjukkan hasil yang bervariasi. Beberapa indikator telah melampaui target Triwulan II, antara lain Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan dengan capaian 72,26%, Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan sebesar 60,07%, Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan sebesar 56,84%, serta Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan sebesar 50,85%. Keberhasilan tersebut didukung oleh percepatan pelaksanaan kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi, penyusunan rekomendasi kebijakan, serta pelaksanaan perjalanan dinas yang terlaksana sesuai rencana kerja. Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target, seperti Kebijakan Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan (25,85%) dan Kebijakan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan (34,07%), karena kegiatan masih dalam tahap pengumpulan data, koordinasi lintas instansi, dan penyusunan substansi kebijakan. Selain itu, pada komponen Layanan Dukungan Manajemen yang meliputi Layanan Umum, Layanan Data dan Informasi, serta Layanan BMN dan Manajemen Keuangan belum terdapat realisasi pada Triwulan II karena pelaksanaan kegiatannya dijadwalkan pada semester II, sehingga anggaran belum dapat diserap. Sisa anggaran tersebut akan direalisasikan secara bertahap pada triwulan berikutnya sesuai jadwal pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian administrasi, sehingga target fisik, keuangan, dan indikator kinerja diharapkan dapat tercapai secara optimal pada akhir Tahun Anggaran 2026.



Tabel 2.17 Progres Fisik dan Keuangan Triwulan II BP3KP Sulawesi III Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Tahun Anggaran 2026

No.	Nama Paket	Pagu RKAKL (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Progres Fisik Per Bulan											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	7661.ABF.001.102.A Perencanaan dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan di Balai P3KP Sulawesi III	50.495.000	28.701.657	0	27,04	27,04	27,04	61,84	61,84						
2	7661.ABF.002.103.A Fasilitasi Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan	33.876.000	8.757.600	0	0	0	0	0	30,85						
3	7661.ABF.003.101.A Fasilitasi dan Pemantauan Penyaluran Fasilitas Pembiayaan Perumahan Perkotaan	30.876.000	10.519.406	0	34,08	34,08	39,07	39,07	39,07						
4	7661.ABF.004.102.A Verifikasi Bantuan Pembangunan	45.855.000	30.839.916	0	18,76	72,26	72,26	72,26	72,26						

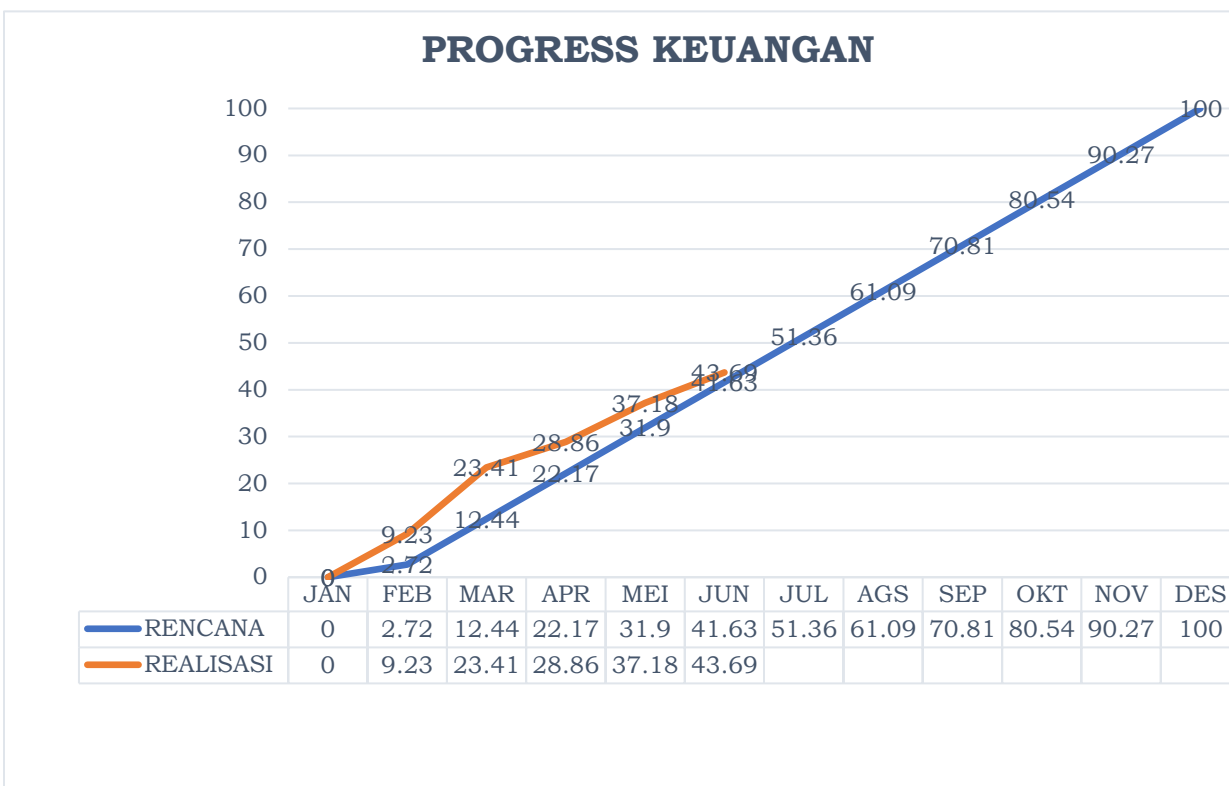
	Perumahan Perkotaan														
5	7661.ABF.005.101.A Verifikasi Bantuan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	54.495.000	32.732.729	0	0	34,53	60,33	60,33	65,07						
6	7661.FAE.001.102.A Pengendalian Program Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan di Balai P3KP Sulawesi III	26.691.000	13.571.800	0	0	0	0	28,41	55,85						
7	7676.EBA.962.106.A Layanan Umum Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan di Balai P3KP Sulawesi III	14.517.000	0	0	0	0	0	0	0						
8	7676.EBA.963.101.A Publikasi Data dan Informasi Publik bidang Perumahan Perkotaan di Balai P3KP Sulawesi III	14.423.000	0	0	0	0	0	0	0						
9	7676.EBA.Z06.101.A Rencana Kebutuhan BMN dan Pengelolaannya di	15.141.000	0	0	0	0	0	0	0						



	Balai P3KP Sulawesi III														
	TOTAL	286.369.000	125.123.108	0	11,45	26,58	32,03	40,82	47,92						

Berdasarkan Tabel 2.17 Tabel Progres Fisik dan Keuangan Triwulan II, realisasi anggaran pada kegiatan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan mencapai Rp125.123.108 dari total pagu anggaran Rp286.369.000, dengan capaian progres fisik kumulatif sebesar 47,92% hingga akhir Triwulan II. Keberhasilan pencapaian tersebut didukung oleh terlaksananya beberapa kegiatan utama, antara lain Perencanaan dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan, Verifikasi Bantuan Pembangunan Perumahan Perkotaan, Verifikasi Bantuan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan, Pengendalian Program Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan, serta Fasilitasi dan Pemantauan Penyaluran Fasilitas Pembiayaan Perumahan Perkotaan yang telah menunjukkan progres sesuai bahkan melebihi target Triwulan II. Namun demikian, masih terdapat anggaran yang belum terserap karena beberapa kegiatan, seperti Fasilitasi Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan, masih dalam tahap koordinasi, pengumpulan data, dan pelaksanaan kegiatan lapangan. Selain itu, paket Layanan Umum, Publikasi Data dan Informasi Publik, serta Rencana Kebutuhan BMN dan Pengelolaannya belum memiliki realisasi karena jadwal pelaksanaannya direncanakan pada semester II dan menunggu pemenuhan persyaratan administrasi maupun kebutuhan operasional. Dengan pengendalian pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara berkala, sisa anggaran akan direalisasikan pada Triwulan III dan Triwulan IV sehingga target fisik, keuangan, dan keluaran kegiatan Tahun Anggaran 2026 diharapkan dapat tercapai secara optimal sesuai rencana.

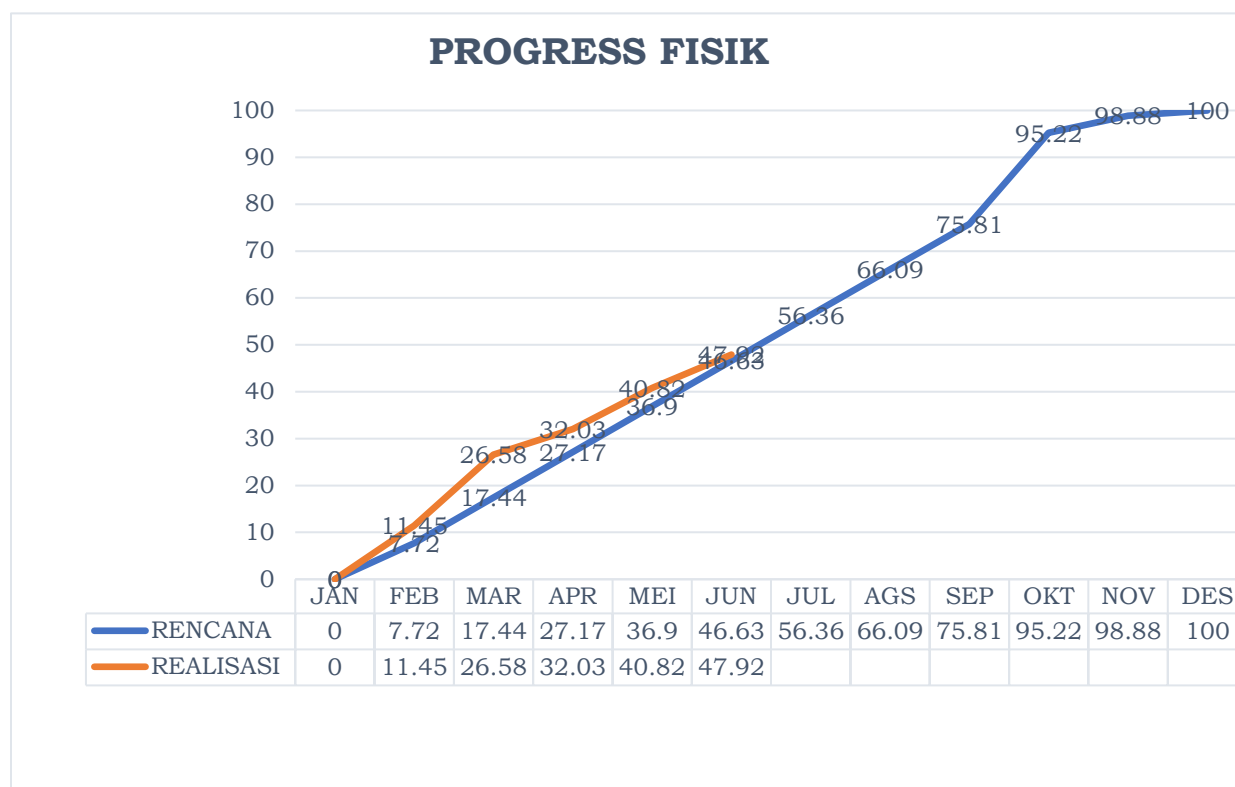
**Gambar 2.5 Grafik Realisasi Keuangan Triwulan II BP3KP Sulawesi III
DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan**



Berdasarkan gambar 2.5 Berdasarkan Grafik Progres Keuangan Triwulan II, realisasi keuangan hingga bulan Juni mencapai 43,69%, melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 41,63%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan berjalan sesuai rencana, terutama melalui percepatan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan sinkronisasi penyelenggaraan perumahan perkotaan, verifikasi bantuan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan, pengendalian program, serta fasilitasi pembiayaan perumahan yang telah memenuhi tahapan pelaksanaan dan administrasi pembayaran. Meskipun demikian, masih terdapat sebagian anggaran yang belum terserap karena beberapa kegiatan masih berada pada tahap koordinasi lintas instansi, pengumpulan data lapangan, penyusunan rekomendasi kebijakan, serta pelaksanaan perjalanan dinas yang disesuaikan dengan jadwal kegiatan. Selain itu, paket Layanan Umum, Publikasi Data dan Informasi Publik, serta Rencana

Kebutuhan BMN dan Pengelolaannya belum direalisasikan karena pelaksanaannya dijadwalkan pada semester II dan menunggu pemenuhan persyaratan administrasi serta kebutuhan operasional. Dengan pengendalian dan monitoring yang dilakukan secara berkala, sisa anggaran akan direalisasikan pada Triwulan III dan Triwulan IV sehingga target penyerapan anggaran dan pencapaian indikator kinerja Tahun Anggaran 2026 diharapkan dapat tercapai secara optimal.

**Gambar 2.6 Grafik Realisasi Fisik Triwulan II BP3KP Sulawesi III DIPA
Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan**



Berdasarkan Gambar 2.6 Grafik Progres Fisik Triwulan II, realisasi fisik hingga bulan Juni mencapai 47,92%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 46,63%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pada Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan berjalan sesuai bahkan sedikit lebih cepat dari rencana yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini didukung oleh percepatan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan sinkronisasi penyelenggaraan perumahan perkotaan, verifikasi bantuan pembangunan dan

peningkatan kualitas perumahan, pengendalian program, serta fasilitasi pembiayaan perumahan yang telah memasuki tahapan penyelesaian sesuai jadwal. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kegiatan yang belum mencapai realisasi fisik optimal karena masih berada pada tahap koordinasi lintas sektor, pengumpulan dan verifikasi data lapangan, penyusunan rekomendasi kebijakan, serta pelaksanaan perjalanan dinas yang disesuaikan dengan jadwal kegiatan. Di samping itu, kegiatan Layanan Umum, Publikasi Data dan Informasi Publik, serta Rencana Kebutuhan BMN dan Pengelolaannya belum menunjukkan realisasi fisik karena pelaksanaannya dijadwalkan pada semester II sesuai rencana kerja. Dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala serta penguatan koordinasi antarunit kerja, sisa target fisik akan diselesaikan pada Triwulan III dan Triwulan IV sehingga seluruh indikator kinerja dan target keluaran Tahun Anggaran 2026 dapat tercapai secara optimal.



**Tabel 2.18 Capaian Target Kinerja Triwulan II BP3KP Sulawesi III Direktorat Jenderal Perumahan
Perdesaan Tahun Anggaran 2026**

SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	TARGET PK AWAL	SATUAN	CAPAIAN TARGET TRIWULAN II		KETERANGAN
			TARGET	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di perdesaan					
7660.ABF.007.101.A Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	1	Rekomendasi Kebijakan	42,16	0	Belum ada realisasi keuangan
7660.FAE.004.101.A Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	1	Laporan	42,16	0	Belum ada realisasi keuangan



Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan					
7660.ABF.008.101.A Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	1	Rekomendasi Kebijakan	42,16	70,85	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa
Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan					
7660.ABF.009.102.A Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1	Rekomendasi Kebijakan	42,16	50,99	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa
7660.BMA.001.100.A Jumlah Dokumen Data dan Informasi	1	Dokumen	42,16	0	Belum ada realisasi keuangan

Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan					
7660.FAE.001.100.A Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	3	Laporan	42,16	0	Kegiatan 7660.FAE.001.100.A sudah tidak ada pada DIPA Revisi 5
Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di wilayah perdesaan					
7660.CBR.001.100.A Jumlah Dokumen Dukungan Teknis Penyiapan Lahan dan Perizinan Perumahan Perdesaan	1	Dokumen	42,16	0	Kegiatan 7660.CBR.001.100.A sudah tidak ada pada DIPA Revisi 5
7660.CBR.002.100.A Jumlah Dokumen Dukungan Teknis Penghunian Perumahan Pedesaan	1	Dokumen	42,16	0	Kegiatan 7660.CBR.002.100.A sudah tidak ada pada DIPA Revisi 5
Meningkatnya akses rumah tangga yang terfasilitasi pembiayaan perumahan di wilayah perdesaan					

7660.PEA.001.100.A Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan Perdesaan	1	Kegiatan	42,16	0	Kegiatan 7660.PEA.001.100.A sudah tidak ada pada DIPA Revisi 5
Program Dukungan Manajemen					
Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan					
7675.EBA.962.100.A Jumlah Layanan Umum	3	Layanan	42,16	0	Belum ada realisasi keuangan
Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan					
7675.EBA.963.101.A Jumlah Layanan Data dan Informasi	1	Layanan	42,16	0	Belum ada realisasi keuangan



Berdasarkan table 2.18 Berdasarkan capaian kinerja Triwulan II, pelaksanaan kegiatan pada Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan menunjukkan hasil yang bervariasi. Indikator Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan telah melampaui target Triwulan II dengan capaian 65,85% dari target 42,16%, sedangkan Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan mencapai 50,99%, juga melampaui target yang telah ditetapkan. Keberhasilan tersebut didukung oleh percepatan pelaksanaan kegiatan koordinasi, verifikasi lapangan, penyusunan rekomendasi kebijakan, serta pelaksanaan perjalanan dinas sesuai jadwal kerja. Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang belum menunjukkan realisasi karena kegiatan masih berada pada tahap persiapan pelaksanaan, penjadwalan kegiatan pada semester II, atau belum memenuhi persyaratan administrasi untuk pencairan anggaran. Selain itu, beberapa kegiatan seperti 7660.FAE.001.100.A, 7660.CBR.001.100.A, 7660.CBR.002.100.A, dan 7660.PEA.001.100.A sudah tidak lagi tercantum pada DIPA Revisi 5, sehingga tidak memiliki target maupun realisasi pada Triwulan II. Sementara itu, kegiatan dukungan manajemen berupa Layanan Umum dan Layanan Data dan Informasi juga belum memiliki realisasi keuangan karena pelaksanaannya dijadwalkan pada semester II sesuai rencana kerja. Dengan pengendalian dan monitoring yang dilakukan secara berkala, sisa kegiatan dan anggaran yang masih tersedia akan direalisasikan pada Triwulan III dan Triwulan IV sehingga target kinerja, baik dari aspek fisik, keuangan, maupun keluaran kegiatan, dapat tercapai secara optimal pada akhir Tahun Anggaran 2026.



**Tabel 2.19 Progres Fisik dan Keuangan Triwulan II BP3KP Sulawesi III Direktorat Jenderal Perumahan
Perdesaan Tahun Anggaran 2026**

No.	Nama Paket	Pagu RKAKL (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Progres Fisik Per Bulan											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	7660.ABF.007.101.A Verifikasi Usulan Bantuan Pembangunan Perumahan Perdesaan oleh BP3KP Sulawesi III	7.431.000	0	0	0	0	0	0	0						
2	7660.ABF.008.101.A Penyusunan Perencanaan Teknis Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	34.945.000	23.012.340	0	47,58	70,85	70,85	70,85	70,85						
3	7660.ABF.009.102.A Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	80.045.000	40.817.824	0	28,02	44,64	44,64	55,99	55,99						
4	7660.BMA.001.100.A Pengelolaan Data dan	30.020.000	0	0	0	0	0	0	0						



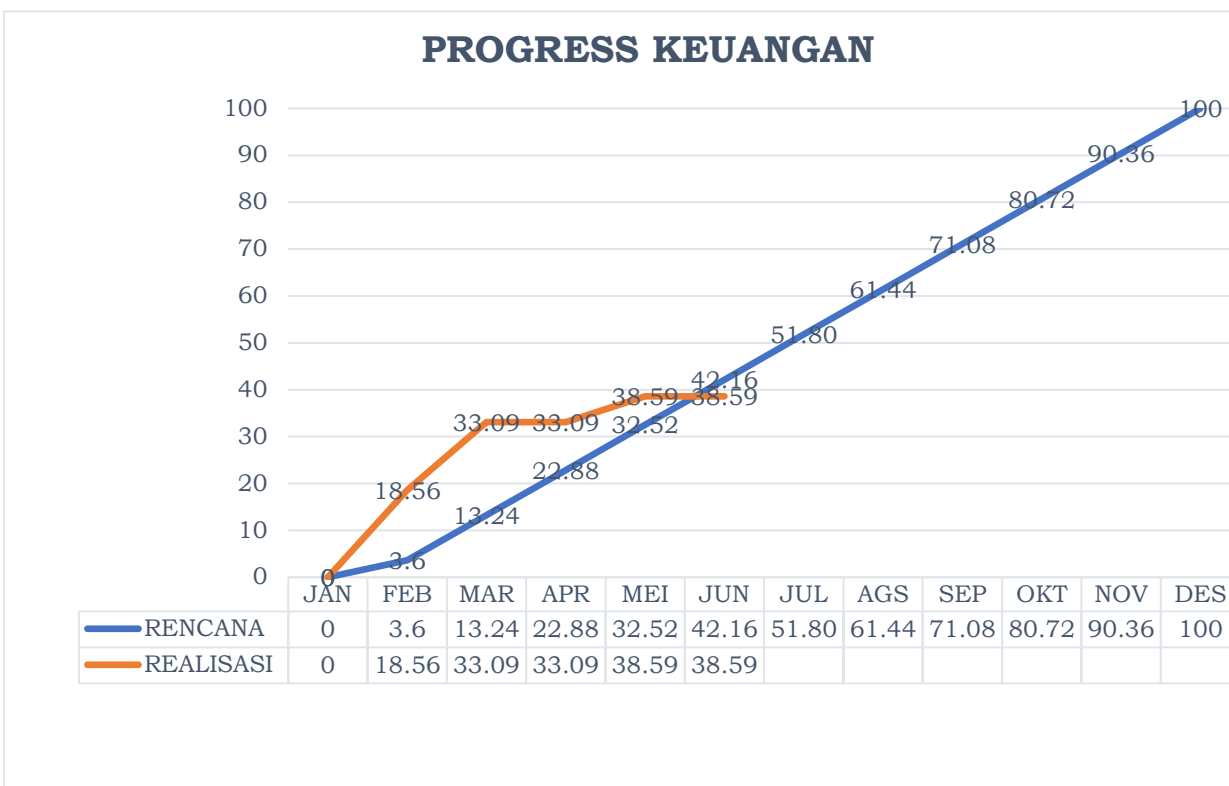
	Informasi Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan														
5	7660.FAE.004.101.A Fasilitasi Pengalihan Aset Pembangunan Perumahan Perdesaan oleh BP3KP Sulawesi III	21.904.000	0	0	0	0	0	0	0						
6	7675.EBA.962.100.A Layanan Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	17.156.000	0	0	0	0	0	0	0						
11	7675.EBA.963.101.A Pengelolaan Data dan Informasi serta Publikasi Balai P3KP Sulawesi III	9.333.000	0	0	0	0	0	0	0						
Total		165.424.000	63.830.164	0	23,61	36,57	36.57	42.06	42.06						

Berdasarkan table 2.19 Progres Fisik dan Keuangan Triwulan II, realisasi anggaran pada kegiatan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan mencapai Rp63.830.164 dari total pagu anggaran sebesar Rp165.424.000, dengan capaian progres fisik kumulatif sebesar 42,06% hingga akhir Triwulan II. Capaian tersebut didukung oleh terlaksananya kegiatan Penyusunan Perencanaan Teknis Peningkatan Kualitas



Perumahan Perdesaan yang telah mencapai progres fisik 70,85%, serta Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan dengan progres 55,99%, sehingga realisasi keuangan pada kedua kegiatan dapat berjalan sesuai tahapan pelaksanaan. Keberhasilan tersebut merupakan hasil dari percepatan koordinasi dengan pemerintah daerah, pelaksanaan verifikasi lapangan, penyusunan dokumen teknis, dan monitoring kegiatan yang dilakukan secara berkala. Sementara itu, masih terdapat beberapa paket kegiatan yang belum menunjukkan realisasi anggaran, antara lain Verifikasi Usulan Bantuan Pembangunan Perumahan Perdesaan, Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, Fasilitasi Pengalihan Aset Pembangunan Perumahan Perdesaan, Layanan Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, serta Pengelolaan Data dan Informasi serta Publikasi Balai P3KP Sulawesi III, karena pelaksanaannya dijadwalkan pada semester II, masih dalam tahap persiapan, atau menunggu penyelesaian proses administrasi dan koordinasi sebelum anggaran dapat direalisasikan. Dengan pengendalian pelaksanaan kegiatan secara berkelanjutan, sisa anggaran akan direalisasikan pada Triwulan III dan Triwulan IV sehingga target fisik, keuangan, dan keluaran kegiatan Tahun Anggaran 2026 diharapkan dapat tercapai secara optimal.

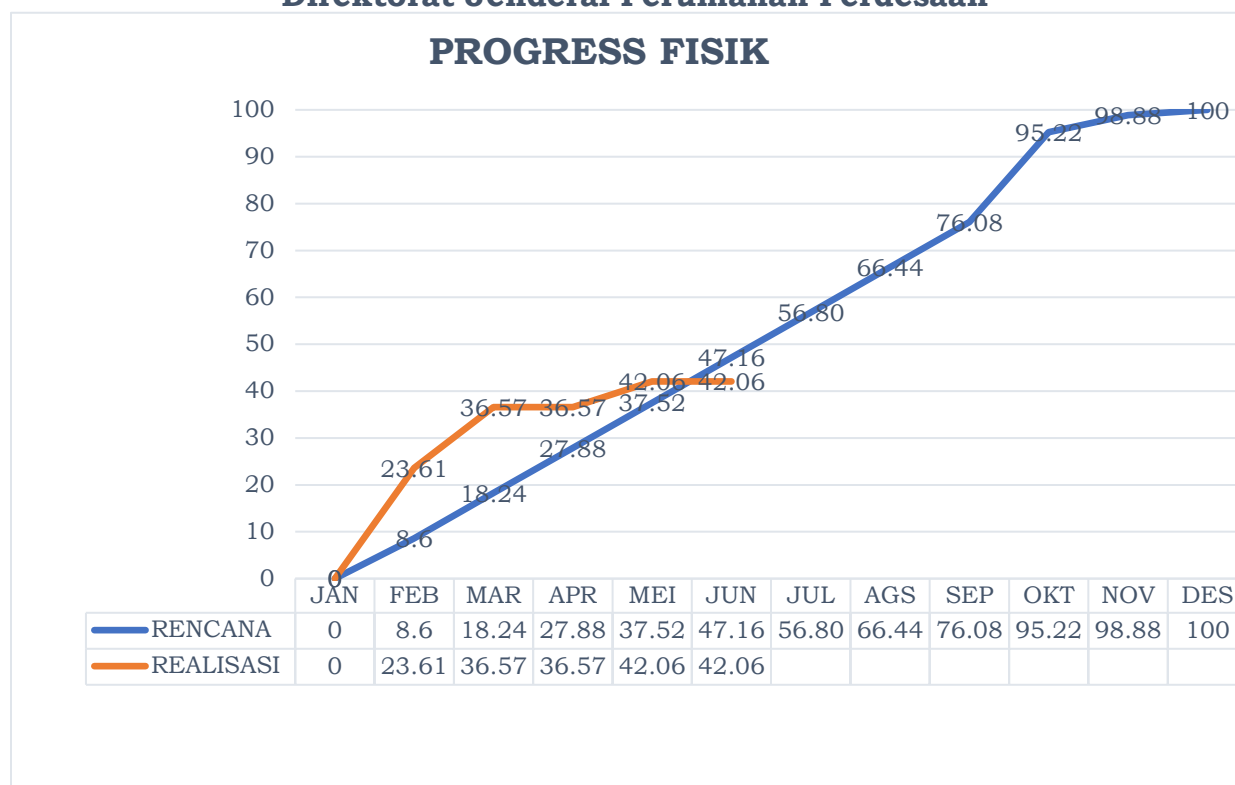
**Gambar 2.7 Grafik Realisasi Keuangan Triwulan II BP3KP Sulawesi III
DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan**



Berdasarkan gambar 2.7 Berdasarkan Grafik Progres Keuangan Triwulan II, realisasi keuangan hingga bulan Juni mencapai 38,59%, masih sedikit di bawah target yang ditetapkan sebesar 42,16%. Meskipun demikian, capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian kegiatan prioritas telah terlaksana dengan baik, terutama pada Penyusunan Perencanaan Teknis Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan dan Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan, yang memberikan kontribusi terbesar terhadap realisasi anggaran. Keberhasilan ini didukung oleh terlaksananya koordinasi, verifikasi lapangan, penyusunan dokumen teknis, serta pelaksanaan perjalanan dinas sesuai tahapan kegiatan. Adapun belum tercapainya target penyerapan anggaran disebabkan oleh beberapa paket kegiatan yang belum memasuki tahap pelaksanaan atau masih dalam proses persiapan administrasi, seperti Verifikasi Usulan Bantuan Pembangunan Perumahan Perdesaan, Pengelolaan Data dan Informasi, Fasilitasi Pengalihan

Aset Pembangunan Perumahan Perdesaan, Layanan Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, serta Pengelolaan Data dan Informasi serta Publikasi Balai P3KP Sulawesi III, sehingga belum terdapat realisasi keuangan pada Triwulan II. Selain itu, beberapa kegiatan menunggu penyelesaian koordinasi dengan pemerintah daerah dan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban sebelum pembayaran dapat dilakukan. Dengan percepatan pelaksanaan kegiatan dan penguatan monitoring pada semester II, sisa anggaran diharapkan dapat direalisasikan sesuai jadwal sehingga target penyerapan keuangan dan indikator kinerja Tahun Anggaran 2026 dapat tercapai secara optimal.

**Gambar 2.8 Grafik Realisasi Fisik Triwulan II BP3KP Sulawesi III DIPA
Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan**



Berdasarkan Gambar 2.8 Berdasarkan Grafik Progres Fisik Triwulan II, realisasi fisik hingga bulan Juni mencapai 42,06%, sedikit di bawah target yang direncanakan sebesar 47,16%. Meskipun demikian, pelaksanaan beberapa kegiatan strategis telah menunjukkan kemajuan yang baik, terutama pada

Penyusunan Perencanaan Teknis Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan dan Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan, yang menjadi kontributor utama terhadap capaian fisik pada Triwulan II. Keberhasilan tersebut didukung oleh terlaksananya koordinasi dengan pemerintah daerah, pelaksanaan verifikasi lapangan, penyusunan dokumen teknis, serta monitoring dan evaluasi secara berkala sehingga sebagian target kegiatan dapat dicapai sesuai jadwal. Adapun belum tercapainya target fisik disebabkan oleh beberapa kegiatan yang masih berada pada tahap persiapan, penjadwalan pelaksanaan, atau menunggu proses koordinasi dan penyelesaian administrasi, seperti Verifikasi Usulan Bantuan Pembangunan Perumahan Perdesaan, Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, Fasilitasi Pengalihan Aset Pembangunan Perumahan Perdesaan, Layanan Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, serta Pengelolaan Data dan Informasi serta Publikasi Balai P3KP Sulawesi III yang belum menunjukkan realisasi fisik pada Triwulan II. Dengan percepatan pelaksanaan kegiatan, penguatan koordinasi, dan pengendalian secara berkelanjutan pada semester II, sisa target fisik diharapkan dapat diselesaikan sesuai rencana sehingga seluruh indikator kinerja dan target keluaran Tahun Anggaran 2026 dapat tercapai secara optimal.



Tabel 2.20 Capaian Target Kinerja Triwulan II BP3KP Sulawesi III Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun Anggaran 2026

SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	TARGET PK AWAL	SATUAN	CAPAIAN TARGET TRIWULAN II		KETERANGAN
			TARGET	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel					
7662.ABF.004 Jumlah Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi, dan Akuntabilitas	1	Rekomendasi / Laporan	45,46	37,10	- Belanja Bahan - Belanja Jasa profesi
Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman					
7662.ABF.005	1	Rekomendasi / Laporan	45,46	76,27	- Belanja Bahan

Jumlah Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi					- Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Belanja Jasa Profesi - Belanja Perjalanan Dinas Biasa
Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemograman, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman					
7662.FAE.001 Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	1	Laporan	45,46	0	Belum ada realisasi keuangan

Berdasarkan table 2.20 Pada Triwulan II, indikator kinerja Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko memiliki target kumulatif sebesar 45,46%, namun realisasi keuangan masih 0% karena kegiatan pemantauan dan evaluasi belum memasuki tahapan pelaksanaan yang mengakibatkan belum dilaksanakannya belanja bahan, belanja jasa, maupun perjalanan dinas sesuai rencana. Kondisi ini disebabkan oleh penyesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan, proses persiapan administrasi, serta menunggu kesiapan dokumen dan waktu yang tepat untuk pelaksanaan monitoring agar hasil evaluasi lebih optimal. Meskipun belum terdapat penyerapan anggaran pada Triwulan II, target kinerja tahunan masih berpeluang tercapai karena kegiatan telah direncanakan untuk dilaksanakan pada semester II sesuai dengan tahapan pelaksanaan program. Dengan demikian, keberhasilan pencapaian target akan sangat bergantung pada



percepatan pelaksanaan kegiatan, penyelesaian administrasi, serta pengendalian pelaksanaan agar seluruh output pemantauan dan evaluasi dapat diselesaikan sesuai target yang telah ditetapkan pada akhir tahun anggaran.

Tabel 2.21 Progres Fisik dan Keuangan Triwulan II BP3KP Sulawesi III Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun Anggaran 2026

No.	Nama Paket	Pagu RKAKL (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Progres Fisik Per Bulan											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	7662.ABF.004.100.D Pembangunan Zona Integritas Balai P3KP Sulawesi III	18.662.000	5.990.193	0	0	0	0	0	37,10						
2	7662.ABF.005.100.E Penerapan Manajemen Risiko Balai P3KP Sulawesi III	59.995.000	30.410.075	0	0	0	0	8,22	76,27						
3	7662.ABF.005.101.E Pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Balai P3KP Sulawesi III	17.325.000	0	0	0	0	0	0	0						

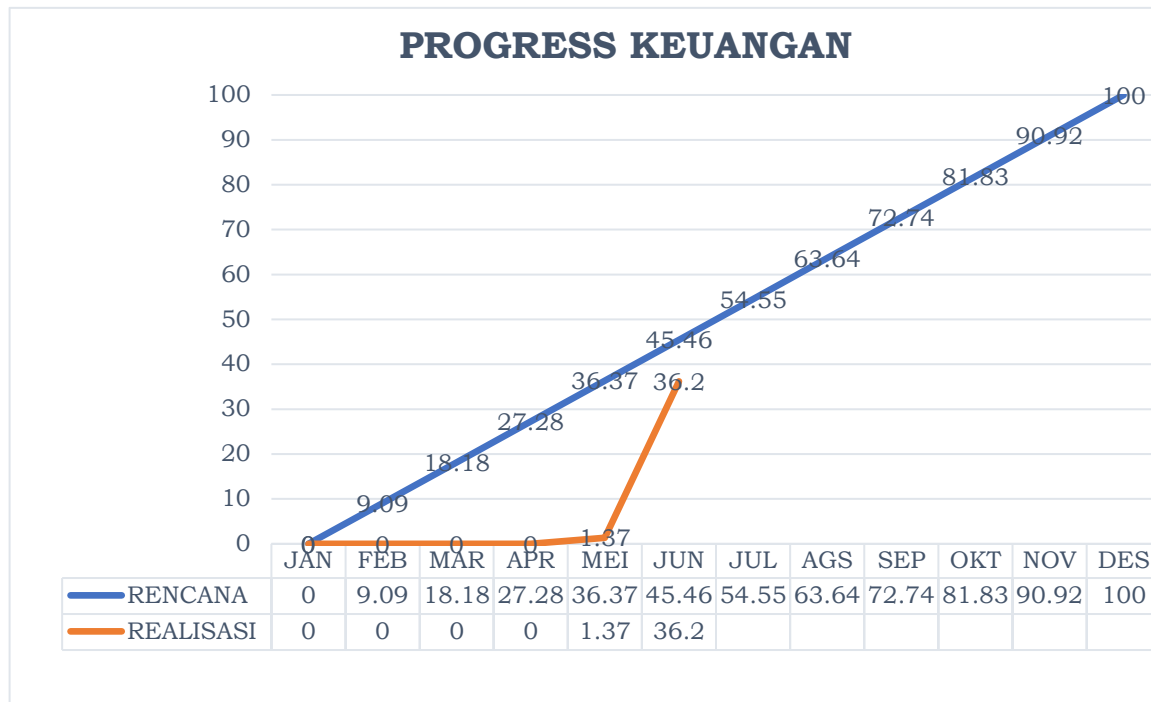


4	7662.FAE.001.100.B Pemantauan Dan Pendampingan Tata Kelola Dan Pengendalian Risiko	21.897.000	0	0	0	0	0	0	0						
Total		164.706.000	0	0	0	0	0	3,49	39,25						

Berdasarkan Tabel 2.21 diatas data realisasi sampai bulan Juli, penyerapan anggaran pada kegiatan Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko masih relatif rendah karena pelaksanaan kegiatan dilakukan secara bertahap sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Anggaran yang telah terserap berasal dari kegiatan Pembangunan Zona Integritas Balai P3KP Sulawesi III dan Penerapan Manajemen Risiko Balai P3KP Sulawesi III, yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan rapat koordinasi, penyusunan dokumen, serta kegiatan pendampingan sehingga progres fisik masing-masing telah mencapai 37,10% dan 76,27%. Sementara itu, kegiatan Pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dan Pemantauan dan Pendampingan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko belum menunjukkan penyerapan anggaran karena masih berada pada tahap persiapan administrasi, penyusunan jadwal, serta menunggu pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja semester berikutnya. Dengan demikian, rendahnya realisasi anggaran bukan disebabkan oleh kendala pelaksanaan, melainkan karena karakteristik jadwal kegiatan yang memang akan terealisasi pada periode berikutnya sehingga diharapkan penyerapan anggaran dan capaian fisik akan meningkat pada Triwulan III dan IV.



**Gambar 2.9 Grafik Realisasi Keuangan Triwulan II BP3KP Sulawesi III
DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko**



Berdasarkan gambar 2.9 Berdasarkan grafik Progress Keuangan, hingga bulan Juni realisasi anggaran mencapai 36,20%, masih berada di bawah rencana kumulatif sebesar 45,46%, sehingga terdapat deviasi sekitar 9,26%. Penyerapan anggaran yang telah terealisasi terutama digunakan untuk mendukung kegiatan yang telah memasuki tahap pelaksanaan, seperti rapat koordinasi, penyusunan dokumen, perjalanan dinas, serta pembayaran belanja operasional yang telah memenuhi persyaratan administrasi. Sementara itu, anggaran yang belum terserap disebabkan masih adanya beberapa kegiatan yang berada pada tahap persiapan, proses pengadaan, penyelesaian administrasi, atau dijadwalkan pelaksanaannya pada semester II. Meskipun demikian, progres pelaksanaan kegiatan tetap berjalan sesuai rencana sehingga penyerapan anggaran diproyeksikan meningkat pada Triwulan III dan IV seiring terlaksananya seluruh tahapan kegiatan yang telah direncanakan.



**Gambar 2.10 Grafik Realisasi Fisik Triwulan II BP3KP Sulawesi III DIPA
Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.**



Berdasarkan Gambar 2.10 Berdasarkan grafik Progress Fisik, hingga bulan Juni realisasi fisik mencapai 39,25%, masih berada di bawah target kumulatif sebesar 50,46%, sehingga terdapat deviasi sebesar 11,21%. Capaian fisik yang telah terealisasi menunjukkan bahwa sebagian kegiatan telah memasuki tahap pelaksanaan, seperti penyusunan dokumen, koordinasi, pendampingan, dan kegiatan administrasi yang menjadi prasyarat pelaksanaan program. Adapun progres fisik yang belum tercapai disebabkan masih adanya beberapa kegiatan yang berada pada tahap persiapan, penjadwalan, koordinasi lintas pihak, serta menunggu penyelesaian proses administrasi dan pelaksanaan pada semester II. Meskipun demikian, seluruh kegiatan tetap berjalan sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan sehingga percepatan pelaksanaan pada Triwulan III dan IV diharapkan dapat meningkatkan capaian fisik hingga mencapai target akhir tahun.



2.4 Permasalahan/ Faktor Keberhasilan

2.4.1 Permasalahan pelaksanaan kegiatan BP3KP Sulawesi III

Secara umum permasalahan pelaksanaan kegiatan selama Triwulan I yang dihadapi oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III adalah sebagai berikut:

1. Penghapusan data Aset lama belum dilakukan sehingga menjadi temuan;
2. Perencanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi, dan pengawasan berkala di kegiatan penanganan perumahan dan kawasan permukiman kumuh berjalan kurang optimal;
3. Pemantauan updating data readiness criteria kekumuhan dan status dokumen pengembangan RP3KP di 41 Kab/Kota kegiatan berjalan kurang optimal;
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan fisik penyelenggaraan bantuan perumahan (BSPS, PSU, Rusun) belum berjalan optimal;
5. Ketidakpatuhan pegawai terhadap jam kerja dan peraturan kedisiplinan pegawai yang berlaku;
6. Sasaran penerima program BSPS dan bantuan penanganan kawasan kumuh yang kurang tepat karena tidak sesuai dengan kriteria penerima BSPS (SE. No. 04/TKPR/2025);
7. Proses pengusulan bantuan perumahan oleh Dinas Teknis Pemda yang terkendala karena keterbatasan SDM dan pemahaman regulasi;
8. Pelaksanaan verifikasi usulan bantuan perumahan mengalami hambatan;
9. Risiko terjadinya kesalahan administrasi serta keterlambatan dalam pengelolaan keuangan dan perbendaharaan;
10. Kegiatan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman di Balai yang belum optimal terlaksana.



2.4.2 Permasalahan pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan

Secara umum permasalahan pelaksanaan kegiatan selama Triwulan III yang dihadapi oleh Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:

1. Verifikasi Usulan Kemenkes, sangat sulit mencari pengganti karena data best PIC Kemenkes terbatas, diarahkan ke Puskesmas setempat tapi datanya juga kurang jelas;
2. Anggaran Bantuan Peningkatan Kualitas DIPA Perdesaan 1.500 namun hingga saat ini Alokasi Instruksi Verifikasi sudah mencapai 1.727 CPB, selisih 227 CPB;
3. Terjadi perubahan jadwal dari timeline yang sudah ditetapkan dari jadwal Proses Tender paket Pelaksanaan fisik dan Supervisi awal untuk kegiatan penanganan kawasan kumuh;
4. Menunggu Hasil Review DED Rumah Susun Kejati Provinsi Sulawesi Selatan.

2.4.3 Permasalahan pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara

Secara umum permasalahan pelaksanaan kegiatan selama Triwulan III yang dihadapi oleh Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut:

1. Masih banyaknya NIK & KK Penerima Bantuan tidak sesuai dalam pengisian Lampiran II Hasil Verifikasi;
2. Kendala Material Lokal di Kota Kendari dan Kabupaten Konawe, Quarry material Pasir terdekat sedang dilakukan penutupan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, dikarenakan status quarry tersebut adalah tambang ilegal;
3. Terjadi keterlambatan penerbitan buku rekening yang menyebabkan tertundanya proses pemindahan dana bantuan dari rekening Giro Satker ke Rekening Penerima Bantuan sebanyak 31 orang. Permasalahan telah selesai ditindaklanjuti dengan PPK menerbitkan



Surat ke Bank Penyalur Dana Bantuan. Permasalahan telah selesai setelah terbitnya buku rekening penerima bantuan;

4. Terdapat kekurangan tenaga kerja loka di Desa Pasampang, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara. Telah selesai ditindaklanjuti melalui gotong royong warga.



BAB III

PENUTUP

3.1 Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, adapun upaya-upaya untuk meningkatkan capaian kinerja berdasarkan hasil pemetaan permasalahan yaitu:

3.1.1 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III

Adapun upaya-upaya untuk meningkatkan capaian kinerja pada periode selanjutnya berdasarkan hasil pemetaan permasalahan/potensi capaian yaitu:

1. Melakukan Koordinasi dengan pihak pemda, tim Biro BMN Sekjen dan mengajukan permintaan dokumen aset lama di BP3KP Jawa I;
2. Kasie Wil 1 melakukan berkoordinasi dengan Kabalai dan Direktorat Teknis Wilayah III (Dit. SSPKP, Dit. Kawasan Permukiman, dan Dit. TKPR) untuk pelaporan kegiatan yang berjalan optimal;
3. Melakukan penyusunan Laporan/Dokumentasi kegiatan ditindaklanjuti sebagai catatan evaluasi agar pelaksanaan kegiatan Satker P2KP Provinsi Sulsel dan Satker P2KP Provinsi Sultra terkendali, terawasi dengan baik, dan berjalan optimal;
4. Melakukan koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan fisik penyelenggaraan bantuan perumahan;
5. Pemberian Sanksi/Punishment berupa Penurunan SKP dan Surat Teguran bagi ketidakpatuhan pegawai terhadap jam kerja;
6. Melakukan Pembinaan teknis berupa sosialisasi bahan ajar/modul terbaru kepada fasilitator BPS untuk memasifkan sosialisasi peningkatan pemahaman masyarakat dampingan agar masyarakat memahami statusnya dan syaratnya sebagai PB BPS;



7. Meningkatkan Intensitas Koordinasi antar Balai-Satker terkait program BSPS dan penanganan kawasan kumuh secara menyeluruh dari tahap pengusulan, verifikasi, pemantauan progres, sampai bantuan telah diserahkan kepada masyarakat/Pemda penerima manfaat;
8. Sinkronisasi data Dukcapil dengan Dinas Sosial kab/kota serta bekerjasama dengan Pemda dan pihak terkait lainnya;
9. Melakukan rapat daring untuk memeriksa hasil verifikasi CPB oleh fasilitator lapangan;
10. Melakukan rapat internal pembahasan hasil verifikasi administrasi dan teknis usulan bantuan perumahan;
11. Melakukan Penguatan pengendalian internal melalui verifikasi berjenjang atas dokumen dan tahapan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan;
12. Melaksanakan sosialisasi dan edukasi penerapan UU No. 08 Tahun 1999 dan pedoman teknis terkait kepada SDM Program Benar PKP.

3.1.2 Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, adapun upaya-upaya untuk meningkatkan capaian kinerja pada triwulan selanjutnya berdasarkan hasil pemetaan permasalahan/potensi capaian yaitu:

1. Melakukan Koordinasi dengan pusat terkait data pengganti CPB yang gugur, dan intens koordinasi dengan PIC kemenkes;
2. Melakukan koordinasi dengan pusat terkait penambahan anggaran;
3. Melakukan Koordinasi dengan Tim Pokja terkait jadwal Review Dokumen dalam rangka percepatan Tender Paket Fisik dan Supervisi;
4. Mengupayakan percepatan konsultan perencanaan agar segera menyelesaikan Review DED.



3.1.3 Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, adapun upaya-upaya untuk meningkatkan capaian kinerja pada triwulan selanjutnya berdasarkan hasil pemetaan permasalahan/potensi capaian yaitu:

Memberikan arahan ke Kordinator Kabupaten dan Koordinator Kota untuk secepatnya memperbaiki data NIK & KK Penerima Bantuan yang tidak sesuai dalam pengisian Lampiran II Hasil Verifikasi sehingga BAHV dapat dikirim;

Mengarahkan Toko penyedia bahan Bangunan untuk mencari alternatif pengambilan material di lokasi lain, baik dalam Kota Kendari maupun dari kabupaten lainnya.

3.2 Bukti Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan

Adapun bukti tindak lanjut atas permasalahan yang telah dipetakan pada triwulan 1 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Bukti Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan Sebelumnya

TRIWULAN I				TRIWULAN II		
No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Bukti Tindak Lanjut	No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
1.	Perencanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi, dan pengawasan berkala di kegiatan penanganan perumahan dan kawasan permukiman kumuh berjalan kurang optimal.	Kasie Wil 1 berkoordinasi dengan Kabalai dan Direktorat Teknis Wilayah III (Dit. SSPKP, Dit. Kawasan Permukiman, dan Dit. TKPR) untuk pelaporan kegiatan yang berjalan optimal.	1. Laporan Hasil Kegiatan/Rapat (Notulensi/Dokumentasi)	1.	Perencanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi, dan pengawasan berkala di kegiatan penanganan perumahan dan kawasan permukiman kumuh berjalan kurang optimal.	Kasie Wil 1 berkoordinasi dengan Kabalai dan Direktorat Teknis Wilayah III (Dit. SSPKP, Dit. Kawasan Permukiman, dan Dit. TKPR) untuk pelaporan kegiatan yang berjalan optimal.

2.	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan fisik penyelenggaraan bantuan perumahan (BSPS, PSU, Rusun) belum berjalan optimal.	Melakukan koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan fisik penyelenggaraan bantuan perumahan	1. Laporan hasil koordinasi pelaksanaan monev 2. Laporan berkala progres kegiatan fisik.	2	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan fisik penyelenggaraan bantuan perumahan (BSPS, PSU, Rusun) belum berjalan optimal.	Melakukan koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan fisik penyelenggaraan bantuan perumahan
3.	Sasaran penerima program BSPS dan bantuan penanganan kawasan kumuh yang kurang tepat karena tidak sesuai dengan kriteria penerima BSPS (SE. No. 04/TKPR/2025)	Pembinaan teknis berupa sosialisasi bahan ajar/modul terbaru kepada fasilitator BSPS untuk memasifkan sosialisasi peningkatan pemahaman masyarakat dampingan agar masyarakat memahami statusnya dan	1. Tabel data CPB Instruksi Verifikasi di Perkotaan, Perdesaan, dan Pesisir. Tabel data kependudukan Penerima Bantuan yang telah memenuhi kriteria Desil di DTSEN.	3.		

		syaratnya sebagai PB BSPS.				
4.	Pelaksanaan verifikasi usulan bantuan perumahan mengalami hambatan	BSPS: melakukan rapat daring untuk memeriksa hasil verifikasi CPB oleh fasilitator lapangan	Laporan hasil verifikasi CPB BSPS	4.	Pelaksanaan verifikasi usulan bantuan perumahan mengalami hambatan	Melakukan rapat daring untuk memeriksa hasil verifikasi CPB oleh fasilitator lapangan
5.	Risiko terjadinya kesalahan administrasi serta keterlambatan dalam pengelolaan keuangan dan perbendaharaan	Penguatan pengendalian internal melalui verifikasi berjenjang atas dokumen dan tahapan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan	Laporan Keuangan	5.	Risiko terjadinya kesalahan administrasi serta keterlambatan dalam pengelolaan keuangan dan perbendaharaan	Peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan
6.	Kegiatan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman di Balai yang belum optimal terlaksana.	Melaksanakan sosialisasi dan edukasi penerapan UU No. 08 Tahun 1999 dan pedoman	Laporan Bulan Januari Klinik PKP BP3KP Sulawesi III, Laporan Bulan Februari Klinik PKP BP3KP Sulawesi III	6.	Kegiatan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman di Balai yang belum optimal terlaksana.	Telah dilakukan kegiatan layanan bulanan berupa Laporan Bulanan Klinik PKP Bulan April, Mei, Juni tahun 2026 Laporan Bulanan Klinik PKP Bulan April

		teknis terkait kepada SDM Program Benar PKP				2026, Laporan Klinik PKP April, Laporan Klinik PKP Mei, Laporan Klinik PKP Juni
--	--	---	--	--	--	--

LAMPIRAN

PROFIL KEGIATAN TA.2026

**Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan
dan Kawasan Permukiman Sulawesi III**



Profil Sumber Daya Manusia

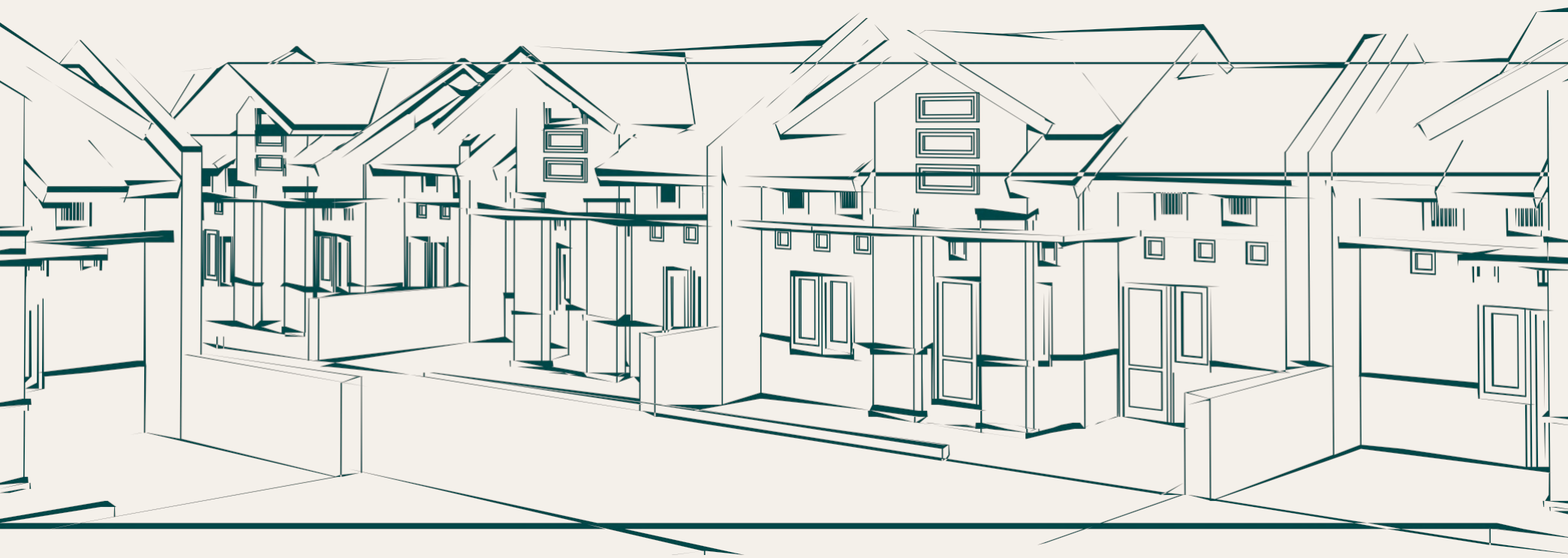
Progres Anggaran BP3KP Sulawesi III TA 2025

**Progres Kegiatan Verifikasi & Monev Program PKP
Tahun 2025**

KOLABORASI CSR & Realisasi FLPP

Layanan Klinik PKP & Pendampingan RP3KP

Pendataan Program 3 Juta Rumah



PROFIL SUMBER DAYA MANUSIA



PROFIL SUMBER DAYA MANUSIA

STATUS	Bala	Satker Sulsel	Satker Sultra
PNS	13	11	9
CPNS	18	12	7
PPPK	26	19	17
JUMLAH	57	42	33

JENIS KELAMIN	Balai	Satker Sulsel	Satker Sultra
LAKI-LAKI	35	23	21
PEREMPUAN	22	19	12
JUMLAH	57	42	33

RENTANG UMUR	Balai	Satker Sulsel	Satker Sultra
<30	19	12	9
31-40	23	19	15
41-50	10	6	6
>50	5	5	3
Total	57	42	33

JENIS JABATAN	Balai	Satker Sulsel	Satker Sultra
FUNGSIONAL	36	29	21
STRUKTURAL	4	-	-
PELAKSANA	17	13	12
JUMLAH	57	42	33

KOMPETENSI	Balai	Satker Sulsel	Satker Sultra
TEKNIK	36	26	20
NON TEKNIK	21	16	13
JUMLAH	57	42	33

Pendidikan	Balai	Satker Sulsel	Satker Sultra
S2	6	5	3
D4/S1	42	30	23
D3	-	-	1
SLTA	9	7	6
Total	57	42	33

GOLONGAN	Balai	Satker Sulsel	Satker Sultra
IV/b	1	-	-
IV/a	3	-	1
III/d	3	4	2
III/c	3	2	1
III/b	2	5	4
III/a	19	12	8
IX	17	12	11
V	9	7	6
JUMLAH	57	42	33



STRUKTUR ORGANISASI

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sulawesi III

Tahun 2025



Bakhtiar, S.ST., M.S.P

KEPALA BALAI



Ratna Juwita, S.T., M.M.G., M.Eng

KEPALA SUBBAGIAN UMUM
DAN TATA USAHA



Andi Dwiayu Permatasari Taufan, S.T., M.M

KEPALA SEKSI PELAKSANA
WILAYAH 1



1. St. Hadidjah sultan – Penata kelola penyehatan lingkungan ahli madya
2. Hardyanti ayu amalya – PKP ahli pertama
3. A.Azwar - PKP Ahli Pertama
4. Alfian Asnawi - PKP Ahli Pertama
5. Alfiana Muhsinin – PKBGKP Ahli pertama
6. Aliyah Baida – PKBGKP Ahli perrtama
7. Khumairah Zulqaidah – PKP Ahli pertama

1. A. Syamsul Bachri – Analis perumahan
2. Yuspın - PKP Ahli Muda
3. Ajeng sekar – PKP ahli pertama
4. Muh Agung – PKP Ahli pertama
5. Novia putri – PKP Ahli pertama
6. Tri Haryadi – PKP Ahli pertama
7. Resky Anugrah – PKBGKP ahli pertama

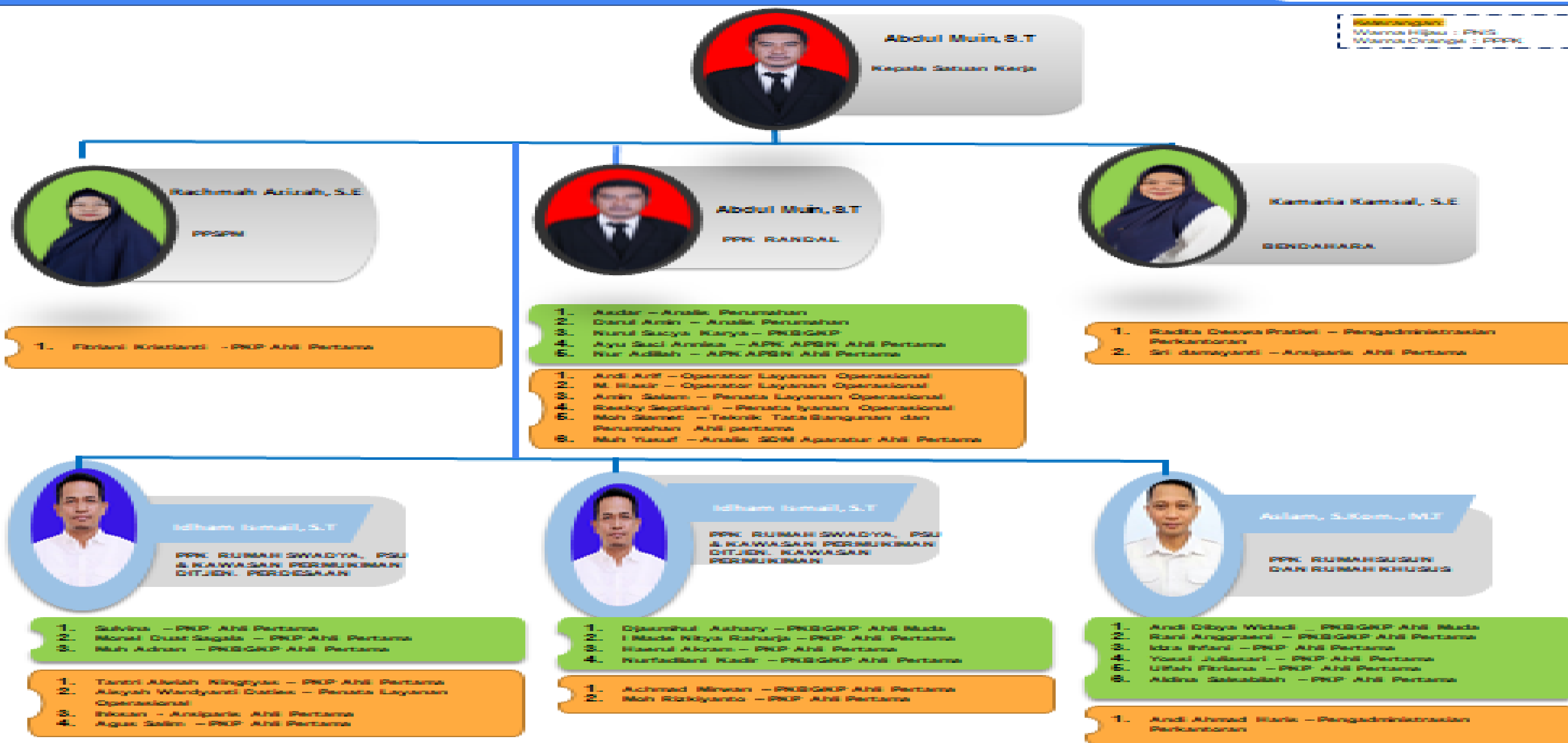
1. Maksi Paiman – PKBGKP Ahli Muda
2. Raden yusran – Penelaah PBJ
3. Syaharullah Yunus – Analis Perumahan
4. Iskandar Ismail – Analis Peruman
5. Alberthin Sirampun – Analis Keuangan
6. Andi Nurmala Dewi – Analis SDM Aparatur Ahli Pertama
7. Aulia Febrianty – Arsiparis ahli pertama
8. Irmansyah – PKP Ah tama
9. Nurul Adlina – APK APBN ahli pertama
10. Faira Nukhalisah – PKP Ahli pertama
11. Rifda Afifah – PKBGKP ahli pertama
12. M. Ilham – PKP ahli pertama
13. Abdul kadir aslam – PKP ahli pertama

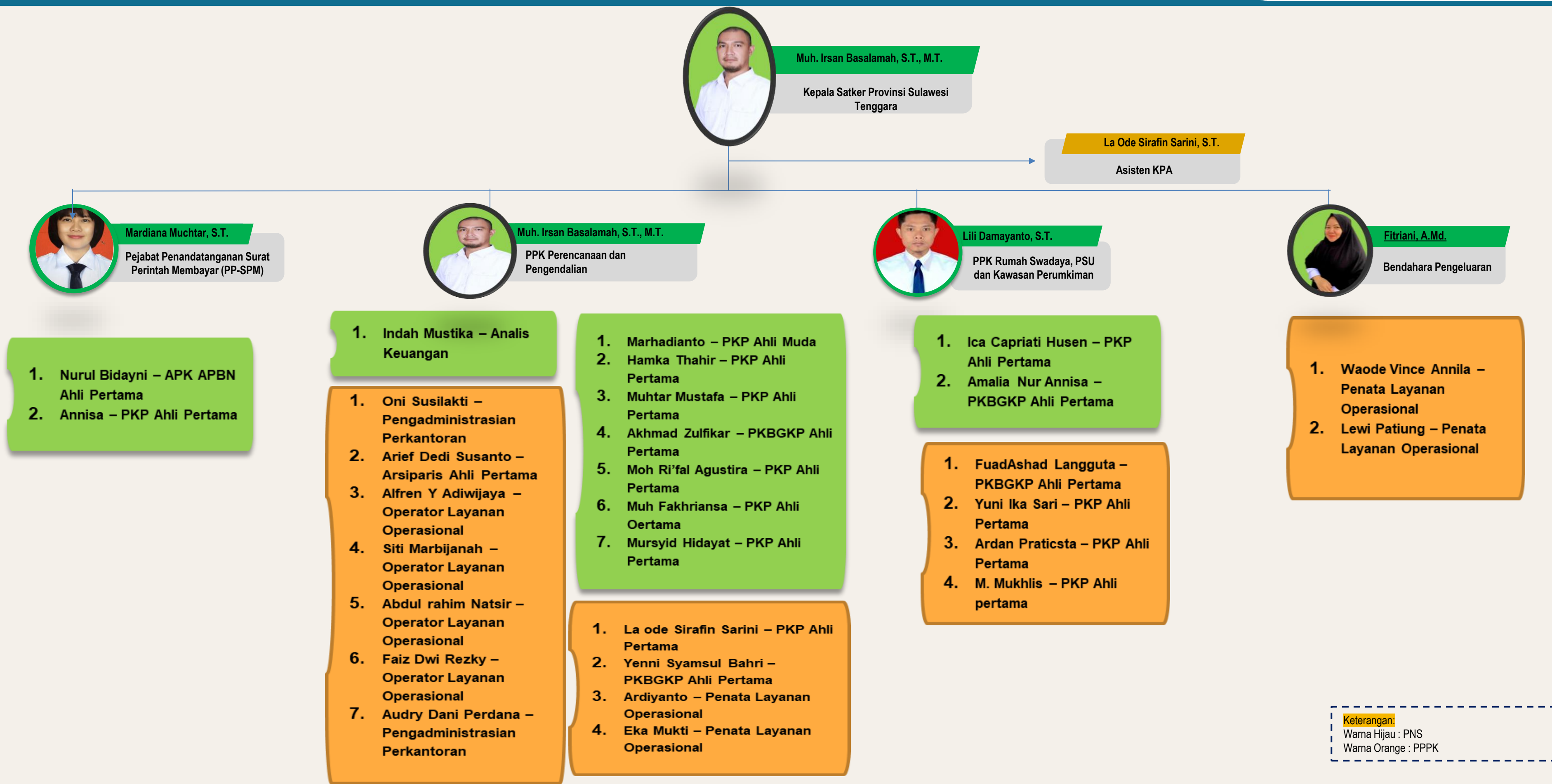
1. Fitri Yusmaniar – Teknik penyehatan lingkungan Ahli pertama
2. Fauziah – PKP Ahli Pertama
3. Ryene Savitri – PKP Ahli Pertama
4. PIK Jasmadi – Arsiparis Ahli pertama
5. Wahyudi Zainal – PKP Ahli pertama
6. Andi Alam Mubarak – Analis SDM Aparatur Ahli Pertama
7. Makmur Kalang – Penata Layanan Operasional
8. Firdaus Patau – PKP Ahli pertama
9. Amiluddin – Pengadministrasian perkantoran
10. Asrul Tisyar – Pengadministrasian Perkantoran
11. Syarifuddin – Pengadministrasian perkantoran
12. Fadlan Hasan – Penata Layanan Operasional
13. Zulfikar – PKP Ahli pertama
14. Irmawan – PKP Ahli Pertama
15. Ismail Machmud – PKP Ahli pertama
16. Abd Abbas – Operator layanan operasional
17. Ismail M – Operator layanan operasional
18. Muh Rezky Alie Riza – Operator Layanan Operasional
19. Zainal Abidin – Operator Layanan Operasional
20. Abrar Mursyid – Operator Layanan Operasional

1. Muhammad Hidayat – PKP Ahli Pertama
2. Nurul Aulia Ridwan – PKBGKP Ahli Pertama

1. Andi Imam Akbar – PKP Ahli Pertama
2. Sitti Husniah – PKP Ahli Pertama

Keterangan
Warna Hijau : PPK
Warna Orange : PPPK





PROGRES ANGGARAN & PROGNOSIS BALAI P₃KP SULAWESI III TA.2026



PROGRES ANGGARAN PER PROGRAM

PADA SATKER BALAI DAN SATKER PKP

Status: 30 Juni 2026

No	SATUAN KERJA	PROGRAM DUKMAN					PROGRAM PKP				
		PAGU (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp/%)		REALISASI FISIK (Rp/%)		PAGU (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp/%)		REALISASI FISIK (Rp/%)	
1.	BALAI P3KP SULAWESI III	1.220.605.000	721.798.695	59,13	779.478.353	63,86	803.722.000	330.099.260	41,07	446.605.384	55,57
2.	SATKER PKP SULAWESI SELATAN	820.753.000	392.155.783	47,78	376.561.476	45,88	249.337.131.000	135.130.596.555	54,20	135.439.182.285	54,32
3.	SATKER PKP SULAWESI TENGGARA	766.733.000	495.064.385	64,57	502.521.111	65,54	164.298.154.000	79.244.316.346	48,23	47.377.989.557	28,84
TOTAL		2.808.091.000	1.609.018.863	57,29	1.658.560.940	59,06	280.683.718.000	214.705.012.161	76,49	183.263.777.226	65,29

PAGU ANGGARAN DAN REALISASI PENYERAPAN PER DIPA UNOR

No	Satker	DIPA UNOR	PAGU (Rp. Ribu)	REALISASI				PROGNOSIS				PROGNOSIS			
				30 JUNI				31 JULI				31 DESEMBER			
				REALISASI KEUANGAN (Rp/%)		REALISASI FISIK (Rp/%)		RENCANA KEUANGAN (Rp/%)		RENCANA FISIK (Rp/%)		RENCANA KEUANGAN (Rp/%)		RENCANA FISIK (Rp/%)	
1.	BP3KP Sulawesi III	Sekjen	1.220.605	721.798.695	59,13	779.478.353	63,86	827.325.000	67,77	888.356.319	72,78	1.220.100	99,96	1.220.605	100
2.	Satker PKP Sulsel		820.753	392.155	47,78	402.168	49,00	336.508	41,00	336.508	41,00	818.454	99,72	820.753	100
3.	Satker PKP Sultra		705.417	490.564	69,54	494.569	70,11	487.302	69,08	487.767	69,15	696.417	98,72	705.417	100
4.	BP3KP Sulawesi III	Ditjen KP	251.375	114.986.488	45,74	127.547.675	50,74	174.065.000	69,25	186.645.937	74,25	250.500	99,65	251.375	100
5.	Satker PKP Sulsel		188.487.077	110.001.058	58,36	113.092.246	60,00	157.645.731	83,64	160.214.015	85,00	113.275.399	100	113.275.399	100
6.	Satker PKP Sultra		125.142.790	58.388.345	46,66	37.034.703	29,59	66.944.314	53,49	59.084.078	47,21	124.744.500	99,68	125.142.790	100
7.	BP3KP Sulawesi III	Ditjen Perdesaan	165.424	59.893.264	36,21	65.640.243	39,68	129.181.000	78,09	137.450.801	83,09	163.400	98,78	165.424	100
8.	Satker PKP Sulsel		32.604.061	11.981.992	36,75	12.389.543	38,00	27.082.856	83,07	27.713.451	85,00	32.604.061	100	32.604.061	100
9.	Satker PKP Sultra		17.732.899	11.198.929	63,15	3.788.123	21,36	13.957.502	78,71	8.430.508	47,54	17.679.960	99,70	17.732.899	100
10.	BP3KP Sulawesi III	Ditjen Perkotan	286.369	118.819.509	41,49	134.307.061	46,90	131.414.000	45,89	145.733.184	50,89	284.100	99,21	286.369	100
11.	Satker PKP Sulsel		28.245.993	13.147.546	47,13	13.840.536	49,00	17.074.534	60,45	16.947.595	60,00	19.645.607	100	19.645.607	100
12.	Satker PKP Sultra		21.483.781	9.661.542	44,97	6.563.115	30,55	12.726.268	59,24	8.757.319	40,76	21.391.016	99,57	21.483.781	100
13.	BP3KP Sulawesi III	Ditjen TKPR	100.554	36.400.000	36,20	119.110.405	39,25	43.170.000	42,93	48.195.532	47,93	100.300	99,75	100.554	100
TOTAL			417.247.098.000	216.478.821.525	51,88	188.791.089.325	45,24	297.692.878.192	71,34	283.377.622.773	67,91	283.087.668	99,85	283.491.809	100

PROGRES ANGGARAN PER DIPASATKER BALAI

Status: 30 Juni 2026

No	SATUAN KERJA	PROGRAM DUKMAN					PROGRAM PKP				
		PAGU (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp/%)		REALISASI FISIK (Rp/%)		PAGU (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp/%)		REALISASI FISIK (Rp/%)	
1.	SEKRETARIAT JENDERAL	1.220.605.000	721.798.695	59,13	779.478.353	63,86	-	-	-	-	-
2.	DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO						100.554.000	36.400.000	36,20	119.110.405	39,25
3.	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN						165.424.000	59.893.264	36,21	65.640.243	39,68
4.	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN						286.369.000	118.819.508	41,49	134.307.061	46,90
5.	DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN						251.375.000	114.986.488	45,74	127.547.675	50,74
TOTAL		1.220.605.000	721.798.695	59,13	779.478.353	63,86	803.722.000	330.099.260	41,07	446.605.384	55,57

PAGU ANGGARAN DAN REALISASI PENYERAPAN PER DIPA UNOR SATKER BALAI

No	DIPA UNOR	PAGU (Rp. Ribu)	REALISASI				PROGNOSIS				PROGNOSIS			
			30 Juni				31 Juli				31 DESEMBER			
			REALISASI KEUANGAN (Rp/%)		REALISASI FISIK (Rp/%)		RENCANA KEUANGAN (Rp/%)		REALISASI FISIK (Rp/%)		RENCANA KEUANGAN (Rp/%)		REALISASI FISIK (Rp/%)	
1.	SEKRETARIAT JENDERAL	1.220.605.000	721.798.695	59,13	779.478.353	63,86	827.325.000	67,78	888.356.319	72,78	1.220.100.000	99,96	1.220.605.000	100
2.	DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO	100.554.000	36.400.000	36,20	119.110.405	39,25	43.170.000	42,93	48.195.532	47,93	100.300.000	99,75	100.554.000	100
3.	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN	165.424.000	59.893.264	36,21	65.640.243	39,68	129.181.000	78,09	137.450.801	83,09	163.400.000	98,78	165.424.000	100
4.	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN	286.369.000	118.819.508	41,49	134.307.061	46,90	131.414.000	45,89	145.733.184	50,89	284.100.000	99,21	286.369.000	100
5.	DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN	251.375.000	114.986.488	45,74	127.547.675	50,74	174.065.000	69,25	186.645.937	74,25	250.500.000	99,65	251.375	100
TOTAL		2.024.327.000	1.051.897.955	51,96	1.226.083.737	60,57	1.305.155.000	64,47	1.406.381.774	69,47	2.018.400.000	99,71	2.024.327.000	100

SATKER PKP PROVINSI SULAWESI SELATAN



PAGU ANGGARAN DAN REALISASI PENYERAPAN

No	DIPA UNOR	PROGRAM DUKMAN					PROGRAM PKP				
		PAGU (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp/%)		REALISASI FISIK (Rp/%)		PAGU (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp/%)		REALISASI FISIK (Rp/%)	
1.	SEKRETARIAT JENDERAL	820.753.000	392.155.783	47,78	402.168.970	49,00					
2.	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN						32.604.061.000	11.981.992.418	36,75	12.389.543.180	38,00
3.	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN						28.245.993.000	13.312.336.501	47,13	13.840.536.570	49,00
4.	DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN						188.672.077.000	110.001.058.137	58,36	113.092.246.200	60,00
TOTAL		820.753.000	392.155.783	47,78	402.168.970	49,00	249.337.131.000	135.687.542.839	54,26	139.322.325.950	55,88

PAGU ANGGARAN DAN REALISASI PENYERAPAN PER DIPA UNOR

No	Satker	DIPA UNOR	PAGU (Rp. Ribu)	REALISASI				PROGNOSIS				PROGNOSIS			
				30 JUNI				31 JULI				31 DESEMBER			
				REALISASI KEUANGAN (Rp/%)		REALISASI FISIK (Rp/%)		RENCANA KEUANGAN (Rp/%)		REALISASI FISIK (Rp/%)		RENCANA KEUANGAN (Rp/%)		REALISASI FISIK (Rp/%)	
	Satker PKP Sulsel	SEKJEN	820.753.000	392.155.783	47,78	402.168.970	49,00	469.215.783	57,17	484.244.270	59,00	818.488.065	99,72	820.753.000	100
		DITEJEN KAWASAN PERMUKIMAN	188.487.077.000	110.001.058.137	58,36	133.092.246.200	60,00	157.645.731.137	83,64	160.214.015.450	85,00	113.275.399.000	100	113.275.399.000	100
		DITJEN PERKOTAAN	28.245.993.000	13.1312.336.501	47,13	13.840.536.570	49,00	17.074.534.501	60,45	16.947.595.800	60,00	19.645.607.000	100	19.645.607.000	100
		DITJEN PERDESAAN	32.604.061.000	11.981.992.418	36,75	12.389.543.180	38,00	27.082.856.418	83,07	27.713.451.850	85,00	32.604.061.000	100	32.604.061.000	100
TOTAL			250.157.884.000	135.687.542.839	54,24	139.724.494.920	55,85	202.272.337.839	80,86	205.359.307.370	82,09	166.343.521.892	100	166.345.820.000	100



PAGU ANGGARAN DAN REALISASI PENYERAPAN PE-KEGIATAN

	Kegiatan		PAGU (Rp. Ribu)	REALISASI				PROGNOSIS				PROGNOSIS			
				30 JUNI				31 JULI				31 DESEMBER			
				REALISASI KEUANGAN (Rp/%)	REALISASI FISIK (Rp/%)	REALISASI KEUANGAN (Rp/%)	REALISASI FISIK (Rp/%)	REALISASI KEUANGAN (Rp/%)	REALISASI FISIK (Rp/%)	REALISASI KEUANGAN (Rp/%)	REALISASI FISIK (Rp/%)				
BSPS															
	PK Rumah Swadaya	Ditjen KP	151.760.000	106.641.752.000	70,27	53.465.048.000	35,23	121.408.000.000	80,00	81.950.400.000	54,00	96.000.000.000	100	96.000.000.000	100
	Wasdal	Ditjen KP	13.216.142	3.161.301.166	23,92	3.251.170.932	24,60	5.286.456.800	40,00	5.286.456.800	40,00	10.051.777.000	100	10.051.777.000	100
	PK Rumah Swadaya	Ditjen Perkotaan	18.000.000	12.859.600.000	49,46	13.070.200.000	50,27	10.800.000.000	60,00	10.800.000.000	60,00	18.000.000.000	100	18.000.000.000	100
	Wasdal	Ditjen Perkotaan	2.219.095	428.285.335	19,30	443.819.000	20,00	566.548.150	35,00	566.548.150	35,00	1.618.709.000	100	1.618.709.000	100
	PK Rumah Swadaya	Ditjen Perdesaan	30.000.000	11.481.000.000	38,27	13.872.000.000	46,24	15.000.000.000	50,00	15.000.000.000	50,00	30.000.000.000	100	30.000.000.000	100
	Wasdal	Ditjen Perdesaan	2.556.083	501.247.876	19,61	511.216.600	20,00	1.278.041.500	50,00	1.278.041.500	50,00	2.556.083.000	100	2.556.083.000	100
TOTAL			225.751.320	135.073.186.378	59,83	66.870.696.000	29,78	108.811.046.450	50,11	114.881.446.450	52,90	158.226.569	100	158.226.569.000	100

[illegible]

PAGU ANGGARAN DAN REALISASI PENYERAPAN PE-KEGIATAN

No	Kegiatan	DIPA UNOR	PAGU (Rp. Ribu)	REALISASI				PROGNOSIS				PROGNOSIS			
				24 APRIL 2026				31 JUNI 2026				31 DESEMBER 2026			
				REALISASI KEUANGAN (Rp/%)	REALISASI FISIK (Rp/%)	RENCANA KEUANGAN (Rp/%)	REALISASI FISIK (Rp/%)	RENCANA KEUANGAN (Rp/%)	REALISASI FISIK (Rp/%)						
PEMBANGUNAN PSU PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN															
	Perencanaan	Ditjen KP	200.000	0	0,00	0	0,00								
	Pelaksanaan		2.283.650	0	0,00	0	0,00								
	Wasdal		86.207	8.258.631	9,58	9.482.770	11,00								
TOTAL															



[illegible]

OPTIMALISASI LAYANAN PERKANTORAN

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN SATUAN KERJA PKP SULAWESI SELATAN

KODE	SATKER/PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/RO	Semula	Menjadi	Realisasi	Selisih	Keterangan
7665.EBA	LAYANAN DUKUNGAN MANAJERIAL INTERNAL		20.310.000			
01.691425.WA.7665.EBA.994.002.A	Operasional dan Pemeliharaan Kantor Satker PKP Provinsi Sulawesi Selatan		296.148.000	99.599.000		
01.691425.WA.7665.EBA.994.002.B	Langganan Daya dan Jasa		112.800.000	42.159.863		
01.691425.WA.7665.EBA.994.002.C	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana		214.845.000	146.474.804		
01.691425.WA.7665.EBA.994.002.D	Honor Operasional Satuan Kerja		140.304.000	62.872.000		
01.691425.WA.7665.EBB.951.100.A	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran		36.346.000	34.410.000		
TOTAL			820.753.000			

SATKER PKP PROVINSI SULAWESI TENGGARA



PAGU ANGGARAN DAN REALISASI PENYERAPAN

No	DIPA UNOR	PROGRAM DUKMAN					PROGRAM PKP				
		PAGU (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp/%)		REALISASI FISIK (Rp/%)		PAGU (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp/%)		REALISASI FISIK (Rp/%)	
1.	SEKRETARIAT JENDERAL	705.417.000	490.564.385	69,54	494.569.681	70,11					
2.	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN	5.125.000			328.00	6,40	17.727.774.000	11.198.928.750	63,17	3.787.794.653	21,37
3.	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN	7.401.000			568.397	7,68	21.476.380.000	9.661.542.050	44,99	6.562.546.704	30,56
4.	DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN	48.790.000	4.500.000	9,22	7.055.034	14,46	125.094.000.000	58.383.845.546	46,67	37.027.648.000	29,60
TOTAL		766.733.000	495.064.385	64,57	502.521.111	65,54	164.298.154.000	79.244.316.346	48,23	47.377.989.557	28,84

PAGU ANGGARAN DAN REALISASI PENYERAPAN PER DIPA UNOR

No	Satker	DIPA UNOR	PAGU (Rp. Ribu)	REALISASI				PROGNOSIS				PROGNOSIS			
				30 JUNI 2026				31 JULI 2026				31 DESEMBER			
				REALISASI KEUANGAN (Rp/%)		REALISASI FISIK (Rp/%)		RENCANA KEUANGAN (Rp/%)		REALISASI FISIK (Rp/%)		RENCANA KEUANGAN (Rp/%)		REALISASI FISIK (Rp/%)	
1	Satker PKP Sultra	SEKJEN	705.417	490.564.385	69,54	494.569.681	70,11	487.302.137	69,08	487.766.921	69,15	696.417.000	98,72	705.417.000	100
2		DITEJEN KAWASAN PERMUKIMAN	125.142.790	58.388.345.546	46,66	37.034.703.234	29,59	66.944.313.620	53,49	59.084.078.324	47,21	124.744.590.500	99,68	125.142.790.000	100
3		DITJEN PERKOTAAN	21.483.781	9.661.542.050	44,97	6.563.115.101	30,55	12.726.268.056	59,24	8.757.319.244	40,76	21.391.016.260	99,61	21.483.781.000	100
4		DITJEN PERDESAAN	17.732.899	11.198.442.750	63,15	3.788.122.653	21,36	13.957.501.540	78,71	8.430.507.588	47,54	17.679.960.130	99,70	17.732.899.000	100
TOTAL			165.064.887	79.739.380.731	48,31	47.880.510.668	29,01	94.115385.353	57,02	76.759.672.078	46,50	164.511.983.890	99,67	165.064.887.000	100



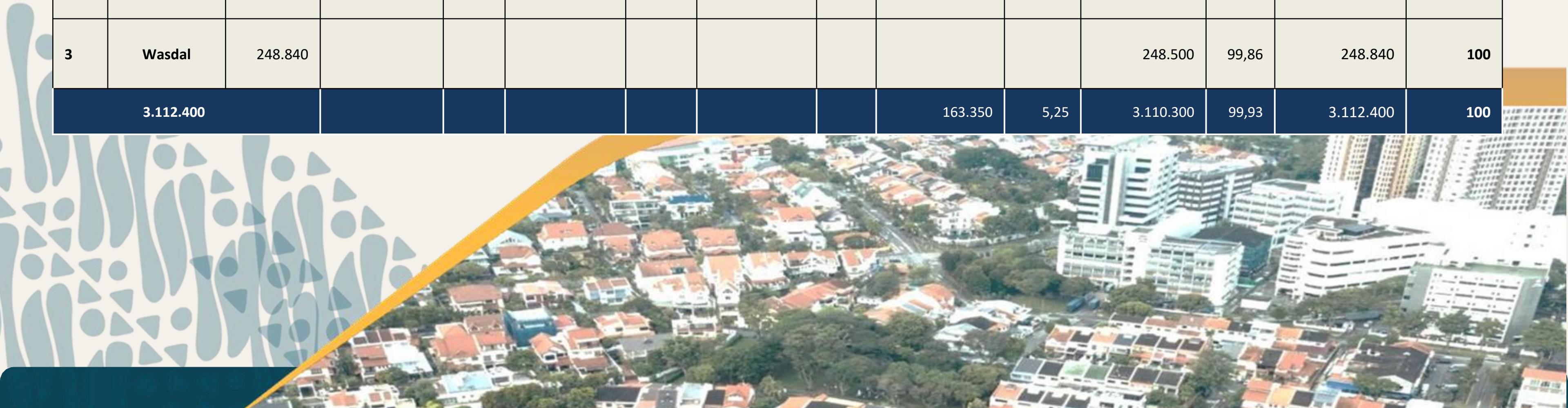
PAGU ANGGARAN DAN REALISASI PENYERAPAN PE-KEGIATAN

No	Kegiatan	DIPA UNOR	PAGU (Rp. Ribu)	REALISASI				PROGNOSIS				PROGNOSIS			
				30 JUNI 2026				31 JULI 2026				31 DESEMBER			
				REALISASI KEUANGAN (Rp/%)	REALISASI FISIK (Rp/%)	RENCANA KEUANGAN (Rp/%)	REALISASI FISIK (Rp/%)	RENCANA KEUANGAN (Rp/%)	REALISASI FISIK (Rp/%)						
BSPS															
1	PK Rumah Swadaya	Ditjen KP	115.200.000	56.100.000.000	48,70	34.848.000.000	30,25	61.680.000.000	53,54	53.740.800.000	46,65	115.200.000.000	100,00	115.200.000.000	100,00
	Wasdal	Ditjen KP	9.894.000	2.283.845.546	23,08	2.179.648.200	22,03	5.247.279.620	53,03	5.325.988.814	53,83	9.498.240.000	96,00	9.894.000.000	100,00
2	PK Rumah Swadaya	Ditjen Perkotaan	16.840.000	9.240.000.000	54,87	5.937.784.000	35,26	12.000.000.000	71,26	7.885.860.000	46,65	16.840.000.000	100,00	16.840.000.000	100,00
	Wasdal	Ditjen Perkotaan	1.500.928	405.871.450	27,04	608.626.304	40,55	705.676.820	47,02	716.261.972	47,72	1.410.872.320	94,00	1.500.928.000	100,00
3	PK Rumah Swadaya	Ditjen Perdesaan	16.420.000	10.740.000.000	65,41	3.338.186.000	20,33	13.200.000.000	80,39	7.659.930.000	46,65	16.420.000.000	100,00	16.420.000.000	100,00
	Wasdal	Ditjen Perdesaan	1.255.233	427.498.400	34,06	415.231.076	33,08	721.866.040	57,51	732.694.031	58,37	1.205.023.680	96,00	1.2255.233.000	100,00
TOTAL			161.110.161	79.197.215.396	49,16	47.327.475.580	29,38	93.554.822.480	58,07	76.031.534.817	47,19	160.574.136.000	99,67	161.110.161.000	100,00



PAGU ANGGARAN DAN REALISASI PENYERAPAN PE-KEGIATAN

No	Kegiatan	PAGU (Rp. Ribu)	REALISASI		PROGNOSIS				PROGNOSIS					
			30 JUNI 2026		31 JULI 2026				31 DESEMBER 2026					
			REALISASI KEUANGAN (Rp/%)	REALISASI FISIK (Rp/%)	RENCANA KEUANGAN (Rp/%)	REALISASI FISIK (Rp/%)	RENCANA KEUANGAN (Rp/%)	REALISASI FISIK (Rp/%)						
PEMBANGUNAN PSU														
1	Perencanaan	217.800							163.350	75,00	216.800	95,54	217.800	100
2	Pelaksanaan	2.645.760									2.645.000	97,97	2.645.760	100
3	Wasdal	248.840									248.500	99,86	248.840	100
3.112.400									163.350	5,25	3.110.300	99,93	3.112.400	100



OPTIMALISASI LAYANAN PERKANTORAN

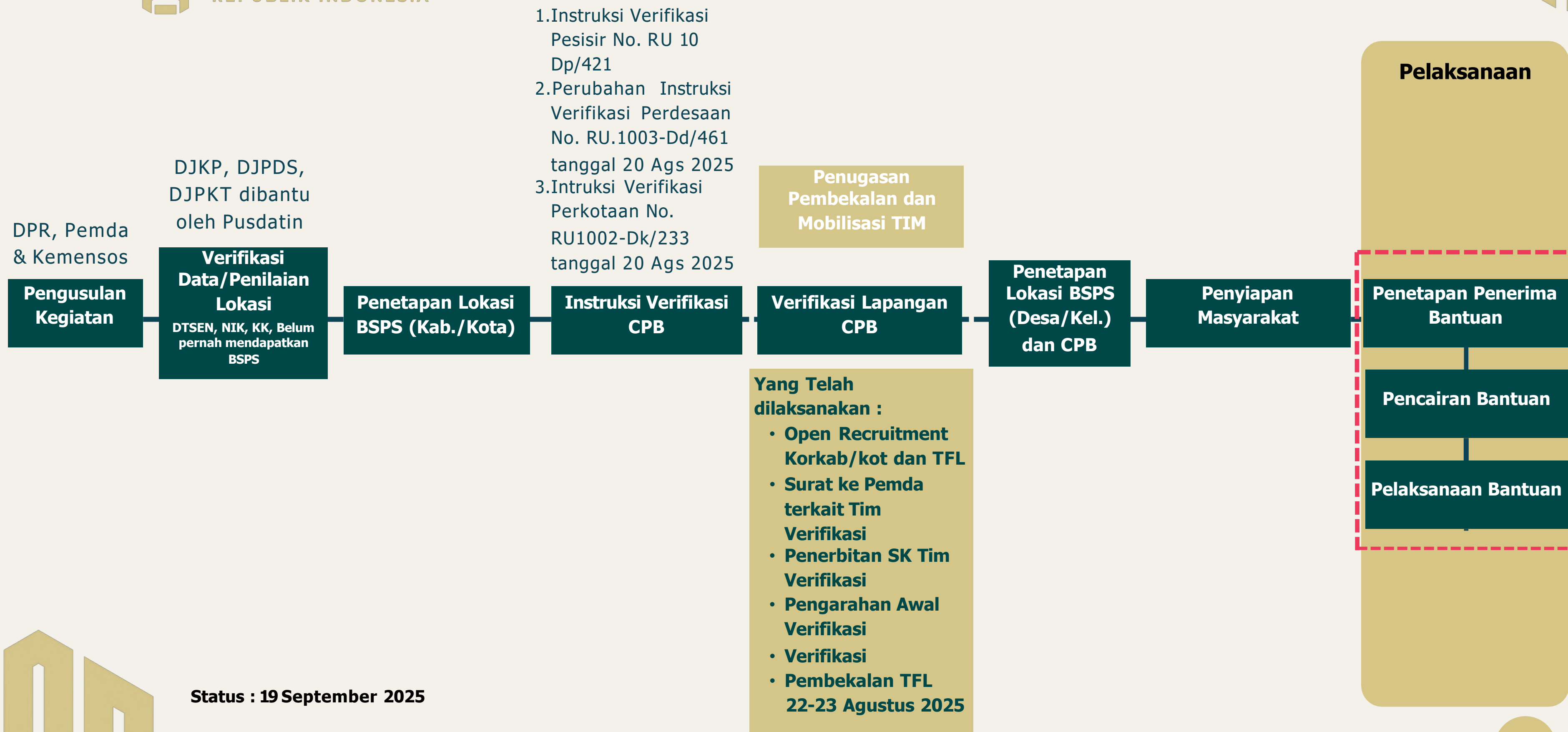
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN SATUAN KERJA SULAWESI TENGGARA

KODE	SATKER/PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/RO	Semula	Menjadi	Realisasi	Selisih	Keterangan
7665	Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal	705.417.000	705.41.000	490.564.385	-	
7665.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	669.071.000	669.071.000	456.074.078		
7665.EBA.962	Layanan Umum	19.140.000	19,140.000	12.522.300		
7665.EBA.962.100.A	LAYANAN UMUM BIRO UMUM	19.140.000	19,140.000	12.522.300		
7665.EBA.994	Layanan Perkantoran	649.931.000	649.931.000	443.551.778		
7665.EBA.994.002.A	OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN KANTOR	139.413.000	145.316.000	89.647.593	5.903.000	Bertambah
7665.EBA.994.002.B	LANGGANAN DAYA DAN JASA	94.320.000	84.480.000	30.835.286	-9.840.000	Berkurang
7665.EBA.994.002.C	PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA	272.662.000	276.599.000	264.988.899	3.937.000	Bertambah
7665.EBA.994.002.D	HONOR OPERASIONAL SATUAN KERJA	143.536.000	143.536.000	58.080.000		
7665.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	36.346.000	36.346.000	34.490.307		
7665.EBB.951	Layanan Sarana Internal	36.346.000	36.346.000	34.490.307		
7665.EBB.951.100.A	PENGADAAN PERALATAN DAN FASILITAS PERKANTORAN	17.145000	17.145.000	15.295.050		
7665.EBB.951.100.A	PENGADAAN PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI	19.201.000	19.201.000	19.195.257		

PROGRES KEGIATAN VERIFIKASI PROGRAM PKP TAHUN 2025

PENINGKATAN KUALITAS RUMAH SWADAYA
PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

PENINGKATAN KUALITAS RUMAH SWADAYA



Delineasi	Pesisir
Surat Perintah Verifikasi	No. RU 10-Dp/21 hal instruksi Verifikasi CPB BSPS Delineasi Pesisir TA 2025 tanggal 19 Agustus 2025, sebanyak unit yang tersebar di 15 Kabupaten DELINEASI PESISIR SULAWESI SELATAN 1. No. RU 0701-Rb14/303 hal BA Hasil Verifikasi CPB BSPS Delineasi Pesisir TA 2025 tanggal 3 September 2025, sebanyak 2.144 unit 2. No. RU 0701-Rb14/321 hal BA Hasil Verifikasi CPB BSPS Delineasi Pesisir TA 2025 tanggal 16 September 2025, sebanyak 214 unit 3. No. RU 0701-Rb14/328 hal BA Hasil Verifikasi CPB BSPS Delineasi Pesisir TA 2025 tanggal 19 September 2025, sebanyak 230 unit DELINEASI PESISIR SULAWESI TENGGARA No. RU 10-Dp/21 hal instruksi Verifikasi CPB BSPS Delineasi Pesisir TA 2025 tanggal 19 Agustus 2025, sebanyak unit yang tersebar di 10 Kabupaten 1. No. RU 0701-Rb14/301 hal BA Hasil Verifikasi CPB BSPS Delineasi Pesisir TA 2025 tanggal 2 September 2025, sebanyak 953 unit
Alokasi	Total 2588 unit 131 Kecamatan 283 Desa/Kelurahan

Sebaran Alokasi BSPS Delineasi Pesisir Sulawesi Selatan

NO	NAMA KABUPATEN	ALOKASI (UNIT)	LOLOS (UNIT)	TIDAK LOLOS (UNIT)	PENGGANTI (UNIT)	DTSN (UNIT)	NON DTSN (UNIT)
1	KAB. BANTAENG	50	34	16	16	18	32
2	KAB. BARRU	564	326	238	238	185	379
3	KAB. BONE	335	257	78	78	78	257
4	KAB. BULUKUMBA	120	80	40	40	37	83
5	KAB. GOWA	332	178	154	154	116	216
6	KAB. JENEPONTO	142	112	30	30	95	47
7	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	39	20	19	19	10	29
8	KAB. LUWU	50	40	10	10	15	35
9	KAB. LUWU TIMUR	20	10	10	10	11	9
10	KAB. MAROS	152	96	56	56	74	78
11	KAB. PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	60	48	12	12	35	25
12	KAB. PINRANG	10	0	10	10	9	1
13	KAB. SINJAI	90	77	13	13	45	45
14	KAB. TAKALAR	263	119	144	144	110	153
15	KAB. WAJO	361	322	39	39	102	259
TOTAL		2588	1719	869	869	940	1453

Sebaran Alokasi BSPS Delineasi Pesisir Sulawesi Tenggara

NO	NAMA KABUPATEN	ALOKASI (UNIT)	LOLOS (UNIT)	TIDAK LOLOS (UNIT)	PENGGANTI (UNIT)	DTSN (UNIT)	NON DTSN (UNIT)
1	KAB. BOMBANA	20	19	1	1	13	7
2	KAB. BUTON	64	43	21	21	32	32
3	KAB. BUTON SELATAN	20	13	7	7	5	15
4	KAB. BUTON TENGAH	70	53	17	17	45	25
5	KAB. BUTON UTARA	40	23	17	17	23	17
6	KAB.KOLAKA	380	325	55	55	83	297
7	KAB. KONAWE SELATAN	165	131	34	34	2	163
8	KAB. MUNA	134	102	32	32	53	81
9	KAB. MUNA BARAT	20	16	4	4	12	8
10	KAB. WAKATOBI	40	27	13	13	7	33
TOTAL		953	752	201	201	275	589

Delineasi	PERKOTAAN
Surat Perintah Verifikasi	PEOVINSI SULAWESI SELATAN & SULAWESI TENGGARA DELINEASI PERKOTAAN Surat Dirjen Perkotaan No. RU.1002/-Dk/216, Hal. Instruksi Verifikasi Calon Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Tanggal 8 Agustus 2025
Alokasi	Total 490 unit 20 Kecamatan 41 Desa/kelurahan

Sebaran Alokasi BSPS Delineasi Perkotaan Sulawesi Selatan

NO	NAMA KABUPATEN	ALOKASI (UNIT)	LOLOS (UNIT)	TIDAK LOLOS (UNIT)	PENGANTI (UNIT)	DTSEN (UNIT)	NON DTSEN (UNIT)
1	KOTA MAKASSAR	275	83	89	89	151	124
2	KOTA PAREPARE	45	26	23	23	14	31
3	KOTA PALOPO	49	30	15	15	16	33
TOTAL		369	139	127	127	181	188

Sebaran Alokasi BSPS Delineasi Perkotaan Sulawesi Tenggara

NO	NAMA KABUPATEN	ALOKASI (UNIT)	LOLOS (UNIT)	TIDAK LOLOS (UNIT)	PENGGANTI (UNIT)	DTSEN (UNIT)	NON DTSEN (UNIT)
1	KOTA KENDARI	121	92	29	29	40	81
TOTAL		121	92	29	29	40	81

Delineasi	PERDESAAN
Surat Perintah Verifikasi	Surat Dirjen Perdesaan No. Ru.1103-PD/429 tanggal 7 Agustus 2025 sebanyak Sulawesi Selatan 120 Unit dan Sulawesi Tenggara 55 Unit
Alokasi	Total 175 unit 11Kecamatan 17 Desa/kelurahan

Sebaran Alokasi BSPS Delineasi Perdesaan Sulawesi Selatan

NO	NAMA KABUPATEN	ALOKASI (UNIT)	LOLOS (UNIT)	TIDAK LOLOS (UNIT)	PENGGANTI (UNIT)	DTSEN (UNIT)	NON DTSEN (UNIT)
1	KAB. TORAJA UTARA	10	4	6	6	4	6
2	KAB. SOPPENG	90	79	11	11	26	64
3	KAB. ENREKANG	20	14	6	6	12	8
TOTAL							

Sebaran Alokasi BSPS Delineasi Perdesaan Sulawesi Tenggara

NO	NAMA KABUPATEN	ALOKASI (UNIT)	LOLOS (UNIT)	TIDAK LOLOS (UNIT)	PENGANTI (UNIT)	DTSN (UNIT)	NON DTSN (UNIT)
1	KAB. KOLAKA TIMUR	55	53	2	2	27	28
TOTAL		55	53	2	2	27	28

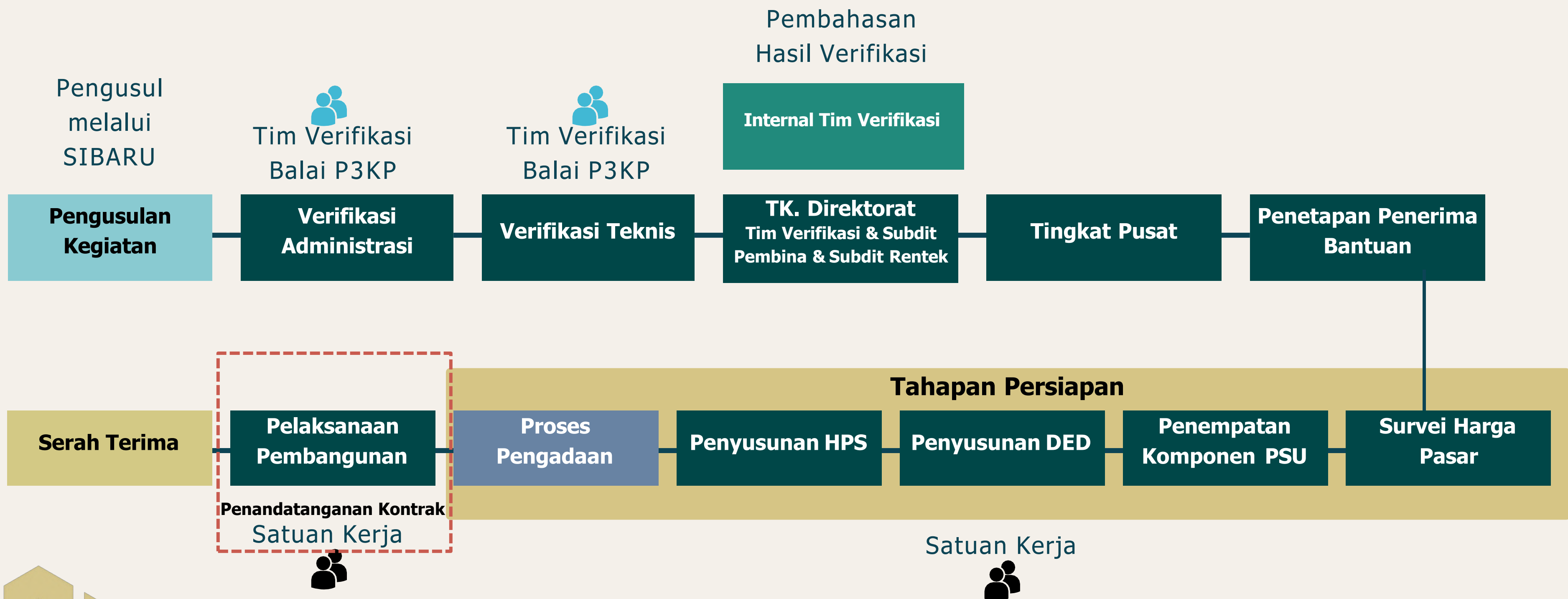
Delineasi	PESISIR		PERKOTAAN		PERDESAAN	
	Sulsel	Sultra	Sulsel	Sultra	Sulsel	Sultra
Kabupaten	15	10	3	1	3	1
Kecamatan	131	44	14	6	7	4
Desa/kelurahan	283	71	30	11	12	4
ALOKASI	2.588 unit	953 unit	369 unit	121 unit	120 unit	55 unit
TOTAL ALOKASI	SULAWESI SELATAN : 3.077 Unit SULAWESI TENGGARA : 1.129 Unit					

Dokumentasi Verifikasi BSPS Delineasi Kawasan Pesisir



Dokumentasi Verifikasi BSPS (delineasi perkkotaan- perdesaan)

BANTUAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN



Bantuan Prasarana , Sarana dan Utilitas

NO	NAMA PAKET	PERUMAHAN/ NAMA PERUSAHAAN	KABUPATEN	TOTAL DAYA TAMPUNG	JUMLAH UNIT TERBANGUN (MEMENUHI SYARAT)	UNIT BANTUAN PSU SEBELUMNYA	UNIT BANTUAN PSU TA 2025	PANJANG JALAN PSU TA 2025 (M)
1	Pembangunan PSU Perumahan MBR di Perumahan Bayu Perdana X, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan (PSU25-SULAWESI SELATAN-KABUPATEN BULUKUMBA-01)	Bayu Perdana X / PT. Ardiansyah Mandiri Pratama	Bulukumba	124	89	0	62	217
2	Pembangunan PSU Perumahan MBR di Perumahan Lili Mas Regency, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan (PSU25-SULAWESI SELATAN-KABUPATEN BULUKUMBA-02)	Lili Mas Regency / PT. Noor Maccita Developer	Bulukumba	107	93	0	53	185.5
3	Pembangunan PSU Perumahan MBR di Perumahan Aru Land Cabalu, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan (PSU25-SULAWESI SELATAN-KABUPATEN BONE-03)	Aru Land Cabalu / PT. Aru Land Development	Bone	1904	178	533	105	315
4	Pembangunan PSU Perumahan MBR di Perumahan Bumi Cilellang Mas 3, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan (PSU25-SULAWESI SELATAN-KABUPATEN BONE-04)	Bumi Cilellang Mas 3 / PT. Mandiri Pratama Putra	Bone	353	241	0	105	315
TOTAL				2488	601	533	325	1032.5



KEMENPKP
REPUBLIK INDONESIA

Dokumentasi Lokasi Bantuan PSU



KEMENPKP
REPUBLIK INDONESIA



PROGRES KEGIATAN MONITORING – EVALUASI PROGRAM PKP TAHUN 2025

PENINGKATAN KUALITAS RUMAH SWADAYA
PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

PENINGKATAN KUALITAS RUMAH SWADAYA





PRASARANA SARANA DAN UTILITAS





BANTUAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN



BANTUAN RUMAH SUSUN



Tujuan:

STAKEHOLDER

Bisa berupa logo MITRA kolaborasi baik Swasta maupun PEMDA

OUTPUT

Peningkatan kualitas rumah layak huni dengan perbaikan struktur atap/dinding.

Penyediaan sarana dan prasarana persampahan, serta pembiasaan pola perilaku membuang sampah.

OUTCOME

Kesehatan masyarakat meningkat, infeksi menurun

Lingkungan bersih, mengurangi risiko penyakit, meningkatkan kualitas hidup warga

DOKUMENTASI

Diisi 1-2 contoh PK atau PB dari Mitra

KOLABORASI CSR



Tujuan:

STAKEHOLDER

Bisa berupa logo MITRA kolaborasi baik Swasta maupun PEMDA

OUTPUT

Peningkatan kualitas rumah layak huni dengan perbaikan struktur atap/dinding.

Penyediaan sarana dan prasarana persampahan, serta pembiasaan pola perilaku membuang sampah.

OUTCOME

Kesehatan masyarakat meningkat, infeksi menurun

Lingkungan bersih, mengurangi risiko penyakit, meningkatkan kualitas hidup warga

DOKUMENTASI

Diisi 1-2 contoh PK atau PB dari Mitra



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN SULAWESI III

SULAWESI Selatan





Provinsi Sulawesi Selatan (diisi semua Delineasi)

CSR

NO	KAB/KOTA	NAMA CSR	PENINGKATAN KUALITAS		PEMBANGUNAN BARU	
			Selesai	Proses	Selesai	Proses
1	Pangkep	Semen Tonasa	3	-	1	-
		BAZNAS	3	-	-	-
2	Selayar	BAZNAS	-	1	-	1
3	Wajo	BAZNAS	-	-	5	-
		PT. SMF	-	-	-	24
4	Maros	BAZNAS & KODIM	1	-	1	1
5	Bone	BAZNAS	10	-	-	-
6	Bulukumba	BAZNAS	30	-	-	-
7	Sinjai	REI Sulsel	1	-	-	-
8	Makassar	Gabungan Perumahan Sumarekon, Mutiara, GMYD, Tallasa City, Wordland	-	-	-	2



Provinsi Sulawesi Selatan (diisi semua Delineasi)

CSR

NO	KAB/KOTA	NAMA CSR	PENINGKATAN KUALITAS		PEMBANGUNAN BARU	
			Selesai	Proses	Selesai	Proses
9	Makassar	Ciputra		42		
10	Pare - pare	DPD REI SULSEL	1			
11	Pare - pare	BAZNAZ	1			
12	Palopo	Bank SULSELBAR		15		
Total			77	58	7	26



Total CSR Sulawesi Selatan

Komitmen

26

Selesai

57

Pembangunan Baru

Renovasi
Rumah

Komitmen 58

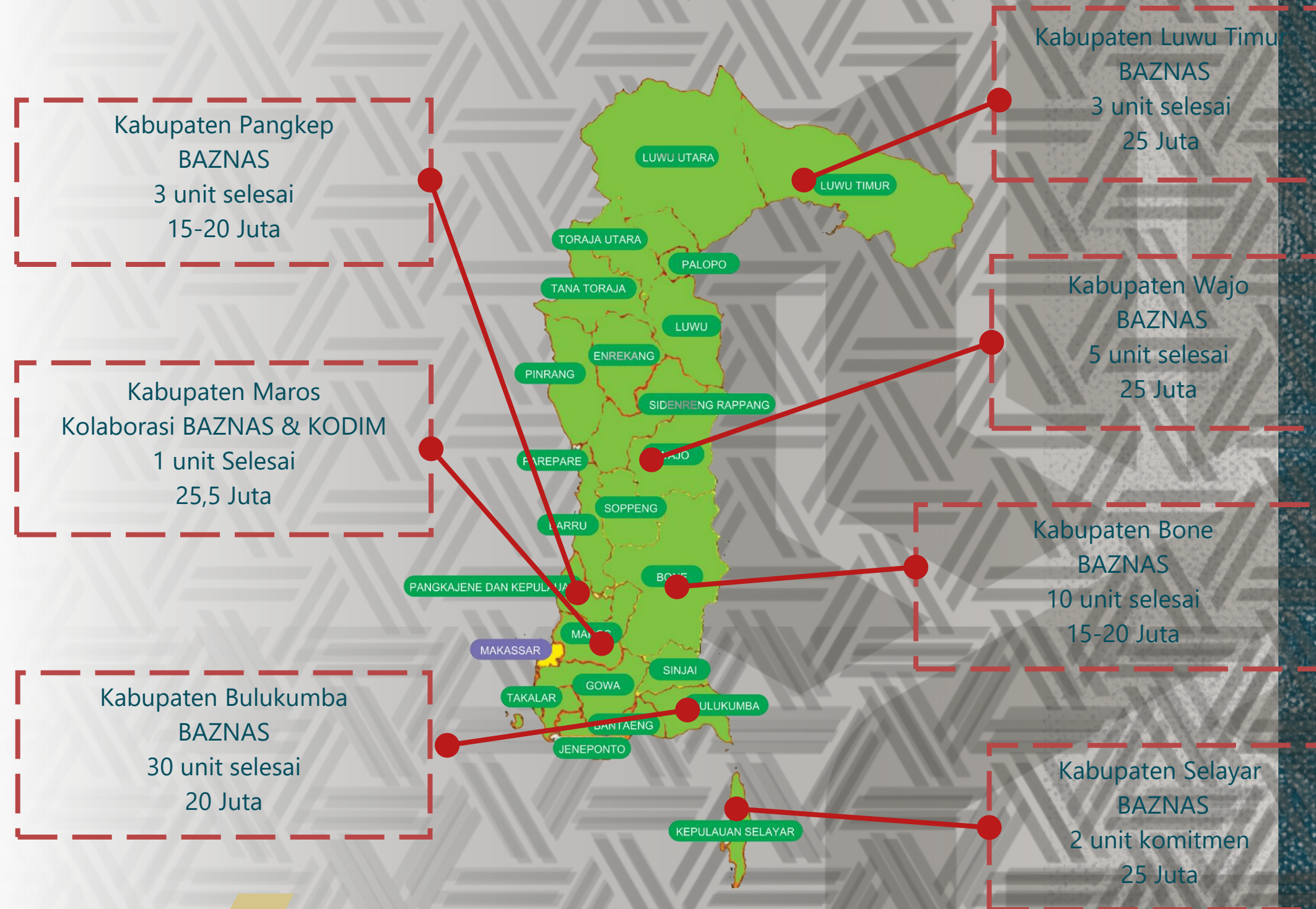
Komitmen 26

Selesai : 77

Selesai : 7



CSR BAZNAS SULAWESI SELATAN



Total CSR Sulawesi Selatan

Komitmen

2

Selesai

52

Pembangunan Baru

Renovasi
Rumah

Komitmen

1

Komitmen

1

Selesai

9

Selesai

43

PENDAMPINGAN RP3KP

PENDAMPINGAN RP3KP KABUPATEN/KOTA 2025

No	Kabupaten	Kegiatan	Keterangan
1	Bulukumba	Review Kesesuaian Substansi Dokumen Final dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Perumahan Nomor: 06/SE/DR/2022 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	- Komponen Pendataan, Nilai Skor 44, Tingkat Kesesuaian Sesuai - Komponen Analisis, Nilai Skor 62, Tingkat Kesesuaian Sesuai - Komponen Perumusan, Nilai Skor 53, Tingkat Kesesuaian Sesuai - Komponen Peta, Nilai Skor 40, Tingkat Kesesuaian Kurang Sesuai

Status Penyusunan RP3KP Sulawesi Selatan

No.	Wilayah				Status RP3KP						
		Belum Menyusun			Sedang Menyusun		Sudah Menyusun				
		Belum dianggarkan	Sudah dianggarkan	Persiapan	Penyusunan Profil	Penyusunan Rencana	Review dokumen RP3KP		Prolegda	Legislasi	
							Pilihan	Tahun Penyusunan		Pilihan	Nomor Peraturan
1	Kab. Bantaeng						Tidak	2013			
2	Kab. Barru			Ya	Ya	Ya	Ya	2024	Tidak	Tidak	
3	Kab. Bone						Tidak	2019			
4	Kab. Bulukumba		Ya	Ya	Ya		Ya	2025		Ya	Perda No. 10 Tahun 2021
5	Kab. Enrekang	Ya									
6	Kab. Gowa		Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak				
7	Kab. Jeneponto						Tidak	2021			
8	Kab. Luwu		Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya	2014			
9	Kab. Luwu Timur						Tidak	2019			
10	Kab. Luwu Utara		Ya				Tidak	2019			
11	Kab. Maros							2013		Ya	No.5 Thn 2015
12	Kepulauan						Tidak	2016		Ya	No.7 Thn 2020
13	Kab. Pinrang						Tidak	2019			
14	Kab. Selayar						Tidak	2014			
15	Kab. Sidrap						Tidak	2022			
16	Kab. Sinjai							2014		Ya	No.1 Thn 2018
17	Kab. Soppeng							2019		Ya	No.9 Thn 2020
18	Kab. Takalar						Tidak	2019			
19	Kab. Tana Toraja	Ya									
20	Kab. Toraja Utara	Ya									
21	Kab. Wajo						Tidak	2021			
22	Kota Makassar			Ya	Ya	Ya	Ya	2015			
23	Kota Palopo						Tidak	2019			
24	Kota Pare-Pare			Ya	Ya	Ya		2019	Ya		

Status Penyusunan RP3KP Sulawesi Tenggara

No.	Wilayah	Status RP3KP										Informasi Tambahan		Keterangan	UPLOAD DOKUMEN
		Belum Menyusun		Sedang Menyusun		Sudah Menyusun						Alokasi Anggaran (Rupiah)	Jenis Kegiatan (Swakelola /Kontraktual)		
		Belum dianggarkan	Sudah dianggarkan	Persiapan	Penyusunan Profil	Penyusunan Rencana	Review dokumen RP3KP		Prolegda	Legislasi					
							Pilihan	Tahun Penyusunan		Pilihan	Nomor Peraturan				
1	Kab. Bombana						Tidak	2024	Ya			Biaya Penyusunan TA. 2024 Rp. 500.000.0000	Swakelola	Tahun 2025 telah dianggarkan penyusunan Perda RP3KP, target Akhir bulan November 2025 selesai	V
2	Kab. Buton						Tidak	2021	Ya			Biaya Review TA. 2021 Rp. 380.000.0000	Kontraktual	Prolegda ditargetkan rampung akhir Tahun 2025	V
3	Kab. Buton Selatan						Tidak	2024				Biaya Review TA. 2024 Rp. 250.000.0000	Kontraktual	Output Review TA 2024 hanya BAB Profil. Sedangkan BAB Analisa dan BAB Perumusan rencana akan dilanjutkan TA 2026	V
4	Kab. Buton Tengah						Tidak	2019				Biaya TA. 2019 Rp. 895.000.0000	Swakelola		V
5	Kab. Buton Utara						Tidak	2018	Ya			Biaya Tahun 2018 Rp. 600.000.0000	Kontraktual	Rencana akan direview Tahun 2026	V
6	Kab. Kolaka						Tidak	2022		Ya	Nomor 2 Tahun 2024	Biaya Review TA 2022 Rp. 400.000.000	Kontraktual		V
8	Kab. Kolaka Utara						Ya	2025				Biaya Review TA. 2025 Rp. 450.000.000	Swakelola	Review Telah Selesai. Rencana akan dilanjutkan dengan Penyusunan Naskah Akademik melalui Anggaran APBD Perubahan Tahun 2025	V
7	Kab. Kolaka Timur						Tidak	2021	Ya			Biaya Review TA. 2021 Rp. 200.000.000	Kontraktual		V
9	Kab. Konawe						Tidak	2015				https://drive.google.com/drive/folders/165luuy	Kontraktual	Rencana akan direview Tahun 2026	V
10	Kab. Konawe Kepulauan						Tidak	2021				Biaya Review TA. 2021 Rp. 250.000.000	Kontraktual		V (Dokumen Tahun 2018)
11	Kab. Konawe Selatan						Tidak	2018							V
12	Kab. Konawe Utara						Tidak	2023				Biaya Review TA 2023 Rp. 300.000.000	Swakelola		V (Dokumen Tahun 2020)
13	Kab. Muna						Tidak	2018				Biaya Tahun 20218 Rp. 300.000.000	Kontraktual		V
14	Kab. Muna Barat						Tidak	2019				Biaya Penyusunan TA 2019 Rp. 600.000.000	Swakelola	Perbub Nomor 30 Tahun 2025, rencana akan direview Tahun 2026. Saat ini sedang penyusunan Prolegda, telah melaksanakan seminar awal penyusunan Perda pada tanggal 1 Agustus 2025	V
15	Kab. Wakatobi						Tidak	2019		Ya	Nomor 5 Tahun 2021	Biaya TA. 2019 Rp. 450.000.0000	Kontraktual		V
16	Kota Bau-Bau						Ya	2025	Ya			Biaya Review TA. 2021 Rp. 400.000.000 Biaya Review Tahun 2025 Rp. 300.000.000	Swakelola	Saat ini sedang tahap akhir Prolegda. Namun ada rencana Review Dokumen melalui APBD Murni pada bulan September Tahun 2025	V
17	Kota Kendari							2023	Ya			Biaya Review TA 2023 Rp. 300.000.000	Swakelola		V

Status Status Dokumen RP2KPKPK Sulawesi Selatan

No	Kabupaten/Kota	SK Kumuh	Perda RTRW	Dokumen Kumuh	
				RP2KPKPK	Legalisasi RP2KPKPK
1	Kabupaten Kep. Selayar	Sk Bupati No.353/IX/Tahun 2020	Perda No.5 Tahun 2012		
2	Kabupaten Bulukumba	SK No. 188.45-574 Tahun 2024	Perda No.21 Tahun 2012	2024 - 2028	Perbup No.2 Tahun 2024
3	Kabupaten Bantaeng	Sk Bupati 100.3.3.2/170/PERKIMTAN/III/2023	Perda No.1 Tahun 2024	2022 - 2026	Perbup No.6 Tahun 2023
4	Kabupaten Jeneponto	SK Bupati 653/368/2022	Perda No.1 Tahun 2022	2023 - 2027	Perbup No.3 Tahun 2024
5	Kabupaten Takalar	SK Bupati No.193 Tahun 2024	Perda No.2 Tahun 2024	Tahap Review 2025	
6	Kabupaten Gowa	SK Bupati No.355/VIII/2020	Perda No.15 Tahun 2012	Tahap Review 2025	
7	Kabupaten Maros	SK Bupati No.1169/KPTS/080.13/XII/2020	Perda No.7 Tahun 2023	2024 - 2028	
8	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Sk Bupati No.1031 Tahun 2024	Perda No.8 Tahun 2012	2023 - 2027	Tahap Legalisasi
9	Kabupaten Barru	SK Bupati No.89/DPUTR-PERKIM/II/2023	Perda No.4 Tahun 2012	2024 - 2028	
10	Kabupaten Bone	SK Bupati No.481 Tahun 2020	Perda No.1 Tahun 2023	2023 - 2027	
11	Kabupaten Soppeng	SK Bupati No.125/III/2023	Perda No.8 Tahun 2012	2023 - 2027	
12	Kabupaten Sinjai	SK Bupati No.655 Tahun 2024	Perda No.28 Tahun 2012	2024 - 2028	
13	Kabupaten Wajo	SK Bupati No.81 Tahun 2022	Perda No.1 Tahun 2023	2023 - 2027	Tahap Legalisasi
14	Kabupaten Sidenreng Rappang	SK Bupati No.362/XII/2020	Perda No.5 Tahun 2012	2023 - 2027	
15	Kabupaten Pinrang	SK Bupati No.050/332/2020	Perda No.6 Tahun 2022	2023 - 2027	
16	Kabupaten Enrekang	SK Bupati No.226/KEP/VI/2025	Perda No.14 Tahun 2011	Tahap Review 2025	
17	Kabupaten Luwu	SK Bupati No.219/IV/2022	Perda No.6 Tahun 2011	2022 - 2026	
18	Kabupaten Tana Toraja	SK Bupati No.472/XIII/Tahun 2020	Perda No.12 Tahun 2011		
19	Kabupaten Luwu Utara	SK Bupati No : 188.4.45/181/III/2022	Perda No.2 Tahun 2011	2023 - 2027	
20	Kabupaten Luwu Timur	SK Bupati No.326/D-06/IX/Tahun 2024	Perda No.7 Tahun 2011	2023 - 2027	Perbup No.95 Tahun 2023
21	Kabupaten Toraja Utara	SK Bupati No.514/X/2024	Perda No.3 Tahun 2012	2025 - 2029	
22	Kota Makassar	SK Walikota No.2821/648/Tahun 2022	Perda No.4 Tahun 2015	2024 - 2028	
23	Kota Parepare	SK Walikota No.1102 Tahun 2020	Perda No.1 Tahun 2021	2021 - 2025	Perwali No.44 Tahun 2021
24	Kota Palopo	SK Walikota No.100.3.3.3/51/B.Hukum Tahun 2024	Perda No.1 Tahun 2022	2023 - 2027	

Status Status Dokumen RP2KPKPK Sulawesi Tenggara

No (1)	Kabupaten / Kota (2)	Tahun (3)	Nomor dan Tanggal (4)	Status (5)					Kendala (6)	Tindak Lanjut (7)
				Perbup/Perwal	Telah Tersusun/ Proses Legalisasi	Proses penyusunan/ reviu	Dokumen belum sesuai SE DJCK 30/2020	Tidak Memiliki		
1.	Buton				Telah tersusun (melalui pihak ke-3)		Sesuai			Proses legalisasi
2.	Muna				Telah tersusun (swakelola)		Belum Sesuai		Dokumen belum diverifikasi	
3.	Konawe				Telah tersusun (swakelola)		Sesuai			Proses legalisasi
4.	Kolaka				Telah tersusun (swakelola)		Sesuai			Proses legalisasi
5	Konawe Selatan				Telah tersusun (melalui pihak ke-3)		Belum sesuai		Dokumen belum diverifikasi	
6	Bombana				Telah tersusun (swakelola)		sesuai			Proses legalisasi
7	Wakatobi				Telah tersusun (swakelola)		Sesuai			Proses legalisasi
8	Kolaka Utara				Telah tersusun (swakelola)		Sesuai			Proses legalisasi
9	Buton Utara				Telah tersusun (melalui pihak ke-3)		Belum sesuai		Dokumen belum diverifikasi	
10	Konawe Utara				Telah tersusun (swakelola)	Peoses Reviu			Belum diverifikasi	
11	Kolaka Timur				Telah tersusun (swakelola)		Belum Sesuai		Belum diverifikasi	
12	Konawe Kepulauan				Telah tersusun (swakelola)		Sesuai			Proses legalisasi
13	Muna Barat				Telah tersusun (swakelola)		Sesuai			Proses legalisasi
14	Buton Tengah				Telah tersusun (swakelola)		Sesuai			Proses legalisasi
15	Buton Selatan				Telah tersusun (melalui pihak ke-3)		Sesuai			Proses legalisasi
16	Kota Kendari	2022	Nomor 39 6 April 2022	Peraturan Walikota Kendari No.39 Tahun 2022 Tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Kendari Tahun 2021-20275	Telah tersusun (swakelola)		Sesuai		-	-
17	Kota Baubau				Telah tersusun (swakelola)		Sesuai			Proses legalisasi

Dokumentasi Kegiatan Konsultasi Penyusunan RP3KP, dan RP2KPKPK



LAYANAN KLINIK PKP



No	Nama Kegiatan	Lokasi	Jenis Layanan	Jumlah Layanan yang dihasilkan
1	Sosialisasi Klinik PKP dalam rangka memperingati hari jadi Provinsi Sulawesi Selatan	Kantor Lurah Pannapu Jl. Bersih Raya, Kec. Tallo Kota Makassar	Sosialisasi dan Diskusi Program Klinik PKP	50 layanan
2	Sosialisasi Klinik PKP dalam rangka memperingati hari jadi Provinsi Sulawesi Selatan Tema: “Hunian Layak untuk Sulsel Maju” 19 oktober	Monumen Mandala	Sosialisasi Program Klinik PKP, tatap muka dengan masyarakat (layanan konsultasi)	47 layanan
3	Car Free Day (CFD) – dalam rangkaian acara Sumpah Pemuda; Tema: “Pemuda Bergerak, Hunian Layak Terwujud” - 26 Oktober	CFD Boulevard	Sosialisasi Program Klinik PKP, diskusi & talkshow	55 layanan
4	Sosialisasi Pemrintah Daerah Wajo, mendukung peningkatan Kualitas kawasa Kumuh Kab. Wajo 23 - oktober	Kelurahan Mattirotappareng!	Sosialisasi, layanan	23 layanan
5	Car Free Day (CFD) – dalam rangkaian acara Hari KORPRI Tema: -	CFD Mandala	Sosialisasi Program Klinik PKP, diskusi dan Talkshow	(Upcoming event : tgl 30 November 2025)

No	Nama Kegiatan	WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
1	Pembuatan merchandise Klinik PKP	Oktober - November	
2	Roadshow Sosialisasi Klinik PKP (UNIBOS, UNHALU)	Oktober - November	

MERCHANDISE MEDIA SOSIALISASI KLINIK PKP



www.klinikpkp.go.id

Substansi Layanan

- Program, kebijakan/regulasi dan jenis bantuan Perumahan dan Kawasan permukiman dari Kementerian PKP
- Perencanaan dan Pembiayaan Rumah
- Pelaksanaan dan Pengawasan Konstruksi
- Pemanfaatan Rumah, Rumah Susun, Perumahan, dan Kawasan Permukiman
- Penanganan dan Pencegahan Kawasan Kumuh
- Fasilitasi Penanganan Pengaduan Masyarakat

Apa itu Klinik PKP?

Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Klinik PKP adalah bantuan pemerintah berupa layanan informasi dan bantuan teknis bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas masyarakat dalam pemenuhan rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan

Tujuan :

- Memberikan layanan informasi Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Memberikan layanan pendampingan berupa bantuan Teknis kepada Masyarakat
- Pemberdayaan dan peningkatan kapasitas Masyarakat dalam pemenuhan rumah layak huni

Layanan :

- Informasi
- Konsultasi dan;

Hunian Layak, Konsultasi Mudah !

KLINIK PKP

Balai Pelaksana Penyediaan



Siapa saja yang bisa memanfaatkan?

Masyarakat yang membutuhkan informasi & pendampingan dalam rangka pemenuhan Rumah Layak Huni

Masyarakat yang memperoleh Bantuan Perumahan (BSPS, Rusun, Rusus, dll)

Masyarakat yang ingin membangun/ memperbaiki rumah sederhana

Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Lingkup Layanan :

- Perencanaan (Desain RAB, PBC, dll)
- Pelaksanaan Konstruksi (pemilihan material, konstruksi, dll)
- Pengawasan konstruksi
- Pemanfaatan (pemeliharaan, perawatan, pengembangan)

Pemerintah Daerah untuk konsultasi terkait :

- Perencanaan (RP3KP, RP2KPKP, RKP0)
- Kelembagaan & kemitraan daerah

Kontak Informasi

Lokasi
Kantor BP3KP Sulawesi III
Jl. Penjernihan Raya No. 22 Komp. PDAM Panaikang, Kota Makassar

Whatsapp
+62-812-88888-911 (Benar-PKP)
+62-882-02037-6433 (Klinik-PKP)

Instagram
bp3kp_sulawesi3

Kriteria Rumah Layak Huni

- Ketahanan dan Keselamatan Bangunan**
Komponen struktur dan kualitas nonstruktur harus memenuhi standar teknis (pondasi, sloof, kolom, balok, rangka atap, pengikatan antar elemen)
- Kecukupan Luas Ruang**
Ruang gerak memenuhi standar teknis luas minimum per orang 7,2 m² dengan tinggi minimal antara lantai dengan plafond 2,8 meter
- Akses Air Minum Layak**
Sumber air minum mudah dijangkau baik dari sisi waktu atau jarak dan kualitas air yang tersedia harus memenuhi layak minum sehat
- Memiliki Sanitasi Layak**
sistem sanitasi meliputi ketersediaan MCK, Septic Tank, tempat sampah, serta saluran pembuangan air kotor dan limbah yang layak dengan jarak yang terjangkau
- Pencahaya dan Penghawaan/ Ventilasi**
Persentase Pencahaya (Jendela dan Ventilasi) minimal ≥ 10% dari luas lantai. Penghawaan/ventilasi minimal ≥ 5% dari luas lantai

www.klinikpkp.go.id

Jadwalkan Konsultasimu Sekarang !

GRATIS

Scan QR code
Temukan kami dengan mudah dengan linktree interaktif.

Standing Banner



LEAFLET

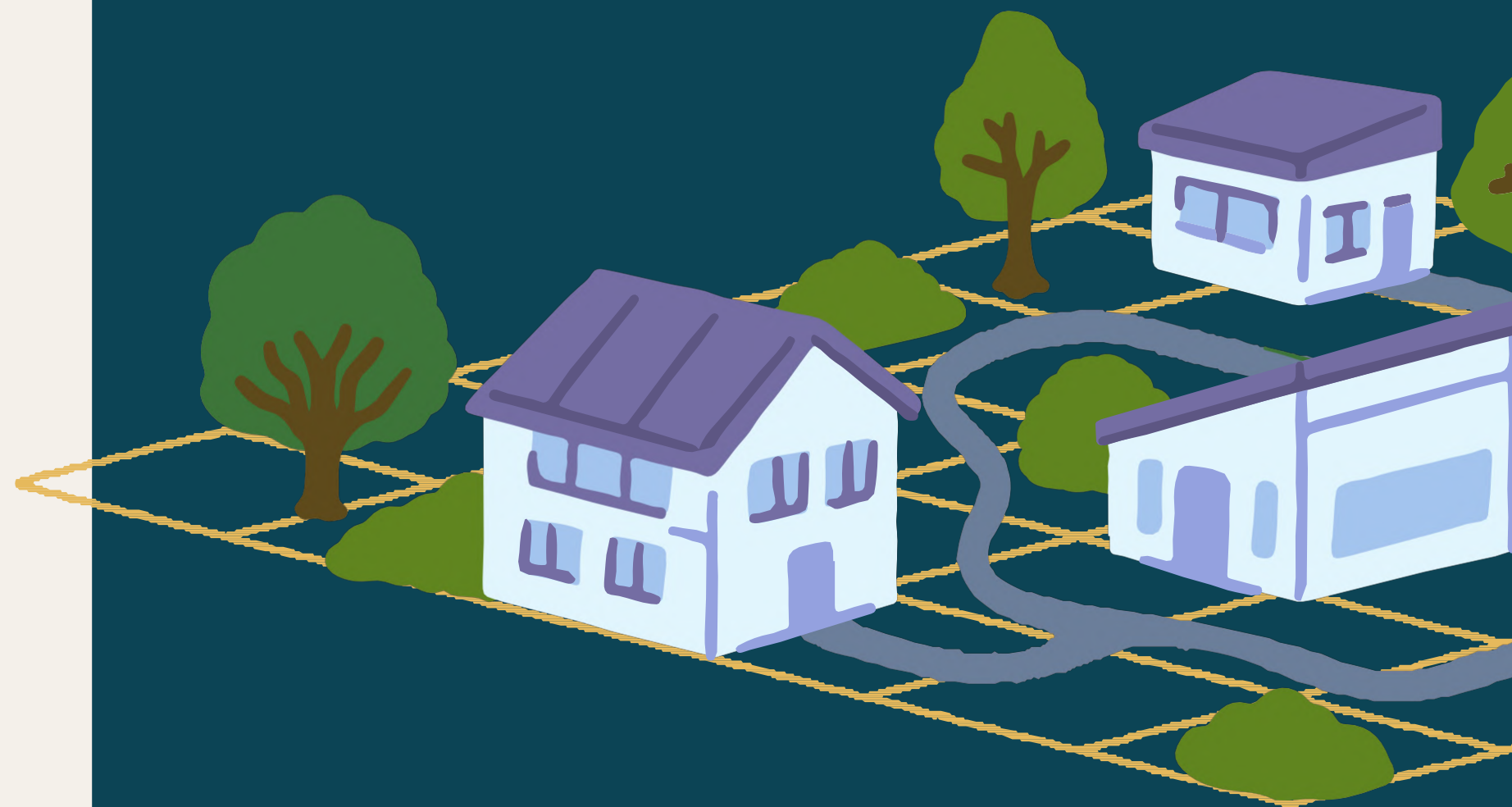


Keikutsertaan Dalam
UMKM EXPO 2025 &
CFD – 19 Oktober 2025

CFD Dalam Rangka
menyambut
peringatan Sumpah
Pemuda - 26 Oktober 2025

PENDATAAN PROGRAM 3 JUTA RUMAH

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan
dan Kawasan Permukiman Jawa II



BACKLOG PERUMAHAN

DATA BACKLOG PERUMAHAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

No.	Kabupaten/Kota	Backlog Kepemilikan	Backlog Kualitas	Total Backlog Perumahan
	Total	398.865	467.577	866.442

DATA BACKLOG PERUMAHAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

No.	Kabupaten/Kota	Backlog Kepemilikan	Backlog Kualitas	Total Backlog Perumahan
	Total	86.828	128.071	214.899

Program 3 Juta Rumah (Delineasi Pesisir)

Jenis Program	Sumber Pendanaan	Program	Sulawesi Selatan	Sulawesi Tenggara
Pembangunan Baru	Negara	PKP	-	-
		Non-PKP	30	37
	Pengembang	FLPP	486	-
		Komersial	-	124
	Swadaya	PBG	691	112
		Non-PBG	3	41
	Gotong Royong	CSR	33	-
Peningkatan Kualitas	Negara	PKP	2.588	953
		Non-PKP	146	78
	Pembiayaan	Tabungan Kontrak Perumahan	-	-
	Swadaya	PBG	6	-
		Non-PBG	-	20
	Gotong Royong	CSR	49	5
(unit)			4.032	1.370

BACKLOG PERUMAHAN

DATA BACKLOG PERUMAHAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

No.	Kabupaten/Kota	Backlog Kepemilikan	Backlog Kualitas	Total Backlog Perumahan
	Total	398.865	467.577	866.442

DATA BACKLOG PERUMAHAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

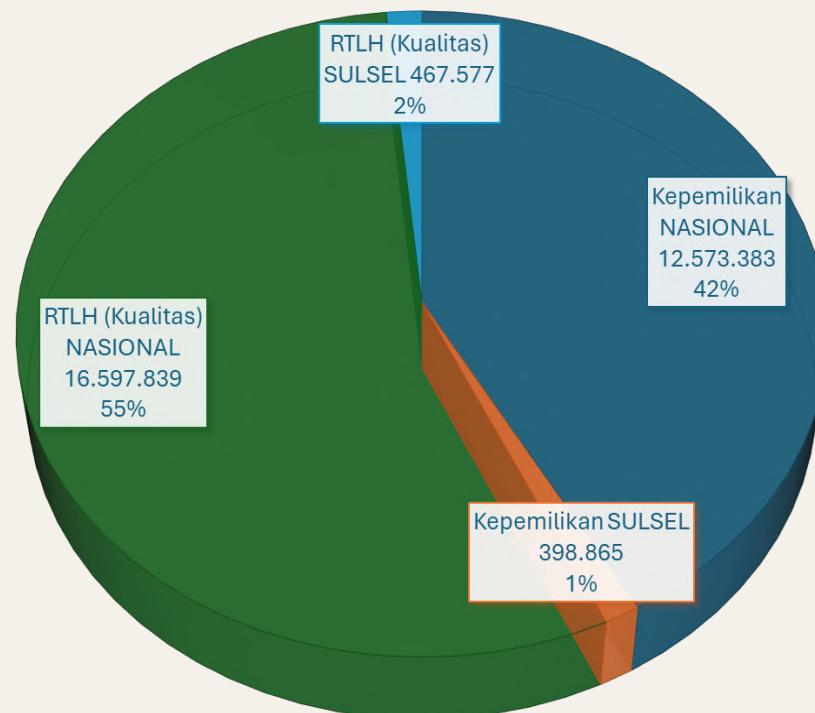
No.	Kabupaten/Kota	Backlog Kepemilikan	Backlog Kualitas	Total Backlog Perumahan
	Total	86.828	128.071	214.899

Total Backlog NASIONAL 29.171.222

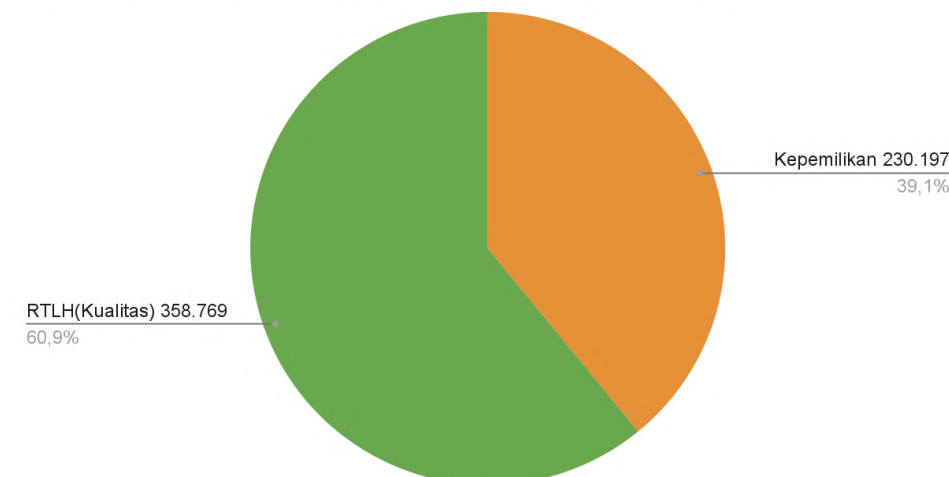
Total Backlog SULAWESI SELATAN 866.442

Total Backlog Delineasi Kawasan Pesisir, SULSEL 588.966

BACKLOG NASIONAL DAN BACKLOG SULAWESI SELATAN

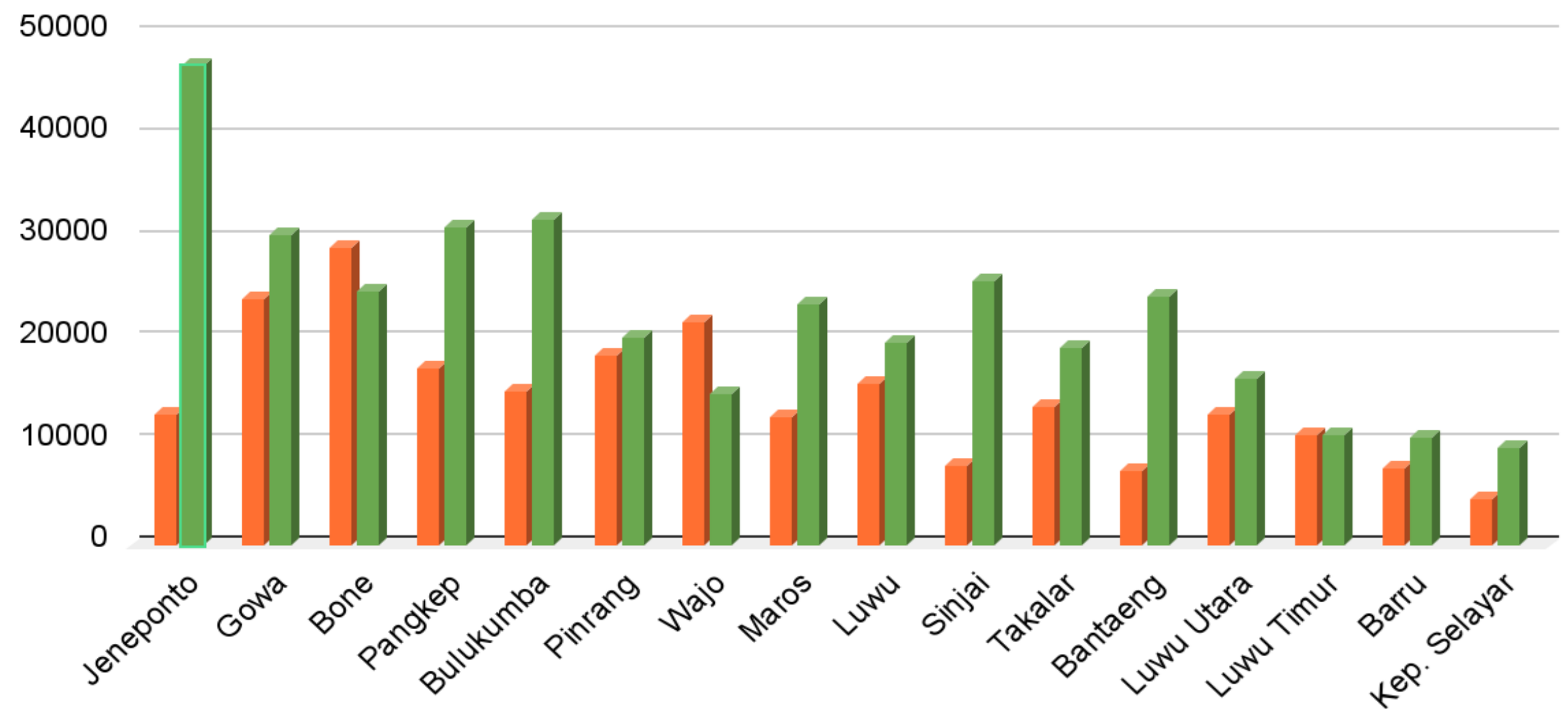


Backlog Delineasi Kawasan Pesisir, Sulawesi Selatan 588.966



Delineasi Kawasan Pesisir 588.966

■ Kepemilikan 230.197
 ■ RTLH (Kualitas) 358.769



Sumber Data my.pkp.go.id
13 Oktober 2025

Backlog SULAWESI TENGGARA

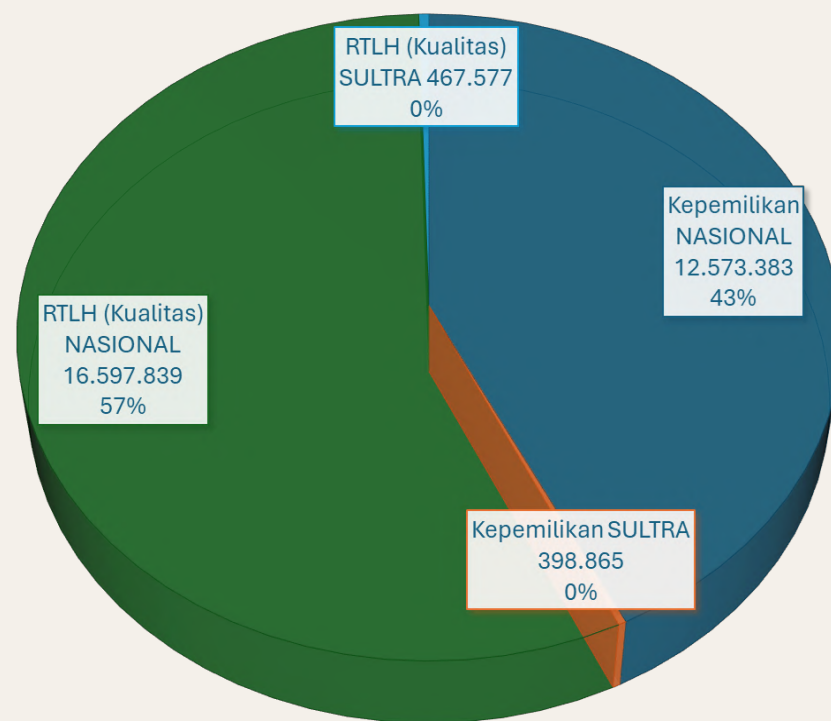
Delineasi Pesisir

Total Backlog NASIONAL 29.171.222

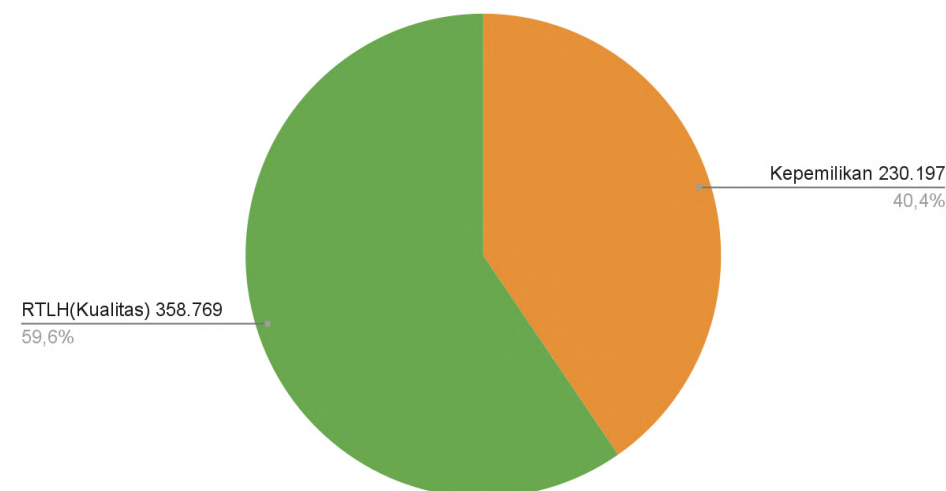
Total Backlog SULAWESI SELATAN 214.899

Total Backlog Delineasi Kawasan Pesisir, SULTRA 156.204

BACKLOG NASIONAL DAN BACKLOG SULAWESI TENGGARA

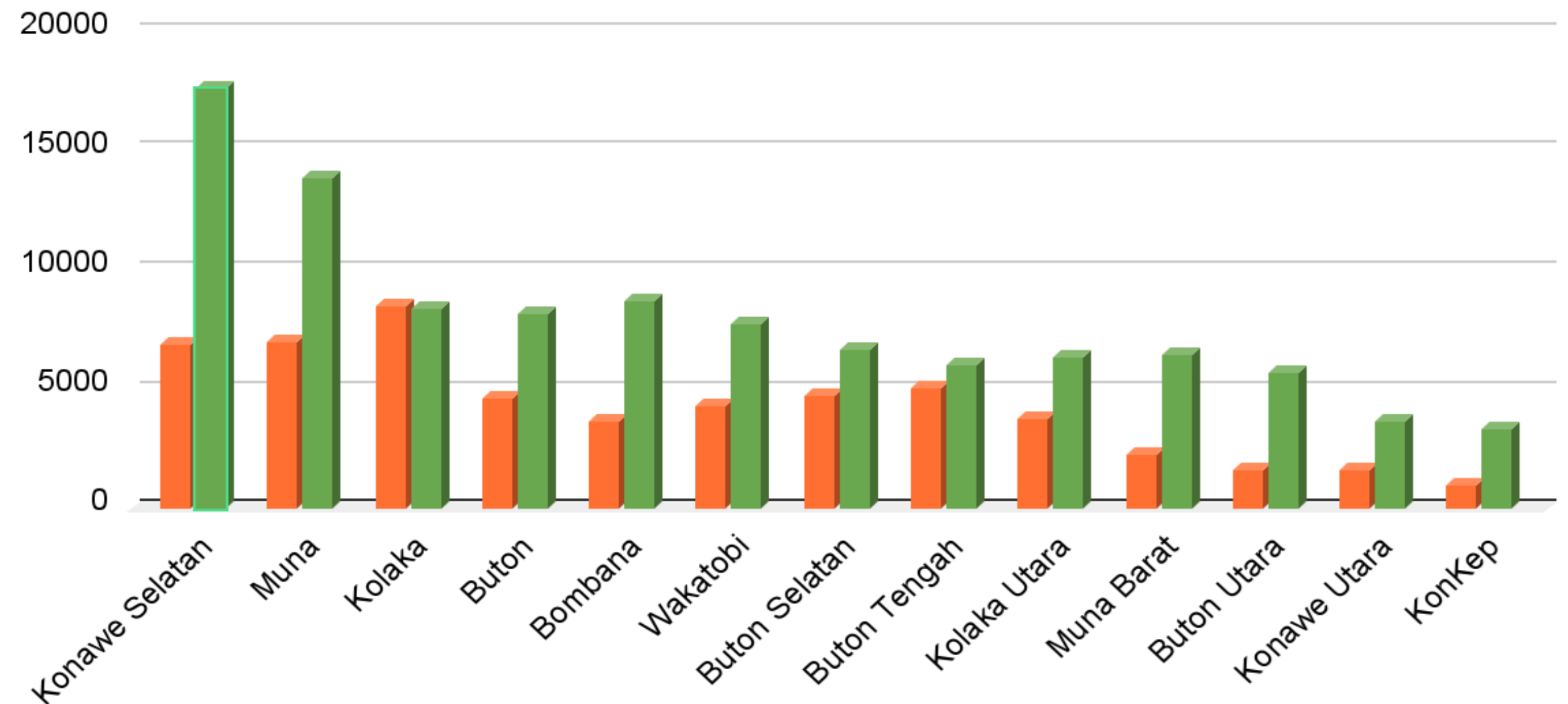


Backlog Delineasi Kawasan Pesisir, Sulawesi Tenggara 156.204



Delineasi Kawasan Pesisir 156.204

■ Kepemilikan 86.828
 ■ RTLH (Kualitas) 128.071



Sumber Data my.pkp.go.id
13 Oktober 2025



KEMPU
REPUBLIC OF INDONESIA

Program 3
Juta Rumah
(Delineasi
Perkotaan)

Jenis Program	Sumber Pendanaan	Program	Sulawesi Selatan		Sulawesi Tenggara	
			Selesai	Rencana	Selesai	Rencana
Pembangunan Baru	Negara	PKP		1	3	
		NON PKP		34	18	
	Pengembang	FLPP				
		KOMERSIL				
	Swadaya	PBG	116		111	
		NON PBG				
	Gotong Royong	CSR	1	2		
Peningkatan Kualitas	Negara	PKP				
		NON PKP		14	78	36
	Pengembang	FLPP	139			
		KOMERSIL				
	Swadaya	PBG	2			
		NON PBG				
	Gotong Royong	CSR	1	57	1	10
Total			259	108	211	56



Program 3 Juta Rumah (Delineasi Perdesaan)

Jenis Program	Sumber Pendanaan	Program	Sulawesi Selatan		Sulawesi Tenggara	
			Selesai	Rencana	Selesai	Rencana
Pembangunan Baru	Negara	PKP				
		NON PKP		90		
	Pengembang	FLPP	740	319		
		KOMERSIL				
	Swadaya	PBG	387			
		NON PBG				
	Gotong Royong	CSR	17	67		
Peningkatan Kualitas	Negara	PKP				
		NON PKP		9		
	Pengembang	FLPP	740	320		
		KOMERSIL				
	Swadaya	PBG				
		NON PBG				
	Gotong Royong	CSR	17	67		
			1901	872		

BACKLOG PERUMAHAN DELINEASI PERDESAAN DAN PERKOTAAN

NO	KAB.	BACKLOG KEPEMILIKAN	BACKLOG KUALITAS	TOTAL BACKLOG PERUMAHAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN				
PERKOTAAN				
1	KOTA MAKASSAR	82.432	21.977	104.409
2	KOTA PARE PARE	9.623	3.091	12.714
3	KOTA PALOPO	11.360	4.689	16.049
PERDESAAN				
1	KAB. SOPPENG	9.498	12.878	22.376
2	KAB. SIDRAP	16.029	11.971	28.000
3	KAB. ENREKANG	8.387		
4	KAB. TANA TORAJA			
5	KAB. TORAJA UTARA			
PROVINSI SULAWESI TENGGARA				
PERKOTAAN				
1	KOTA KENDARI			
2	KOTA BAU BAU			
PERDESAAN				
1	KAB. KONAWE			
2	KAB. KOLAKA TIMUR			

INFOGRAFIS delineasi perkotaan



INFOGRAFIS perdesaan



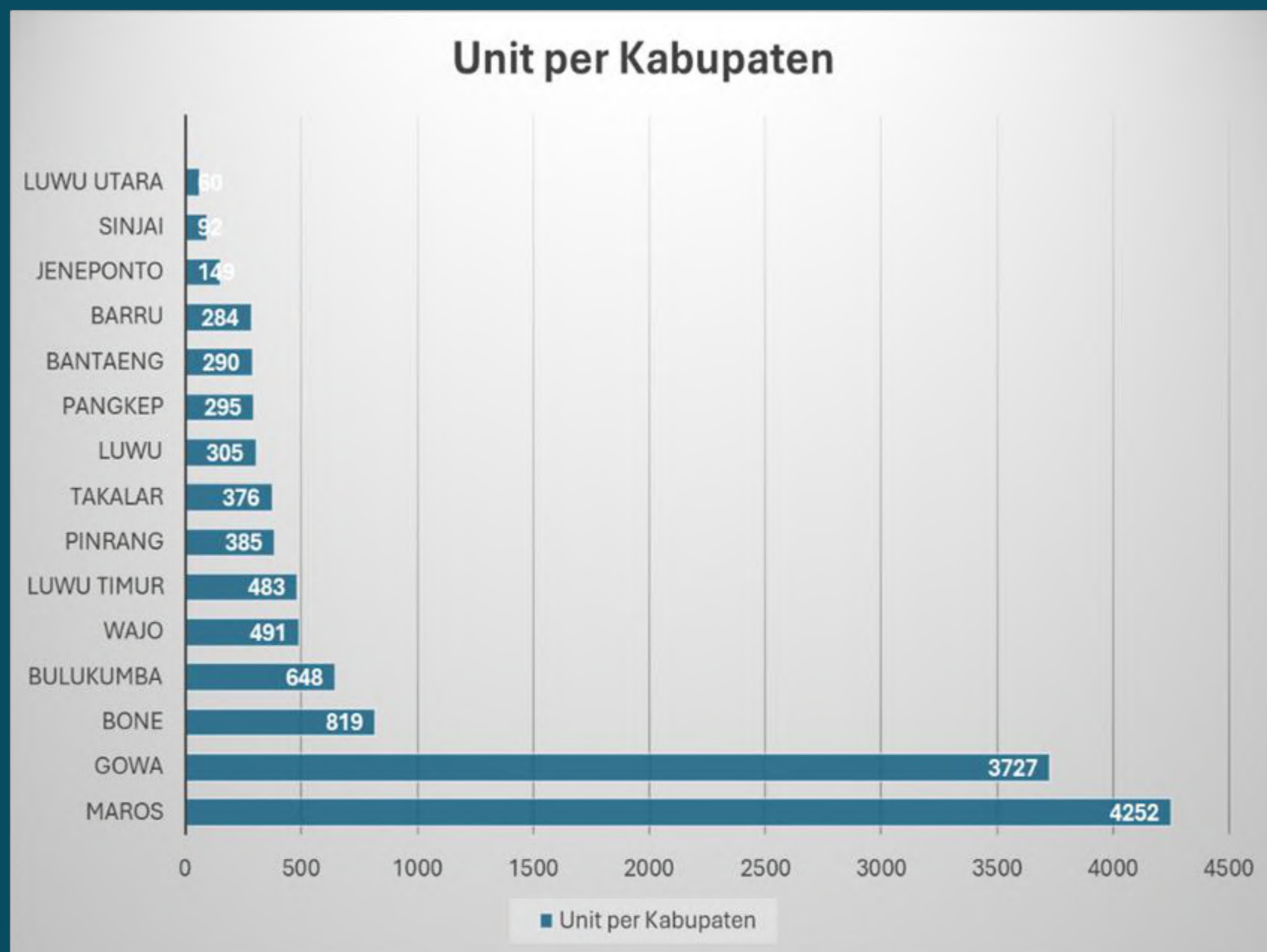
Realisasi Penyaluran FLPP



REALISASI PENYALURAN FLPP SULAWESI SELATAN

Delineasi Kawasan Pesisir

12.673 unit	Rp. 2,1 Triliun Nilai FLPP	...	...	...	Sulawesi Selatan Delineasi Pesisir	16 KAB/KOTA
		BANK	PENGEMBANG	LOKASI PERUMAHAN		



(Dokumentasi)



Bumi Pajukukang Mas 3, Bantaeng



Kelapa Gading Barru Residence, Barru



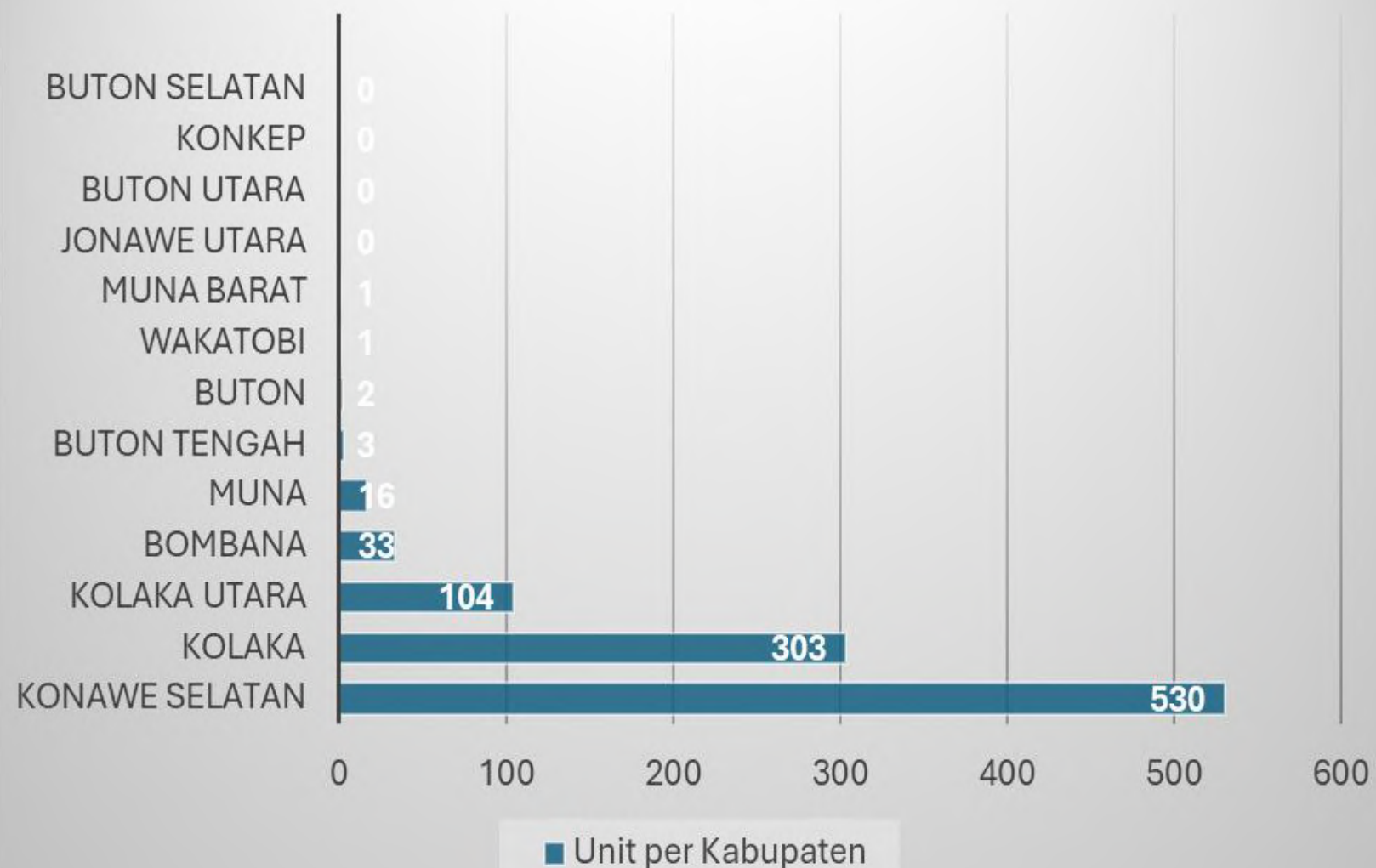
Rindra Pratama 8, Bulukumba

REALISASI PENYALURAN FLPP SULAWESI TENGGARA

Delineasi Kawasan Pesisir

993 unit Rp. 171 Milyar Sulawesi Tenggara 13
 Nilai FLPP BANK PENGEMBANG LOKASI Delineasi KAB/KOTA
 PERUMAHAN Pesisir

Unit per Kabupaten



(Dokumentasi)



Onewila Praja Land, Konawe Selatan



Mega Bola Residence 2, Kolaka Utara



Villa Indah Pondui 2, Kolaka



Puri Kencana, Konawe Selatan

REALISASI PENYALURAN FLPP SULSEL DAN SULTRA Delineasi Perdesaan



740
unit

Rp. 128 Milyar
Nlai FLPP

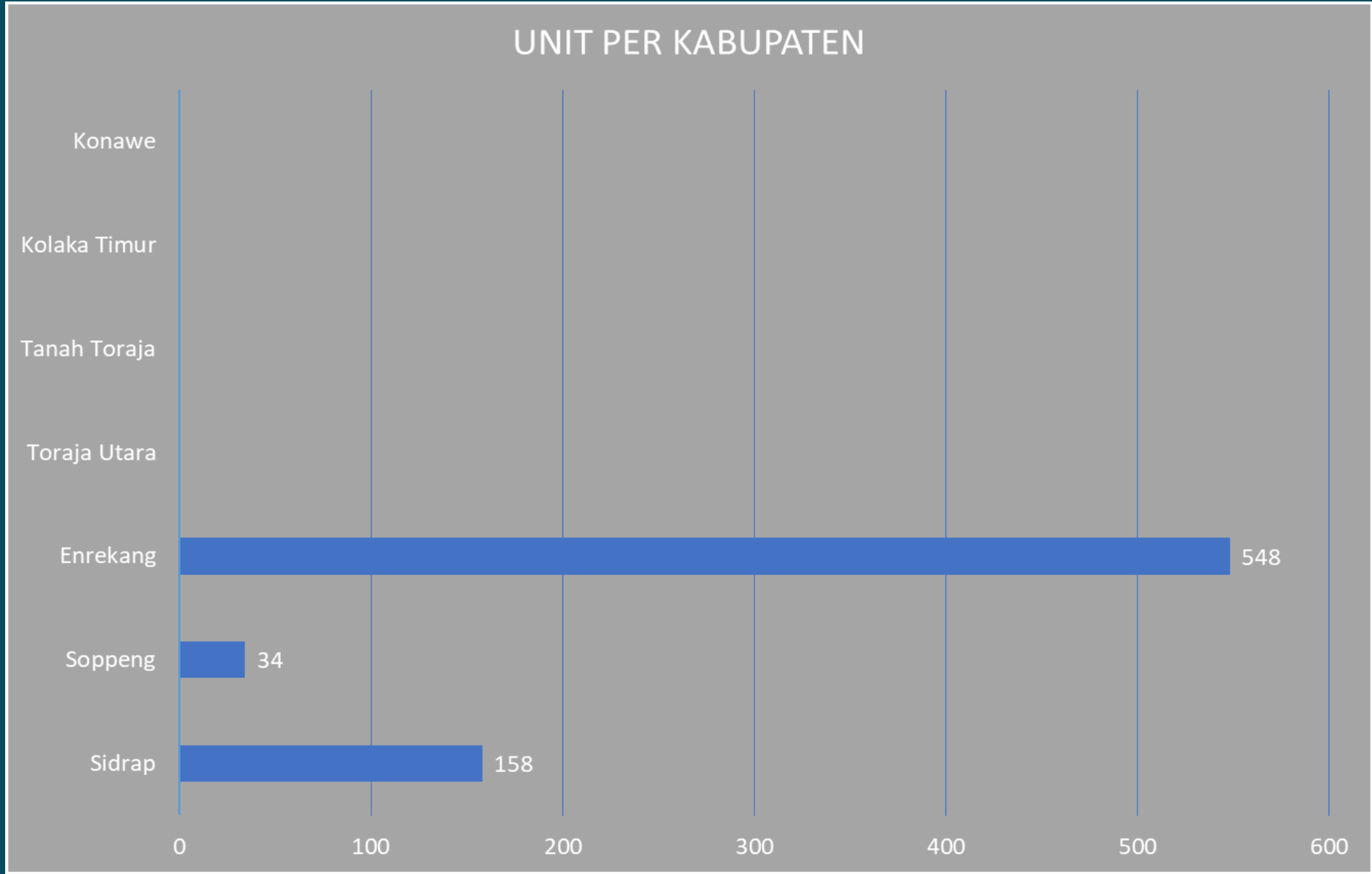
BTN &
BNI
BANK

15
PENGEMBANG

15
LOKASI
PERUMAHAN

Sulawesi
Selatan
Delineasi
Perdesaa
n

7
KAB/KOTA



(Dokumentasi)



Ufa Residence 2, Enrekang



Del Mattapa Residence, Soppeng



Clara Residence Four, Sidrap

Pembangunan Zona Integritas & Penerapa Manajemen Risiko



Implementasi Zona Integritas di Lingkungan BP3KP Sulawesi III

Penunjukan Agen Perubahan

Kegiatan Pembangunan ZI di Lingkungan Balai P3KP Sulawesi III

- Penunjukan Agen Perubahan di setiap Seksi, dan satker
- Keikutsertaan dalam Bimtek ZI
- Penyusunan SOP
- Pelatihan Public Speaking, kepribadian dan layanan public (*upcoming 7 desember 2025*)
- Pembahasan Program & Rencana Kerja (*tgl 16 desember 2025*)
- Media Sosialisasi, sticker branding, merchandise
- Pembuatan display ruang layanan & podcast

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
Jalan Perumahan Raya No. 22, Kompleks PDAM, Pannakang, Makassar 90231 Email: bp3kp.sulawesi3@pkp.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN SULAWESI III
NOMOR : 20/KPTS/Rb14/2025
TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DILINGKUNGAN BALAI PELAKSANA
PENYEDIAAN PERUMAHAN SULAWESI III

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN SULAWESI III

Menimbang: Bahwa pada periode 2022 sampai dengan tahun 2024 Direktorat Jenderal Perumahan telah melaksanakan pencanangan dan Pembangunan Zona Integritas (ZI) di Balai, serta bahwa pada periode pemerintahan saat ini Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman berkomitmen untuk melanjutkan Pembangunan Zona Integritas.

Mengingat:

1. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 388);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
3. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1064);
4. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 242);
5. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Evaluasi Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 268);
6. Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 123/KPTS/M/2025 tentang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Fungsi Tertentu;
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor 06/SE/Dt/2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
8. Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nomor 15/KPTS/ZI/Rb 14/2022 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih

PEMBENTUKAN TIM ZI

Pembahasan Draft MR Balai BP3KP Sulawesi III

Kegiatan Berbasis Risk Awareness di Lingkungan Balai P3KP Sulawesi III

PEMBENTUKAN TIM MR

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
Jalan Penjemihan Raya No. 22, Kompleks PDAM, Panakiang, Makassar 90231

Nomor : UM0102-Rb14/364
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rapat Pembahasan Internal Manajemen Risiko

Makassar, 07 Oktober 2025

Yth.
Daftar Terlampir
di –
Tempat

Menindaklanjuti surat Direktur Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor PR0301-DT/113 perihal Permintaan Penyampaian Komitmen Manajemen Risiko, maka dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri rapat di Lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Rabu- Jumat, 8 - 10 Oktober 2025
Waktu : 09.00 WITA – selesai
Tempat : Ruang Rapat KTU
Link Zoom : Menyusul

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Kepala Balai,

Bakhtiar
NIP. 197110092002121003

Kegiatan Penyiapan dan Penguatan *Risk Awareness* di Lingkungan Balai P3KP Sulawesi III

- Pemetaan risiko dan penyusunan profil risiko di masing – masing seksi 1, seksi 2, satker Balai, Satker Sulsel dan Satker Sultra
- Pembahasan draft Profil Risiko masing-masing seksi dan satker
- Finalisasi Profil Risiko (*On Progress*)
- Pelaksanaan Monev berdasarkan risiko yang diidentifikasi
- Pemantauan Tindak Lanjut hasil Monev

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
Jalan Penjemihan Raya No. 22, Kompleks PDAM, Panakiang, Makassar 90231 Email: bp3kp.sulawesi3@pkp.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
NOMOR : 21/KPTS/Rb14/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN RISIKO DAN SPIP

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III

Mengingat: Bahwa untuk melaksanakan Manajemen Risiko secara komprehensif di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III serta melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu membentuk Unit Pemilik Risiko, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III Tahun 2025.

Mengingat:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 388);
3. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1064);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan SPIP di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Memperhatikan:

1. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Surat Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor PR.0301-DT/113 perihal Permintaan Penyampaian Komitmen Manajemen Risiko Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PENETAPAN UNIT PEMILIK RISIKO UPR T-2 BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III TAHUN ANGGARAN 2025.

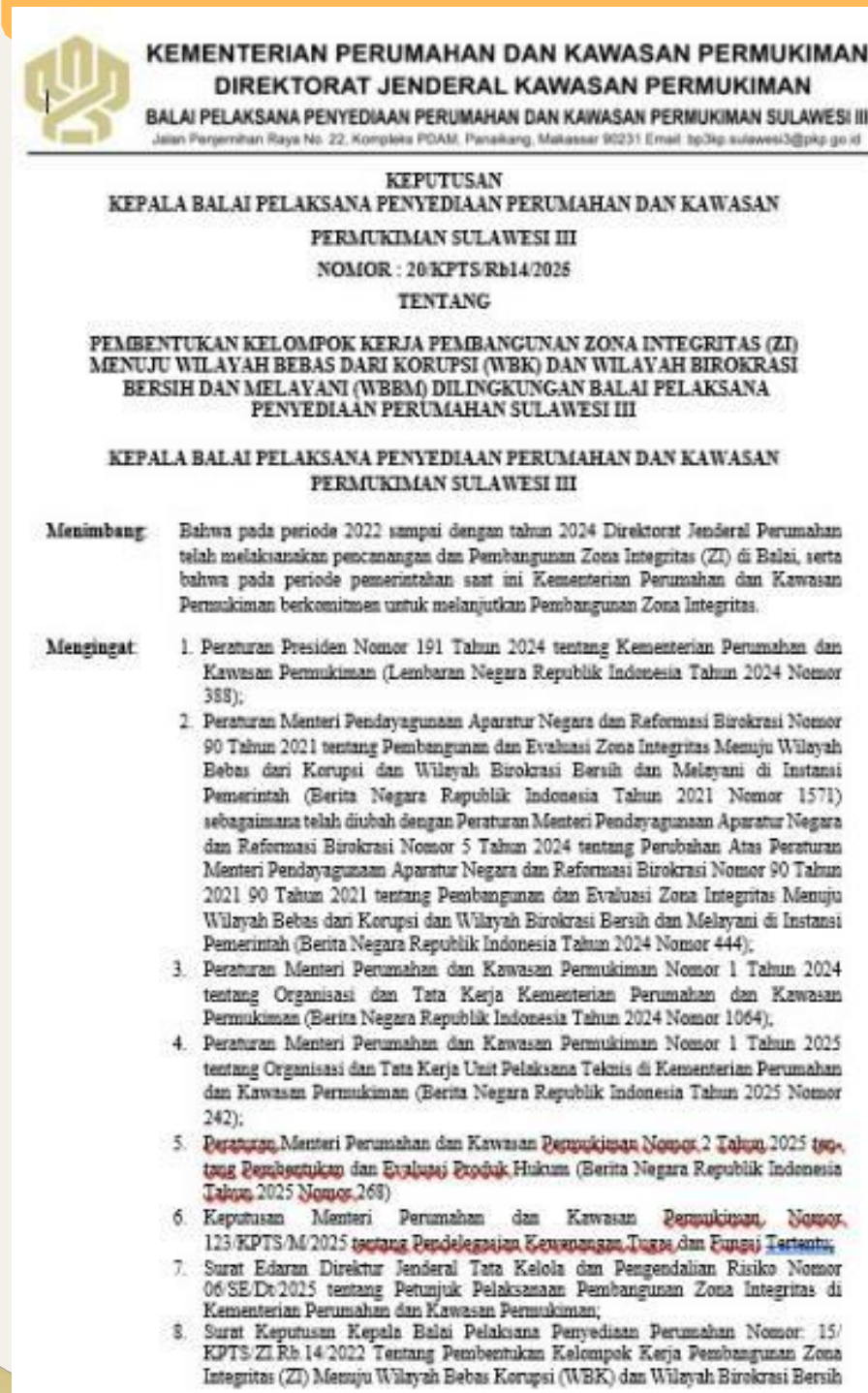
Implementasi Zona Integritas di Lingkungan BP3KP Sulawesi III

Penunjukan Agen Perubahan

Kegiatan Pembangunan ZI di Lingkungan Balai P3KP Sulawesi III

- Penunjukan Agen Perubahan di setiap Seksi, dan satker
- Keikutsertaan dalam Bimtek ZI
- Penyusunan SOP
- Pelatihan Public Speaking, kepribadian dan layanan public (*upcoming 7 desember 2025*)
- Pembahasan Program & Rencana Kerja (*tgl 16 Oktober 2025, dan di agendakan per-2 minggu*)
- Media Sosialisasi, sticker branding, merchandise
- Pembuatan display ruang layanan & podcast

PEMBENTUKAN TIM ZI





RUANG PELAYANAN PUBLIK BALAI



**RUANG PELAYANAN PUBLIK SATKER
PKP PROV SULTRA**

KEGIATAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA DI LINGKUP TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO

Pembahasan Draft MR Balai BP3KP Sulawesi III

Kegiatan Berbasis Risk Awareness di Lingkungan Balai P3KP Sulawesi III

PEMBENTUKAN TIM MR

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
 Jalan Penjemihan Raya No. 22, Kompleks PDAM, Panakang, Makassar 90231

Nomor : UM0102-Rb14/364
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Rapat Pembahasan Internal Manajemen Risiko

Makassar, 07 Oktober 2025

Yth.
 Daftar Terlampir
 di –
 Tempat

Menindaklanjuti surat Direktur Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor PR0301-DT/113 perihal Permintaan Penyampaian Komitmen Manajemen Risiko, maka dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri rapat di Lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Rabu- Jumat, 8 - 10 Oktober 2025
 Waktu : 09.00 WITA – selesai
 Tempat : Ruang Rapat KTU
 Link Zoom : Menyusul

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Kepala Balai,

 Bakhtiar
 NIP. 197110092002121003

Kegiatan Penyiapan dan Penguatan *Risk Awareness* di Lingkungan Balai P3KP Sulawesi III

- Pemetaan risiko dan penyusunan profil risiko di masing – masing seksi 1, seksi 2, satker Balai, Satker Sulsel dan Satker Sultra
- Pembahasan draft Profil Risiko masing-masing seksi dan satker
- Finalisasi Profil Risiko (*On Progress*)
- Pelaksanaan Monev berdasarkan risiko yang diidentifikasi
- Pemantauan Tindak Lanjut hasil Monev
- Media Sosialisasi Internal Campaign Risk awareness

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
 Jalan Penjemihan Raya No. 22, Kompleks PDAM, Panakang, Makassar 90231 Email: bp3kp.sulawesi3@pkp.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
NOMOR : 21/KPTS/Rb14/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN RISIKO DAN SPIP

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III

Mengingat: Bahwa untuk melaksanakan Manajemen Risiko secara komprehensif di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III serta melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu membentuk Unit Pemilik Risiko, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III Tahun 2025.

Mengingat:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 388);
3. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1064);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan SPIP di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Mempertimbangkan:

1. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Surat Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor PR 0301-DT/113 perihal Permintaan Penyampaian Komitmen Manajemen Risiko Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PENETAPAN UNIT PEMILIK RISIKO UPR T-2 BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III TAHUN ANGGARAN 2025.



NOTULENSI RAPAT

- Agenda : Koordinasi Kab. Buton Utara Terkait Program KemenPKP
- Tanggal/Pukul : 19 Januari 2026/09.20 WITA
- Lokasi : Ruang Rapat Satker PKP Prov. Sultra
- Peserta Rapat :

1. Muh. Irsan Basalamah	Kasatker PKP Prov. Sultra
2. Mustafa	Kadis PKP Kab. Buton Utara
3. Ikhsan Mapo	Kabid Permukiman PKP Butur
4. Sirafin Sarini	Asisten KPA
5. Awirullah	Tenaga Ahli Program BSPS
- Poin Pembahasan :

1. Pembahasan Program BSPS TA 2026
2. Pembahasan Program Sanitasi TA 2026
3. Pembahasan Program Kawasan Kumuh TA 2026
- Sesi Diskusi :

1. Pemda Kab. Buton Utara diwakili Dinas PKP Kab. Buton Utara sudah menginput data Usulan Program BSPS di Aplikasi SIBARU, kami juga membua Hard Copy sebagai pegangan Kasatker untuk kedepannya. Penginputan data di aplikasi sudah sesuai dengan format yang tersedia meliputi : - Identifikasi Calon Penerima Bantuan - Melakukan validasi awal data untuk meminimalkan kesalahan input dan duplikasi data kami juga dari pemda meminta update informasi terkait permintaan selanjut nya dan kuota yang tersedia apabila memang Kab. Buton Utara mendapat bantuan untuk TA 2026
2. Dari kami satker sendiri, kami meminta keterlibatan pemda terkait data pengusulan bantuan dan pelaksanaan di kegiatan nantinya Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam menjamin ketepatan sasaran penerima BSPS, antara lain melalui: - Pendataan awal dan Identifikasi Calon Penerima - Verifikasi awal Data

- Pengusulan Data ke Pemerintah Pusat

Dalam tahap pelaksanaan, Pemda berperan sebagai fasilitator dan pendukung keberhasilan program, meliputi:

- Koordinasi dan Pendampingan
- Dukungan Administratif dan Teknis
- Monitoring dan Pengawasan
- Penyelesaian Permasalahan di Lapangan

Pemerintah Daerah juga memiliki dukungan penuh dengan cara menyediakan Data RTLH yang terintegrasi dan Bantuan Perumahan yang serupa.

3. Terkait penanganan permukiman kumuh, kami pihak satker meminta ketersediaan RC mohon di lengkapi. Dan kami menginformasikan kalau ada kawasan kumuh di daerah pesisir, bisa di usulkan program kampung nelayan merah putih.
4. Selain BSPS, di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KemenPKP) juga terdapat beberapa program strategis lain, khususnya penanganan kawasan kumuh dan sanitasi.
 - Penanganan Kawasan Kumuh
Program ini bertujuan meningkatkan kualitas permukiman dan mengurangi luas kawasan kumuh melalui peningkatan infrastruktur dasar dan penataan lingkungan.
 - Program Sanitasi Lingkungan
Program sanitasi difokuskan pada peningkatan kesehatan lingkungan dan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat.
5. Dokumen RP3KP dan RP2KPKPK mohon di update sebagai syarat dasar RC Penanganan Kumuh dan Sanitasi, karena kita ketahuai ada 8 RC yang harus di lengkapi untuk syarat pengusulan Program Penanganan Kumuh dan Sanitasi.
6. Sama hal nya dengan BSPS, kami dari satker sangat berharap apa bila tahun ini Pemda Kab. Butor mendapatkan Bantuan Peningkatan Penanganan Kumuh dan dan Peningkatan Sanitasi, kami mohon melibatkan penuh Pemda terkait sebagai dasar usulan bantuan.
7. Koordinasi ini sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan TA. 2026

Notulen

: Eka Mukti, S.E.



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Jl. Drs. H. Abdullah Silondae No. 84, Korumba, Kec. Mandonga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara

Dokumentasi : Koordinasi Kab. Buton Utara Terkait Program Kemen PKP







DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III

Jalan Penjernihan Raya No.22, Kompleks PDAM, Panaikang, Makassar 90231 Email : bp3kp.sulawesi3@pkp.go.id

NOTULENSI RAPAT

- Agenda : Koordinasi Kab. Konawe Selatan Terkait Program KemenPKP
- Tanggal/Pukul : 22 Januari 2026/11.00 WITA
- Lokasi : Ruang Rapat Satker PKP Prov. Sultra
- Peserta Rapat : 1. Muh. Irsan Basalamah Kasatker
2. Laode Sirafin Sarini Asisten KPA
3. Junadi Rombe Sekdis PKP Konsel
4. M.I. Taridala Kasi Perkitam Konsel
5. Eka Mukti Staff Satker PKP
- Poin Pembahasan : 1. Pembahasan Program BSPS TA 2026
2. Pembahasan Program Sanitasi TA 2026
3. Pembahasan Program Kawasan Kumuh TA 2026
- Sesi Diskusi : 1. di Buton Selatan, ketersediaan Lahan APL lebih dari 200Ha yang diperuntukan untuk pembangunan Infrastruktur Pemerintahan. Dinas PKP menusahakan Lahan sekitar 5 sampai 6 Ha untuk bidang perumahan, dikhususkan pembangunan Rumah ASN.
2. Dari kami satker sendiri, akan menyampaikan ketersediaan lahan yang pemda Busel maksudkan ke pemerintah pusat, kami juga dari pusat akan cepat menanggapi ketersediaan lahan tersebut, dikarenakan pemerintah pusat sedang gencar gencarnya mencari lahan untuk pembangunan infrastruktur maupun pembangunan rumah MBR ataupun ASN.
- Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam menjamin ketepatan sasaran penerima BSPS, antara lain melalui:
- Pendataan awal dan Identifikasi Calon Penerima
 - Verifikasi awal Data

- Pengusulan Data ke Pemerintah Pusat

Dalam tahap pelaksanaan, Pemda berperan sebagai fasilitator dan pendukung keberhasilan program, meliputi:

- Koordinasi dan Pendampingan
- Dukungan Administratif dan Teknis
- Monitoring dan Pengawasan
- Penyelesaian Permasalahan di Lapangan

Pemerintah Daerah juga memiliki dukungan penuh dengan cara menyediakan Data RTLH yang terintegrasi dan Bantuan Perumahan yang serupa.

3. Terkait penanganan permukiman kumuh, kami pihak satker meminta ketersediaan RC mohon di lengkapi. Dan kami menginformasikan kalau ada kawasan kumuh di daerah pesisir, bisa di usulkan program kampung nelayan merah putih.
4. Selain BSPS, di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KemenPKP) juga terdapat beberapa program strategis lain, khususnya penanganan kawasan kumuh dan sanitasi.
 - Penanganan Kawasan Kumuh
Program ini bertujuan meningkatkan kualitas permukiman dan mengurangi luas kawasan kumuh melalui peningkatan infrastruktur dasar dan penataan lingkungan.
 - Program Sanitasi Lingkungan
Program sanitasi difokuskan pada peningkatan kesehatan lingkungan dan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat.
5. Dokumen RP3KP dan RP2KPKPK mohon di update sebagai syarat dasar RC Penanganan Kumuh dan Sanitasi, karena kita ketahuai ada 8 RC yang harus di lengkapi untuk syarat pengusulan Program Penanganan Kumuh dan Sanitasi.
6. Sama hal nya dengan BSPS, kami dari satker sangat berharap apa bila tahun ini Pemda Kab. Butor mendapatkan Bantuan Peningkatan Penanganan Kumuh dan dan Peningkatan Sanitasi, kami mohon melibatkan penuh Pemda terkait sebagai dasar usulan bantuan.
7. Koordinasi ini sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan TA. 2026

Notulen

: Eka Mukti, S.E.



Dokumentasi : Koordinasi Kab. Konawe Selatan Terkait Program Kemen PKP







KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Jl. Drs. H. Abdullah Silondae No. 84, Korumba, Kec. Mandonga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara

LEMBAR DISPOSISI

Unit Pengirim : PPK Ruswa, PSU dan Kawasan Permukiman

No. Surat : - /Tgl Surat : 25 Januari 2026

Hal : Rapat Koordinasi Kelengkapan Data BMN dan
Persiapan Proses BAST BMN di Lingkungan Satker
PKP Provinsi Sulawesi Tenggara

No. Agenda : /Tgl Penerimaan : 25 Januari 2026

Yth

- | | |
|---|--|
| ☒ PPK Ruswa, PSU dan Kawasan Permukiman | ☐ Kaur Teknik PPK Randal |
| ☐ Pejabat Penandatanganan SPM | ☐ Kaur Administrasi PPK Randal |
| ☐ Bendahara | ☐ Kaur Teknik PPK Ruswa, PSU & KP |
| ☐ Pejabat Pengadaan Barang/Jasa | ☐ Kaur Administrasi PPK Ruswa, PSU & KF |
| ☐ Asisten KPA | ☐ |

Sifat : ☐ Biasa ☒ Segera ☒ Perlu Perhatian ☐ Perhatikan Batas Waktu

- | | |
|--|--|
| ☐ Memberikan dan menyampaikan saran | ☐ Monitoring Perkembangan |
| ☒ Melaksanakan / Menindaklanjuti | ☐ Dibahas bersama |
| ☐ Bicarakan dengan saya | ☐ Jadwalkan / Atur rapat / Pertemuan |
| ☐ Mohon hadir mewakili saya | ☐ Diproses lebih lanjut sesuai prosedur |
| ☐ Ikut hadir / Menugaskan Staf | ☐ Melaksanakan dan melaporkan hasilnya |
| ☐ Diketahui / Sebagai informasi | ☐ Untuk dipedomani |
| ☐ Menyimpan dalam file | ☐ Siapkan konsep jawaban / tanggapan |
| ☐ Melaksanakan sesuai dengan pembicaraan | ☐ Ikuti Zoom |

Catatan

data aset rumah dan sanitasi
dikirim ke tim Aset.

Kepala Satuan Kerja
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Sulawesi Tenggara

Muh. Irsan Basalamah, S.T., M.T.
NIP. 19870612 201001 1 013



NOTULEN RAPAT

Judul Rapat	: Rapat Koordinasi Kelengkapan Data BMN dan Persiapan Proses BAST BMN di Lingkungan Satker PKP Provinsi Sulawesi Tenggara
Hari/Tanggal	: Rabu, 25 Februari 2026
Waktu	: 10:30 WITA s/d Selesai
Lokasi	: Ruang Rapat Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara
Tujuan Rapat	: Koordinasi Kelengkapan Data BMN dan Persiapan Proses BAST BMN di Lingkungan Satker PKP Provinsi Sulawesi Tenggara
Peserta	: Rapat ini dihadiri oleh: 1. Kepala Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sultra 2. Koordinator BMN Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sultra 3. Petugas UKPA Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sultra 4. Petugas UAKPB Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sultra 5. Asisten KP Satker Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sultra
Pimpinan Rapat	: Muh. Irsan basalamah, S.T.,M.T. selaku Kepala Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara
Notulis	: Laode Sirafin Sarini, S.T.

A. Dasar Pembahasan Rapat

Rapat dilaksanakan Sehubungan dengan Surat Undangan Rapat Direktur Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan Nomor UM0102-Dt/25 tanggal 23 Februari tahun 2026 hal Koordinasi Proses Serah terima Aset Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus. Beberapa poin pembahasan:

1. Data dan Format BMN Rumah Susun, Rumah Khusus, PSU, dan Aset Tetap diupdate ke versi PKP
2. Data BMN Kumuh dan Sanitasi Buton (DED, Fisik, dan TA/Supervisi) tahun 2025 belum ada di tim BMN Satker

3. Rincian DATIN BMN Kumuh dan Sanitasi Buton perlu dikoordinasikan ke Biro BMN dan Balai
4. Data BMN diklaster berdasarkan Jenis BMN

B. Rencana Tindak Lanjut

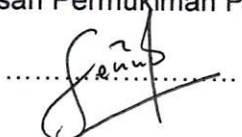
1. Dikoordinasikan kepada PPK Ruswa, PSU, dan Kawasan Permukiman untuk permintaan Dokumen BMN Kumuh dan sanitasi tahun 2025
2. Rincian DATIN BMN Kumuh dan Sanitasi Buton tahun 2025 akan dikoordinasikan ke Biro BMN dan Balai

Notulis



Laode Sirafin sarini, S.T.

Tanda Tangan Peserta :

1. Kepala Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sultra
Muh. Irsan Basalamah, ST.,MT. 
2. Koordinator BMN Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sultra
Hamka Thahir 
3. Petugas UKPA Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sultra
Lewi Patiung 
4. Petugas UAKPB Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sultra
Yenni Syamsul Bahri 
5. Asisten KP Satker Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sultra
Laode Sirafin Sarini 



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Jl. Malaka Kompleks Ruko Spazia Citraland Blok K1 No.1 Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari - Kode Pos : 93231

DOKUMENTASI

**RAPAT KOORDINASI KELENGAKAPAN DATA BMN DAN PERSIAPAN PROSES BAST BMN DI
LINGKUNGAN SATKER PKP PROVINSI SULAWESI TENGGARA**





KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Jl. Drs. H. Abdullah Silondae No. 84, Korumba, Kec. Mandonga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara

LEMBAR DISPOSISI

Unit Pengirim : PPK Ruswa, PSU dan Kawasan Permukiman
No. Surat : - /Tgl Surat : 25 Januari 2026
Hal : Rapat Koordinasi Kelengkapan Data BMN dan
Persiapan Proses BAST BMN di Lingkungan Satker
PKP Provinsi Sulawesi Tenggara

No. Agenda : /Tgl Penerimaan : 25 Januari 2026

Yth

- | | |
|---|--|
| ☒ PPK Ruswa, PSU dan Kawasan Permukiman | ☒ Kaur Teknik PPK Randal |
| ☐ Pejabat Penandatanganan SPM | ☐ Kaur Administrasi PPK Randal |
| ☐ Bendahara | ☐ Kaur Teknik PPK Ruswa, PSU & KP |
| ☐ Pejabat Pengadaan Barang/Jasa | ☐ Kaur Administrasi PPK Ruswa, PSU & KP |
| ☐ Asisten KPA | ☐ |

Sifat : ☐ Biasa ☒ Segera ☒ Perlu Perhatian ☐ Perhatikan Batas Waktu

- | | |
|--|--|
| ☐ Memberikan dan menyampaikan saran | ☐ Monitoring Perkembangan |
| ☒ Melaksanakan / Menindaklanjuti | ☐ Dibahas bersama |
| ☐ Bicarakan dengan saya | ☐ Jadwalkan / Atur rapat / Pertemuan |
| ☐ Mohon hadir mewakili saya | ☐ Diproses lebih lanjut sesuai prosedur |
| ☐ Ikut hadir / Menugaskan Staf | ☐ Melaksanakan dan melaporkan hasilnya |
| ☐ Diketahui / Sebagai informasi | ☐ Untuk dipedomani |
| ☐ Menyimpan dalam file | ☐ Siapkan konsep jawaban / tanggapan |
| ☐ Melaksanakan sesuai dengan pembicaraan | ☐ Ikuti Zoom |

Catatan

data aset rumah dan sambutan
dikirim ke tim aset.

Kepala Satuan Kerja
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Sulawesi Tenggara

Muh. Irsan Basalamah, S.T., M.T.
NIP. 19870612 201001 1 013



Nomor : UM0102-Dt.04/25
Sifat : Biasa
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Koordinasi Proses Serah Terima Aset
Bantuan Pembangunan Perumahan
dan Penyediaan Rumah Khusus

Jakarta, 23 Februari 2026

Yth. *Daftar terlampir*

Di -

Tempat.

Dalam rangka menindaklanjuti tanggapan dan masukan yang telah diberikan terhadap surat kami sebelumnya Nomor HK0101-Dt.04/2 Tanggal 20 Januari 2026 Hal Permohonan Masukan Penyempurnaan SE Dirjen TKPR No. 03/SE/Dt/2025 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun dan SE Dirjen TKPR No. 05/SE/Dt/2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyediaan Rumah Khusus, bersama ini dengan hormat kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir dalam kegiatan koordinasi yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 26 Februari 2026
Waktu : Pukul 08.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat 218 Pusat Studi Jepang (PSJ) Universitas
Indonesia
Jl. Prof. DR. Selo Soemardjan, Pondok Cina, Kecamatan
Beji, Kota Depok, Jawa Barat.
Narasumber : Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Sekretariat
Jenderal Kementerian PKP
Agenda : Koordinasi Proses Serah Terima Aset Bantuan:
1. Pembangunan Rumah Susun;
2. Pembangunan Rumah Khusus;
3. Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh;
4. Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah; dan
5. Pengembangan Permukiman.

Panitia menanggung konsumsi selama kegiatan, sedangkan biaya perjalanan dinas ditanggung oleh masing-masing unit kerja pengutus. Untuk konfirmasi kehadiran dan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan dengan Saudara Brian (HP. 085369535900) atau Saudari Diva (HP. 085877684512).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Sistem Efisiensi dan Kemitraan
Penyelenggaraan Pembangunan



Sonny Surachman Ramli, S.H., L.L.M.
NIP 197103041999031001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
3. Direktur Jenderal Kawasan Permukiman;
4. Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan;
5. Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan;
6. Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.

LAMPIRAN SURAT

Nomor : UM0102-Dt.04/25

Tanggal : 23 Februari 2026

DAFTAR UNDANGAN

Hadir secara Luring:

A. Sekretariat Jenderal Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama;
2. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara;
3. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa;
4. Kepala Biro Hukum.

B. Inspektorat Jenderal

1. Inspektur I;
2. Inspektur II;
3. Inspektur III;
4. Inspektur Bidang Investigasi.

C. Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman;
2. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman;
3. Direktur Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman;
4. Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman;
5. Direktur Bina Teknik Perumahan dan Kawasan Permukiman;
6. Kepala Bagian Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara, Sekretariat Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman.

D. Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan;
2. Direktur Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan;
3. Direktur Penyiapan Lahan, Perizinan, dan Penghunian Perumahan Perdesaan;
4. Direktur Pembangunan Perumahan Perdesaan;
5. Direktur Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan;
6. Kepala Bagian Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara, Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.

E. Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan;
2. Direktur Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perkotaan;
3. Direktur Penyiapan Lahan, Perizinan, dan Penghunian Perumahan Perkotaan;
4. Direktur Pembangunan Perumahan Perkotaan;
5. Direktur Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan;
6. Kepala Bagian Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara, Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan;
7. Ir. Dedy Permadi, CES, Penata Kelola Perumahan Ahli Utama.

F. Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko;
2. Direktur Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko;
3. Direktur Keterbukaan Publik, Transparansi, dan Akuntabilitas;
4. Direktur Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi;
5. Kepala Bagian Keuangan dan Umum, Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko;
6. Ir. Christ Robert Panusunan Marbun, M.Sc., Penata Kelola Perumahan Ahli Utama;
7. Ir. Samson Sibarani M.T., Analis Kebijakan Ahli Madya;
8. PPK Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.

Hadir secara Daring:

A. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV;
2. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa I;
3. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa III;
4. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II;
5. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III;
6. Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau;
7. Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur;
8. Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara.

LAMPIRAN SURAT

Nomor : UM0102-Dt.04/25

Tanggal : 23 Februari 2026

SUSUNAN ACARA

No	Waktu	Kegiatan	Moderator	Narasumber
1	08.00 – 09.00	Persiapan dan Registrasi	Panitia	
2	09.00 – 09.30	Pembukaan dan Sambutan	Direktur Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan	
3	09.30 – 12.00	Koordinasi Proses Serah Terima Aset Bantuan: 1. Pembangunan Rumah Susun; 2. Pembangunan Rumah Khusus.	Kasubdit SEKPP Perkotaan	Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal Kementerian PKP
5	12.00 – 13.00	ISHOMA	Panitia	
5	13.00 – 15.00	Koordinasi Proses Serah Terima Aset Bantuan: 1. Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh; 2. Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah; 3. Pengembangan Permukiman.	Plt. Kasubdit SEKPP Kawasan Permukiman	Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal Kementerian PKP
6	15.00 – 15.30	Kesimpulan dan Penutup	Direktur Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan	



DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Jl. Drs. H. Abdullah Silondae No. 84, Korumba, Kec. Mandonga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Senin, 30 Maret 2026

Tempat : Ruang Rapat Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara (Via Zoom Meeting)

Acara : Peluncuran Bps Secara Nasional Tahun Anggaran 2026 Dan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan Serta Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Kementerian PKP-BP TAPERA-BRI-PNM-SMF

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	TANDA TANGAN
1	MUH. IRSAN		KASATKER	
2	LAOPE SIRAFIN		STAF	
3	Muh. Fakhriana Purn		staf	
4	Indah MH			
5	Moh. Rifa Agustina		staf	
6	MURSYID HIDAYAT		STAFF	
7	NURUL BIDAYNI		staf	
8	ANNISA		staf	
9	Achmad Zulfikar M.		//	
10	Hamka Thahir		staf	
11				
12				
13				



NOTULENSI

- Agenda : Koordinasi Dengan Dinas PKP Provinsi Sulawesi Tenggara
Terkait Program KemenPKP
- Tanggal/Pukul : 27 Januari 2026/09.20 WITA
- Lokasi : Ruang Rapat Kepala Dinas PKP Prov. Sultra
- Peserta :
1. Effendi Kadis PKP Prov. Sultra
2. La Liusu Kabid PKP Prov. Sultra
3. Ira Muchsin Kabid PKP Prov. Sultra
4. Muh. Irsan Basalamah Kasatker PKP Prov. Sultra
5. Ardhan Staff Satker PKP
6. Arif Staff Satker PKP
- Poin Pembahasan : Sharing Informasi Program Provinsi dan Pusat
- Sesi Diskusi :
1. Pemda Provinsi mempunyai program pembangunan rumah baru tipe 36 di 10 Kab./Kota yang akan diskusikan dengan Satker PKP Prov. Sultra terkait aturan yang berlaku untuk keberlanjutan program pembangunan rumah tersebut
- Pemda Prov. Sultra sementara mencari solusi untuk program tersebut supaya tidak tumpang tindih antara aturan Provinsi dan Aturan Pusat.
- Kami dari pihak satker karena program ini berbunyi pembangunan baru, sehingga menyarankan untuk memakai aturan Pembangunan Baru BSPS yang ada di Kementerian PKP.
- Tetapi Update data dari Pihak Pemda Prov. Pembangunan Baru Kementerian PKP harus berada di Kawasan Kumuh, sehingga satker mencari info dan berkomunikasi dengan pihak pusat untuk kelancaran program tersebut.
- Kami sari satker menyarankan untuk pemda prov. Kolaborasi dengan Asosiasi Pengembang terkait Bantuan Pembangunan Baru Rumah Tipe 36 dengan Anggaran 50juta per Unitnya.

2. Kami dari satker sendiri tetap seperti dulu, program yang sekarang BSPS, Rusun, Rusus, PSU dan penambahan Permukiman Kumuh termasuk Sanitasi serta Monitoring Penyaluran FLPP, KPP dan SBUM.

Tetapi untuk gambaran tahun ini, kemungkinan besar Pembangunan Rusun ada, Rusun Mahasiswa di Univ. Lakidende di Kab. Konawe.

Program BSPS Range berada di kisaran 4.500 Unit s/d 5.000 Unit. Tetapi itu kami ambil dari nilai terendahnya, kemungkinan besar bisa naik dan melonjak.

Untuk Permukiman Kumuh masih terfokus di penanganan Jalan, Sanitasi dan persampahan.

Untuk Rumah Khusus Pemerintah Pusat terfokus pada Bencana Alam atau Relokasi yang terdampak Program Pemerintah.

3. Menindaklanjuti Rencana kedatangan Wakil Menteri tanggal 9 Februari, Kami dari satker meminta untuk Pemda selaku perwakilan Provinsi meminta Gubernur untuk mengundang Pak Wakil Menteri untuk menghadiri rapat atau pertemuan di kantor gubernur pada tanggal 10 Februari.

Notulen : Eka Mukti, S.E.



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Jl. Drs. H. Abdullah Silondae No. 84, Korumba, Kec. Mandonga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara

Dokumentasi : Koordinasi Dengan Dinas PKP Provinsi Sulawesi Tenggara Terkait Program KemenPKP







Laporan Kunjungan Lapangan

PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS)

I. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2025, diperlukan kegiatan monitoring dan evaluasi melalui kunjungan lapangan. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan program dengan ketentuan yang berlaku serta menjamin tercapainya sasaran program.

2. Dasar Pelaksanaan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Peraturan Menteri PUPR tentang Penyelenggaraan Program BSPS;

3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan pelaksanaan kunjungan lapangan adalah :

- Melakukan verifikasi kondisi rumah penerima bantuan;
- Memantau progres pelaksanaan kegiatan BSPS;
- Mengidentifikasi permasalahan di lapangan;
- Memberikan arahan dan pembinaan kepada penerima bantuan.

II. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

1. Hari/Tanggal : Senin/02-02-2026
2. Waktu : Jam 14.00 Sampai Selesai
3. Lokasi : Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara

III. Tim Pelaksana

1. Ridwan BAE (Komisi V DPR-RI) dan tim
2. Muh. Irsan Basalamah (Kasatker PKP Sultra) dan tim
3. Koodinator Fasilitator dan Tenaga Fasilitator Kota Kendari

IV. Objek Kunjungan

Objek kunjungan lapangan meliputi :

1. Rumah penerima bantuan BSPS;
2. Kelompok Penerima Bantuan (KPB)
3. Hasil rehabilitasi rumah.

Jumlah rumah yang dikunjungi: 3 unit.

V. Hasil Kunjungan Lapangan

1. Kondisi Rumah Penerima Bantuan

Berdasarkan hasil peninjauan lapangan, kondisi rumah penerima bantuan secara umum adalah sebagai berikut :

- Struktur Bangunan : Baik
- Atap : Baik
- Dinding : Baik
- Lantai : Baik
- Sanitasi : Tersedia

Sebagian besar rumah telah memenuhi standar minimum hunian layak.

2. Progres Pelaksanaan

Progres pembangunan/rehabilitasi rumah mencapai sekitar 100%. Dengan Rincian progres:

- Pekerjaan Struktur : 100%
- Pekerjaan Dinding : 100%
- Pekerjaan Atap : 100%
- Finishing : 100%

3. Kesesuaian dengan petunjuk teknis

Secara umum, pelaksanaan kegiatan BSPS di lokasi telah sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku. Namun, masih ditemukan beberapa penerima yang belum sepenuhnya memahami spesifikasi teknis bangunan.

4. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan BSPS tergolong Baik. Bentuk partisipasi antara lain :

- Swadaya tenaga kerja dalam pembangunan rumah bantuan
- Gotong royong antar warga
- Penyediaan material secara mandiri (Swadaya)
- Dukungan dari pemerintah setempat

5. Kesimpulan dan Rekomendasi

- Kesimpulan

Berdasarkan hasil kunjungan lapangan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program BSPS di Kota Kendari secara umum berjalan dengan Baik, meskipun masih terdapat beberapa kendala teknis yang perlu ditindaklanjuti.

- Adapun rekomendasi yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan intensitas pendampingan teknis;
- Memastikan ketersediaan material tepat waktu;
- Memperkuat koordinasi dengan pemerintah setempat;

VI. Penutup

Demikian laporan kunjungan lapangan ini disusun sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan Program BSPS. Diharapkan hasil monitoring ini dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan program di lapangan.

Penyusun

Kendari, 03-02-2026

Eka Mukti



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Jl. Drs. H. Abdullah Silondae No. 84, Korumba, Kec. Mandonga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara

DOKUMENTASI











LAPORAN KEGIATAN

Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Provinsi Sulawesi
Tenggara Tahun 2027

I. Dasar Kegiatan

- Undangan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2027 dari Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Atas Nama Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 000.1.5/589 Tanggal 29 Januari 2026.
- Peraturan Perundang-undangan terkait perencanaan pembangunan daerah.
- Tugas dan fungsi Satuan Kerja dalam mendukung perencanaan pembangunan sektor perumahan dan kawasan permukiman.

II. Maksud dan Tujuan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

- Menghadiri dan berpartisipasi aktif dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2027.
- Memberikan masukan dan saran terkait program dan kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman
- Menyelaraskan program pusat dan daerah dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan.
- Mengakomodasi aspirasi pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan daerah.

III. Waktu dan Tempat Kegiatan

Kegiatan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2027 dilaksanakan pada :

- Hari/Tanggal : Kamis, 05-02-2026
- Waktu : Pukul 08.00 WITA s/d Selesai
- Tempat : Hotel Claro Kendari

IV. Peserta Kegiatan

- DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara
- Perangkat Daerah Provinsi

- Instansi Vertikal/Perbankan (termaksud BP3KP Sul. III)
- Universitas/Akademisi
- Bappeda Kab./Kota Se-Sulawesi Tenggara
- Organisasi Non Pemerintah

V. Uraian Kegiatan

Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2027 dibuka secara resmi oleh Asisten II Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kegiatan diawali dengan pemaparan rancangan awal RKPD Tahun 2027 yang memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas daerah, serta indikasi program dan kegiatan strategis.

Sesi Pemaparan Materi :

- BPS Provinsi Sulawesi Tenggara
Judul : Gambaran umum indikator makro pembangunan Sulawesi Tenggara dan peran data statistik dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah yang terukur dan akuntabel)
- KPw Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara
Judul : *Outlook* Ekonomi Sulawesi Tenggara 2027 : tantangan, peluang dan implikasinya terhadap perencanaan pembangunan daerah)
- BPKAD Provinsi Sulawesi Tenggara
Judul : Penguatan pengelolaan keuangan daerah untuk mendukung prioritas pembangunan Sulawesi Tenggara tahun 2027)
- BAPENDA Provinsi Sulawesi Tenggara
Judul : Optimalisasi pendapatan daerah dalam peningkatan kapasitas fiskal daerah)
- BAPPEDA Provinsi Sulawesi Tenggara
Judul : Prioritas arah kebijakan pembangunan Sulawesi Tenggara tahun 2027)

Selanjutnya, dilaksanakan sesi diskusi dan tanya jawab yang melibatkan seluruh peserta. Dalam forum tersebut, disampaikan berbagai masukan, khususnya terkait :

- Peningkatan kualitas hunian layak.
- Penanganan kawasan kumuh.
- Pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
- Penguatan sinergi program pusat dan daerah.

Perwakilan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara turut menyampaikan usulan dan rekomendasi guna mendukung pencapaian target pembangunan sektor perumahan.

VI. Hasil Kegiatan

Adapun hasil yang diperoleh dari kegiatan ini antara lain :

- Terhimpunnya masukan dan saran dari pemangku kepentingan terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027.
- Terjalinnya koordinasi dan sinergi antarinstansi dalam perencanaan pembangunan daerah.
- Terakomodasinya isu strategis bidang perumahan dan kawasan permukiman dalam dokumen perencanaan.
- Meningkatnya pemahaman peserta terhadap arah kebijakan pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2027.

VII. Penutup

Demikian laporan kegiatan menghadiri Undangan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2027 ini disusun sebagai bahan dokumentasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

Diharapkan hasil kegiatan ini dapat menjadi dasar dalam penyusunan program dan kegiatan pada tahun anggaran berikutnya.

Notulen : Eka Mukti



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Jl. Drs. H. Abdullah Silondae No. 84, Korumba, Kec. Mandonga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara

DOKUMENTASI







NOTULENSI KOORDINASI

- Agenda : Koordinasi Kabupaten Konawe Selatan Terkait Program KemenPKP
- Tanggal/Pukul : 06 Februari 2026/10.20 WITA
- Lokasi : Ruang Rapat Satker PKP Prov. Sultra
- Peserta Rapat : 1. Muh. Irsan Basalamah Kasatker PKP Prov. Sultra
2. Budi Utama Kabid Perumahan PKP Konsel
3. Tendri Kasie Kabid Perumahan
- Poin Pembahasan : Pembahasan Program KemenPKP
- Sesi Diskusi : 1. Dalam rangka meningkatkan ketepatan sasaran penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), diperlukan penguatan basis data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang terintegrasi dengan data kesejahteraan sosial dan data statistik resmi. Oleh karena itu, diusulkan agar data RTLH yang digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan Program BSPS diintegrasikan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada Dinas Sosial serta data Badan Pusat Statistik (BPS), guna memastikan calon penerima bantuan berasal dari masyarakat berpenghasilan rendah dan sesuai dengan kondisi sosial ekonomi serta karakteristik perumahan. Integrasi data tersebut diharapkan dapat meningkatkan akurasi dan transparansi penetapan sasaran, meminimalkan duplikasi penerima bantuan, serta mendukung perencanaan dan pelaksanaan Program BSPS yang lebih efektif, tepat sasaran, dan akuntabel.
2. Pelaksanaan verifikasi calon penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) diawali dengan proses pengusulan yang bersumber dari pemerintah desa/kelurahan, pemerintah daerah, aspirasi DPR/DPRD, serta hasil pendataan lapangan. Usulan tersebut dilengkapi dengan dokumen administrasi berupa KTP, Kartu Keluarga, bukti kepemilikan lahan, surat keterangan penghasilan, serta dokumentasi kondisi rumah. Selanjutnya, dilakukan verifikasi administrasi oleh tim

teknis dan fasilitator untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaian data, termasuk status sebagai masyarakat berpenghasilan rendah dan kepemilikan rumah yang sah. Calon penerima yang lolos administrasi kemudian dilakukan verifikasi lapangan melalui kunjungan langsung guna mengecek kondisi fisik rumah, tingkat ketidaklayakan, status hunian, serta melakukan wawancara dan dokumentasi. Hasil verifikasi tersebut selanjutnya divalidasi dan disinkronkan melalui sistem pendataan untuk memastikan keakuratan, menghindari duplikasi, serta menyesuaikan dengan basis data kependudukan. Berdasarkan data yang telah valid, Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan Calon Penerima Bantuan melalui Surat Keputusan.

3. Update bantuan PSU sampai sekarang belum ada kuota untuk Sultra, tetapi tidak tertutup kemungkinan akan segera ada, jadi updating data untuk PSU atau bantuan lainnya disegerakan. Sama juga dengan bantuan lainnya, seperti Kumuh dan Sanitasi, update data perlu dilakukan dikarenakan bantuan tidak semestinya di tetapkan, bisa juga pemerintah pusat melihat dokumen yang terupdate, itu yang bisa di tetapkan bantuan.

4. SK Kumuh Kab. Konsel belum ada, sementara koordinasi ke Pemda Provinsi. Tetapi ada titik terang dimana Pemda Konsel menitik beratkan RC yang ada akan di lengkapi, termaksud RP2KPKPK dan RP3KP serta turunannya.

Kasatker juga menitik beratkan IUP di kab. Konsel harus diperhatikan, jangan sampai berdampak pada Kawasan Kumuh yang akan disusun.

5. Pemda Konsel mencari tahu bagaimana cara untuk mendapatkan bantuan Rumah Khusus. Berdampaknya Relokasi dikawasan markas KOPASUS yang akan dibangun di Kab. Konsel. 53 Rumah yang akan berdampak Relokasi tersebut.

Kasatker tetap menginginkan update data untuk bantuan Rumah Khusus, dikarenakan bantuan rumah khusus sekarang Cuma 2 kategori yaitu Bencana Alam dan Dampak Relokasi Pembangunan Pemerintah.

Tetapi Pemda Konsel harus menyiapkan lahan untuk relokasi tersebut dan melihat siapa leader untuk relokasi tersebut, leader tersebut yang akan menyurat ke pemerintah pusat.

6. Kasatker mengingatkan untuk Pemda Konsel melihat dan mendata RTLH di bagian atau kawasan pembangunan Sekolah Garuda.



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Jl. Drs. H. Abdullah Silondae No. 84, Korumba, Kec. Mandonga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara

Dokumentasi : Koordinasi Kabupaten Konawe Selatan Terkait Program KemenPKP







DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Jl. Drs. H. Abdullah Silondae No. 84, Korumba, Kec. Mandonga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara

NOTULEN RAPAT

Judul Rapat : Rapat Peluncuran BSPS Secara Nasional Tahun Anggaran 2026 Dan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan Serta Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Kementerian PKP-BP TAPER-BRI-PNM-SMF

Hari/Tanggal : Senin, 30 Maret 2026

Waktu : 14:30 WITA s/d Selesai

Lokasi : Ruang Rapat Kantor Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara (Via Zoom Meeting)

Rundown Acara : Sesuai Undangan Rapat

Notulis : Laode Sirafin Sarini, S.T.

I. POKOK PEMBAHASAN BSPS:

A. Gambaran Umum BSPS

1. BSPS merupakan bantuan stimulan dari pemerintah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk pembangunan atau peningkatan kualitas rumah swadaya
2. Program berlandaskan:
 - a) UU No. 1 Tahun 2011
 - b) PP No. 14 Tahun 2016
 - c) PMK terkait bantuan pemerintah
 - d) Inpres No. 8 Tahun 2025
 - e) Permen PKP No. 10 Tahun 2025
 - f) SE Ditjen TKPR No. 1 Tahun 2026

B. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan:
 - a) Meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rumah layak huni.
2. Manfaat:
 - a) Mendorong gotong royong
 - b) Menggerakkan ekonomi lokal
 - c) Menyerap tenaga kerja
 - d) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

C. Indikator Rumah Layak Huni

1. Kualitas struktur dan bahan bangunan
2. Keselamatan dan kesehatan
3. Pencahayaan dan penghawaan
4. Akses air minum dan sanitasi
5. Kecukupan ruang ($\geq 9 \text{ m}^2/\text{jiwa}$, bertahap minimal $7,2 \text{ m}^2$)

D. Prinsip Pelaksanaan BPS

1. Penerima bantuan sebagai pelaku utama
2. Bantuan bersifat stimulan (bukan pembiayaan penuh)
3. Mengedepankan keswadayaan dan gotong royong
4. Tidak ada pungutan biaya dari pihak manapun
5. Nilai bantuan sebesar $\pm \text{Rp}20.000.000/\text{unit}$
6. Pendampingan oleh TFL dan Korkab/Korkot

E. Persyaratan Penerima

1. WNI sudah berkeluarga
2. Termasuk MBR (desil 4 ke bawah / penghasilan $\leq \text{UMK/UMP}$)
3. Memiliki/menguasai tanah yang sah
4. Memiliki dan menempati RTLH
5. Belum menerima BPS/FLPP dalam 10 tahun terakhir
6. Bersedia mengikuti ketentuan program

F. Tahapan Pelaksanaan

1. Pengusulan
2. Verifikasi dan penyiapan masyarakat
3. Penetapan penerima dan pencairan bantuan
4. Penyaluran bantuan
5. Penggunaan dana tahap I
6. Penggunaan dana tahap II

Meliputi:

- Pembelian bahan bangunan
- Pelaksanaan pekerjaan fisik
- Pembayaran upah kerja
- Pelaporan tiap tahap

G. Pelaksanaan dan Contoh Kasus

1. Program menunjukkan adanya kontribusi keswadayaan masyarakat (Rp1 juta – Rp30 juta).
2. Progres pembangunan umumnya bertahap (0% – 30% – 100%).
3. Dokumentasi menunjukkan keberhasilan di berbagai daerah.

H. Kesimpulan

1. Program BPSPS merupakan instrumen strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah.
2. Keberhasilan program sangat bergantung pada:
 - a) Partisipasi aktif masyarakat
 - b) Pendampingan TFL/Korkab
 - c) Kepatuhan terhadap aturan
3. Program tidak hanya berdampak pada perumahan, tetapi juga pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat.

I. Tindak Lanjut (Rekomendasi)

1. Meningkatkan sosialisasi program kepada masyarakat
2. Memperkuat pengawasan agar tidak terjadi pungutan liar
3. Optimalisasi peran TFL dan Korkab/Korkot
4. Mendorong peningkatan keswadayaan masyarakat
5. Memastikan ketepatan sasaran penerima bantuan

II. RINGKASAN KOLABORASI PROGRAM KOLABORASI

1. Tujuan Kolaborasi

Kolaborasi ini bertujuan untuk:

- Memperluas akses pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
- Meningkatkan kualitas hunian melalui dukungan pembiayaan yang berkelanjutan
- Mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat penerima bantuan
- Menciptakan ekosistem perumahan yang inklusif dan terintegrasi

2. Peran Masing-Masing Lembaga

A. Kementerian PKP

- Koordinator utama program
- Penyusun kebijakan dan regulasi
- Pelaksana program BPSPS sebagai stimulan awal

B. BP TAPERA

- Menyediakan pembiayaan perumahan jangka panjang
- Memfasilitasi akses kepemilikan rumah bagi MBR

C. BRI

- Penyalur layanan keuangan dan perbankan
- Mendukung inklusi keuangan masyarakat
- Mempermudah akses transaksi dan penyaluran bantuan

D. PNM (Permodalan Nasional Madani)

- Pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya ultra mikro
- Pendampingan usaha produktif bagi penerima bantuan
- Meningkatkan kemampuan ekonomi rumah tangga

E. SMF (Sarana Multigriya Finansial)

- Penyedia pembiayaan sekunder perumahan
- Menjaga likuiditas pembiayaan perumahan nasional
- Mendukung keberlanjutan pembiayaan jangka panjang

3. Skema Integrasi Program

- BSPS (stimulan awal) → meningkatkan kualitas rumah
- TAPERA & SMF → menyediakan pembiayaan lanjutan/perumahan
- BRI → menyediakan akses perbankan dan transaksi
- PNM → memperkuat ekonomi masyarakat melalui usaha produktif

Pendekatan ini mengintegrasikan:

- Bantuan fisik (rumah)
- Pembiayaan (akses kredit/perumahan)
- Pemberdayaan ekonomi (peningkatan pendapatan)

4. Manfaat Kolaborasi

- Meningkatkan akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan
- Mengurangi backlog perumahan dan RTLH
- Mendorong kemandirian ekonomi masyarakat
- Meningkatkan inklusi keuangan
- Memperkuat dampak program pemerintah secara berkelanjutan

5. Dampak yang Diharapkan

- Terbentuknya masyarakat yang tidak hanya memiliki rumah layak, tetapi juga memiliki kemampuan ekonomi yang meningkat
- Terciptanya siklus positif antara hunian layak dan peningkatan kesejahteraan
- Penguatan ekosistem pembiayaan perumahan nasional

6. Tantangan Utama

- Koordinasi lintas lembaga yang kompleks
- Literasi keuangan masyarakat yang masih terbatas

- Kemampuan bayar masyarakat (affordability)
- Ketepatan sasaran penerima manfaat

7. Rekomendasi

- Penguatan koordinasi dan integrasi program antar lembaga
- Peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat
- Optimalisasi pendampingan (TFL dan lembaga terkait)
- Penguatan sistem data terpadu penerima manfaat
- Monitoring dan evaluasi terpadu

8. Kesimpulan

Kolaborasi antara Kementerian PKP, BP TAPERA, BRI, PNM, dan SMF merupakan langkah strategis untuk mengintegrasikan program perumahan dengan pemberdayaan ekonomi rakyat. Pendekatan ini tidak hanya menyelesaikan permasalahan hunian, tetapi juga meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Notulis



Laode Sirafin sarini, S.T.



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

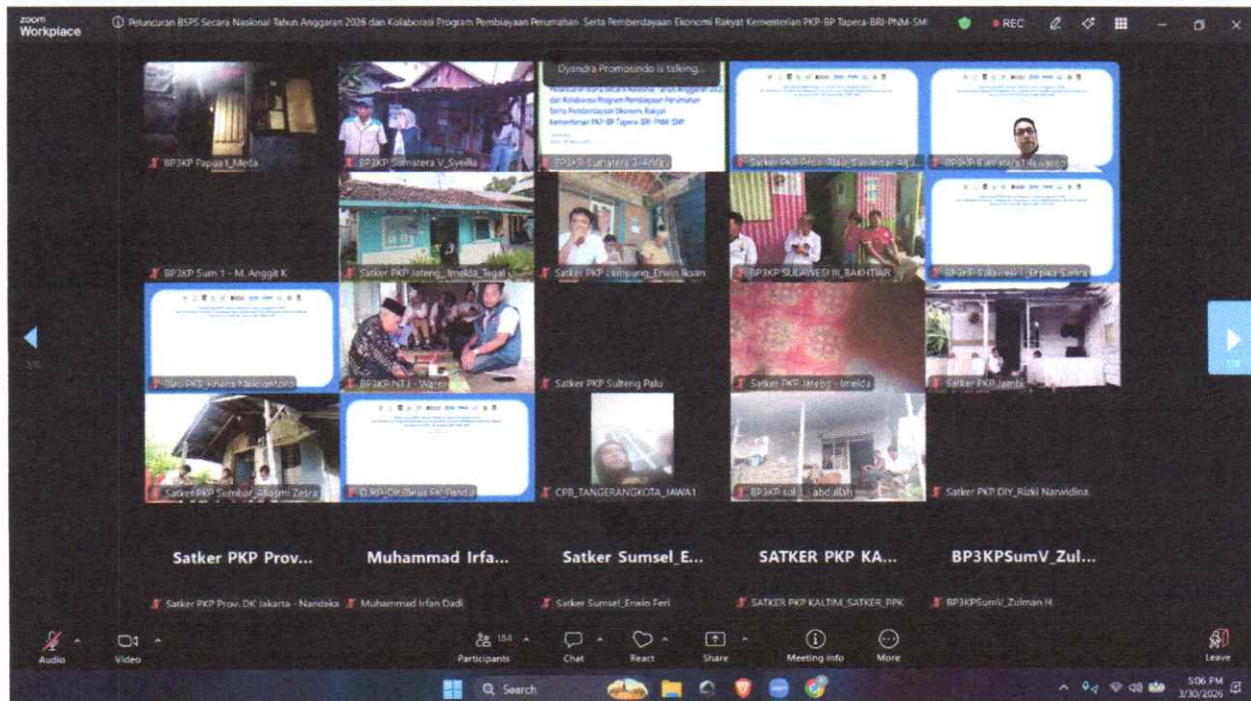
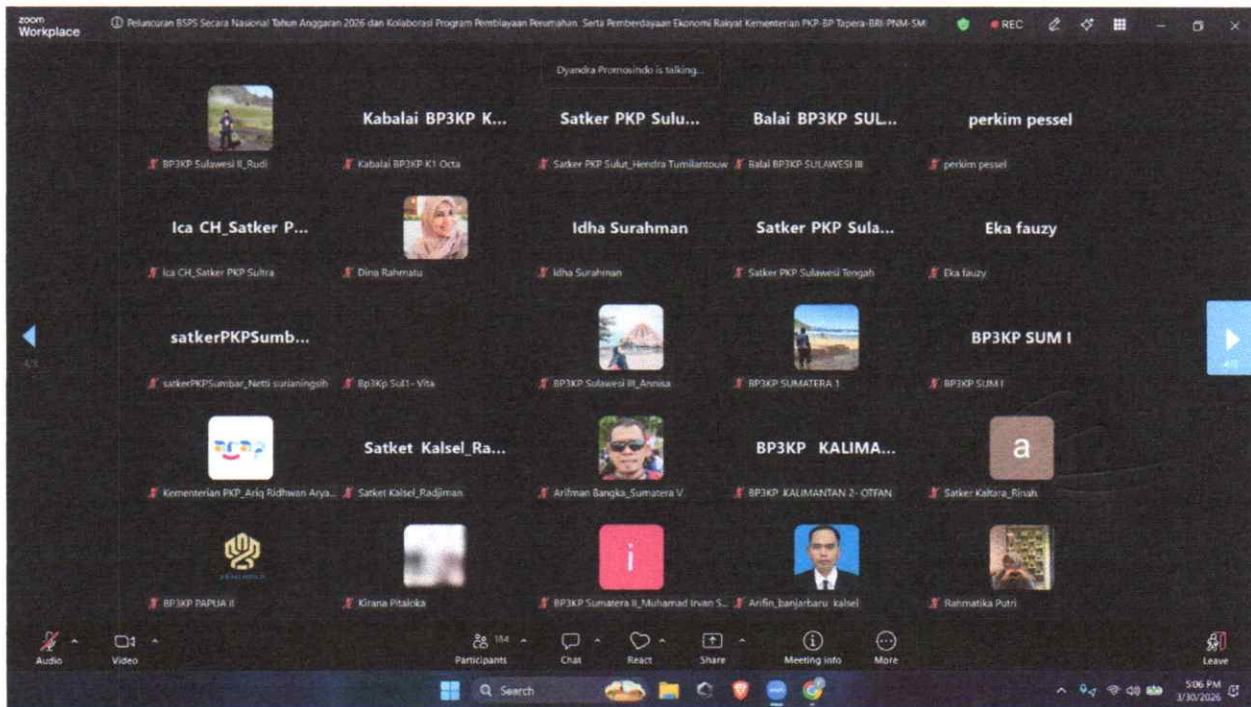
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Jl. Drs. H. Abdullah Silondae No. 84, Korumba, Kec. Mandonga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara

DOKUMENTASI RAPAT

PELUNCURAN BSPS SECARA NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2026 DAN KOLABORASI PROGRAM PEMBIAYAAN PERUMAHAN SERTA PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT KEMENTERIAN PKP-BP TAPERA-BRI-PNM-SMF

30 Maret 2026







KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Jl. Drs. H. Abdullah Silondae No. 84, Korumba, Kec. Mandonga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara

LEMBAR DISPOSISI

Unit Pengirim : DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN.
No. Surat : Ru.10/Dp/138/B/2026 /Tgl Surat : 27 Maret 2026
Hal : Undangan Peluncuran BSPS Secara Nasional TA 2026
dan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan Serta
Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Kementerian PKP-BP
Tapera-BRI-PNM-SMF.
No. Agenda : /Tgl Penerimaan : 28 Maret 2026

Yth

☒ PPK Ruswa, PSU dan Kawasan Permukiman
☒ Pejabat Penandatanganan SPM
☒ Bendahara
☒ Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
☒ Asisten KPA

☒ Kaur Teknik PPK Randal
☒ Kaur Administrasi PPK Randal
☒ Kaur Teknik PPK Ruswa, PSU & KP
☒ Kaur Administrasi PPK Ruswa, PSU & KP
☒ Cpnns

Sifat : ☐ Biasa ☐ Segera ☒ Perlu Perhatian ☐ Perhatikan Batas Waktu

☐ Memberikan dan menyampaikan saran
☐ Melaksanakan / Menindaklanjuti
☐ Bicarakan dengan saya
☐ Mohon hadir mewakili saya
☒ Ikut hadir / ~~Menugaskan~~ Staf
☐ Diketahui / Sebagai informasi
☐ Menyimpan dalam file
☐ Melaksanakan sesuai dengan pembicaraan

☐ Monitoring Perkembangan
☐ Dibahas bersama
☐ Jadwalkan / Atur rapat / Pertemuan
☐ Diproses lebih lanjut sesuai prosedur
☐ Melaksanakan dan melaporkan hasilnya
☐ Untuk dipedomani
☐ Siapkan konsep jawaban / tanggapan
☐ Ikuti Zoom

Catatan

Zoom diruang rapat untuk
disiapkan



Kepala Satuan Kerja
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Sulawesi Tenggara

Muh. Irsan Basalamah, S.T., M.T.
NIP. 19870612 201001 1 013



DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Raden Patah 1, Nomor 1, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12110

Nomor : Ru.10/Dp/138/B/2026
Sifat : Segera
Lampiran : 2
Hal : Undangan Peluncuran BSPS Secara Nasional TA 2026
dan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan Serta
Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Kementerian PKP-BP
Tapera-BRI-PNM-SMF

Jakarta, 27 Maret 2026

Yth. (Daftar Undangan Terlampir)
di Tempat

Dalam rangka mendukung pencapaian Program 3 Juta Rumah melalui peningkatan kualitas rumah serta peningkatan akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat, akan dilaksanakan Peluncuran BSPS Secara Nasional Tahun Anggaran 2026 dan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan Serta Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Kementerian PKP-BP Tapera-BRI-PNM-SMF pada:

Hari/Tanggal : Senin, 30 Maret 2026
Waktu : 1. Gladi Resik
11.00 – 12.00 WIB
2. Pelaksanaan Kegiatan
13.30 WIB – Selesai (Jadwal Terlampir)
Tempat : **Aplikasi Zoom Meeting**
1. Gladi Resik
<https://bit.ly/gladiresik30mar>
2. Pelaksanaan Kegiatan
<https://bit.ly/zoompeluncuranBSPS>
Meeting ID : 872 7492 6594
Password : BRI2026

Mengingat pentingnya acara tersebut, dimohon Bapak/Ibu dapat hadir tepat waktu serta menyiapkan data-data yang relevan terkait pelaksanaan BSPS, KPP dan PNM pada masing-masing wilayah kerja. Peserta wajib melakukan konfirmasi kehadiran pada tautan <https://bit.ly/konfirm30maret> paling lambat Sabtu, 28 Maret 2026. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Pipit Prayogo (082138698262).

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman,



[Signature]
Ir. Fitrah Nur M.Si.
NIP 196704191994031003

Tembusan:

1. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman ;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;

Lampiran I
Surat Direktur Jenderal Kawasan Permukiman
Nomor : RU.10/Dp/138/B/2026
Tanggal : 27 Maret 2026
Hal : Undangan Peluncuran BSPS
Secara Nasional TA 2026 dan
Kolaborasi Program Pembiayaan
Perumahan Serta Pemberdayaan
Ekonomi Rakyat Kementerian
PKP-BP Tapera-BRI-PNM-SMF

DAFTAR PENERIMA UNDANGAN

A. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan PKP Sumatera I;
2. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan PKP Sumatera II;
3. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan PKP Sumatera III;
4. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan PKP Sumatera IV;
5. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan PKP Sumatera V;
6. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan PKP Kalimantan I;
7. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan PKP Kalimantan II;
8. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan PKP Jawa I;
9. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan PKP Jawa II;
10. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan PKP Jawa III;
11. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan PKP Jawa IV;
12. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan PKP Nusa Tenggara I;
13. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan PKP Nusa Tenggara II;
14. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan PKP Sulawesi I;
15. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan PKP Sulawesi II;
16. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan PKP Sulawesi III;
17. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan PKP Maluku;
18. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan PKP Papua I;
19. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan PKP Papua II.

B. Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Aceh;
2. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Sumatera Utara;
3. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Sumatera Barat;
4. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Riau;
5. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Kepulauan Riau;
6. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Bengkulu;
7. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Jambi;
8. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Sumatera Selatan;
9. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Bangka Belitung;
10. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Lampung;
11. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Banten;
12. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi DKI Jakarta;
13. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Jawa Barat;
14. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi DI Yogyakarta;
15. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Jawa Tengah;
16. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Jawa Timur;
17. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Bali;
18. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Nusa Tenggara Barat;
19. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Nusa Tenggara Timur;

20. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Kalimantan Barat;
21. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Kalimantan Tengah;
22. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Kalimantan Selatan;
23. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Kalimantan Timur;
24. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Kalimantan Utara;
25. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi IKN;
26. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Sulawesi Utara;
27. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Gorontalo;
28. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Sulawesi Tengah;
29. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Sulawesi Barat;
30. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Sulawesi Selatan;
31. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Sulawesi Tenggara;
32. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Maluku;
33. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Maluku Utara;
34. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Papua;
35. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Papua Barat.

C. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman

1. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman, PKP Provinsi Aceh;
2. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman, PKP Provinsi Sumatera Utara;
3. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman, PKP Provinsi Sumatera Barat;
4. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman, PKP Provinsi Riau;
5. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau;
6. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu;
7. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi;
8. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman Sumatera Selatan;
9. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Bangka Belitung;
10. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman, PKP Provinsi Lampung;
11. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman, PKP Provinsi Banten;
12. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman, PKP Provinsi DKI Jakarta;
13. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman, PKP Provinsi Jawa Barat;
14. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman, PKP Provinsi DI Yogyakarta;
15. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman, PKP Provinsi Jawa Tengah;
16. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman, PKP Provinsi Jawa Timur;
17. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman, PKP Provinsi Bali;
18. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman, PKP Provinsi Nusa Tenggara Barat;
19. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman, PKP Provinsi Nusa Tenggara Timur;
20. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman, PKP Provinsi Kalimantan Barat;
21. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman, PKP Provinsi Kalimantan Tengah;

22. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman, PKP Provinsi Kalimantan Selatan;
23. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman, PKP Provinsi Kalimantan Timur;
24. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman, PKP Provinsi Kalimantan Utara;
25. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman, PKP Provinsi IKN;
26. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman, PKP Provinsi Sulawesi Utara;
27. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman, PKP Provinsi Gorontalo;
28. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman, PKP Provinsi Sulawesi Tengah;
29. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman, PKP Provinsi Sulawesi Barat;
30. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman, PKP Provinsi Sulawesi Selatan;
31. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman, PKP Provinsi Sulawesi Tenggara;
32. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman, PKP Provinsi Maluku;
33. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman, PKP Provinsi Maluku Utara;
34. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman, PKP Provinsi Papua;
35. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman, PKP Provinsi Papua Barat.



Lampiran II
 Surat Direktur Jenderal Kawasan Permukiman
 Nomor : RU.10/Dp/138/B/2026
 Tanggal : 27 Maret 2026
 Hal : Undangan Peluncuran BSPS
 Secara Nasional TA 2026 dan
 Kolaborasi Program Pembiayaan
 Perumahan Serta Pemberdayaan
 Ekonomi Rakyat Kementerian
 PKP-BP Tapera-BRI-PNM-SMF

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN
Senin, 30 Maret 2026

No	Waktu	Kegiatan
1	13.30 – 14.00	Registrasi Peserta
2	14.00 – 14.03	<i>Opening MC</i>
3	14.03 – 14.05	Pembacaan Doa
4	14.05 – 15.05	<i>Talkshow:</i> 1. Kebijakan KUR Perumahan oleh PKP 2. Tata cara pinjaman KUR Perumahan oleh BRI 3. Sosialisasi oleh PNM Mekar 4. Sosialisasi oleh Rumah Subsidi 5. Sosialisasi BSPS
5	15.05 – 15.08	Menyanyikan lagu Indonesia Raya
6	15.08 – 15.18	Sambutan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati)
7	15.18 – 15.28	Sambutan dari Bank BRI
8	15.28 – 15.38	Sambutan dari K/L Terkait (jika ada)
9	15.38 – 15.48	Sambutan dari Wakil Ketua DPR RI
10	15.48 – 16.18	Sambutan dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman
11	16.18 – 16.23	<i>Closing Statement</i> Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman - Pembagian <i>reward</i> bagi PNM Berprestasi - Peluncuran BSPS Masal
12	16.23 – 16.25	Menyanyikan lagu Bagimu Negeri
13	16.25 – 16.28	Foto Bersama
14	16.28 – 16.38	<i>Press Conference</i>

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman,



Fitrah Nur, M.Si.
 NIP. 196704191994031003



TANPA DIPUNGUT BIAYA

OLEH PIHAK MANAPUN!!



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tangerang, 30 Maret 2026



Gambaran Umum BSPS

Landasan Hukum, Pengertian, Tujuan, dan Manfaat



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA



Landasan Hukum

UU 1 Tahun 2011

Pasal 54

tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, salah satu bentuk kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi MBR berupa **stimulan rumah swadaya**

PP 14 Tahun 2016

Pasal 37 ayat (3)

entang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, salah satu bentuk kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi MBR berupa **stimulan rumah swadaya**

PMK 05 Tahun 2021

168/PMK.05/2015
Jo.173/PMK.05/2016 Jo.
132/PMK.05/2021
tentang **Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga**

Instruksi Presiden No 8 Tahun 2025

tentang Optimalisasi Pelaksanaan **Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem**

Peraturan Menteri PKP No 10 Tahun 2025

tentang Pelaksanaan Bantuan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus

SE Ditjen TKPR No. 1 Tahun 2026

tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya

Pengertian

Dukungan dana pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk **peningkatan kualitas** dan **pembangunan baru** rumah swadaya berdasarkan **kegotong-royongan**.

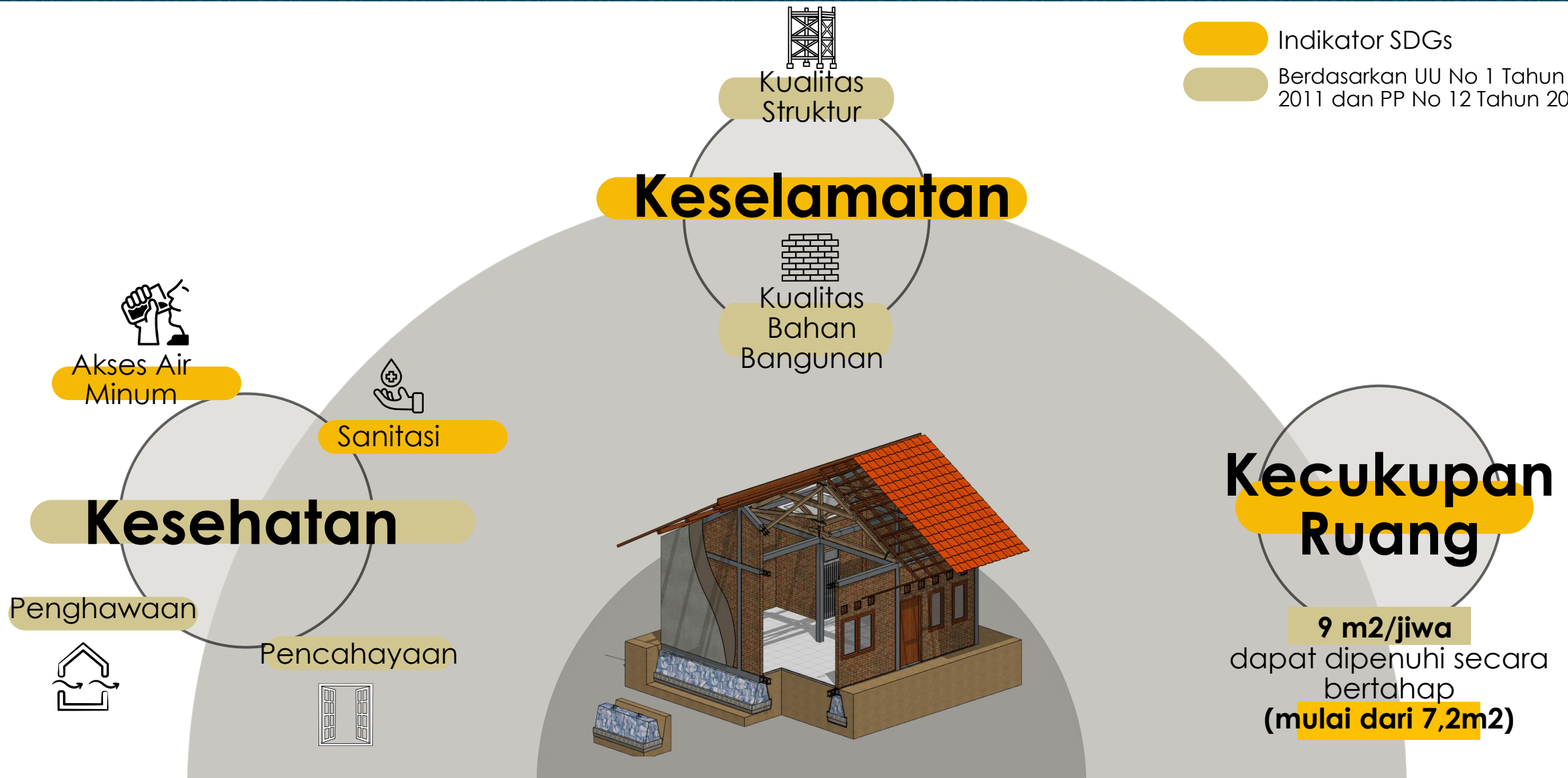
Tujuan

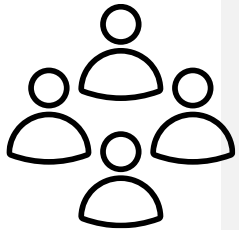
Mendorong dan meningkatkan **keswadayaan** masyarakat agar memiliki **akses** dalam memenuhi kebutuhan **rumah layak huni** secara swadaya

Manfaat

- 1 Menumbuhkan/kembangkan **gotong-royong**
- 2 Menggerakkan **ekonomi** rakyat
- 3 Menyerap **tenaga kerja**
- 4 Masyarakat lebih **sejahtera**

Indikator Rumah Layak Huni





Penerima bantuan sebagai **pelaku utama** dalam perencanaan, pelaksanaan perbaikan rumah, pengawasan, dan pertanggungjawaban dana bantuan



Bantuan bersifat **stimulan**, untuk **menumbuhkan keswadayaan** dan **gotong-royong**



Peran Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dan Koordinator Kabupaten/Kota (**Korkab/kot**) Adalah sebagai **fasilitator** yang **mendampingi** dan mengawal kegiatan agar Masyarakat dapat menjalankan peran dan fungsinya sebagai **pelaku utama**

1 Kartu Keluarga
Penerima
Rumah

Nilai Bantuan

20 juta



**TANPA PUNGUTAN DARI
PIHAK MANAPUN!**

Persyaratan Penerima BSPS

Berdasarkan Verifikasi Lapangan



1 **WNI** yang sudah **berkeluarga** dan diprioritaskan masuk dalam **DTSN**



3 **Memiliki rumah** & menempati **RTLH** satu-satunya



5 **Belum pernah** memperoleh **BSPS/FLPP** 10 tahun, Terakhir **kecuali** bagi PB yang **terdampak bencana**.



2 **Memiliki** atau menguasai **tanah** dengan **bukti kepemilikan** dan penguasaan yang jelas dan **sah**



4 Termasuk kelompok **rumah tangga desil 4** ke bawah dan/atau **penghasilan maksimal UMK/UMP**



6 Bersedia mengikuti **ketentuan program**

Bukti Penguasaan Lahan

1 Sertipikat Hak Milik

2 Sertipikat HGB (Hak Guna Bangunan) di atas HPL (Hak Pengelolaan Lahan)

3 Bukti izin tertulis menempati tanah ulayat dari kepala adat atau tanah milik keluarga besar;

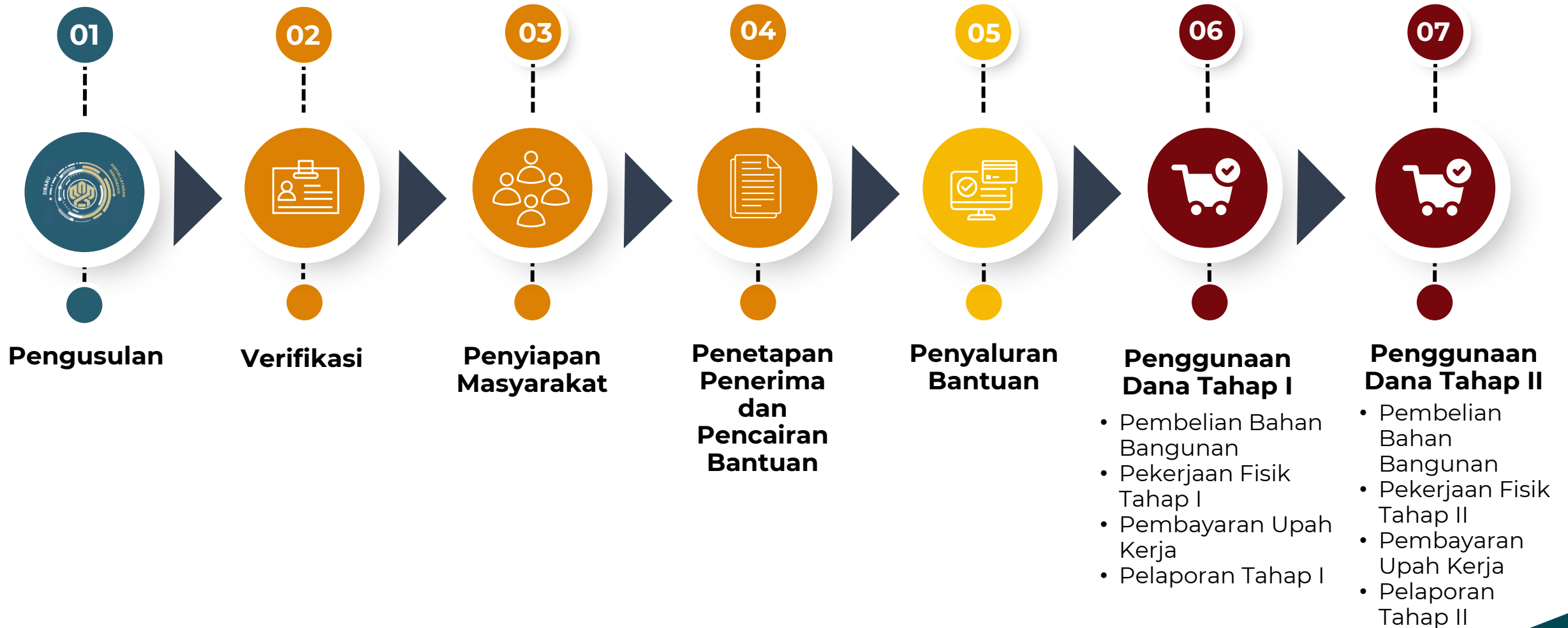
4 Bukti penguasaan tanah lainnya

- **Surat keterangan ditandatangani oleh pejabat** terkait (kepala desa/lurah/camat/PPAT), dengan meminta keterangan 2 (dua) orang saksi yang bukan keluarga/tidak sedarah

- **Dilengkapi dengan salah satu dokumen pendukung** seperti akta hibah, akta jual beli, petok D, girik, leter C, pipil, Nomor Identifikasi Bidang (NIB) dari Kantor Pertanahan

- **Izin menempati sekurang-kurangnya hingga 10 tahun setelah pekerjaan fisik selesai.**

Tahapan Kegiatan BSPS



[Link: Video](#)



Video Animasi PTT

[Link: Video](#)

Dokumentasi Pelaksanaan BSPS



► Nana



► Entu



► Serah



► Ibah Misbahudin



► Mamat

KABUPATEN
Majalengka
BSPS 2025

Dokumentasi Pelaksanaan BSPS

Penerima Bantuan : Yusuf Nayowan (Kab. Bolaang Mongondow Selatan) - Keswadayaan Rp 10.000.000



0%



30%



100%

Penerima Bantuan: Adel (Kota Manado) – Keswadayaan Rp 1.000.000



0%



30%



100%

Dokumentasi Pelaksanaan BSPS

Penerima Bantuan : Husnul Hatimah (Kab.Bulukumba) - Keswadayaan Rp 17.000.000



0%



30%



100%

Penerima Bantuan : Nurbeina Siregar (Kab. Tapanuli Selatan) - Keswadayaan : Rp. 30.000.000



0%



30%



100%

Dokumentasi Pelaksanaan BSPS

Penerima Bantuan : Liman (Kab.Bulukumba) - Keswadayaan Rp 11.000.000



0%



30%



Penerima Bantuan : Maya Safitri (Kab.Penajam Paser Utara) - Keswadayaan Rp 2.500.000



0%



30%



100%

Dokumentasi Pelaksanaan BSPS Kab.Langkat

[Link: Dokumentasi Pelaksanaan BSPS Kab.Langkat](#)

Dokumentasi Pelaksanaan BSPS Kalimantan Timur



Link: Dokumentasi Pelaksanaan BSPS Kalimantan Timur



Terima Kasih





DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Jl. Drs. H. Abdullah Silondae No. 84, Korumba, Kec. Mandonga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara

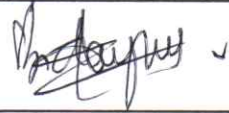
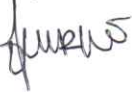
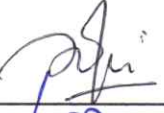
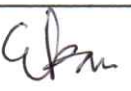
DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Selasa, 31 Maret 2026

Tempat : Ruang Rapat Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara

Acara :

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	TANDA TANGAN
1	YUSEF SAHAICA	Penkoptikoltim.	BUPATI	
2	JUMHANI.	DPRD Koltim	KETUA DPRD.	
3	PRIMARTO RUMBA.	PEMSEK KOLTIM.	SEKPA Koltim.	
4	SUPRIANTO.	DPRD KOLTIM.	KETUA KOMISI 2.	
5	IKRA	PEMSEK KOLTIM.	KABID PU PR	
6	LISMA.	Penkoptikoltim.	PROKOPIM.	
7	ARDA PERIANTI.	PEMSEK KOLTIM	DOKPIM	
8	MERIN.	DEVELOPER.	PENGUSHA.	
9	MUH. IRSAN	SATKER PLKP	KASATKER	
10	LAODE SUDAFIN	SATKER PLKP	STAF	
11	Indah MH	"	STAF	
12	MARHADIANTO	- - -	- - -	
13	MUNTAN	- - -	- - -	

12	Hamka Thahir	staf	
13	Aurpullah	TA	
14	Annisa	CPNS	
15	Nurul Bidayni Sukardi	CPNS	
16	Muh. FAKHRIANSA PUTRA	CPNS	
17	Mursyid Hidayat	CPNS	
18	Amalia Nur Annisa Rasibo	CPNS	
19	Moh. Rifal Agustina	CPNS	
20	Marhijannah	staf	
21	Yenni S. Bahri	staf	
22	Lewi Putung	staf	
23	ONI SURIKATY M	staf	
24	ALFONS YANTI	"	
25	AUDREY DANI	STAFF	
26	EKA MUKTI	staf	
27	Vince	staf	



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Jl. Drs. H. Abdullah Silondae No. 84, Korumba, Kec. Mandonga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara

NOTULEN RAPAT

- Judul Rapat : Koordinasi dan penyampaian informasi terkait program bantuan perumahan dan kawasan permukiman Kepada Pemda Kab. Kolaka Timur.
- Hari/Tanggal : Selasa, 31 Maret 2026
- Waktu : 17:30 WITA s/d Selesai
- Lokasi : Ruang Rapat Kantor Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara
- Peserta Rapat : A. Unsur Satuan Kerja
1. Kepala Satuan Kerja
 2. Asisten KPA
 3. Perwakilan PPK Rumah Swadaya, PSU dan Kawasan Permukiman
 4. Staf Satuan Kerja PKP Prov. Sultra
- B. Unsur Pemda Kab. Kolaka Timur
1. Bupati Kolaka Timur
 2. Sekretaris Daerah Kolaka Timur
 3. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
 4. Anggota DPRD Kabupaten Kolaka Timur
 5. Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara
 6. Undangan terkait lainnya
- Notulis : Laode Sirafin Sarini, S.T.

A. Pembahasan

1. Penyampaian dari Pemerintah Daerah Kolaka Timur

Pemerintah Daerah Kolaka Timur menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Meminta informasi terkait program bantuan perumahan dan kawasan permukiman dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- b. Mengharapkan penjelasan mengenai prosedur pengusulan program bantuan.
- c. Meminta penjelasan terkait kriteria penetapan kawasan kumuh.

- d. Menanyakan apakah penetapan kawasan kumuh memerlukan Surat Keputusan (SK) dari Kepala Daerah.

2. Penjelasan Kepala Satuan Kerja

Kepala Satuan Kerja menyampaikan bahwa terdapat beberapa jenis program bantuan, antara lain:

- a. Penanganan Kawasan Kumuh
- b. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Hasil verifikasi CPB Kabupaten Kolaka Timur:

- Lolos: 301 unit
- Tidak lolos: 69 unit

- c. Bantuan Rumah Susun (Rusun)

Contoh: Rusun Rumah Sakit Bombana dan Rusun ASN Rumah Sakit Provinsi Sulawesi Tenggara

- d. Bantuan Sanitasi Rumah

Nilai bantuan sekitar Rp18.000.000 per unit

- e. Pemantauan realisasi rumah subsidi (FLPP)
- f. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan

Penjelasan Teknis dan Kriteria Program

- a. Kriteria Bantuan Rumah Susun (Rusun):

- Status tanah harus *clean and clear*
- Tersedia sumber listrik
- Memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
- Unit rusun sudah termasuk meubelair
- Idealnya terdiri dari 44 unit per tower

- b. Penanganan Kawasan Kumuh:

- Mengacu pada 7 indikator kumuh
- Penetapan kawasan kumuh dilakukan melalui SK Bupati
- Kewenangan pemerintah pusat untuk penanganan kawasan kumuh di atas 15 hektare
- Penanganan dapat dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan CSR

- c. Program BSPS:

- Kuota BSPS Kabupaten Kolaka Timur yang sudah turun saat ini sebanyak 370 unit
- Syarat calon penerima:
 - 1) Termasuk kategori desil 1–4
 - 2) Memiliki satu-satunya rumah
 - 3) Berpenghasilan maksimal setara UMR/UMP
- Data CPB Tidak Lolos (69 Unit):
Disebabkan oleh:
 - 1) Tidak bersedia mengikuti program
 - 2) Tidak memiliki rumah
 - 3) Tidak memiliki lahan
 - 4) Rumah yang ditempati sudah layak huni
 - 5) Memiliki lebih dari satu rumah

Penggantian CPB akanr dikoordinasikan dengan Dinas Perumahan untuk pengusulan calon penerima pengganti.

d. Program Lainnya:

- Usulan kawasan kumuh sebaiknya disinergikan dengan program nasional lainnya (misalnya: kampung nelayan, dll.)
- Bantuan rumah khusus diberikan kepada masyarakat terdampak program pembangunan pemerintah atau korban bencana

B. Kesimpulan / Tindak Lanjut:

1. Pemerintah Daerah Kolaka Timur akan menindaklanjuti informasi program dengan menyusun usulan sesuai prosedur yang berlaku.
2. TFL dan Korkab akan melakukan koordinasi ke Dinas Perumahan terkait penggantian CPB yang tidak lolos verifikasi.
3. Penetapan kawasan kumuh perlu dilakukan melalui SK Bupati sebagai dasar pengusulan penanganan.
4. Perlu adanya sinergi program antara pemerintah daerah dengan program nasional dan pihak lainnya.

Notulis


Laode Sirafin sarini, S.T.



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Jl. Drs. H. Abdullah Silondae No. 84, Korumba, Kec. Mandonga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara

DOKUMENTASI RAPAT

Koordinasi dan Penyampaian Informasi Terkait Program Bantuan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kepada Pemda Kab. Kolaka Timur

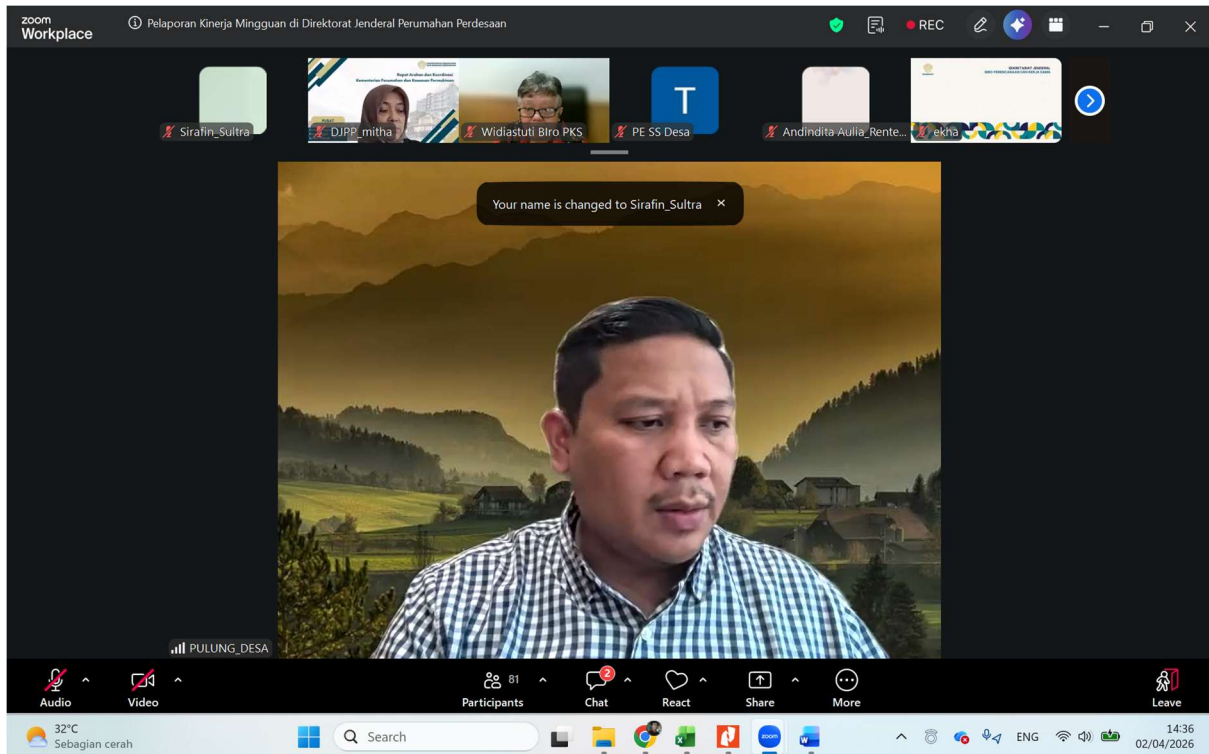
31 Maret 2026





RAPAT PELAPORAN KINERJA MINGGUAN DITJEN PERUMAHAN PERDESAAN

2 APRIL 2026



zoom Workplace ⓘ Pelaporan Kinerja Mingguan di Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

32°C Sebagian cerah 14:34 02/04/2026

zoom Workplace ⓘ Meeting w.setyawan's screen

32°C Sebagian cerah 14:41 02/04/2026

Rapat Arahan dan Koordinasi
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

PUSAT
Gotong Royong
Membangun
Untuk Rakyat *Rumah*

1. URGENSI LAPORAN MINGGUAN REALISASI ANGGARAN

Dasar Hukum

UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	PP Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan	PP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
--	--	--

Maksud

Untuk memantau dan evaluasi pelaksanaan anggaran di lingkungan Kementerian PKP

Tujuan

1. Mengetahui progres pelaksanaan pekerjaan baik dari aspek fisik maupun keuangan secara aktual di lapangan
2. Mengidentifikasi permasalahan dan kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan
3. Menentukan ruang lingkup dan mempercepat penyelesaian permasalahan (Satker/Balai/Unron/Pusat)
4. Menjamin kualitas dan kesesuaian hasil pekerjaan dengan spesifikasi teknis, kontrak, maupun pedoman pelaksanaan
5. Sebagai bahan pengendalian pimpinan dalam pelaksanaan anggaran di lingkungan Unit Organisasi maupun Unit Kerja

zoom Workplace Meeting w.setyawan's screen

Sirafin_Sultra DJPP_mitha PULUNG_DESA w.setyawan Widiastuti Biro... PE SS Desa

Bahan Tayang...realisasi (2).pdf

DASHBOARD ANGGARAN

PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN PKP TA 2026

Gotong Royang Membangun Untuk Rakyat

Progres Keuangan

Progres Keuangan Rp. 314.368.848.932,-

5.6 %

Pagu dan Realisasi Per Jenis Belanja

Pagu Rp.5.614.543.809.000 (Progres : 5,60%)

Realisasi

Kurva-S Pelaksanaan Anggaran

33,87 x 19,05 cm

Audio Video Participants Chat React Share More Leave

Terasa lebih panas Sekarang

Search

14:45 02/04/2026

Sirafin_Sultra DJPP_mitha PULUNG_DESA w.setyawan Widiastuti Biro... PE SS Desa

Bahan Tayang...realisasi (2).pdf

REALISASI ANGGARAN BELANJA TA 2026

MENURUT JENIS BELANJA DAN UNIT ORGANISASI (PER DD/MM/YYYY PUKUL 12.00 WIB)

Realisasi anggaran belanja Kementerian PKP TA 2026 per DD/MM/YYYY sebesar Rp314,37 Miliar atau 5,6% (% dari pagu awal dikurang dengan blokir). Terhadap rencana buka blokir sebesar Rp5,297 terdini dari BSPS, Rusun, PSU, Kumuh dan Sanitasi maka persentase realisasi anggaran menjadi 3,02% dari pagu efektif.

REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN PKP

Pagu : Rp10,90 T

Realisasi : Rp 0,314 T

3,02%

5,60%

KOMPOSISI REALISASI ANGGARAN PER UNIT ORGANISASI

Unit Organisasi	Pagu	Realisasi	Persentase
Sekretariat Jenderal	Rp891,75M	Rp19,52M	2,19 %
Inspektorat Jenderal	Rp26,88M	Rp5,66M	20,38 %
Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	Rp2,938,32M	Rp45,27M	1,54 %
Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	Rp3,923,45M	Rp228,49M	5,82 %
Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	Rp3,073,93M	Rp167,25M	5,44 %
Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	Rp41,18M	Rp14,75M	35,83 %

No	Jenis Belanja	Pagu Awal	Blokir	RO Khusus	Pagu Efektif	Pagu Efektif	Jumlah	% dari Pagi - RO Khusus	% dari Pagi - Blokir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Belanja Pegawai	624,46	-	-	624,46	624,46	187,83	30,08	30,08
2.	Belanja Barang	10.031,38	5.280,96	480,89	4.750,42	9.550,49	92,97	1,96	0,97
3.	Belanja Modal	239,67	-	-	239,67	239,67	33,57	14,00	14,01
Jumlah		10.895,51	5.280,96	480,89	5.614,55	10.614,62	314,37	5,60	3,02

Sumber: myPKP tanggal DD/MM/YYYY

33,87 x 19,05 cm

84

Sirafin-Sutra
 PULUNG_DESA
 w.setyawan

DJPP_mitha

Widiastuti Biro...

T

DJPB_mitha

Widiastuti Biro PKS

PE SS Desa

Bahan Tayang ...edisi (2).pdf

File Edit Comment Convert View Page Tools Form Protect Search Tools

Home Edit Comment Convert View Page Tools Form Protect Search Tools

Edit All Add Text OCR Crop Translate Capture Search

Gotong Royong
Membanan Untuk Rakyat

Rumahnya

Realisasi anggaran berdasarkan unit organisasi Kementerian PKP sebesar **Rp3.938,66 Miliar (83,50%)** menunjukkan bahwa Kementerian PKP telah melaksanakan anggaran untuk mendukung tugas dan fungsinya dari kegiatan fisik pembangunan.

PAGU DAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN PKP

Status tanggal DD/MM/YYYY(Pukul 12.00 WIB) >> MENURUT UNIT ORGANISASI

No	Unit Organisasi	PAGU EFEKTIF	PAGU PKP (Rp Juta)	BLKOR PERJADIN	REALISASI	(%)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = e/c	
1	Sekretariat Jenderal	619.491,79	-	507.232,22	81,88	
2	Inspektorat Jenderal	25.877,35	-	18.487,38	71,44	
3	Ditjen Kawasan Permukiman	523.660,14	244.018,55	388.657,22	74,22	
4	Ditjen Perumahan Perdesaan	1.040.934,55	15.304,14	890.699,29	85,57	
5	Ditjen Perumahan Perkotaan	2.479.917,75	297.565,28	2.112.420,98	85,19	
6	Ditjen Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	27.421,51	-	21.160,53	77,17	
TOTAL		4.716.903,09	557.487,97	3.938.657,62	83,50	

Pengisian data keterangan dari urur

Sekretariat Jenderal
Realisasi Rp507,23 M (81,88%) digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan, operasional kantor, penyusunan SOTK, penyusunan regulasi, kerja sama kelembagaan, penyelesaian revisi DPA/edimasterial keuangan.

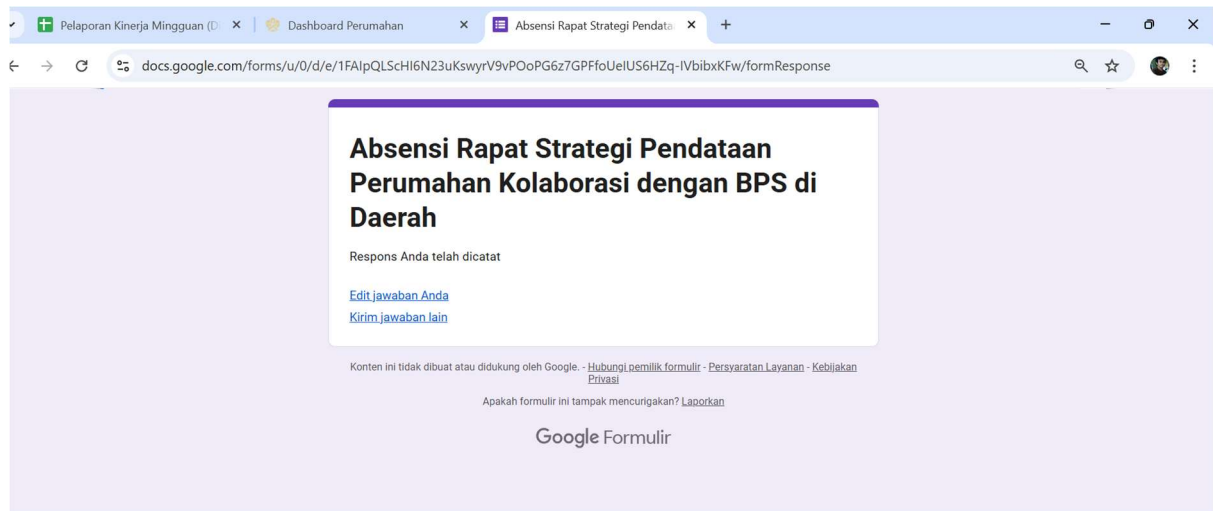
Inspektorat Jenderal
Realisasi Rp18,48 M (71,44%) digunakan untuk operasional kantor, penyusunan sistem pengendalian internal dan pengawasan, review dan audit internal.

Ditjen Kawasan Permukiman
Realisasi Rp388,66 M (74,22%) digunakan untuk penyusunan kebijakan, regulasi, terkait tata Kelola kawasan PSU, sanitasi, penanganan Kawasan kumuh, pembentukan BPS, pembentukan BEHAR PKP.

Ditjen Perumahan Perdesaan
Realisasi Rp890,70 M (85,57%) digunakan untuk penyusunan kebijakan dan regulasi pembangunan perdesaan, tata Kelola BPS, satuan tugas data dan Pembangunan PSPU Pembangunan Hutanup Erupsi Gunung Ruang di Sulawesi Utara (Rp105,85 M).

Ditjen Perumahan Perkotaan
Realisasi Rp2.112,42 M (85,19%) digunakan untuk pembayaran pekerjaan fisik lanjutan pembangunan Rumah Susun ASN 1-4, Rumah Pantempas, PKBR & Hunian Vertikal TIR (KOR) (Rp469,89 M), lanjutan pembangunan Rumah Susun Kejaksaa Tinggi Riau (Rp19,36 M), dan lanjutan pembangunan Rumah Susun Kejaksaa Tinggi Papua (Rp33,46 M).

Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko
Realisasi Rp21,16 M (77,17%) digunakan untuk penyusunan kebijakan dan regulasi tata Kelola sektor perumahan, pengembangan sistem manajemen (RPP, investasi), manajemen risiko, peningkatan kualitas, efisiensi dan pencegahan korupsi dan layanan operasional dan pemeliharaan kantor.





LAPORAN

PEMBEKALAN CALON KOORDINATOR KABUPATEN/KOTA DAN TENAGA FASILITATOR LAPANGAN PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2026

A. Dasar

Surat Undangan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi Tenggara Nomor UM 01.02-Bp16.5/028.1 Hal Undangan Pembekalan Calon Koordinator Kabupaten/Kota dan Tenaga Fasilitator Lapangan Kegiatan BSPS Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2026.

B. Waktu Dan Tempat

Hari : Jumat – Sabtu
Tanggal : 13 – 14 Februari 2026
Waktu : 07.30 WITA s.d. selesai
Tempat : Daring (*Online*) melalui *Zoom Meeting*

C. Agenda

Pembekalan Calon Koordinator Kabupaten/Kota dan Tenaga Fasilitator Lapangan untuk Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2026.

D. Tamu Undangan Dan Pemateri

1. Bakhtiar, S.ST., S.T., M.S.P. (Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III)
2. Muhammad Irsan Basalamah, ST., MT. (Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara)
3. Lili Damayanto, ST. (PPK Rumah Swadaya, PSU, dan Kawasan Permukiman Sulawesi Tenggara)
4. A. Dwi ayu Permatasari Taufan, S.T., M.M. (Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah I BP3KP Sulawesi III)
5. Nur Ali, S.T. (Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah II BP3KP Sulawesi III)
6. Agus Priyanto, Ak. M.E. (Inspektur IV Bidang Investigasi, Inspektorat Jenderal)

7. Endah Setyowati, S.E. (Auditor Inspektorat Bidang Investigasi, Inspektorat Jenderal)
8. Iryanto Sirait, S.T., M.Si. (Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia)
9. Wijasena Hendra Kurniawan, S.Kom., M.T.I. (Kepala Bidang Manajemen Data dan Pengembangan Sistem Informasi, Pusat Data dan Informasi)
10. Julian Fernando Nainggolan, S.E., M.B.A. (Kepala Subdirektorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Pembangunan Perumahan Perdesaan)
11. Hariyadi Saputra, S.E., M.M. (Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan)
12. Muhammad Farras Handy Susetyo, S.T. (Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman)
13. Amorena Ruth Eolia Saragih, S.Ars (Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan)
14. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Sulawesi Tenggara
15. La Ode Muhammad Taufik Halik, S.T. (Tenaga Ahli Konstruksi Satuan Kerja PKP Provinsi Sulawesi Tenggara)
16. Awirullah, S.Kep. (Tenaga Ahli Pemberdayaan Satuan Kerja PKP Provinsi Sulawesi Tenggara)
17. Ir. Muh. Asraf Kasim, S.Ars. (Tenaga Ahli Manajemen Satuan Kerja PKP Provinsi Sulawesi Tenggara)
18. Calon Koordinator Kabupaten/Kota Program BSPS Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2025;
19. Calon Tenaga Fasilitator Lapangan Program BSPS Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2026.

E. Pelaksanaan Pembekalan

1. Kegiatan ini dibuka oleh Bapak Muhammad Irsan Basalamah, ST., MT. selaku Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara. Pembekalan ini diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kompetensi Calon Koordinator Kabupaten/Kota dan Tenaga Fasilitator Lapangan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2026 sehingga dapat meningkatkan pemahaman terhadap kebijakan dan regulasi program BSPS. Kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman teknis terkait tahapan pelaksanaan program BSPS, dan meningkatkan kemampuan pendampingan, pengawasan, pelaporan dan koordinasi yang efektif dan bersinergi antar pelaksana program.

2. Sambutan oleh Bapak Bakhtiar, S.ST., S.T., M.S.P. selaku Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III, berupa penyampaian mengenai harapan agar Korkab/Kot dan TFL dapat melakukan verifikasi Calon Penerima Bantuan sesuai dengan SOP dan selalu menerapkan integritas pada saat melakukan pendampingan Program BSPS.
3. Paparan oleh Bapak Hariyadi Saputra, S.E., M.M. selaku Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko:
 - a. Pengawasan dilakukan berjenjang (TFL, Korkab/Kot, provinsi, pusat) untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan ketentuan dan mencegah penyimpangan.
 - b. Pengendalian risiko dimulai dari identifikasi potensi masalah pada setiap tahapan (data, keuangan, dan pekerjaan fisik) serta tindak lanjut secara cepat.
 - c. Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas, termasuk keterbukaan dalam pemilihan toko, harga material, dan penggunaan dana bantuan.
 - d. Monitoring dan pelaporan berkala disertai dokumentasi kegiatan untuk memastikan program tepat sasaran, tepat mutu, tepat waktu, dan tertib administrasi.
4. Paparan oleh Bapak Julian Fernando Nainggolan, S.E., M.B.A. selaku Kepala Subdirektorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Pembangunan Perumahan Perdesaan:
 - a. Dasar hukum bantuan pembangunan perumahan dan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) adalah Peraturan Menteri PKP Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Bantuan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor 04 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya.
 - b. Latar belakang program BSPS adalah membangun rumah atas prakarsa dan upaya masyarakat berpenghasilan rendah yang diukur berdasarkan kapasitas membangun dan merenovasi rumah, maupun kemampuan masyarakat dalam berswadaya.
 - c. *Output* kegiatan BSPS terdiri atas dua, yaitu peningkatan kualitas rumah swadaya dan pembangunan baru rumah swadaya.
5. Paparan oleh Ibu Endah Setyowati, S.E. selaku Auditor Inspektorat Bidang Investigasi Inspektorat Jenderal:

- a. TFL dan Korkab/Kot berperan sebagai pendamping teknis sekaligus pengawas proses, kapasitas masyarakat, dan kepatuhan aturan.
 - b. Terdapat beberapa potensi masalah dalam BSPS, berupa salah sasaran penerima (verifikasi lemah), monopoli toko/penyedia bahan, distribusi material dan upah tidak sesuai, serta pengendalian pekerjaan fisik yang lemah.
 - c. Upaya pencegahan berupa menggunakan DTSEN untuk keakuratan data penerima bantuan, mendampingi Kelompok Penerima Bantuan saat survei/pemilihan toko, memastikan transparansi, laporkan monopoli, pantau distribusi & spesifikasi material, dampingi serah terima, serta lakukan pelaporan dan dokumentasi berkala.
6. Paparan oleh Bapak Iryanto Sirait, S.T., M.Si. selaku Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia:
- a. PTT (Pemilihan Terbuka Toko) adalah mekanisme transparan untuk memilih toko penyedia bahan bangunan bagi program BSPS, meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan keadilan dalam proses pemilihan.
 - b. Dampak dari pelaksanaan PTT tersebut yaitu menghasilkan penghematan besar dan membantu meringankan beban swadaya masyarakat penerima bantuan.
 - c. Akan ada pengembangan ke depan berupa peningkatan sistem pengawasan berbasis digital, optimalisasi efisiensi (target tambahan 10%), serta perbaikan kebijakan termasuk peningkatan remunerasi tenaga fasilitator lapangan (TFL).
7. Paparan oleh Muhammad Farras Handy Susetyo, S.T, perwakilan Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman:
- a. Pelaksanaan BSPS memiliki tahapan jelas, yaitu perencanaan, pelaksanaan, hingga pemanfaatan, dengan verifikasi ketat (DTSEN, e-BSPS) serta pengawasan berjenjang.
 - b. Pemanfaatan hasil BSPS mencakup penghunian dan pemeliharaan, yaitu rumah wajib dihuni, dirawat secara rutin, dan tidak dialihfungsikan agar tetap layak huni dan berkelanjutan.
 - c. Pembinaan oleh pemerintah daerah sangat penting untuk memastikan keberlanjutan, meningkatkan kapasitas masyarakat, serta mencegah kembali munculnya rumah tidak layak huni.
8. Paparan oleh Amorena Ruth Eolia Saragih, S.Ars, perwakilan Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan:

- a. Perencanaan teknis BSPS berbasis standar dan regulasi, dengan tujuan menghasilkan rumah layak huni sesuai kriteria keselamatan, kesehatan, kecukupan ruang, serta akses air dan sanitasi.
 - b. Pelaksanaan teknis mengikuti kaidah konstruksi yang benar, menggunakan material sesuai standar (SNI), memperhatikan struktur aman (termasuk tahan gempa), serta perhitungan volume pekerjaan (pondasi, kolom, atap, dll).
 - c. Pengendalian program dilakukan dengan prinsip 5T (tepat waktu, mutu, biaya, sasaran, administrasi), termasuk transparansi pemilihan toko, efisiensi biaya, serta pengawasan agar pelaksanaan sesuai rencana.
9. Paparan oleh Bapak Wijasena Hendra Kurniawan, S.Kom., M.T.I. selaku Kepala Bidang Manajemen Data dan Pengembangan Sistem Informasi, Pusat Data dan Informasi:
- a. Telah dilakukan transformasi digital dalam lingkup Kementerian PKP guna meminimalisir penggunaan kertas sebagai bentuk efisiensi anggaran, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan program, dan modernisasi budaya kerja.
 - b. E-BSPS adalah bagian dari aplikasi Go-PKP (Gerakan Online Pendataan Kegiatan Perumahan) yang kedepannya akan digunakan bukan hanya untuk pendataan BSPS, tapi juga untuk pendataan 3 juta rumah, data lokasi bencana, data RTLH yang tersedia dalam versi *website* dan *mobile*.
10. Kegiatan dilanjutkan pada hari ke dua (2) yaitu pemaparan materi mengenai “Pengawasan dan Pengendalian BSPS” yang dibawakan oleh Bapak Awirullah, S.Kep. (Tenaga Ahli Pemberdayaan Satuan Kerja PKP Provinsi Sulawesi Tenggara), pemaparan materi mengenai “Tata Cara Pelaksanaan Pekerjaan Fisik BSPS” yang dibawakan oleh Bapak La Ode Muhammad Taufik Halik, S.T. (Tenaga Ahli Konstruksi Satuan Kerja PKP Provinsi Sulawesi Tenggara), dan terakhir pemaparan mengenai “Tata Cara Penyusunan Proposal, LPD I dan LPD II” yang dibawakan oleh Bapak Ir. Muh. Asraf Kasim, S.Ars. (Tenaga Ahli Manajemen Satuan Kerja PKP Provinsi Sulawesi Tenggara)
11. Kegiatan terakhir yaitu penutupan kegiatan pada pukul 16.00 WITA oleh Ibu A. Dwi ayu Permatasari Taufan, S.T., M.M. selaku Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah I BP3KP Sulawesi III.

F. Kesimpulan

1. Kegiatan berjalan baik dalam hal meningkatkan kapasitas serta pemahaman peserta terkait program BSPS.

2. Ditekankan penerapan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan berjenjang dalam pelaksanaan program BSPS.
3. Peran Korkab/Kot dan TFL sangat penting dalam pendampingan, pengawasan, dan memastikan kepatuhan aturan.
4. Diharapkan program berjalan tepat sasaran, mutu, waktu, dan administrasi secara efektif serta berkelanjutan.

Demikian laporan ini dibuat dan akan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sehingga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DOKUMENTASI PEMBEKALAN CALON KORKAB/KOT DAN TFL PROGRAM BSPTS PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2026

Rapat Arahan dan Koordinasi
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

BALAI
Gotong Royong
Membangun Untuk Rakyat

ELWI

Marilah Kita Berseru
Indonesia Bersatu

PEMBEKALAN CALON KOORDINATOR KABUPATEN/KOTA DAN TENAGA FASILITATOR LAPANGAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPTS) PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2026

KEMENTERIAN PKP

DASAR HUKUM & LATAR BELAKANG PROGRAM BSPTS

DASAR HUKUM

- Pasal 14-15 UU 1 Tahun 2001 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, salah satu bentuk kemitraan adalah bantuan pembangunan dan perbaikan rumah bagi MBS berupa stimulus rumah swadaya
- Pasal 17 ayat (3) PP 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, salah satu bentuk kemitraan adalah bentuk kemitraan dengan bentuk pembangunan dan perbaikan rumah bagi MBS berupa stimulus rumah swadaya
- Peraturan Menteri Perumahan 10/PMK/2021/2021 dan 12/PMK/2021/2021 tentang Pelaksanaan Pelaksanaan Program Bantuan Perumahan pada Kementerian Regional/Lingkungan
- Instruksi Presiden 8 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Bantuan Perumahan dan Pengembangan Kemitraan
- Peraturan Menteri PKP No. 19 Tahun 2025 tentang Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Surat Edaran Kepala PKP No. 4 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Perumahan Swadaya

LATAR BELAKANG

1. Rumah Swadaya adalah rumah yang dibangun oleh masyarakat dan warga masyarakat (UU 1/2001 tentang PKP)
2. Tingkat prakarsa dan upaya (berdaya) dukor bersumberkan kapasitas dalam membangun atau memelihara rumah
3. Peningkatan kewadayaan (pembudayaan) dilakukan guna meningkatkan kesadaran, kemauan, kemampuan, dan kemandirian
4. Berlakunya pemberdayaan meliputi edukasi, pendampingan, dan pembinaan
5. Pemberdayaan dilakukan dalam tahap perencanaan, pembangunan/peningkatan kualitas rumah, pengawasan, pengelolaan dana bantuan guna mewujudkan rumah layak huni

PRINSIP UTAMA BSPTS

Masyarakat (Pemirsa Berdaya) sebagai pelaku utama pembangunan (Peningkatan dana bantuan akan diberikan sesuai sesuai dengan peran masing-masing)

DOKUMENTASI PEMBEKALAN CALON KORKAB/KOT DAN TFL PROGRAM BSPS PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2026



DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Jl. Drs. H. Abdullah Silondae No. 84, Korumba, Kec. Mandonga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Senin, 30 Maret 2026

Tempat : Ruang Rapat Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara (Via Zoom Meeting)

Acara : Peluncuran Bps Secara Nasional Tahun Anggaran 2026 Dan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan Serta Pemberdayaan
Ekonomi Rakyat Kementerian PKP-BP TAPERA-BRI-PNM-SMF

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	TANDA TANGAN
1	MUH. IRSAN		KASATKER	
2	LAOPE SIRAFIN		STAF	
3	Muh. Fakhriana Purn		staf	
4	Indah MH			
5	Moh. Rifa Agustina		staf	
6	MURSYID HIDAYAT		STAFF	
7	NURUL BIDAYNI		staf	
8	ANNISA		staf	
9	Achmad Zulfikar M.		//	
10	Hamka Thahir		staf	
11				
12				
13				



DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Jl. Drs. H. Abdullah Silondae No. 84, Korumba, Kec. Mandonga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara

NOTULEN RAPAT

Judul Rapat : Rapat Peluncuran BSPS Secara Nasional Tahun Anggaran 2026 Dan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan Serta Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Kementerian PKP-BP TAPERA-BRI-PNM-SMF

Hari/Tanggal : Senin, 30 Maret 2026

Waktu : 14:30 WITA s/d Selesai

Lokasi : Ruang Rapat Kantor Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara (Via Zoom Meeting)

Rundown Acara : Sesuai Undangan Rapat

Notulis : Laode Sirafin Sarini, S.T.

I. POKOK PEMBAHASAN BSPS:

A. Gambaran Umum BSPS

1. BSPS merupakan bantuan stimulan dari pemerintah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk pembangunan atau peningkatan kualitas rumah swadaya
2. Program berlandaskan:
 - a) UU No. 1 Tahun 2011
 - b) PP No. 14 Tahun 2016
 - c) PMK terkait bantuan pemerintah
 - d) Inpres No. 8 Tahun 2025
 - e) Permen PKP No. 10 Tahun 2025
 - f) SE Ditjen TKPR No. 1 Tahun 2026

B. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan:
 - a) Meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rumah layak huni.
2. Manfaat:
 - a) Mendorong gotong royong
 - b) Menggerakkan ekonomi lokal
 - c) Menyerap tenaga kerja
 - d) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

C. Indikator Rumah Layak Huni

1. Kualitas struktur dan bahan bangunan
2. Keselamatan dan kesehatan
3. Pencahayaan dan penghawaan
4. Akses air minum dan sanitasi
5. Kecukupan ruang ($\geq 9 \text{ m}^2/\text{jiwa}$, bertahap minimal $7,2 \text{ m}^2$)

D. Prinsip Pelaksanaan BPS

1. Penerima bantuan sebagai pelaku utama
2. Bantuan bersifat stimulan (bukan pembiayaan penuh)
3. Mengedepankan keswadayaan dan gotong royong
4. Tidak ada pungutan biaya dari pihak manapun
5. Nilai bantuan sebesar $\pm \text{Rp}20.000.000/\text{unit}$
6. Pendampingan oleh TFL dan Korkab/Korkot

E. Persyaratan Penerima

1. WNI sudah berkeluarga
2. Termasuk MBR (desil 4 ke bawah / penghasilan $\leq \text{UMK/UMP}$)
3. Memiliki/menguasai tanah yang sah
4. Memiliki dan menempati RTLH
5. Belum menerima BPS/FLPP dalam 10 tahun terakhir
6. Bersedia mengikuti ketentuan program

F. Tahapan Pelaksanaan

1. Pengusulan
2. Verifikasi dan penyiapan masyarakat
3. Penetapan penerima dan pencairan bantuan
4. Penyaluran bantuan
5. Penggunaan dana tahap I
6. Penggunaan dana tahap II

Meliputi:

- Pembelian bahan bangunan
- Pelaksanaan pekerjaan fisik
- Pembayaran upah kerja
- Pelaporan tiap tahap

G. Pelaksanaan dan Contoh Kasus

1. Program menunjukkan adanya kontribusi keswadayaan masyarakat (Rp1 juta – Rp30 juta).
2. Progres pembangunan umumnya bertahap (0% – 30% – 100%).
3. Dokumentasi menunjukkan keberhasilan di berbagai daerah.

H. Kesimpulan

1. Program BSPS merupakan instrumen strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah.
2. Keberhasilan program sangat bergantung pada:
 - a) Partisipasi aktif masyarakat
 - b) Pendampingan TFL/Korkab
 - c) Kepatuhan terhadap aturan
3. Program tidak hanya berdampak pada perumahan, tetapi juga pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat.

I. Tindak Lanjut (Rekomendasi)

1. Meningkatkan sosialisasi program kepada masyarakat
2. Memperkuat pengawasan agar tidak terjadi pungutan liar
3. Optimalisasi peran TFL dan Korkab/Korkot
4. Mendorong peningkatan keswadayaan masyarakat
5. Memastikan ketepatan sasaran penerima bantuan

II. RINGKASAN KOLABORASI PROGRAM KOLABORASI

1. Tujuan Kolaborasi

Kolaborasi ini bertujuan untuk:

- Memperluas akses pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
- Meningkatkan kualitas hunian melalui dukungan pembiayaan yang berkelanjutan
- Mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat penerima bantuan
- Menciptakan ekosistem perumahan yang inklusif dan terintegrasi

2. Peran Masing-Masing Lembaga

A. Kementerian PKP

- Koordinator utama program
- Penyusun kebijakan dan regulasi
- Pelaksana program BSPS sebagai stimulan awal

B. BP TAPERA

- Menyediakan pembiayaan perumahan jangka panjang
- Memfasilitasi akses kepemilikan rumah bagi MBR

C. BRI

- Penyalur layanan keuangan dan perbankan
- Mendukung inklusi keuangan masyarakat
- Mempermudah akses transaksi dan penyaluran bantuan

D. PNM (Permodalan Nasional Madani)

- Pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya ultra mikro
- Pendampingan usaha produktif bagi penerima bantuan
- Meningkatkan kemampuan ekonomi rumah tangga

E. SMF (Sarana Multigriya Finansial)

- Penyedia pembiayaan sekunder perumahan
- Menjaga likuiditas pembiayaan perumahan nasional
- Mendukung keberlanjutan pembiayaan jangka panjang

3. Skema Integrasi Program

- BSPS (stimulan awal) → meningkatkan kualitas rumah
- TAPERA & SMF → menyediakan pembiayaan lanjutan/perumahan
- BRI → menyediakan akses perbankan dan transaksi
- PNM → memperkuat ekonomi masyarakat melalui usaha produktif

Pendekatan ini mengintegrasikan:

- Bantuan fisik (rumah)
- Pembiayaan (akses kredit/perumahan)
- Pemberdayaan ekonomi (peningkatan pendapatan)

4. Manfaat Kolaborasi

- Meningkatkan akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan
- Mengurangi backlog perumahan dan RTLH
- Mendorong kemandirian ekonomi masyarakat
- Meningkatkan inklusi keuangan
- Memperkuat dampak program pemerintah secara berkelanjutan

5. Dampak yang Diharapkan

- Terbentuknya masyarakat yang tidak hanya memiliki rumah layak, tetapi juga memiliki kemampuan ekonomi yang meningkat
- Terciptanya siklus positif antara hunian layak dan peningkatan kesejahteraan
- Penguatan ekosistem pembiayaan perumahan nasional

6. Tantangan Utama

- Koordinasi lintas lembaga yang kompleks
- Literasi keuangan masyarakat yang masih terbatas

- Kemampuan bayar masyarakat (affordability)
- Ketepatan sasaran penerima manfaat

7. Rekomendasi

- Penguatan koordinasi dan integrasi program antar lembaga
- Peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat
- Optimalisasi pendampingan (TFL dan lembaga terkait)
- Penguatan sistem data terpadu penerima manfaat
- Monitoring dan evaluasi terpadu

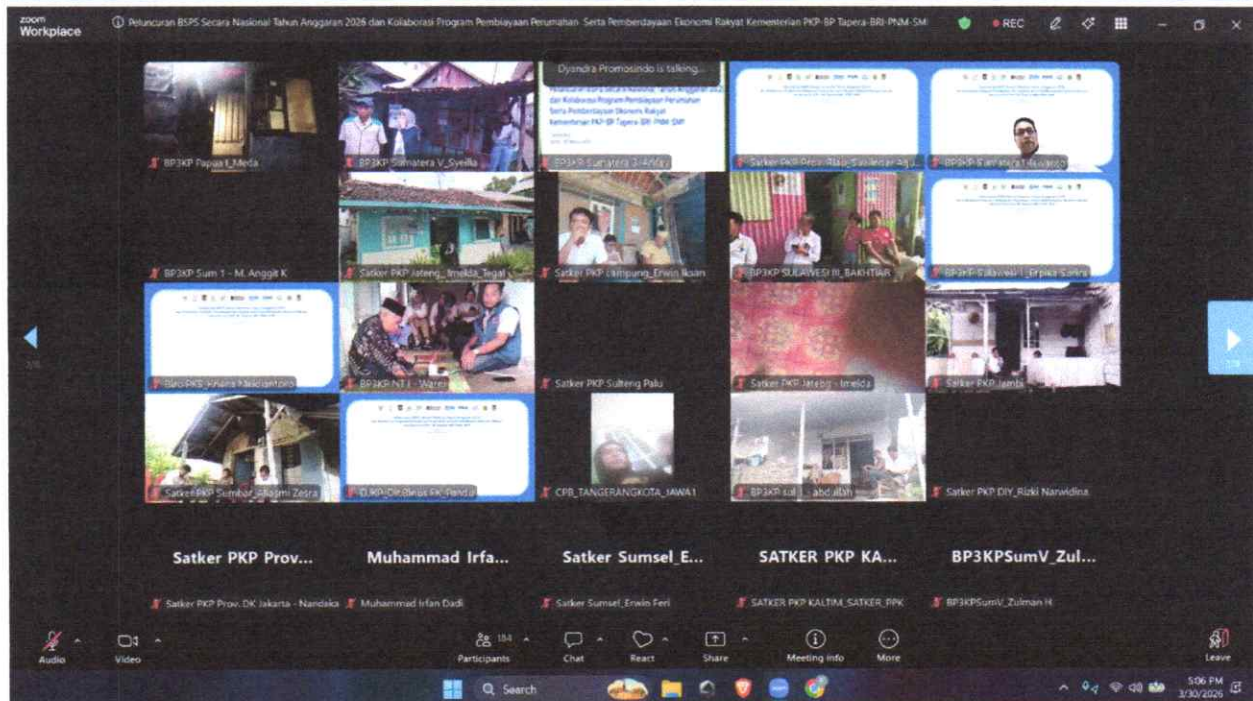
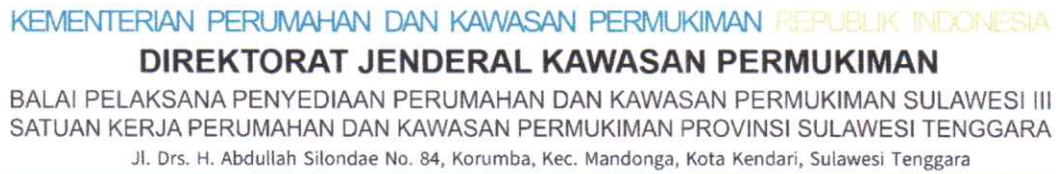
8. Kesimpulan

Kolaborasi antara Kementerian PKP, BP TAPERA, BRI, PNM, dan SMF merupakan langkah strategis untuk mengintegrasikan program perumahan dengan pemberdayaan ekonomi rakyat. Pendekatan ini tidak hanya menyelesaikan permasalahan hunian, tetapi juga meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Notulis



Laode Sirafin sarini, S.T.







KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Jl. Drs. H. Abdullah Silondae No. 84, Korumba, Kec. Mandonga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara

LEMBAR DISPOSISI

Unit Pengirim : DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN.
No. Surat : Ru.10/Dp/138/B/2026 /Tgl Surat : 27 Maret 2026
Hal : Undangan Peluncuran BSPS Secara Nasional TA 2026 dan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan Serta Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Kementerian PKP-BP Tapera-BRI-PNM-SMF.
No. Agenda : /Tgl Penerimaan : 28 Maret 2026

Yth

☒ PPK Ruswa, PSU dan Kawasan Permukiman
☒ Pejabat Penandatanganan SPM
☒ Bendahara
☒ Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
☒ Asisten KPA

☒ Kaur Teknik PPK Randal
☒ Kaur Administrasi PPK Randal
☒ Kaur Teknik PPK Ruswa, PSU & KP
☒ Kaur Administrasi PPK Ruswa, PSU & KP
☒ Cpnns

Sifat : ☐ Biasa ☐ Segera ☒ Perlu Perhatian ☐ Perhatikan Batas Waktu

☐ Memberikan dan menyampaikan saran
☐ Melaksanakan / Menindaklanjuti
☐ Bicarakan dengan saya
☐ Mohon hadir mewakili saya
☒ Ikut hadir / ~~Menugaskan~~ Staf
☐ Diketahui / Sebagai informasi
☐ Menyimpan dalam file
☐ Melaksanakan sesuai dengan pembicaraan

☐ Monitoring Perkembangan
☐ Dibahas bersama
☐ Jadwalkan / Atur rapat / Pertemuan
☐ Diproses lebih lanjut sesuai prosedur
☐ Melaksanakan dan melaporkan hasilnya
☐ Untuk dipedomani
☐ Siapkan konsep jawaban / tanggapan
☐ Ikuti Zoom

Catatan

Zoom diruang rapat untuk
disiapkan



Kepala Satuan Kerja
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Sulawesi Tenggara

Muh. Irsan Basalamah, S.T., M.T.
NIP. 19870612 201001 1 013



DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Raden Patah 1, Nomor 1, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12110

Nomor : Ru.10/Dp/138/B/2026
Sifat : Segera
Lampiran : 2
Hal : Undangan Peluncuran BSPS Secara Nasional TA 2026
dan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan Serta
Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Kementerian PKP-BP
Tapera-BRI-PNM-SMF

Jakarta, 27 Maret 2026

Yth. (Daftar Undangan Terlampir)
di Tempat

Dalam rangka mendukung pencapaian Program 3 Juta Rumah melalui peningkatan kualitas rumah serta peningkatan akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat, akan dilaksanakan Peluncuran BSPS Secara Nasional Tahun Anggaran 2026 dan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan Serta Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Kementerian PKP-BP Tapera-BRI-PNM-SMF pada:

Hari/Tanggal : Senin, 30 Maret 2026
Waktu : 1. Gladi Resik
11.00 – 12.00 WIB
2. Pelaksanaan Kegiatan
13.30 WIB – Selesai (Jadwal Terlampir)
Tempat : **Aplikasi Zoom Meeting**
1. Gladi Resik
<https://bit.ly/gladiresik30mar>
2. Pelaksanaan Kegiatan
<https://bit.ly/zoompeluncuranBSPS>
Meeting ID : 872 7492 6594
Password : BRI2026

Mengingat pentingnya acara tersebut, dimohon Bapak/Ibu dapat hadir tepat waktu serta menyiapkan data-data yang relevan terkait pelaksanaan BSPS, KPP dan PNM pada masing-masing wilayah kerja. Peserta wajib melakukan konfirmasi kehadiran pada tautan <https://bit.ly/konfirm30maret> paling lambat Sabtu, 28 Maret 2026. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Pipit Prayogo (082138698262).

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman,



[Signature]
Ir. Fitrah Nur M.Si.
NIP 196704191994031003

Tembusan:

1. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman ;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;

Lampiran I
Surat Direktur Jenderal Kawasan Permukiman
Nomor : RU.10/DP/138/B/2026
Tanggal : 27 Maret 2026
Hal : Undangan Peluncuran BSPS
Secara Nasional TA 2026 dan
Kolaborasi Program Pembiayaan
Perumahan Serta Pemberdayaan
Ekonomi Rakyat Kementerian
PKP-BP Tapera-BRI-PNM-SMF

DAFTAR PENERIMA UNDANGAN

A. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan PKP Sumatera I;
2. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan PKP Sumatera II;
3. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan PKP Sumatera III;
4. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan PKP Sumatera IV;
5. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan PKP Sumatera V;
6. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan PKP Kalimantan I;
7. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan PKP Kalimantan II;
8. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan PKP Jawa I;
9. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan PKP Jawa II;
10. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan PKP Jawa III;
11. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan PKP Jawa IV;
12. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan PKP Nusa Tenggara I;
13. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan PKP Nusa Tenggara II;
14. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan PKP Sulawesi I;
15. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan PKP Sulawesi II;
16. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan PKP Sulawesi III;
17. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan PKP Maluku;
18. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan PKP Papua I;
19. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan PKP Papua II.

B. Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Aceh;
2. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Sumatera Utara;
3. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Sumatera Barat;
4. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Riau;
5. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Kepulauan Riau;
6. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Bengkulu;
7. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Jambi;
8. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Sumatera Selatan;
9. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Bangka Belitung;
10. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Lampung;
11. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Banten;
12. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi DKI Jakarta;
13. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Jawa Barat;
14. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi DI Yogyakarta;
15. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Jawa Tengah;
16. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Jawa Timur;
17. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Bali;
18. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Nusa Tenggara Barat;
19. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Nusa Tenggara Timur;

20. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Kalimantan Barat;
21. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Kalimantan Tengah;
22. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Kalimantan Selatan;
23. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Kalimantan Timur;
24. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Kalimantan Utara;
25. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi IKN;
26. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Sulawesi Utara;
27. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Gorontalo;
28. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Sulawesi Tengah;
29. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Sulawesi Barat;
30. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Sulawesi Selatan;
31. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Sulawesi Tenggara;
32. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Maluku;
33. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Maluku Utara;
34. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Papua;
35. Kepala Satker Penyediaan PKP Provinsi Papua Barat.

C. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman

1. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman, PKP Provinsi Aceh;
2. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman, PKP Provinsi Sumatera Utara;
3. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman, PKP Provinsi Sumatera Barat;
4. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman, PKP Provinsi Riau;
5. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau;
6. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu;
7. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi;
8. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman Sumatera Selatan;
9. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Bangka Belitung;
10. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman, PKP Provinsi Lampung;
11. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman, PKP Provinsi Banten;
12. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman, PKP Provinsi DKI Jakarta;
13. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman, PKP Provinsi Jawa Barat;
14. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman, PKP Provinsi DI Yogyakarta;
15. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman, PKP Provinsi Jawa Tengah;
16. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman, PKP Provinsi Jawa Timur;
17. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman, PKP Provinsi Bali;
18. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman, PKP Provinsi Nusa Tenggara Barat;
19. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman, PKP Provinsi Nusa Tenggara Timur;
20. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman, PKP Provinsi Kalimantan Barat;
21. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman, PKP Provinsi Kalimantan Tengah;

22. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman, PKP Provinsi Kalimantan Selatan;
23. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman, PKP Provinsi Kalimantan Timur;
24. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman, PKP Provinsi Kalimantan Utara;
25. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman, PKP Provinsi IKN;
26. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman, PKP Provinsi Sulawesi Utara;
27. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman, PKP Provinsi Gorontalo;
28. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman, PKP Provinsi Sulawesi Tengah;
29. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman, PKP Provinsi Sulawesi Barat;
30. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman, PKP Provinsi Sulawesi Selatan;
31. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman, PKP Provinsi Sulawesi Tenggara;
32. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman, PKP Provinsi Maluku;
33. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman, PKP Provinsi Maluku Utara;
34. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman, PKP Provinsi Papua;
35. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman, PKP Provinsi Papua Barat.



Lampiran II

Surat Direktur Jenderal Kawasan Permukiman

Nomor : RU.10/Dp/138/B/2026

Tanggal : 27 Maret 2026

Hal : Undangan Peluncuran BSPS

Secara Nasional TA 2026 dan

Kolaborasi Program Pembiayaan

Perumahan Serta Pemberdayaan

Ekonomi Rakyat Kementerian

PKP-BP Tapera-BRI-PNM-SMF

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN**Senin, 30 Maret 2026**

No	Waktu	Kegiatan
1	13.30 – 14.00	Registrasi Peserta
2	14.00 – 14.03	<i>Opening MC</i>
3	14.03 – 14.05	Pembacaan Doa
4	14.05 – 15.05	<i>Talkshow:</i> 1. Kebijakan KUR Perumahan oleh PKP 2. Tata cara pinjaman KUR Perumahan oleh BRI 3. Sosialisasi oleh PNM Mekar 4. Sosialisasi oleh Rumah Subsidi 5. Sosialisasi BSPS
5	15.05 – 15.08	Menyanyikan lagu Indonesia Raya
6	15.08 – 15.18	Sambutan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati)
7	15.18 – 15.28	Sambutan dari Bank BRI
8	15.28 – 15.38	Sambutan dari K/L Terkait (jika ada)
9	15.38 – 15.48	Sambutan dari Wakil Ketua DPR RI
10	15.48 – 16.18	Sambutan dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman
11	16.18 – 16.23	<i>Closing Statement</i> Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman - Pembagian <i>reward</i> bagi PNM Berprestasi - Peluncuran BSPS Masal
12	16.23 – 16.25	Menyanyikan lagu Bagimu Negeri
13	16.25 – 16.28	Foto Bersama
14	16.28 – 16.38	<i>Press Conference</i>

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman,



Fitrah Nur, M.Si.

NIP. 196704191994031003



NOTULENSI KEGIATAN

A. Nama Kegiatan

Pembekalan Persiapan Kegiatan Fisik Program BSPS di Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2026.

B. Dasar Kegiatan

Surat Keputusan Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Nomor 39/KPTS/Dp/2026, serta Keputusan Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Nomor 35/KPTS/Dd/2026 dan Nomor 43/KPTS/Dd/2026 tentang Lokasi Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2026.

C. Penyelenggara

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rumah Swadaya, PSU, dan Kawasan Permukiman Satuan Kerja PKP Provinsi Sulawesi Tenggara.

D. Waktu dan Tempat

Hari/Tanggal : Jum'at, 17 April 2026
Waktu : 14.00 – 18.00 WITA
Tempat : *Online (Aplikasi Zoom Meeting)*

E. Peserta

1. Koordinator Kabupaten/Kota (Korkab/Korkot), sebanyak 16 orang;
2. Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), sebanyak 220 orang.

F. Narasumber/Pemateri

1. Bakhtiar, S.ST., S.T., M.S.P., selaku Kepala Balai P3KP Sulawesi III
2. Andi Dwi Ayu Permatasari Taufan, S.T., M.M., selaku Kepala Seksi Wilayah 1 Balai P3KP Sulawesi III
3. Nur Ali, S.T., selaku Kepala Seksi Wilayah 1 Balai P3KP Sulawesi III
4. Lili Damayanto, S.T., selaku PPK Rumah Swadaya, PSU, dan Kawasan Permukiman Satuan Kerja PKP Provinsi Sulawesi Tenggara
5. Awirullah S.Kep., selaku Tenaga Ahli Manajemen BSPS Prov. Sulawesi Tenggara
6. La Ode Muhammad Taufik, S.T., M.T., selaku Tenaga Ahli Konstruksi BSPS Prov. Sulawesi Tenggara
7. Ir. Muh. Asraf Kasim, S.Ars., selaku Tenaga Ahli Pemberdayaan BSPS Prov. Sulawesi Tenggara

G. Ringkasan Pelaksanaan Kegiatan

1. Pembukaan

Kegiatan dimulai dan dipandu oleh Saudari Annisa (Staf PPK Rumah Swadaya, PSU, dan Kawasan Permukiman) selaku Moderator Kegiatan pada pukul 14.10 WITA, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

2. Arahan Kepala Balai BP3KP Sulawesi III

Bapak Bakhtiar selaku Kepala Balai P3KP Sulawesi III dalam sambutan dan arahnya menyampaikan bahwa kegiatan pembekalan ini sangat penting untuk menyamakan persepsi seluruh pelaksana, khususnya TFL dan Korkab, agar memahami tahapan pelaksanaan BSPS tahun 2026 secara utuh. Ia menekankan agar setiap tahapan kegiatan, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan di lapangan, dicermati dengan baik dan tidak ada yang terlewat karena menjadi tanggung jawab bersama antara TFL, tenaga ahli, PPK, dan Satker.

Beliau menyampaikan bahwa dari total rencana sekitar 5.713 unit bantuan di Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagian telah memiliki SK penetapan penerima bantuan. Oleh karena itu, TFL diminta segera melakukan langkah-langkah persiapan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai target. Selain itu, beliau juga mengapresiasi dukungan Komisi V DPR RI yang telah mendorong perpanjangan masa kontrak TFL dari sebelumnya 3 bulan menjadi sekitar 5 bulan, sehingga diharapkan pelaksanaan pendampingan, khususnya dalam aspek pelaporan, dapat lebih optimal.

Lebih lanjut, beliau menekankan pentingnya ketepatan waktu dalam penyelesaian laporan, khususnya LPD 1 dan LPD 2, agar tidak terjadi keterlambatan seperti tahun sebelumnya. Di samping itu, TFL juga diminta untuk teliti dalam menyusun RAB agar bantuan material sebesar Rp17,5 juta dapat dimanfaatkan secara maksimal dan menghasilkan pekerjaan yang tuntas, bukan pekerjaan yang hanya selesai sebagian.

Dari sisi integritas, beliau mengingatkan dengan tegas agar seluruh pelaksana tidak melakukan penyimpangan, terutama dalam pengadaan material dan kerja sama dengan toko bangunan. Ia menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap pelanggaran dan tidak ada jaminan pendampingan hukum bagi pihak yang terbukti melakukan kesalahan, sehingga seluruh pelaksana harus bekerja sesuai prosedur dan menjaga amanah. Beliau juga menyoroti pentingnya kedisiplinan, termasuk kehadiran dalam kegiatan pembekalan sebagai bentuk tanggung jawab dan penghormatan terhadap forum.

Pada akhir sambutannya, Bapak Bakhtiar secara resmi membuka kegiatan pembekalan pelaksanaan fisik BSPS tahun 2026 dengan mengucapkan

“Bismillahirrahmanirrahim”, seraya berharap seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan lancar. Sebagai penutup, beliau berharap seluruh pelaksanaan BSPS tahun 2026 dapat berjalan dengan baik, tepat waktu, dan profesional, serta mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

3. Arahan Seksi Wilayah 1 Balai P3KP Sulawesi III

Ibu Andi Ayu menegaskan bahwa pelaksanaan Program BSPS harus tepat sasaran, tepat waktu, dan tertib administrasi sesuai ketentuan terbaru dari Kementerian PKP. Dari sisi pelaksanaan fisik, seluruh tahapan kegiatan—mulai dari verifikasi, penetapan lokasi, hingga konstruksi—harus dijalankan secara disiplin. Peran TFL menjadi kunci dalam memastikan pekerjaan sesuai standar teknis, kualitas bangunan terjaga, serta pelaksanaan sesuai RAB tanpa penyimpangan.

Pada aspek administrasi, seluruh dokumen wajib disusun secara lengkap, sistematis, dan akuntabel, karena ketidaksesuaian dapat berdampak pada temuan pemeriksaan. Selain itu, diperlukan koordinasi dan sinkronisasi yang baik antara TFL, satker, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan, serta respons cepat terhadap setiap permasalahan di lapangan.

Ibu Andi Ayu juga menekankan pentingnya integritas dan profesionalisme dalam pelaksanaan program, mengingat BSPS merupakan bentuk kehadiran negara dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sebagai penutup, disampaikan bahwa balai, satker, dan PPK akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala serta menindak tegas setiap ketidaksesuaian.

4. Arahan Seksi Wilayah 2 Balai P3KP Sulawesi III

Bapak Nur Ali menekankan pentingnya menjaga integritas bagi seluruh Korkab dan TFL dalam mendampingi pelaksanaan Program BSPS, serta mengingatkan agar tidak terjadi penyimpangan karena akan berdampak pada konsekuensi bagi pelaksana di lapangan.

Beliau menyampaikan bahwa program saat ini telah memasuki tahap pelaksanaan setelah melalui proses persiapan seperti verifikasi, sosialisasi, dan penyuluhan. Tahap pelaksanaan yang terdiri dari pra-pelaksanaan dan pelaksanaan perlu dipahami dengan baik karena menjadi tolok ukur kinerja pendamping di lapangan. TFL dan Korkab diharapkan dapat berperan aktif dalam membantu PPK, khususnya dalam mengawal aspek administrasi dan teknis seperti penyusunan RAB, kontrak toko, serta penentuan HPS. Seluruh proses harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, setiap permasalahan di lapangan harus segera dikomunikasikan kepada PPK atau pihak balai agar dapat diselesaikan bersama dan tidak menimbulkan isu. Pihak balai juga akan melakukan pengawasan secara tegas dan

memberikan teguran apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program.

5. Arahan PPK Rumah Swadaya, PSU, dan Kawasan Permukiman Satuan Kerja PKP Provinsi Sulawesi Tenggara

Bapak Lili Damayanto selaku PPK Rumah Swadaya, PSU, dan Kawasan Permukiman Satuan Kerja PKP Provinsi Sulawesi Tenggara menekankan pentingnya pemahaman menyeluruh terhadap tahapan penyusunan proposal BSPS sesuai dengan format terbaru tahun 2026. Beliau menjelaskan bahwa proses dimulai dari pembentukan KPB (Kelompok Penerima Bantuan) sebagai langkah awal, kemudian dilanjutkan secara berurutan hingga pengajuan permohonan penetapan bantuan, dengan total sekitar 19 format yang harus dilengkapi oleh TFL.

Dalam arahannya, beliau juga menyampaikan adanya perubahan kebijakan dibandingkan tahun sebelumnya, di mana penggunaan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) telah dihapus dan digantikan dengan HSBB (Harga Satuan Bahan Bangunan). HSBB yang diterbitkan oleh PPK hanya berfungsi sebagai pembanding, sedangkan acuan utama dalam penyusunan RAB (Rencana Anggaran Biaya) adalah HSBB hasil survei yang dilakukan oleh KPB bersama TFL.

Lebih lanjut, beliau menegaskan bahwa survei harga material harus dilakukan secara transparan dengan melibatkan minimal tiga toko bangunan, serta dianjurkan melibatkan lebih banyak anggota kelompok agar menghindari potensi kecurigaan di masyarakat. Hasil survei tersebut kemudian digunakan untuk menyusun RAB awal (RAB 1).

Setelah itu, dilakukan proses Pemilihan Toko Terbuka (PTT) yang harus berjalan secara kompetitif dan transparan. Dalam proses ini, harga penawaran dari toko dapat lebih rendah atau lebih tinggi dari HSB, namun tidak boleh sama persis karena hal tersebut dapat mengindikasikan adanya rekayasa. Hasil dari PTT kemudian digunakan untuk menyusun RAB kedua (RAB 2), dengan harga yang telah disepakati dan bersifat final tanpa adanya perubahan atau eskalasi di kemudian hari.

Beliau juga mengingatkan bahwa titik rawan kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini terletak pada proses penyusunan RAB awal, pelaksanaan PTT, dan penyusunan RAB kedua. TFL diharapkan dapat mencermati dan melaksanakan tahapan tersebut dengan benar sesuai prosedur, karena apabila tahapan ini telah dilaksanakan dengan baik, maka proses selanjutnya akan lebih aman.

Selain itu, beliau menegaskan bahwa TFL memiliki tanggung jawab untuk melakukan pendampingan hingga seluruh pekerjaan selesai 100 persen. Bahkan apabila masa kontrak telah berakhir namun pekerjaan belum tuntas, TFL tetap berkewajiban melanjutkan pendampingan tanpa tambahan biaya. Dalam hal

koordinasi, beliau mendorong seluruh TFL dan Korkab untuk aktif berkomunikasi dan tidak ragu untuk bertanya atau berdiskusi apabila terdapat hal-hal yang belum dipahami, baik melalui jalur pribadi maupun grup. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahan yang berulang dan meminimalisir revisi dokumen.

Sebagai penutup, beliau berharap seluruh tahapan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai prosedur, tepat waktu, dan dengan pemahaman yang baik, sehingga pelaksanaan fisik BSPS tahun 2026 dapat berjalan lancar tanpa kendala baik dari sisi teknis maupun administrasi.

6. Materi Tenaga Ahli Manajemen

Bapak Muh. Asraf Kasim menyampaikan bahwa pembekalan ini merupakan pemantapan dari materi sebelumnya dengan mengacu pada SE 01 Tahun 2026. Saat ini kegiatan telah memasuki tahap administrasi, setelah seluruh proses awal seperti koordinasi dan verifikasi lapangan dilaksanakan.

Dalam tahap ini, peserta diminta menyiapkan dokumen administrasi secara lengkap, meliputi lembar verifikasi, surat permohonan bantuan, KTP, bukti penghasilan, dan dokumen kepemilikan tanah. Selain itu, terdapat dokumen lanjutan seperti surat permohonan calon penerima (Format 2.19), surat pernyataan bermaterai (Format 2.22), identifikasi swadaya, serta dokumen teknis berupa rencana teknis dan RAB. Format yang digunakan pada dasarnya masih sama, namun ada beberapa penyesuaian dan tambahan.

Perubahan yang disampaikan antara lain adanya dokumen kesepakatan sosial, fakta integritas oleh desa/kelurahan, serta berita acara identifikasi tukang. Selain itu, mekanisme pemilihan toko bahan bangunan kini berubah dari survei menjadi pemilihan (Format 2.16), dengan Ketua Tim Verifikasi hanya sebagai pihak “mengetahui”. Proses pemilihan toko dilakukan secara terbuka melalui undangan, penawaran harga, hingga penetapan toko, dengan survei harga dilakukan di tingkat kelompok (desa) dan direkap oleh PPK di tingkat kabupaten.

Bapak Asraf juga menekankan pentingnya ketelitian dalam penginputan data pada aplikasi, khususnya terkait titik koordinat rumah penerima agar tidak salah (misalnya berada di laut). Progres penginputan data saat ini masih belum mencapai target sehingga perlu segera ditingkatkan. Secara keseluruhan, seluruh tim diminta untuk melaksanakan tahapan administrasi dengan tertib, mengikuti format terbaru, serta memperhatikan detail teknis agar pelaksanaan program dapat berjalan lancar.

7. Materi Tenaga Ahli Konstruksi

Bapak La Ode Muhammad Taufik Halik menekankan bahwa proses *Rapid Assessment* dalam Program BSPS dilakukan secara sistematis berbasis aplikasi, di mana seluruh data dan dokumen diinput oleh TFL melalui link yang telah disediakan,

kemudian diverifikasi oleh Korkab dan dinilai secara otomatis oleh sistem. Oleh karena itu, kelengkapan dokumentasi menjadi hal krusial karena sangat mempengaruhi hasil penilaian.

Beliau juga mengingatkan bahwa seluruh indikator penilaian sudah jelas tertuang dalam format dan mengacu pada Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2026, sehingga seluruh TFL dan Korkab wajib memahami dan tidak diperkenankan mengurangi atau menambah format yang dapat merugikan program. Pemahaman terhadap regulasi ini menjadi dasar utama dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

Selain itu, disampaikan bahwa hal-hal administratif yang sering dianggap kecil, seperti kelengkapan laporan TFL, kartu kendali, laporan permasalahan, dan dokumentasi, justru menjadi indikator penting dalam menilai kinerja pendampingan. Ketidakterpenuhan dokumen tersebut dapat menimbulkan asumsi bahwa pendampingan tidak dilakukan secara optimal, termasuk tidak dilaksanakannya metode *door to door*.

Bapak La Ode juga menekankan pentingnya pelaporan permasalahan secara berjenjang. Setiap kendala di lapangan harus segera dilaporkan oleh TFL kepada Korkab untuk direkap dan diteruskan ke tingkat yang lebih tinggi. Hal ini bertujuan agar setiap permasalahan memiliki jejak administrasi yang jelas serta solusi yang terkoordinasi, bukan berdasarkan asumsi atau kebiasaan semata.

Dalam pelaksanaan program, beliau mengingatkan agar setiap pihak memahami batas tugas dan kewenangannya. TFL tidak diperkenankan mengambil keputusan secara sepihak di luar kewenangannya, melainkan harus melalui koordinasi dengan Korkab dan tim terkait. Komunikasi yang baik dan berjenjang menjadi kunci dalam menjaga kelancaran program serta menghindari konflik internal.

Terkait progres program, disampaikan bahwa hingga 17 April 2026 telah terbit SK CPB dengan total 1.784 unit yang tersebar pada deliniasi pedesaan, pesisir, dan perkotaan. Untuk lokasi yang telah memiliki SK, TFL diminta segera melakukan langkah lanjutan seperti survei harga (HSB), penyusunan proposal, dan koordinasi dengan KPB agar proses tidak stagnan. Selain itu, masih terdapat sejumlah kekurangan penginputan data pada aplikasi Go PKP di beberapa kabupaten yang harus segera ditindaklanjuti. Seluruh tim diminta proaktif menyelesaikan target tersebut sesuai batas waktu yang telah disepakati.

Sebagai penutup, beliau menegaskan pentingnya menjaga kekompakan, komunikasi, dan profesionalisme antar TFL dan Korkab. Seluruh pihak diharapkan dapat bekerja sesuai aturan, saling berkoordinasi, serta berkomitmen penuh dalam mengawal keberhasilan Program BSPS Tahun 2026 sesuai ketentuan yang berlaku.

8. Materi Tenaga Ahli Pemberdayaan

Paparan oleh Pak Awirullah selaku Tenaga Ahli Pemberdayaan menekankan bahwa dalam proses penarikan dan penyaluran dana BSPS, seluruh pihak harus memperhatikan kelengkapan administrasi, baik untuk pembayaran toko maupun upah kerja, serta mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan. Setelah PPK menerbitkan surat perintah pembayaran, pihak penyalur memiliki waktu maksimal tiga hari kerja untuk memproses pencairan dana, sehingga TFL dan Korkab diharapkan tidak terburu-buru menanyakan pencairan sebelum batas waktu tersebut. Selain itu, penyaluran dana harus mengacu pada rekening toko yang telah disepakati dan tercantum dalam dokumen, termasuk memastikan kejelasan nomor rekening dan nama pemiliknya.

Dalam pelaksanaannya, pihak penyalur juga wajib memberikan layanan hingga ke lokasi penerima bantuan, khususnya untuk wilayah yang jauh dari akses perbankan, dengan tetap menjaga koordinasi yang baik. Di sisi lain, terdapat ketentuan terkait penarikan kembali dana bantuan, seperti apabila penerima tidak memiliki ahli waris, tidak melakukan penarikan dalam batas waktu tertentu, atau tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Oleh karena itu, TFL diminta untuk lebih cermat dalam mengawal kondisi penerima di lapangan agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Pak Awirullah juga menegaskan beberapa larangan penting, di antaranya pihak penyalur tidak diperbolehkan menerbitkan ATM, melayani penarikan dengan surat kuasa selain kepada keluarga inti atau ahli waris, maupun memberikan dana dalam bentuk tunai selain untuk upah kerja. Rekening penerima bantuan juga harus digunakan khusus untuk dana BSPS dan tidak boleh menerima transfer dari sumber lain. Selain itu, tidak diperkenankan adanya saldo minimum pada rekening bantuan.

Dalam aspek pelaporan, masih ditemukan berbagai kesalahan yang perlu diperbaiki, seperti pengisian data yang tidak sesuai petunjuk, kesalahan penulisan jenis kelamin, serta pengisian laporan harian yang mencantumkan “libur” tanpa aktivitas. Padahal, TFL tetap diwajibkan mengisi kegiatan yang relevan setiap hari, termasuk pada hari libur atau cuti bersama. Selain itu, laporan permasalahan hanya perlu dilampirkan pada minggu yang benar-benar terdapat permasalahan, bukan seluruh minggu.

Lebih lanjut, pengisian data juga harus mengikuti tahapan kegiatan yang sebenarnya, dan tidak boleh menginput data yang belum waktunya, seperti pencantuman nama kelompok atau toko sebelum tahap tersebut dilaksanakan. Peran Korkab sangat penting dalam melakukan pemeriksaan dokumen sebelum diserahkan, sehingga tidak terjadi temuan di tingkat satker.

Sebagai tambahan, dalam proses pembukaan rekening, disarankan agar data nomor handphone penerima bantuan tetap disiapkan, meskipun tidak semua bank mewajibkan, sebagai langkah antisipasi. Secara keseluruhan, Pak Awirullah menekankan pentingnya ketelitian administrasi, kepatuhan terhadap prosedur, serta komunikasi yang baik antar pihak agar pelaksanaan program BSPS dapat berjalan lancar dan akuntabel.

9. Diskusi dan Tanya Jawab

- a. Bu Nur Annisa: Apakah nomor HP penerima perlu disiapkan untuk pembukaan rekening?

Pak Awirullah: Nomor HP diperlukan (tidak hanya BRI, BNI juga). Disarankan menggunakan nomor penerima atau keluarga. Foto KTP juga sebaiknya disiapkan.

- b. Pak La Ode Agustian: Apakah ada batas minimal anggota kelompok (KPB) atau fleksibel?

Pak Awirullah dan Pak Lili: Tidak ada batas minimal baku, bersifat fleksibel. Jika sedikit bisa tetap dibentuk atau digabung dengan desa terdekat, atau menunggu CPB pengganti.

Pak La Ode Agustian: Bagaimana jika jumlah penerima sedikit dan berjauhan antar desa?

Pak Lili: Bisa digabung lintas desa dengan pertimbangan jarak atau menunggu tambahan CPB. Jika beda TFL, dilakukan penyesuaian (masih perlu pembahasan lanjut).

Pak La Ode Agustian: Apakah HSB dari PPK sudah mempertimbangkan harga talangan?

Pak Lili: HSB dari PPK hanya sebagai pembanding, HSB utama berasal dari hasil survei CPB/TFL dimana TFL hanya mendampingi survei, bukan pelaku utama.

Pak La Ode Agustian: Apakah kenaikan harga karena sistem pembayaran tidak tunai diperbolehkan?

Pak Lili: Diperbolehkan dengan syarat ada justifikasi jelas dan dicantumkan dalam berita acara PTT.

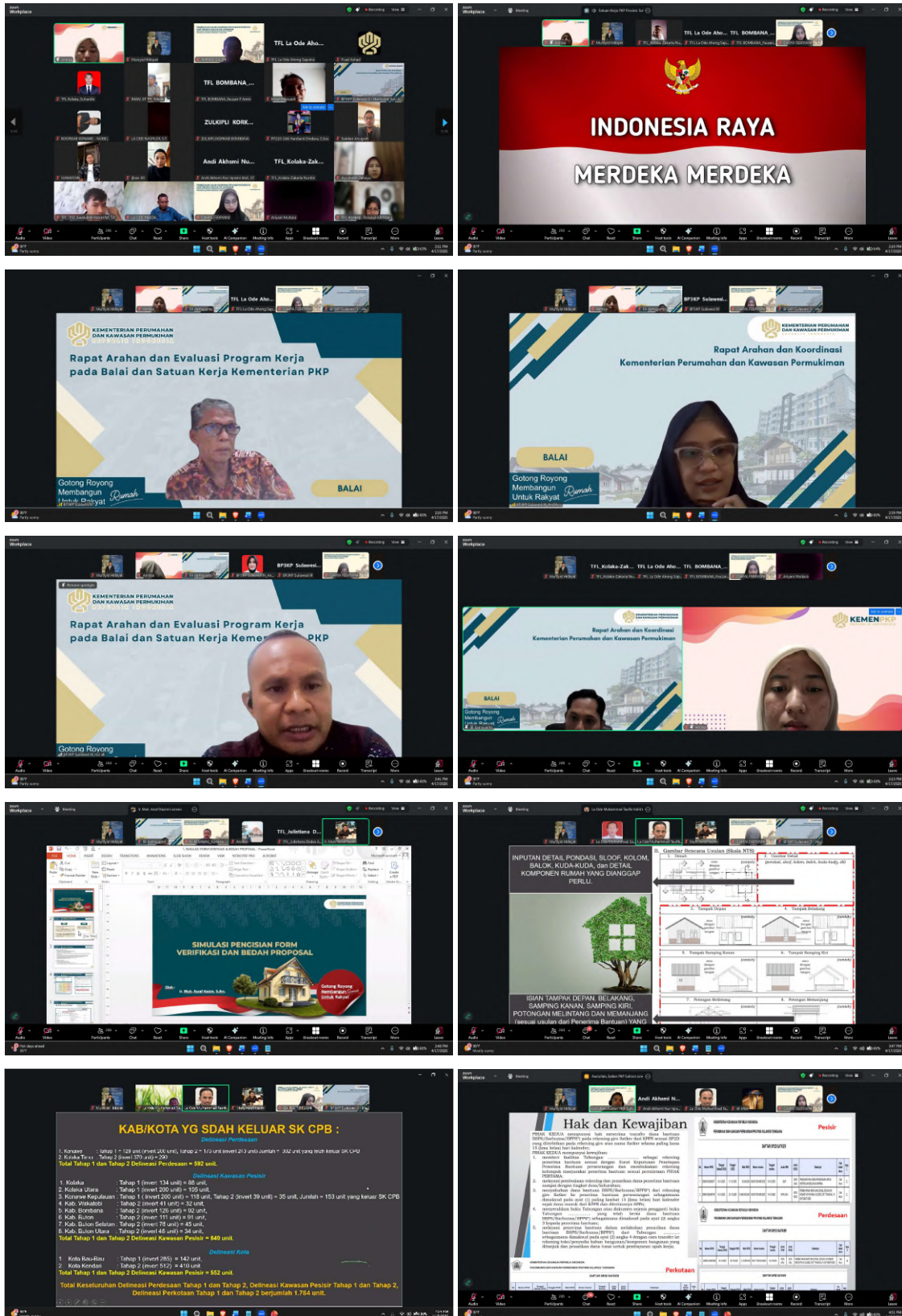
- c. Penegasan Tambahan oleh Pak Lili Damayanto:

Menekankan pentingnya kehati-hatian dalam proses HSB & PTT serta kelengkapan dokumen dan berita acara. Beliau juga mengingatkan bahwa BSPS menjadi perhatian pemeriksa sehingga perlu mitigasi risiko sejak awal.

10. Penutupan oleh MC

Kegiatan ditutup oleh Bu Annisa selaku Moderator Kegiatan pada pukul 18.00 WITA dan diakhiri dengan sesi foto bersama (*via Zoom Meeting*).

H. Dokumentasi Kegiatan



**Mengetahui,
Notulis**

Nama : Mursyid Hidayat
NIP : 199807302025061009

RAPAT KONSOLIDASI PROGRES BSPTS TA 2026

Rabu, 13-05-2026

Zoom Workplace Meeting: Anggoro Putro - Dir Bangkim's sc

Participants (242)

myPKP

TAHUN ANGGARAN 2026

Anggaran BSPTS Per Program Per Kegiatan Per KRO Per RO TA 2026
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
13 May 2026 : 09:10 WIB

NO	Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Target	Satuan	Pagu	Blok	Realisasi
1	IA	Program Pemukiman dan Kawasan Permukiman			8.568.630.175.000	5.067.406.299.000	406.501.354.591
1	7659	Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman			2.647.062.328.000	1.345.202.118.000	161.479.837.514
1	7659 RBB	Prasarana Bidang Pemukiman dan Pemukiman (unit, Hektar) [PN]			2.647.062.328.000	1.345.202.118.000	161.479.837.514
1	7659 RBB 008	Stimulus Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	120.000	Unit	2.647.062.328.000	1.345.202.118.000	161.479.837.514
1	7660	Penyelenggaraan Pemukiman Perdesaan			3.389.667.352.000	1.895.194.425.000	168.671.308.608
1	7660 RBB	Prasarana Bidang Pemukiman dan Pemukiman (unit, Hektar) [PN]			3.389.667.352.000	1.895.194.425.000	168.671.308.608
1	7660 RBB 008	Stimulus Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perdesaan	160.000	Unit	3.389.667.352.000	1.895.194.425.000	168.671.308.608
1	7661	Penyelenggaraan Pemukiman Perkotaan			2.531.900.495.000	1.827.009.756.000	76.350.208.469
1	7661 RBB	Prasarana Bidang Pemukiman dan Pemukiman (unit, Hektar) [PN]			2.531.900.495.000	1.827.009.756.000	76.350.208.469
1	7661 RBB 008	Stimulus Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perkotaan	120.000	Unit	2.531.900.495.000	1.827.009.756.000	76.350.208.469
	TOTAL		400.000	unit	8.568.630.175.000	5.067.406.299.000	406.501.354.591

Participants: 242

Chat: 261

React: 10:20

Share: 13/05/2026

More: 10:20

Leave: 13/05/2026

Zoom Workplace Meeting interface showing a screen share of a spreadsheet titled "PELAPORAN PROGRES PELAKSANAAN BPS 2026". The spreadsheet displays financial data for various provinces and districts, including columns for "Provinsi", "Balai", "Rencana Pagu Fisik Akhir (375.200 Unit)", and "Perdesaan". A participants list on the right shows 274 participants, including "Sarker PKP Sultra", "Dit. Bangkim", and "Anggoro Putro - Dir Bangkim". The bottom status bar shows the date 10/26 13/05/2026 and weather 31°C Hujan ringan.

Zoom Workplace Meeting interface showing a screen share of a spreadsheet titled "PELAPORAN PROGRES PELAKSANAAN BPS 2026". The spreadsheet displays financial data for various provinces and districts, including columns for "Provinsi", "Balai", "Rencana Pagu Fisik Akhir (375.200 Unit)", and "Perdesaan". A participants list on the right shows 274 participants, including "Sarker PKP Sultra", "Dit. Bangkim", and "Anggoro Putro - Dir Bangkim". The bottom status bar shows the date 10/26 13/05/2026 and weather 31°C Hujan ringan.

zoom Workplace

Meeting

Dit. Bangkim's screen

Satker PKP Sultra BP3KP Sulawesi II-Sulastrit Dit. Bangkim Erpika Anselia Surira BP3KP Papua II-Stenly BP3KP Papua 1_MEDA

kemenpkp-my.sharepoint.com/x/g/personal/ditjenkp_pkp_go_id/QBtRrLSEtAtd673qtAQsQsinR1UESbjzAfsW5c7e=mYOKi

PELAPORAN PROGRES PELAKSANAAN BSFS 2026

File Home Insert Share Page Layout Formulas Data Review View Automate Help Draw

26

No	Provinsi	Daerah	Rencana Pagu Fisik Akhir (775.200 Unit)	1 Juni						Perkiraan						
				Pendanaan			Kawasan Permukiman			Total			Perkiraan			
				%	Unit	Fisik (Rp)	%	Unit	Fisik (Rp)	%	Unit	Fisik (Rp)	%	Unit	Fisik (Rp)	%
25	Sulawesi Selatan	Sulawesi II	342.600.000.000	3,04%	814	18.280.000.000	5,34%	1.057	43.340.000.000	12,65%	3.001	72.020.000.000	21,02%	1.097	21.340.000.000	6,23%
26	Sulawesi Barat	Sulawesi II	89.080.000.000	2,20%	154	3.080.000.000	3,47%	290	5.800.000.000	4,54%	544	10.880.000.000	12,27%	200	4.000.000.000	4,51%
27	Sulawesi Tengah	Sulawesi II	158.960.000.000	1,26%	117	2.340.000.000	1,47%	1.224	24.480.000.000	15,40%	1.441	28.820.000.000	18,13%	200	4.000.000.000	2,52%
28	Gorontalo	Sulawesi I	52.860.000.000	3,04%	50	1.000.000.000	1,90%	563	11.260.000.000	21,31%	774	15.860.000.000	28,31%	80	1.800.000.000	3,42%
29	Sulawesi Tenggara	Sulawesi II	224.540.000.000	2,49%	259	4.360.000.000	1,94%	1.110	22.200.000.000	8,86%	1.008	21.160.000.000	14,35%	471	8.420.000.000	3,75%
30	Sulawesi Utara	Sulawesi I	231.700.000.000	5,18%	-	-	0,00%	1.401	28.020.000.000	12,39%	2.001	40.020.000.000	17,27%	800	18.000.000.000	7,77%
31	Maluku	Maluku	112.100.000.000	3,96%	-	-	0,00%	980	19.800.000.000	11,35%	1.321	26.420.000.000	15,35%	541	12.820.000.000	7,45%
32	Maluku Utara	Sulawesi I	203.500.000.000	1,43%	-	-	0,00%	909	22.725.000.000	11,17%	1.029	25.725.000.000	12,64%	229	5.720.000.000	2,81%
33	Papua Barat	Papua II	169.320.000.000	1,49%	188	4.710.000.000	2,78%	546	13.650.000.000	8,36%	834	20.860.000.000	12,32%	200	5.000.000.000	2,95%
34	Papua Barat Daya	Papua II	133.070.000.000	4,57%	180	4.000.000.000	3,01%	343	8.375.000.000	6,45%	766	18.850.000.000	14,02%	444	11.100.000.000	8,34%
35	Papua Pegunungan	Papua I	180.800.000.000	1,62%	901	22.528.000.000	12,48%	-	-	0,00%	1.018	25.450.000.000	14,08%	230	5.750.000.000	3,18%
36	Papua Selatan	Papua I	93.900.000.000	12,78%	411	10.275.000.000	10,64%	-	-	0,00%	881	22.275.000.000	23,72%	540	16.000.000.000	17,04%
37	Papua Tengah	Papua I	162.800.000.000	1,58%	891	20.025.000.000	12,35%	-	-	0,00%	904	22.890.000.000	13,98%	593	6.575.000.000	4,04%
38	Papua	Papua I	196.800.000.000	1,51%	290	6.250.000.000	3,17%	1.807	45.175.000.000	22,94%	2.176	54.400.000.000	27,63%	208	5.200.000.000	2,64%
39			7.852.060.000.000			476.365.000.000			528.285.000.000		81.366	1.283.500.000.000	16,09%		508.705.000.000	

REKAP New_Uptd

ACCH SUMUT SUMBAR KEP. BAW. JAMBI BAW. BENGKULU BABEL LAMPUNG SUMSEL KALBAR

Participants 273 Chat React Share More Leave

2 cm hujan Sabtu 11:29 13/05/2026

RAPAT KONSOLIDASI PROGRES BSPTS TA 2026

Selasa, 19 Mei 2026

zoom Workplace Rapat Progres BSPTS

Satker PKP Pro...

Satker PKP Sultra Satker PKP Prov NTT_S... BP3KP Sumatera V - Y... Satker PKP Bengkulu... Satker PKP Prov Riau BP3KP Sumatera III - ...

KEMEN PKP

Participants 121 Chat 15 React Share More Leave

29°C Berawan 10:07 19/05/2026

zoom Workplace Meeting lala's screen

Satker PKP Sultra KEMEN PKP Satker PKP Lpg_Erwin... Satker PKP Prov NTT_S... Satker PKP NTT_Dhani BP3KP Sumatera V - Y...

20260518 - ALOKASI PER PRO... kementerian.go.id/dashboard GoPp - Kement... Nalika Wardi Fidi

RENCANA DAN REALISASI KEUANGAN BSPTS 2026

Profilasi Kumulatif SP/MS/PPD Penetapan ke rekening Satker untuk Par 16 Mei 2026 (Per Wilayah)

No	Provinsi	Batal	Rencana Paga Fiskal Akr (75,200 Unit)	Perkotaan				Perdesaan					
				Unit	Rp	%	Rp	Unit	Rp	%	Rp		
9	Sumatera Barat	Sumatera III	235.000.000.000	178	3.560.000.000	1.51%	352.000.700	3.912.000.700	228	4.760.000.000	3.02%	364.588.844	5.124.588.844
10	Kepulauan Riau	Sumatera III	61.460.000.000	-	-	0.00%	150.608.598	150.608.598	-	-	0.00%	-	-
11	Jambi	Sumatera IV	123.000.000.000	-	-	0.00%	83.880.500	83.880.500	-	-	0.00%	723.985.380	723.985.380
12	Bengkulu	Sumatera IV	87.760.000.000	50	1.100.000.000	1.12%	114.378.126	1.214.378.126	120	2.400.000.000	2.45%	216.334.513	2.716.334.513
13	Sumatera Selatan	Sumatera V	197.780.000.000	481	8.220.000.000	4.66%	612.115.448	9.832.115.448	676	13.520.000.000	6.84%	628.528.790	14.148.528.790
14	Pendakutan Bengkulu	Sumatera V	81.460.000.000	105	2.100.000.000	3.42%	38.500.000	2.138.500.000	-	-	0.00%	-	910
15	Lampung	Sumatera V	239.420.000.000	153	3.060.000.000	1.28%	296.855.000	3.356.855.000	537	10.740.000.000	4.49%	1.279.924.932	12.019.924.932
16	DI. Banten	Jawa I	191.780.000.000	130	2.700.000.000	1.41%	393.895.000	3.093.895.000	898	17.920.000.000	9.34%	658.000.000	18.578.895.000
17	DI. Jakarta	Jawa I	134.880.000.000	20	400.000.000	0.30%	1.114.742.000	1.114.742.000	-	-	0.00%	-	-
18	Jawa Barat	Jawa II	420.000.000.000	480	8.000.000.000	1.26%	682.205.000	10.682.205.000	1.471	29.400.000.000	3.69%	1.962.554.468	31.402.554.468
19	Jawa Tengah	Jawa III	600.000.000.000	400	8.000.000.000	1.33%	578.574.368	8.578.574.368	1.279	25.580.000.000	4.26%	2.378.548.169	27.958.548.169
20	DI. Yogyakarta	Jawa III	73.900.000.000	-	-	0.00%	18.810.250	18.810.250	472	9.440.000.000	12.71%	422.203.325	9.962.203.325
21	Jawa Timur	Jawa IV	600.000.000.000	275	4.780.000.000	0.71%	441.437.880	5.221.437.880	1.881	37.620.000.000	5.70%	1.791.033.633	39.411.033.633
22	Bali	Nusa Tenggara I	83.000.000.000	-	-	0.00%	43.566.700	43.566.700	449	8.880.000.000	10.62%	560.671.189	9.573.671.189
23	Nusa Tenggara Barat	Nusa Tenggara I	171.180.000.000	-	-	0.00%	292.883.000	292.883.000	-	-	0.00%	-	910
24	Nusa Tenggara Timur	Nusa Tenggara I	325.160.000.000	29	570.000.000	0.18%	570.000.000	570.000.000	-	-	0.00%	-	715
25	Kalimantan Barat	Kalimantan I	258.880.000.000	464	8.200.000.000	3.15%	9.607.307.650	148	3.360.000.000	1.12%	811.569.760	3.771.569.760	
26	Kalimantan Tengah	Kalimantan I	138.480.000.000	14	280.000.000	0.20%	130.720.000	410.720.000	47	940.000.000	0.68%	1.127.969.699	2.967.969.699
27	Kalimantan Selatan	Kalimantan I	114.140.000.000	-	-	0.00%	89.699.370	89.699.370	-	-	0.00%	862.732.740	862.732.740
28	Kalimantan Timur	Kalimantan I	414.000.000.000	-	-	0.00%	81.000.000	81.000.000	-	-	0.00%	81.000.000	81.000.000

Participants 161 Chat 17 React Share More Leave

29°C Berawan 10:18 19/05/2026

zoom Workplace Meeting lala's screen

Satker PKP Sultra KEMEN PKP Satker PKP Lpg_Erwin J. Satker PKP NTT_Dhani Fitrah BP3KP Sumatera V - Y

Fitrah

20260518 - ALOKASI PER PROJEK PELAPORAN PROGRES PELAKSANAAN EPS 2025 Dashboard | GoKP - Kemendagri

kemendagri-my.sharepoint.com/x/g/personal/djenkpk_gk_id/0BbtrRtLSEtAd6B73qAIQsQdRrTUE3gAfw5cTe-hUJcUp

No	Provinsi	Balai	Rencana Pagu Fiskal Aler (Rp.200 Unit)	Pembangunan		Fiskal + Pembangunan		Fiskal (%)		Pembangunan (%)		Total Fiskal + Pembangunan (%)		Unit
				Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%			
34	Sulawesi Tenggara	Sulawesi III	224.540.000.000	2.77%	1.331.003.750	7.561.003.750	582	11.640.000.000	5,18%	1.874.124.400	13.514.124.400	14		
35	Sulawesi Utara	Sulawesi I	231.700.000.000	10,02%	486.661.323	23.708.661.323	1.327	26.540.000.000	11,45%	656.835.323	27.098.835.323	11		
36	Maluku	Maluku	172.700.000.000	0,00%	1.713.390.000	1.713.390.000	-	-	0,00%	2.106.376.000	2.106.376.000	-		
37	Maluku Utara	Sulawesi II	203.500.000.000	5,43%	1.174.869.000	12.234.869.000	567	11.620.000.000	5,71%	1.360.695.116	12.980.695.116	-		
38	Papua Barat	Papua II	189.325.000.000	0,91%	1.004.792.927	2.544.792.927	115	2.775.000.000	1,64%	1.552.954.247	4.327.954.247	-		
39	Papua Barat Daya	Papua II	133.025.000.000	0,00%	-	-	40	1.000.000.000	0,75%	1.000.000.000	1.000.000.000	-		
40	Papua Pegunungan	Papua I	180.800.000.000	0,00%	-	-	-	-	0,00%	53.192.700	53.192.700	-		
41	Papua Selatan	Papua I	83.900.000.000	0,00%	-	-	93	3.720.000.000	3,96%	121.307.117	3.841.307.117	-		
42	Papua Tengah	Papua I	162.800.000.000	0,00%	-	-	49	1.960.000.000	1,00%	57.297.892	2.017.297.892	-		
43	Papua	Papua I	196.900.000.000	0,36%	773.590.949	1.473.590.949	180	5.840.000.000	2,97%	207.603.701	6.047.603.701	-		
44			7.852.050.000.000		18.214.425.247	222.579.425.247	23.213	470.290.000.000	5,99%	41.410.013.893	511.700.013.893	-		

MOHON HANYA MENGISI SHEET YANG HIAU

Participants 162 Chat 17 React Share More Leave

29°C Berawan 10:20 19/05/2026

zoom Workplace Rapat Progres BSPS

Satker PKP Sultra Satker PKP Lpg_Erwin J. Satker PKP NTT_Dhani Fitrah BP3KP Sumatera V - Y Satker PKP Bengkulu

Fitrah

KEMEN PKP

Participants 165 Chat React Share More Leave

Tuesday, 19 May 2026 Tue 10:24 (Local time) 10:24 19/05/2026

Zoom Workplace Meeting Interface

Meeting ID: 20260518 - ALOKASI PER PROJEK

Participants: 186

Chat: 14

React: 14

Share: 14

More: 14

Leave: 14

Audio: Hujan ringan Hari ini

Video: Hujan ringan Hari ini

Screen Share: kementerian.go.id

Table Data:

No	Provinsi	Balai	Rencana Pagu Fisik Akhir (375.200 Unit)	Unit Fisik	Fisik (Rp)	Fisik (%)	Pendampingan (Rp)
25	Sulawesi Selatan	Sulawesi III	342.600.000.000	3.601	72.020.000.000	21,02%	2.143.441.799
26	Sulawesi Barat	Sulawesi II	88.680.000.000	-	-	0,00%	-
27	Sulawesi Tengah	Sulawesi II	158.960.000.000	43	860.000.000	0,54%	719.719.001
29	Gorontalo	Sulawesi I	52.680.000.000	81	1.625.000.000	3,08%	570.602.032
28	Sulawesi Tenggara	Sulawesi III	224.540.000.000	582	11.640.000.000	5,18%	1.874.124.400
30	Sulawesi Utara	Sulawesi I	231.700.000.000	1.327	26.540.000.000	11,45%	556.835.323
31	Maluku	Maluku	172.100.000.000	-	-	0,00%	2.106.376.000
32	Maluku Utara	Sulawesi I	203.500.000.000	567	11.620.000.000	5,71%	1.360.696.116
33	Papua Barat	Papua II	169.325.000.000	115	2.775.000.000	1,64%	1.552.954.247

RAPAT KOORDINASI DUKUNGAN VERIFIKASI KEGIATAN BSPS USULAN KEMENTERIAN LEMBAGA

13-05-2026

The screenshot displays a Zoom meeting interface. The main window shows a PowerPoint presentation titled "Data BNBA Kemensos". The presentation content includes:

- Surat dari Menteri Sosial kepada Menteri PKP perihal Permohonan Dukungan Pembangunan Rumah Orang Tua Siswa Sekolah Rakyat, tgl 23 April 2026, dengan jumlah usulan sebanyak 10.034 unit**
- Pengolahan Data Awal: Data eligible sebanyak 6.842 unit**
- Dilakukan filter kembali oleh Kemensos dan didapatkan BNBA Prioritas sejumlah 5.000 unit**
- Tahun 2025: 1.000 unit** (indicated with a red arrow pointing to)
- Tahun 2026 menjadi 10.000 unit**

The bottom of the screen shows the Zoom meeting controls and a chat window on the right. The chat window is titled "Rapat Koordinasi Pelaksanaan Verifikasi D..." and contains several messages from participants, all starting with "Hi, I'm transcribing this call with my Tactiq AI Extension." and including a link to <https://tactiq.io/r/transcribing>. The participants listed in the chat are A Nugraha, Risna_Set Dayasos, BP3KP SUMATERA V, and Hanny Putri Zulia.

Rapat Arahan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman

Jumat, 26 Juni 2026

14.00 WIB s.d. selesai

Daring via Zoom Meeting

forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=obhj3dvyoE-FYZizDVH1g2UDstj_BpFtwW7aTVYyHxURUVTNFFPMk1ERkYwSjMwUjAwTVIKWtdWSS4...

Absensi Rapat Arahan Menteri PKP

Ketika Anda mengirimkan formulir ini, itu tidak akan secara otomatis mengumpulkan detail Anda seperti nama dan alamat email kecuali Anda memberikannya sendiri.

* Wajib diisi

1. NAMA *

MUH. IRSAN BASALAMAH

2. NIP *

198706122010011013

3. JABATAN *

KEPALA SATUAN KERJA PKP PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Tanggapan Anda telah dikirim.

Hal penting yang dapat Anda lakukan selanjutnya

[Simpan respons saya](#)

[Kirim tanggapan lainnya](#)

Microsoft Forms

Bersiaplah untuk undangan acara Anda sendiri!

[Mulai sekarang →](#)

Pendaftaran acara

zoom Workplace Meeting Ruang Kerja Menteri PKP's screen

Satker Sultra Ruang Kerja Menteri PKP BP3KP-Sumatera III Dirjen Kawasan Permu... Norhana Satker PKP S... Iswanto BP3KP Sumat.

Materi BSPP 26.06

7 / 8 50%

ATENSI DALAM RANGKA AKUNTABILITAS BSPP

KEPALA BALAI / KASATKER

1. Proses rekrutmen Korkab atau TPL secara benar (jangan ada titipan maupun konflik kepentingan)
2. Memastikan Ketepatan Sasaran Penerima Manfaat
3. Dengan ada pencarian jika tidak ada keyakinan bahwa PB telah memperbaiki rumah
4. Menyosialisasikan antikorupsi program BSPP kepada Korkab, TPL, Toka Penyedia, Aparatur desa/kelurahan, Tokoh Masyarakat, Pihak lainnya
5. Memastikan tepat jumlah dan kualitas yang diterima Penerima Bantuan
6. Memonitor ketepatan waktu penyelesaian Bantuan

Participants: 262 Chat: 9 React: Share: More

zoom Workplace Meeting Ruang Kerja Menteri PKP's screen

Satker Sultra Ruang Kerja Menteri PKP BP3KP-Sumatera III Dirjen Kawasan Permu... Satker PKP Sulteng N... DJKP_Musnifah

Materi BSPP 26.06

6 / 8 50%

HASIL AUDIT INSPEKTORAT BIDANG INVESTIGASI

No.	AREA AUDIT	TEMUAN
	Akun Belanja (Umum)	- Pertanggungjawaban belanja tertambat - Belanja tidak didukung dengan bukti pengeluaran - Kesalahan pembebanan akun belanja
	Perjalanan Dinas	- Perjalanan Dinas tidak - Kelambatan penyelesaian - Belanja melebihi 50% - Membebaskan pengeluaran yang tidak dapat dipertanggung jawabkan (belanja keperluan pribadi, dipertanggungjawabkan sebagai pengeluaran)
1.	Bukti	- Belum adanya SOP - Pencatatan SOP tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya - Ases tidak disertai dengan bukti (Ruang) - Tidak terdapat labelisasi (NUP) pada aset - Tidak terdapat Berita Acara Serah terima (BAST) pada aset
	PB3	Belum serah terima kepada Pihak User atas aset persediaan berupa Rusun, Hunian Tetap, PSU, Kumpul, dan Sanitasi
	Belanja Pegawai	- Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan - Kuantitas dan Kualitas pekerjaan tidak sesuai (Rencana Kerja dan Syarat-Syarat dalam kontrak) - Kekurangan pemotongan Tunjangan kinerja

Participants: 247 Chat: 9 React: Share: More

31°C Cerah 15:20 26/06/2026

zoom Workplace Meeting Dirjen Kawasan Permukiman's scr

Muh. Irsan Basalamah ... Ruang Kerja Menteri PKP BP3KP-NT.I Hamdan Aslam_Satker PKP Sulsel

myPKP 260626_Paparan Progres BSPS sinj 260626_Paparan Progres BSPS papj

C:/Users/Asus%20RUK/Downloads/260626_Paparan%20Progres%20BSPS%20paparan%20lengkap.pdf

PROVINSI	ALOKASI	ALOKASI	ALOKASI
JAWA BARAT	40,000	2,400	
JAWA TIMUR	30,040	-	
JAWA TENGAH	31,899	1,000	
KALIMANTAN BARAT	19,166	-	
SUMATERA UTARA	13,492	-	
ACEH	13,496	-	
SULAWESI SELATAN	13,271	-	
SUMATERA SELATAN	6,704	-	
NUSA TENGGARA TIMUR	13,603	-	
LAMPUNG	11,067	-	
SULAWESI UTARA	10,678	-	
BANTEN	9,178	-	
SULAWESI TENGGARA	10,054	-	
NUSA TENGGARA BARAT	8,418	1,582	
SUMATERA BARAT	8,056	-	
MALUKU	6,650	-	
SULAWESI TENGAH	6,035	-	
DKI JAKARTA	5,662	-	
MALUKU UTARA	5,197	-	

Audio Video Participants 281 Chat React Share More Leave

zoom Workplace Meeting Dirjen Kawasan Permukiman's scr

Muh. Irsan Basalamah ... Ruang Kerja Menteri PKP Bakhtiar BP3KP Sulaw Soemir Kase. ST. M.Si Soe Lili Damayanto Ergi_Satker PKP Banten

kemempkp-my.sharepoint.com/x/g/personal/djtenkp_kkp.go.id/1Q4jh7V6rqQqMucw62nWToATDYABAQdFYHm_8-pUW0Z07e+zJ...

26 06 14 USULAN BSPS TA 2026 pukul 20:48

File Beranda Siipkan Bagian Tata Letak Halaman Rumus Data Tinjau Tampilan Otomatisasikan Bantuan Gambar

Calibri (pt) 11 B U L Umum

NO	PROVINSI	TOTAL Sebelum Alokasi Tambahan 26 Juni 2026	ALOKASI TAMBAHAN 26 Juni 2026	TOTAL ALOKASI	PERSENTASE	DEADLINE	KETERANGAN
15	11 SULAWESI UTARA	10,678	-	10,678	3.10%		TERSERAP KESELURUHAN
16	12 BANTEN	9,178	-	9,178	2.67%		TERSERAP KESELURUHAN, dapat menampung Pelimpahan 1000
17	13 SULAWESI TENGGARA	10,054	-	10,054	2.92%		TERSERAP KESELURUHAN
18	14 NUSA TENGGARA BARAT	8,418	1,582	10,000	2.91%		
19	15 SUMATERA BARAT	8,056	-	8,056	2.34%		
20	16 MALUKU	6,650	-	6,650	1.93%		
21	17 SULAWESI TENGAH	6,035	-	6,035	1.75%		
22	18 DKI JAKARTA	5,662	-	5,662	1.65%		
23	19 MALUKU UTARA	5,197	-	5,197	1.51%		
24	20	4,660	-	4,660	1.39%		

PIB: tokan dan tokan ENTER atau klik Tombol Filter diterapkan 69

Audio Video Participants 303 Chat 14 React Share More Leave

30°C Cerah 16:18 26/06/2026